



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 202-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Situbondo dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

RPJPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu serta dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh tahun) yang disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RTRW.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyusun visi, misi, dan program.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Rincian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan kebijakan mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6), tetap berlaku sampai dengan masa perencanaannya selesai

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 September 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



WAWAN sesuai dengan Aslinya,
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM

BEHMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 220-5/2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1-1

1.2 DASAR HUKUM..... 1-2

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1-3

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN..... 1-4

1.5 SISTEMATIKA 1-5

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 2-1

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2-1

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 2-1

2.1.2 Kondisi Topografi..... 2-3

2.1.3 Kondisi Geologi..... 2-3

2.1.4 Kondisi Hidrologi..... 2-3

2.1.5 Klimatologi 2-4

2.1.6 Penggunaan Lahan 2-4

2.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... 2-6

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 2-23

2.1.9 Demografi 2-42

2.1.10 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk 2-43

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2-48

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 2-48

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya..... 2-56

2.3 ASPEK DAYA SAING 2-65

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah 2-65

2.3.2 Daya Saing SDM..... 2-69

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah 2-75

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi..... 2-79

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM 2-83

2.4.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar..... 2-83

2.4.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar 2-96

2.4.3 Pelayanan Urusan Pilihan 2-135

2.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 2-145

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005 - 2025..... 2-152

2.5.1 RPJPD PERIODE 1 2-152

2.5.2 RPJPD PERIODE 2 2-154

2.5.3 RPJPD PERIODE 3 2-156

2.5.4 RPJPD PERIODE 4 2-161



2.6	TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	2-173
2.6.1	Proyeksi Kependudukan.....	2-173
2.6.2	Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	2-176
2.7	PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....	2-189
2.7.1	Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional	2-189
2.7.2	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur.....	2-189
2.7.3	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah	2-201
BAB 3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	3-1
3.1	PERMASALAHAN	3-1
3.2	ISU STRATEGIS.....	3-6
3.2.1	Isu Global.....	3-6
3.2.2	Isu Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045	3-8
3.2.3	Isu jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2025 - 2045	3-11
3.2.4	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (IKLHS) RPJPD	3-14
3.2.5	Isu Strategis Kabupaten Situbondo	3-20
BAB 4	VISI DAN MISI DAERAH	4-1
4.1	VISI DAERAH TAHUN 2025-2045.....	4-1
4.1.1	Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045	4-1
4.1.2	Telaah Visi Dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045	4-7
4.1.3	Visi Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045	4-9
4.2	MISI DAERAH TAHUN 2025-2045	4-15
BAB 5	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	5-1
5.1	ARAH KEBIJAKAN.....	5-1
5.2	SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045	5-19
BAB 6	PENUTUP	6-1
6.1	PEDOMAN TRANSISI.....	6-1
6.2	KAIDAH PELAKSANAAN	6-1
6.3	PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo	2-2
Tabel 2.2	Suhu, Jumlah Curah Hujan, dan Jumlah Hari Hujan, 2023	2-4
Tabel 2.3	Sebaran dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2023	2-5
Tabel 2.4	Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo	2-8
Tabel 2.5	Hasil Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2045	2-10
Tabel 2.6	Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Situbondo.....	2-13
Tabel 2.7	Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Situbondo	2-17
Tabel 2.8	Nilai Koefisien Runoff Untuk Jenis Penggunaan Lahan	2-20
Tabel 2.9	Klasifikasi Nilai Rata-Rata Koefisien Aliran dan Implikasi Pengembangan	2-21
Tabel 2.10	Koefisien Aliran Kabupaten Situbondo	2-22
Tabel 2.11	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2023.....	2-24
Tabel 2.12	Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2018 -2023	2-25
Tabel 2.13	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2018-2023.....	2-26
Tabel 2.14	Produksi Hasil Peternakan Tahun 2018-2023	2-28
Tabel 2.15	Produksi Hasil Perikanan Tahun 2018-2023	2-29
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Di Kabupaten Situbondo	2-30
Tabel 2.17	Kelas Resiko Bencana Berdasarkan Kelas Kapasitas	2-31
Tabel 2.18	Matriks Bahaya Dan Kerentanan Bencana.....	2-32
Tabel 2.19	Matriks Resiko Bencana	2-32
Tabel 2.20	Potensi Luas Potensi Bahaya Likuefaksi	2-36
Tabel 2.21	Data Sejarah Dan Dampak Kejadian Bencana Tahun 2019-2023.....	2-40
Tabel 2.22	Potensi Penduduk Terpapar	2-40
Tabel 2.23	Data Potensi Kerusakan Lingkungan Dan Kerugian Akibat Bencana	2-41
Tabel 2.24	Potensi Luas Wilayah Terdampak Bencana.....	2-41
Tabel 2.25	Data Tingkat Resiko Bencana.....	2-42
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Situbondo Tahun 2023	2-43
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023	2-44
Tabel 2.28	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Situbondo.....	2-47
Tabel 2.29	Perubahan Metode Indeks Pembangunan Manusia	2-57
Tabel 2.30	Pengeluaran per Kapita Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023.....	2-65
Tabel 2.31	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2023	2-69

Tabel 2.32 Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo.....	2-70
Tabel 2.33 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2023.....	2-73
Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Iplm) Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2023	2-74
Tabel 2.35 Variabel Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo	2-75
Tabel 2.36 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-81
Tabel 2.37 Jumlah Pernikahan Anak di bawah Usia 19 Tahun.....	2-86
Tabel 2.38 Indikator Kinerja Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	2-93
Tabel 2.39 Data PPKS Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-95
Tabel 2.40 Capaian Indikator Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023.....	2-98
Tabel 2.41 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023	2-100
Tabel 2.42 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Diversifikasi pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023.....	2-102
Tabel 2.43 Skor PPH Konsumsi Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023.....	2-103
Tabel 2.44 Kategori dan Range Nilai IKLH	2-106
Tabel 2.45 Capaian Indikator Sasaran Daerah Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023	2-113
Tabel 2.46 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-115
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan.....	2-117
Tabel 2.48 Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika ...	2-120
Tabel 2.49 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-126
Tabel 2.50 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-129
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja PD Urusan Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-130
Tabel 2.52 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-131
Tabel 2.53 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-132
Tabel 2.54 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	2-133
Tabel 2.55 Realisasi Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023.....	2-134
Tabel 2.56 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2019-2023	2-137
Tabel 2.57 Jumlah Destinasi Wisata Yang Dibina Dan Dikembangkan Tahun 2019-2023.....	2-138



Tabel 2.58 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo
Tahun 2018-2023.....2-140

Tabel 2.59 Produksi Pertanian Holtikultura Kabupaten Situbondo Tahun
2018-2023.....2-141

Tabel 2.60 Produksi Peternakan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-20232-142

Tabel 2.61 Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Situbondo Tahun
2018-2023.....2-144

Tabel 2.62 Realisasi Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Situbondo
Tahun 2019-2023.....2-145

Tabel 2.63 Realisasi Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten
Situbondo Tahun 20232-145

Tabel 2.64 Opini Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo Tahun
2018-2023.....2-146

Tabel 2.65 Realisasi Capaian Urusan Kepegawaian Kabupaten Situbondo
Tahun 20232-147

Tabel 2.66 Realisasi Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Situbondo Tahun 2017-20232-148

Tabel 2.67 Realisasi Capaian Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo
Tahun 2018-2023.....2-149

Tabel 2.68 Capaian Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2018-20232-149

Tabel 2.69 Realisasi Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten
Situbondo Tahun 2018-20232-150

Tabel 2.70 Tabel Capaian RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2020....2-159

Tabel 2.71 Tabel Capaian RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2025.....2-169

Tabel 2.72 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo 2025-20452-173

Tabel 2.73 Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan
Jenis Kelamin 2025-2045.....2-174

Tabel 2.74 Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan
Kelompok Umur Produktif Dan Non Produktif 2025-20452-174

Tabel 2.75 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo 2023-2045
Berdasarkan Kelompok Umur2-175

Tabel 2.76 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih2-177

Tabel 2.77 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Situbondo
Berdasarkan Kecamatan2-178

Tabel 2.78 Proyeksi Kebutuhan Pangan2-179

Tabel 2.79 Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo2-181

Tabel 2.80 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Dan Rumah.....2-182

Tabel 2.81 Proyeksi Timbulan Sampah & Kebutuhan Prasarana Persampahan .2-184

Tabel 2.82 Ketersediaan Prasarana Pendidikan2-186

Tabel 2.83 Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Pendidikan
Kabupaten Situbondo2-186

Tabel 2.84 Ketersediaan Prasarana Kesehatan Kabupaten Situbondo2-187



Tabel 2.85 Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Kesehatan
Kabupaten Situbondo2-188

Tabel 2.86 Proyeksi Kebutuhan Minimum Fasilitas Listrik
Kabupaten Situbondo.....2-189

Tabel 2.87 Transformasi Dan Game Changer Dalam Arah Pembangunan
Kawasan Agrikultur Tapal Kuda2-191

Tabel 2.88 Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RPJPN Yang Berkenaan
Dengan Kabupaten Situbondo2-192

Tabel 2.89 penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp),
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL)2-201

Tabel 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah di Kabupaten Situbondo..... 3-1

Tabel 3.2 Telaah Evaluasi KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 3-14

Tabel 3.3 Linieritas Isu Global, Nasional, Provinsi dan KLHS Terhadap Isu
Strategis RPJPD Kabupaten Situbondo..... 3-26

Tabel 4.1 Linieritas Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten
Situbondo..... 4-10

Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo
dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur 4-14

Tabel 4.3 Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan
RPJPD Kabupaten Situbondo 4-17

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Makro pada Masing-Masing Periode RPJPD..... 5-9

Tabel 5.2 Alternatif Arah Kebijakan Mikro menurut Misi Pembangunan RPJPD
Kabupaten Situbondo 5-10

Tabel 5.3 Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan..... 5-25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah	1-3
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJP Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Sektoral Lainnya	1-4
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Situbondo Tahun 2013 - 2033.....	2-1
Gambar 2.2	Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo	2-5
Gambar 2.3	Peta Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo.....	2-11
Gambar 2.4	Peta Hasil Proyeksi Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo	2-11
Gambar 2.5	Indeks Ketahanan Pangan Kab. Situbondo 2019 - 2023.....	2-12
Gambar 2.6	Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Situbondo	2-14
Gambar 2.7	Penentuan Daya Dukung Air	2-15
Gambar 2.8	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Situbondo	2-18
Gambar 2.9	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Situbondo Tahun 2045.....	2-19
Gambar 2.10	Peta Rawan Bencana Kabupaten Situbondo	2-29
Gambar 2.11	Potensi Luas Potensi Bahaya Gelombang ekstrim dan Abrasi	2-33
Gambar 2.12	Potensi Luas Potensi Bahaya Tsunami	2-34
Gambar 2.13	Potensi Luas Potensi Bahaya Bencana Gunung Api	2-34
Gambar 2.14	Potensi Luas Potensi Bahaya Gempabumi	2-35
Gambar 2.15	Potensi Luas Potensi Bahaya Tanah Longsor.....	2-36
Gambar 2.16	Potensi Luas Potensi Bahaya Banjir Bandang	2-37
Gambar 2.17	Potensi Luas Potensi Bahaya Bencana Kekeringan	2-38
Gambar 2.18	Potensi Luas Potensi Resiko Bencana kebakaran Hutan	2-38
Gambar 2.19	Potensi Luas Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim	2-39
Gambar 2.20	Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023	2-43
Gambar 2.21	Piramida Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2023	2-47
Gambar 2.22	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023 .	2-48
Gambar 2.23	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional.....	2-49
Gambar 2.24	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2023	2-50
Gambar 2.25	Indeks Gini Kabupaten Situbondo Tahun 2023.....	2-51
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional 2008 dan 2023	2-51
Gambar 2.27	Indeks Gini Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023	2-52
Gambar 2.28	Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2023.....	2-53
Gambar 2.29	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional.....	2-53
Gambar 2.30	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 ...	2-54
Gambar 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2023	2-55

Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional 2005 dan 2023	2-55
Gambar 2.33 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2023	2-56
Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2023	2-57
Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2005 dan 2023	2-58
Gambar 2.36 Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten /Kota di Jawa Timur Tahun 2023	2-58
Gambar 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023.....	2-60
Gambar 2.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023	2-61
Gambar 2.39 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Situbondo Tahun 2019 -2023.....	2-63
Gambar 2.40 Indeks Ketimpangan Gender kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023	2-64
Gambar 2.41 PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo Tahun 2023	2-66
Gambar 2.42 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2003 dan 2023	2-66
Gambar 2.43 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	2-67
Gambar 2.44 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	2-67
Gambar 2.45 Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	2-68
Gambar 2.46 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023	2-71
Gambar 2.47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023.....	2-72
Gambar 2.48 Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo 2018 -2023	2-73
Gambar 2.49 Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023 ...	2-78
Gambar 2.50 Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023	2-80
Gambar 2.51 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2023	2-82
Gambar 2.52 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 - 2023.....	2-83
Gambar 2.53 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-84
Gambar 2.54 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-84
Gambar 2.55 Angka Putus Sekolah SD dan SMP Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2023	2-85



Gambar 2.56 Indeks kesehatan Kabupaten Situbondo 2018 - 2023	2-87
Gambar 2.57 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Situbondo 2018 -2023	2-87
Gambar 2.58 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-88
Gambar 2.59 Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Situbondo Tahun 2018 -2023	2-89
Gambar 2.60 Persentase Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023.....	2-91
Gambar 2.61 Persentase Rumah Layak Tahun 2018 - 2023	2-92
Gambar 2.62 Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 - 2023.....	2-94
Gambar 2.63 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.....	2-97
Gambar 2.64 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Akupaten Situbondo Tahun 2019 -2023.....	2-97
Gambar 2.65 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019 -2023	2-100
Gambar 2.66 Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-102
Gambar 2.67 Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Situbondo 2019 - 2023	2-105
Gambar 2.68 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-106
Gambar 2.69 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan lahan Tahun 2018 - 2023	2-106
Gambar 2.70 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 - 2023	2-107
Gambar 2.71 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2023.....	2-108
Gambar 2.72 Jumlah dan persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023.....	2-108
Gambar 2.73 Jumlah dan persentase Kepemilikan KTP kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023	2-109
Gambar 2.74 Jumlah dan persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023	2-110
Gambar 2.75 Jumlah dan persentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023	2-108
Gambar 2.76 Jumlah dan persentase Kepemilikan KIA Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2023	2-112
Gambar 2.77 Persentase Pasangan Usia Subur Tahun 2018 2023.....	2-114
Gambar 2.78 Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2019 - 2023.....	2-115
Gambar 2.79 Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Kabupaten) Tahun 2017 - 2023.....	2-119
Gambar 2.80 Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Yang Tersebarluaskan Tahun 2018 - 2023	2-119
Gambar 2.81 Jumlah Koperasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-121
Gambar 2.82 Jumlahn Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Akupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-122



Gambar 2.83 Jumlah Usah Mikro Kabupaten Situbondo Pada Tahun 2018 - 2023	2-123
Gambar 2.84 Jumlah dan Persentase UMKM yang di Bina	2-123
Gambar 2.85 Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2018 - 2023	2-125
Gambar 2.86 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Situbondo 2019 - 2023	2-126
Gambar 2.87 Jumlah Atlet Berprestasi	2-128
Gambar 2.88 Jumlah Event Olahraga	2-128
Gambar 2.89 Grafik Produksi Perikanan 2018 – 2023 (Ton).....	2-135
Gambar 2.90 Grafik Jumlah Wisatawan Domestik & Mancanegara 2016 - 2023	2-136
Gambar 2.91 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2023 (Ton).	2-139
Gambar 2.92 Grafik Produksi Perkebunan 2017 – 2023 (Ton)	2-140
Gambar 2.93 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Situbondo 2018 - 2023	2-143
Gambar 2.94 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo 2023 - 2045.....	2-173
Gambar 2.95 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo 2023 - 2045 Berdasarkan Kelompok Umur.....	2-175
Gambar 2.96 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (M2) dan Air Minum (ml/orang/hari).....	2-177
Gambar 2.97 Total Kebutuhan Pangan.....	2-179
Gambar 2.98 Total Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman dan Rumah	2-183
Gambar 2.99 Proyeksi Timbunan Sampah	2-185
Gambar 2.100 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa.....	2-190
Gambar 2.101 Peta Kawasan Agrikultur	2-190
Gambar 2.102 Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas	2-200
Gambar 2.103 Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.....	2-200
Gambar 4.1 Kerangka Pikir RPJPN 2025 - 2045.....	4-1
Gambar 4.2 Visi Indonesia Emas 2045.....	4-2
Gambar 4.3 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	4-4
Gambar 4.4 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan	4-6
Gambar 4.5 Visi Kabupaten Situbondo	4-10
Gambar 4.6 Visi, Sasaran dan Indikator Visi Kabupaten Situbondo	4-11
Gambar 5.1 Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 - 2045	5-1
Gambar 5.2 Cascading Sasaran Pokok Misi 1	5-20
Gambar 5.3 Cascading Sasaran Pokok Misi 2	5-21
Gambar 5.4 Cascading Sasaran Pokok Misi 3	5-21
Gambar 5.5 Cascading Sasaran Pokok Misi 4	5-22
Gambar 5.6 Cascading Sasaran Pokok Misi 5	5-23
Gambar 5.7 Cascading Sasaran Pokok Misi 6	5-23
Gambar 5.8 Cascading Sasaran Pokok Misi 7	5-24
Gambar 5.9 Cascading Sasaran Pokok Misi 8	5-24
Gambar 6.1 Kerangka Pengendalian RPJPD 2025 - 2045	6-2





BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini sangat diperlukan suatu bentuk konsep pembangunan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan, artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan haruslah dilaksanakan secara terus menerus dan berkembang tanpa harus berhenti. Hal ini jika berdasarkan pada suatu pengalaman di masa lalu, bahwa jika aktivitas atau kegiatan pembangunan tersebut di lakukan hanya pada satu kurun waktu tanpa ada kegiatan lebih lanjut, maka cenderung pembangunan tersebut tidak dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan diharapkan akan menjadi dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak terganggu baik secara teknis dan fungsi. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.

Untuk itu, seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sepakat untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan UU SPPN disusunlah rencana pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut, perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Situbondo. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memperhatikan arah kebijakan nasional pada RPJPN dan arah kebijakan provinsi pada RPJPD Provinsi. Selain itu dalam memastikan pembangunan kedepannya pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta sosial ekonomi maka pada penyusunan RPJPD Kabupaten Situbondo mengakomodir hasil telaah kajian lingkungan hidup strategis RPJPD.

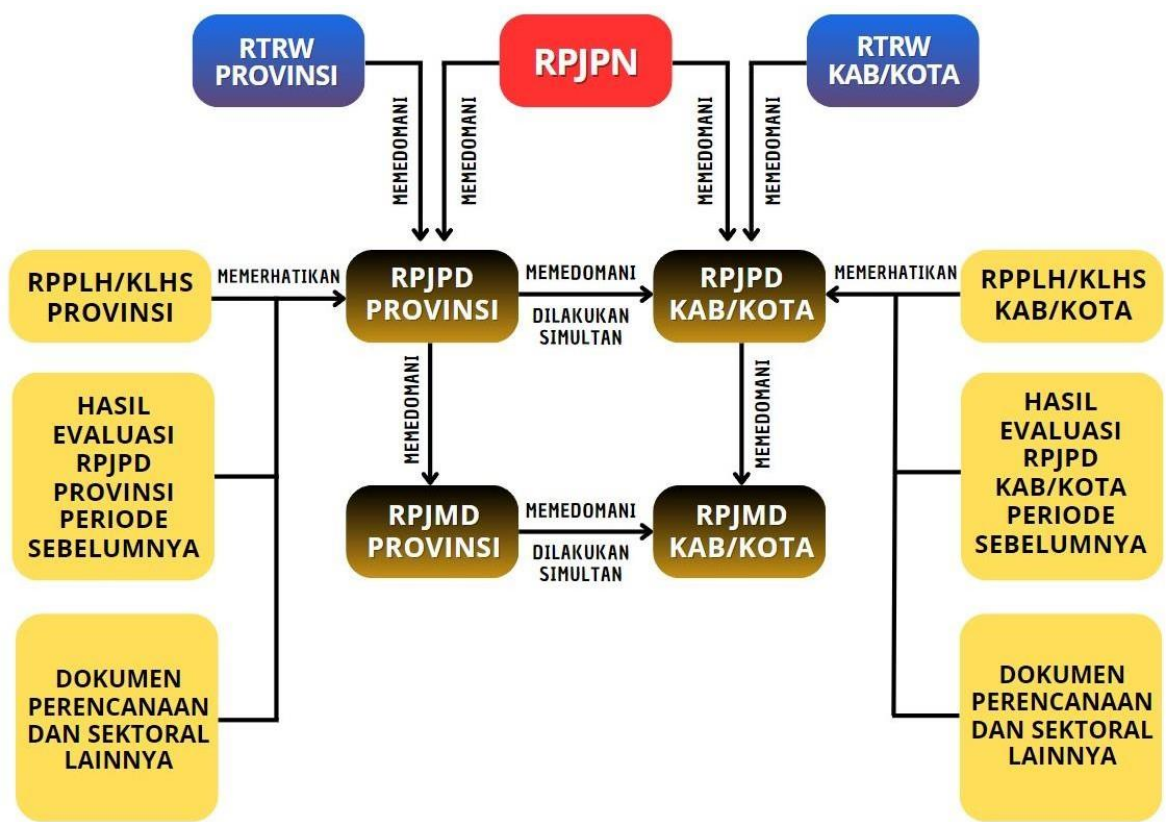
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan di Kabupaten Situbondo dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan disusunnya evaluasi dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Mengacu pada keterkaitan antar dokumen perencanaan pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut, kementerian dalam negeri menetapkan pedoman yang lebih rinci yang ditetapkan dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam instruksi menteri tersebut dijelaskan hubungan antar dokumen secara lebih detail melalui diagram alir sebagai berikut.



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Situbondo sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Situbondo untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Situbondo (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Sedangkan Tujuan dari disusunnya Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo selama 20 Tahun mendatang;
- b. Mewujudkan keselarasan arah kebijakan sasaran pokok Pembangunan daerah sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan Pembangunan daerah yang terintegrasi dan bersinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.



1.5 Sistematika

Penyajian dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat disajikan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang terdiri dari 6 bab pembahasan. Mengacu pada pedoman tersebut, RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memuat peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim, serta menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan, menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah, serta menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis

3.1. Permasalahan

Memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2. Isu strategis daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

4.1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

4.2. Misi daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan Tahun 2045.

Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja Pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan indikator yang bersifat progresif.

Bab VI : Penutup

Memuat beberapa poin penting catatan sebagai tindak lanjut atas penyusunan dokumen RPJPD ini, serta diuraikan mengenai kaidah pelaksanaan dan kerangka pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

RPJPD

2025 - 2045

KABUPATEN SITUBONDO



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

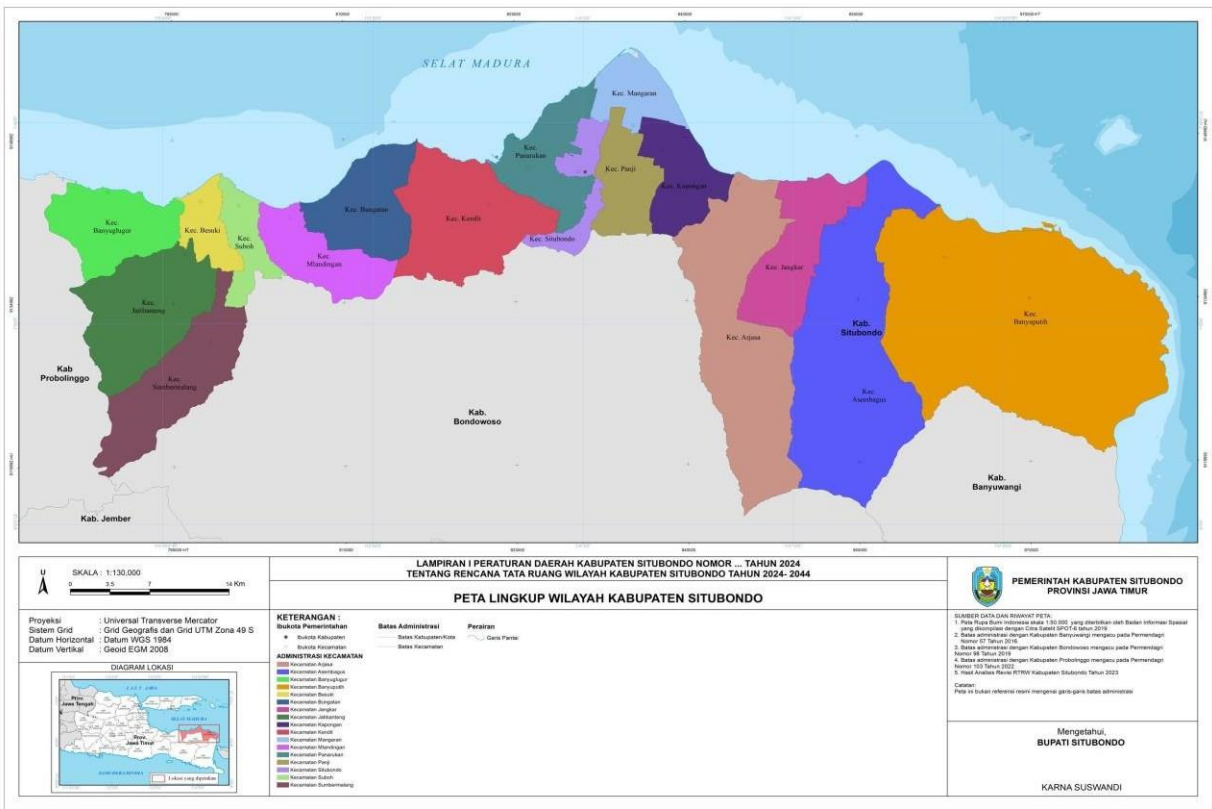
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan Wisata Pantai Pasir Putihnya. Kabupaten Situbondo memiliki luas sebesar 165.505 Ha yang bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Secara astronomis, Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35' – 7° 44' Lintang Selatan dan 113° 30' – 114° 42' Bujur Timur. Sementara itu, secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Selat Madura
- 2) Sebelah Timur : Selat Bali
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033

Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2024-2044

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa dengan luas wilayah Kabupaten Situbondo yang mencapai 165.505 Ha secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 132 Desa, 4 Kelurahan serta 682 Dusun. Diantara tujuh belas kecamatan tersebut, Kecamatan Banyuwangi merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Situbondo yakni mencapai 481,67 km². Hal tersebut disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuwangi dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km². Secara rinci pembagian administrasi dan luas wilayah di Kabupaten Situbondo dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Jumlah					Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	
1	Sumbermalang	9	-	32	58	161	12.947
2	Jatibanteng	8	-	35	86	192	6.608
3	Banyuglugur	7	-	28	39	106	7.266
4	Besuki	10	-	45	120	314	2.641
5	Suboh	8	-	31	61	169	3.084
6	Mlandingan	7	-	34	52	127	3.961
7	Bungatan	7	-	39	59	141	6.607
8	Kendit	7	-	37	94	193	11.414
9	Panarukan	8	-	52	84	245	5.438
10	Situbondo	4	2	27	66	242	2.781
11	Panji	10	2	53	90	270	4.699
12	Mangaran	6	-	45	78	170	3.570
13	Kapongan	10	-	55	98	252	4.455
14	Arjasa	8	-	59	90	214	21.638
15	Jangkar	8	-	44	70	179	6.700
16	Asembagus	10	-	36	66	193	11.874
17	Banyuputih	5	-	30	56	175	48.167
Jumlah		132	4	682	1.265	3.343	163.850

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045

Merujuk pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 17 kecamatan yang ada, hanya dua kecamatan yang memiliki wilayah administrasi kelurahan yakni Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji. Sedangkan untuk kecamatan Besuki, Kecamatan Panji, Kecamatan Kapongan dan Kecamatan Asembagus merupakan kecamatan yang memiliki jumlah pemerintahan desa terbanyak di Kabupaten Situbondo yakni terdiri dari 10 Desa. Selanjutnya terkait dengan sebaran wilayah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mulai tahun 2022 terdapat perubahan jumlah jika dibandingkan berdasarkan data pembagian wilayah tahun 2020. Pada tahun 2022 jumlah RW sebanyak 1.259 mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 1.265 wilayah. Hal tersebut dikarenakan terdapat penggabungan wilayah antar RW di beberapa desa. Sedangkan untuk jumlah RT dengan adanya pengurangan jumlah rumah tangga dalam satu RT, maka pada tahun 2022 dengan jumlah RT yang mencapai 3.351 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya berjumlah 3.343 RT yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo.



2.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75% dan tergolong kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42%, kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial. Regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah eksisting yaitu seluas 36.011,29 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07%).

Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0°-45°, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km² (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km² (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km² (0,53%) selalu tergenang.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: Wilayah utara merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; Wilayah tengah bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk sektor pertanian; dan Wilayah selatan yang memiliki topografi miring mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman perkebunan dan kehutanan.

2.1.3 Kondisi Geologi

Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten di Jawa Timur yang berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Secara umum tekstur tanah yang tergolong sedang mencapai 96,26%, tergolong halus 2,75% dan yang tergolong kasar 0,99%. Sedangkan untuk drainase tanah yang tergolong tidak tergenang seluas 99,42%, kadang-kadang tergenang 0,05% dan drainase yang selalu tergenang hanya 0,53%. Adapun Jenis tanah di Kabupaten Situbondo antara lain alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol serta andosol. Jika dilihat dari struktur Geologi, Kabupaten Situbondo berada pada Aluvium dengan luas 48.983 Ha, Vulkan Zaman Quarter Muda seluas 19.787 Ha, Vulkan Zaman Quarter Tua seluas 72.752 Ha, dan Leusita yang luasnya mencapai 22.328 Ha.

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Situbondo di lewati hulu sungai sampean yang berada sekitar 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Panjang sungai 72 kilometer dan DAS sampean seluas 1.347 kilometer persegi mengalir wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Sedangkan untuk daerah hulu berada di kompleks Gunung Argopuro dan kompleks Gunung Raung dengan muaranya yang berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

2.1.5 Klimatologi

Iklim adalah rata-rata cuaca dimana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Kabupaten Situbondo beriklim tropis basah dan kering yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Situbondo biasanya berlangsung pada periode Mei sampai November dengan puncaknya yakni periode Juli sampai September. Musim penghujan di wilayah Situbondo normalnya berlangsung pada periode bulan Desember sampai Maret, rata-rata curah hujan biasanya di atas 150 mm per bulan. Kondisi iklim di Kabupaten Situbondo apabila ditinjau dari kondisi curah hujan di tahun 2023, maksimum mencapai 15.179 mm dengan jumlah hari hujan selama 25 hari yang terjadi di bulan Januari. Secara rinci kondisi klimatologi di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Suhu, Jumlah Curah Hujan, dan Jumlah Hari Hujan, 2023

Bulan	Suhu (°C)			Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum		
Januari	21,00	27,20	34,20	242,2	15
Februari	22,80	26,40	32,20	397,6	24
Maret	22,00	27,40	33,30	199,7	13
April	21,20	27,20	33,40	106,2	16
Mei	22,00	27,40	37,50	11,4	8
Juni	22,00	26,80	31,80	43,4	5
Juli	22,00	25,70	32,30	252,5	16
Agustus	21,00	25,80	30,30	12,2	9
September	21,90	26,20	31,20	6,6	5
Oktober	22,80	27,90	33,50	-	-
November	24,30	28,50	34,00	48,2	5
Desember	24,00	28,60	34,20	9,6	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

2.1.6 Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Situbondo mencapai 165.505 Ha yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah kawasan hutan. Apabila ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, penggunaan lahan terbesar adalah untuk hutan yakni mencapai 73.512,77 Ha atau setara dengan 44,87% dari total wilayah Kabupaten Situbondo. Kemudian, terdapat pertanian tanah kering seluas 37.480,59 Ha atau setara 23,47%. Setelah itu, persawahan mencapai 26.191,00 Ha atau 15,98%. Sementara itu, lahan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kawasan terbangun (permukiman) hanya mencapai 4,64%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa luasan wilayah di Kabupaten Situbondo masih sangat berpotensi untuk pengembangan potensi melalui berbagai kegiatan investasi. Secara ringkas, penggunaan lahan di Kabupaten Situbondo didominasi oleh lahan tidak terbangun, seperti

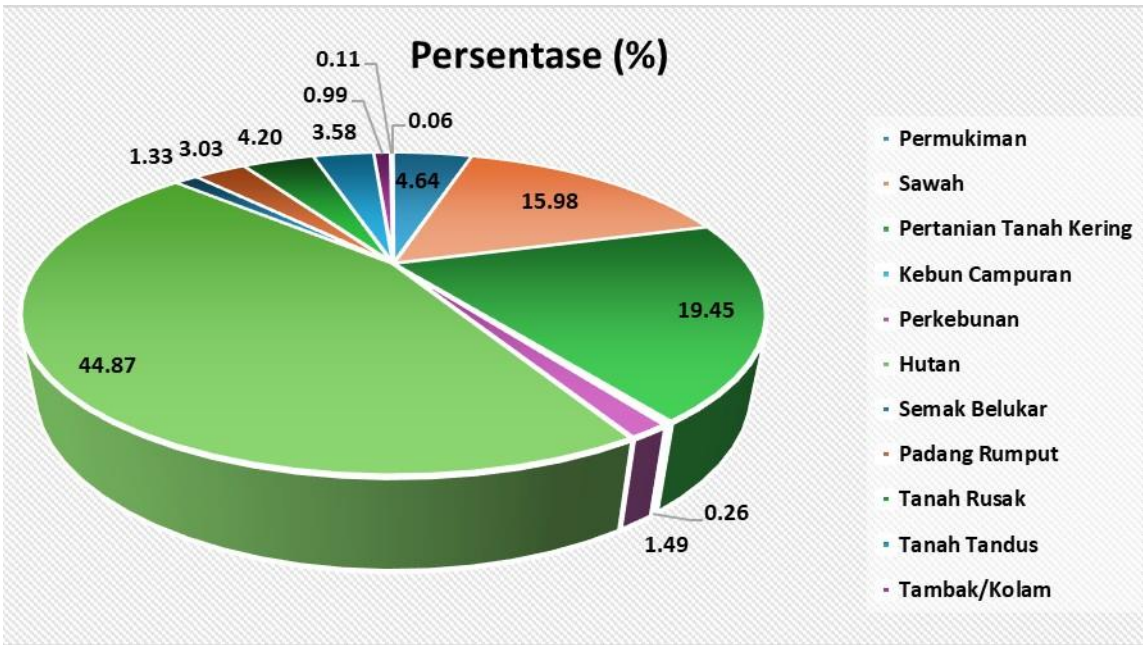


hutan, sawah, pertanian tanah kering, kolam, rawa, dan lainnya. Adapun data dan komposisi sebaran luasan penggunaan lahan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada sebagai berikut berikut:

Tabel 2. 3 Sebaran dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Jenis Penggunaan	Luas (Ha) Indikatif	Persentase (%)
Permukiman	7.598.23	4.64
Sawah	26.191.00	15.98
Pertanian Tanah Kering	31.876.43	19.45
Kebun Campuran	428.32	0.26
Perkebunan	2.433.98	1.49
Hutan	73.512.50	44.87
Semak Belukar	2.174.02	1.33
Padang Rumput	4.970.40	3.03
Tanah Rusak	6.879.86	4.20
Tanah Tandus	5.873.03	3.58
Tambak/Kolam	1.629.29	0.99
Rawa	182.00	0.11
Lain-Lain	100.95	0.06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024



Gambar 2.2 Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024



2.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu lingkungan/ bumi dalam mendukung makhluk hidup yang berada di atasnya baik dari sisi ekonomi, lingkungan, budaya, dan demografi, dalam hal ini daya dukung memiliki batas maksimal dalam mendukung kebutuhan makhluk hidup. Konsep utama dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Hal ini sangat penting untuk dikaji karena ketersediaan (*supply*) jumlahnya terbatas dan kebutuhan (*demand*) jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai swasembada beras. Untuk dapat hidup layak manusia memerlukan kurang lebih 2.100 kalori/hari/kapita. Standar yang digunakan untuk hidup layak ini dinamakan dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). KFM merupakan nilai yang menunjukkan seseorang dapat hidup secara normal, sehingga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo yang mengakomodir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memuat substansi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Jasa Ekosistem. Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan antara jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk (Cloud, (dalam Soerjani, dkk., 1987)). Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) diperoleh dari pendekatan kuantitatif melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016). Dalam hal mengukur daya tampung, Kabupaten Situbondo memiliki empat muatan daya dukung, antara lain daya dukung lahan pertanian, daya dukung fungsi lindung, daya dukung sumber daya air, dan daya dukung penyangga resapan air. Keempat daya dukung tersebut mengukur bagaimana kebutuhan atas dasar pangan, kebutuhan penggunaan lahan, kebutuhan air dan, kebutuhan penyangga resapan air.

Ambang batas merupakan ukuran atau tingkatan yang masih dapat diterima dan/ atau ditoleransi. Dalam konteks jasa ekosistem, ambang batas merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai kondisi ekosistem dan jasanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Dalam pengembangan wilayah, pendekatan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk (Muta'ali, 2012). Persebaran populasi merupakan parameter penting untuk analisis ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Populasi menentukan demand atau kebutuhan maupun konsumsi atas jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan.

2.1.7.1 Daya Dukung Lahan Pertanian

Semakin lama masyarakat mendiami suatu wilayah dalam rangka mencukupi kebutuhan untuk kelangsungan hidup, maka dibutuhkan sumberdaya-sumberdaya, khususnya pangan. Jumlah penduduk yang semakin banyak adalah nilai multiplier bagi sumber daya pangan yang mengalami surplus maupun defisit bergantung pada pola pangan dan tingkat ketahanan pangan suatu daerah. Semakin jumlah penduduk memiliki implikasi terhadap tingkat konsumsi pangan dan memiliki pengaruh terhadap luasan produksi pangan. Secara umum analisis daya dukung dan daya tampung kebutuhan pangan tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur, apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri, karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Dalam KLHS ini kajian daya dukung dan daya tampung ketersediaan pangan di Kabupaten Situbondo masih didasarkan pada sektor pertanian, khususnya pada luas lahan pertanian untuk tanaman pangan (padi, jagung, dan ketela).

Daya dukung lahan pertanian merupakan perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Untuk itu perlu diketahui berapa luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per kepala keluarga, potensi lahan yang tersedia dan penggunaannya untuk kegiatan pertanian. Perhitungan daya dukung pangan memiliki berbagai pendekatan dalam rangka mengukur kemampuan ekosistem memproduksi pangan untuk kehidupan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi nilai daya dukung. Dari Hasil perhitungan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Situbondo pada tahun 2022, pendekatan dihitung dari pendekatan odum, christeleiler, Howard dan Issar dengan membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan pangan. Indikator ketersediaan dicerminkan oleh luas lahan pertanian dan produktivitasnya. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya beras. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan formulai sebagai berikut :

$$\frac{Lp/Pd}{KFM/Pr} = t$$

Dimana :

t = Daya dukung wilayah pertanian

Lp = Luas Panen (ha)

Pd = Jumlah Penduduk (Jiwa)

KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun)

Pr = Produksi Lahan Rata-Rata per Hektar (kg/ha)

Kelestarian ekosistem terantung pada ketersediaan sumberdaya yang cukup merata dan berkelanjutan. Sumber daya yag dimaksud adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui dan sebagai indikatornya adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras. Dengan asumsi dari perhitungan daya dukung pertanian di atas, jika:

- a. $t > 1$
Surplus, wilayah tersebut mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.
- b. $t < 1$
Defisit, wilayah tersebut tidak mampu melaksanakan swasembada pangan atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.
- c. $t = 1$
Wilayah tersebut memiliki daya dukung lingkungan optimal. Jadi nilai 1 (satu) merupakan batas ambang daya dukung lingkungan.
Parameter yang digunakan adalah (1) luas panen; (2) jumlah penduduk; (3) kebutuhan fisik minimum (KFM); dan (4) produktivitas lahan/ ha. Kebutuhan fisik minimum yang diperlukan untuk menentukan besarnya daya dukung wilayah lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi wilayah. KFM penduduk di Kabupaten Situbondo adalah sekitar 0,294 ton/ kapita/ tahun.

Untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini :

Tabel 2. 4 Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Panen (Ha)	Produksi Lahan (Ton)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	Produksi Lahan Rata-Rata per Hektar (Pr)	KFM	k (KFM/ Pr)	Daya Dukung	Status
Sumbermalang	28.056	1.332	6.776,03	0,047	5,087	0,294	0,058	0,821	DEFISIT
Jatibanteng	22.538	1.457	7.314,36	0,065	5,020	0,294	0,059	1,104	SURPLUS
Banyuglugur	23.661	890	4.599,13	0,038	5,168	0,294	0,057	0,661	DEFISIT
Besuki	64.586	3.603	18.779,44	0,056	5,212	0,294	0,056	0,989	DEFISIT
Suboh	28.087	2.576	13.657,91	0,092	5,302	0,294	0,055	1,654	SURPLUS
Mlandingan	23.934	2.496	13.010,79	0,104	5,213	0,294	0,056	1,849	SURPLUS
Bungatan	25.417	734	3.760,22	0,029	5,123	0,294	0,057	0,503	DEFISIT
Kendit	29.426	1.851	9.664,67	0,063	5,221	0,294	0,056	1,117	SURPLUS
Panarukan	57.946	4.149	21.656,05	0,072	5,220	0,294	0,056	1,271	SURPLUS
Situbondo	48.297	1.367	7.235,16	0,028	5,293	0,294	0,056	0,510	DEFISIT
Mangaran	34.315	5.046	26.787,20	0,147	5,309	0,294	0,055	2,655	SURPLUS



Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Panen (Ha)	Produksi Lahan (Ton)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	Produksi Lahan Rata-Rata per Hektar (Pr)	KFM	k (KFM/ Pr)	Daya Dukung	Status
Panji	66.581	4.069	21.626,68	0,061	5,315	0,294	0,055	1,105	SURPLUS
Kapongan	38.994	5.157	26.837,34	0,132	5,204	0,294	0,056	2,341	SURPLUS
Arjasa	42.423	3.112	16.333,20	0,073	5,248	0,294	0,056	1,310	SURPLUS
Jangkar	39.018	1.626	8.509,00	0,042	5,233	0,294	0,056	0,742	DEFISIT
Asembagus	49.100	484	2.423,74	0,010	5,008	0,294	0,059	0,168	DEFISIT
Banyuputih	50.723	3.187	16.338,19	0,063	5,127	0,294	0,057	1,096	SURPLUS
Kabupaten Situbondo	673.102	43.136	225.309,11	0,064	5,223	0,294	0,056	1,139	SURPLUS

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045

Dari hasil perhitungan tabel Daya Dukung dan daya tampung Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki skor 1,139. Angka tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh sawah dan ladang padi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Dari 17 kecamatan yang dihitung, sebanyak 10 kecamatan memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Mangaran (2,655) dan Kecamatan Kapongan (2,341). Sedangkan sebanyak 7 kecamatan lainnya memiliki skor <1 dengan skor terendah diperoleh di Kecamatan Asembagus (0,168). Hal Ini menunjukkan bahwa 10 dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo cukup mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri. Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Kapongan mempunyai lahan panen komoditas padi terluas dan produksi tertinggi se-kabupaten sehingga berdampak terhadap ketersediaan pangan. Kecamatan dengan daya dukung rendah mempunyai tingkat produksi rendah, sedangkan jumlah penduduknya relatif tinggi. Kondisi tersebut merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan.

Berdasarkan data existing selanjutnya dapat dilakukan proyeksi guna untuk mengetahui Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo pada tahun 2045. Berdasarkan hasil perhitungan dengan mendasarkan pada hasil proyeksi terhadap jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2045 yang diperkirakan mencapai 859.499 jiwa, Luas Panen dan Produksi Lahan yang secara akumulasi cenderung mengalami penurunan, serta KFM penduduk di Kabupaten Situbondo yang masih mencapai sekitar 0,294 ton/ kapita/ tahun, maka Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo pada tahun 2045 diperkirakan mengalami kondisi Defisit. Adapun hasil proyeksi terhadap Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo pada tahun 2045 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 5 Hasil Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2045

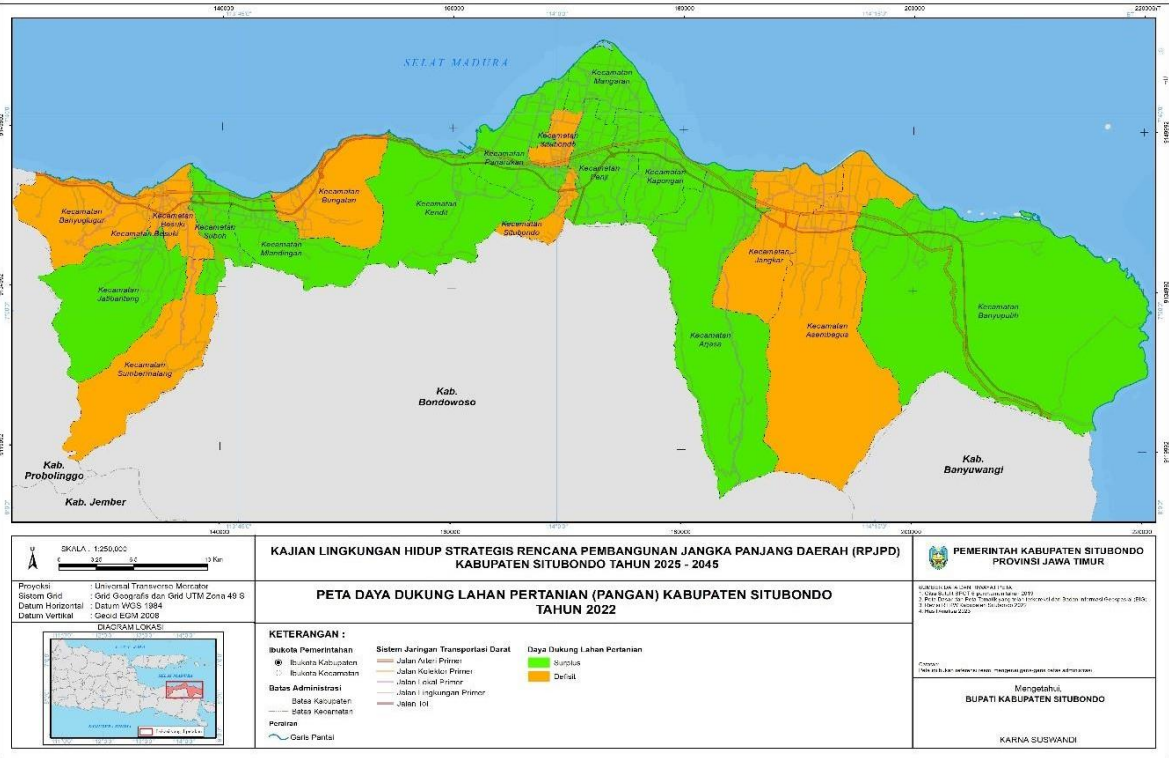
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Panen (Ha)	Produksi Lahan (Ton)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	Produksi Lahan Rata-Rata per Hektar (Pr)	KFM	Daya Dukung	Keterangan
Sumbermalang	34.044	689	3.908,00	0,020	5,672	0,294	0,390	DEFISIT
Jatibanteng	25.958	2.067	5.729,00	0,080	2,772	0,294	0,751	DEFISIT
Banyuglugur	24.696	3.943	10.216,00	0,160	2,591	0,294	1,407	SURPLUS
Besuki	85.811	1.650	6.438,00	0,019	3,902	0,294	0,255	DEFISIT
Suboh	41.788	2.271	7.017,00	0,054	3,090	0,294	0,571	DEFISIT
Mlandingan	38.252	834	5.531,00	0,022	6,632	0,294	0,492	DEFISIT
Bungatan	28.965	425	2.063,00	0,015	4,854	0,294	0,242	DEFISIT
Kendit	41.152	489	6.297,00	0,012	12,877	0,294	0,520	DEFISIT
Panarukan	77.595	2.255	6.452,00	0,029	2,861	0,294	0,283	DEFISIT
Situbondo	54.681	1.533	5.988,00	0,028	3,906	0,294	0,372	DEFISIT
Mangaran	56.968	6.080	33.034,00	0,107	5,433	0,294	1,972	SURPLUS
Panji	94.931	6.175	30.447,00	0,065	4,931	0,294	1,091	SURPLUS
Kapongan	63.194	3.777	10.555,00	0,060	2,795	0,294	0,568	DEFISIT
Arjasa	44.305	757	7.135,00	0,017	9,425	0,294	0,548	DEFISIT
Jangkar	44.516	850	3.916,00	0,019	4,607	0,294	0,299	DEFISIT
Asembagus	67.220	196	1.906,00	0,003	9,724	0,294	0,096	DEFISIT
Banyuputih	35.423	2.773	7.216,00	0,078	2,602	0,294	0,693	DEFISIT
Kabupaten Situbondo	859.499	36.764	153.848,00	0,043	4,185	0,294	0,609	DEFISIT

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045

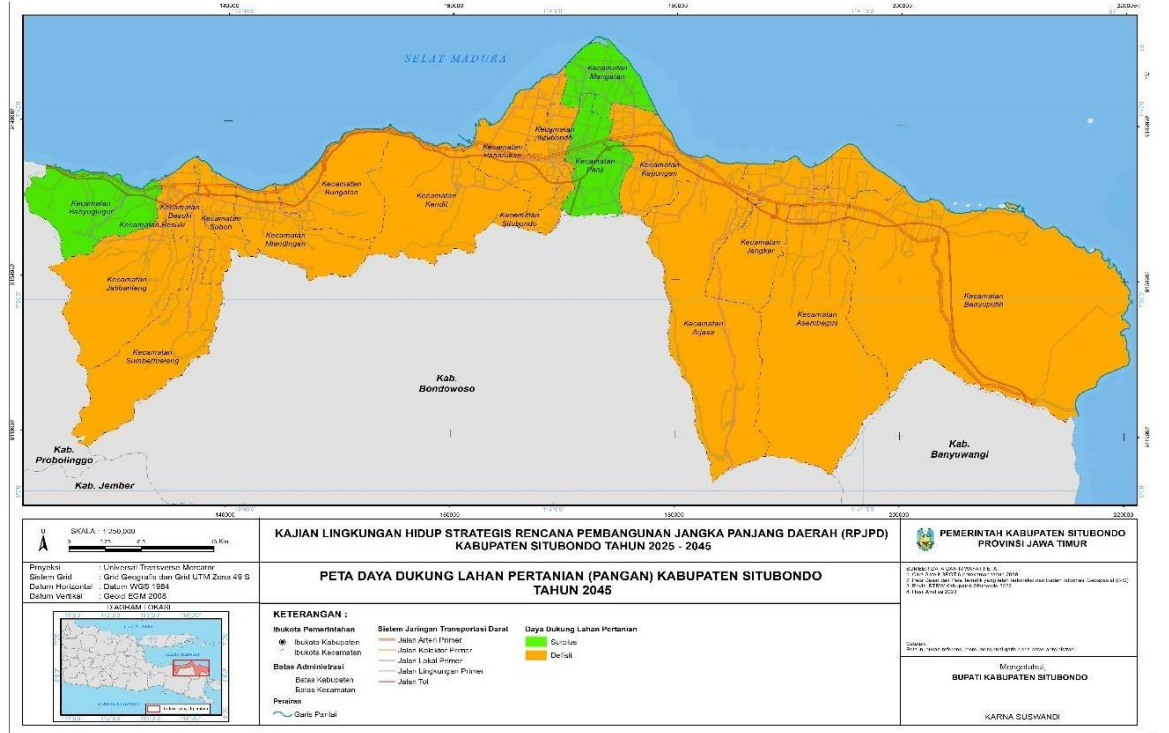
Berdasarkan data hasil perhitungan yang disajikan pada tabel di atas, selanjutnya bila dibandingkan dengan data yang terdapat pada tabel daya dukung pangan existing pada tahun 2023 (yang belum diproyeksikan), maka dapat diketahui bahwa dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, terdapat 8 kecamatan yang statusnya masih sama dengan data yang belum diproyeksikan ditahun 2023, yaitu di Kecamatan Sumbermalang, Besuki, Bungatan, Situbondo, Jangkar, dan Asembagus dengan status Defisit, serta Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Panji dengan status Surplus, Sedangkan pada 9 kecamatan lainnya mengalami perubahan status yaitu dari Surplus menjadi Defisit yang dikarenakan berkurangnya jumlah luas lahan yang ikut mengakibatkan berkurangnya jumlah produksi lahan sawah, yaitu di Kecamatan Jatibanteng, Suboh, Mlandingan, Kendit, Panarukan, Kapongan, Arjasa, dan Banyuputih. Sedangkan kecamatan yang mengalami perubahan dari status Defisit ke Surplus adalah Kecamatan Banyuglugur yang diperkirakan adanya peningkatan jumlah produksi. Namun, secara keseluruhan daya dukung pangan di Kabupaten Situbondo setelah diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi DEFISIT dengan nilai daya dukung/ skor hitung t pada hasil perhitungan mencapai 0,609.



Untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2. 3 Peta Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo
Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045



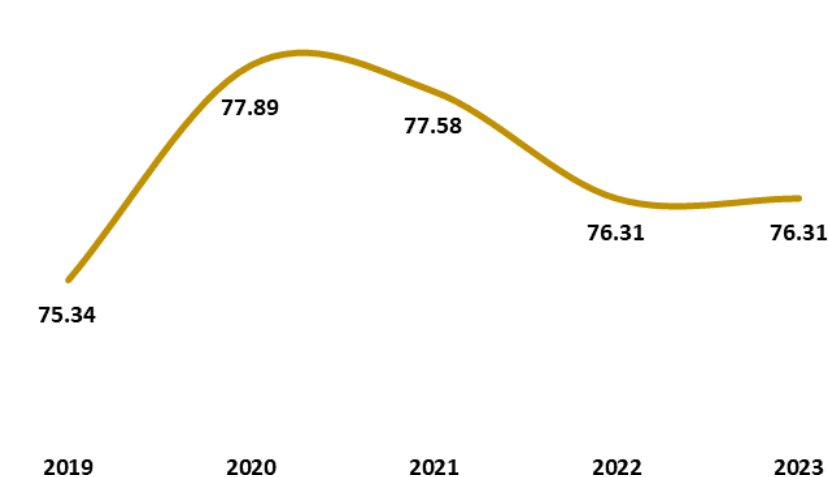
Gambar 2. 4 Peta Hasil Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2045
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045

Ketahanan pangan merupakan ketersediaan akses terhadap sumber makanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi



konsumsi manusia. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintah daerah memiliki tugas yaitu mewujudkan ketahanan pangan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik itu dalam hal jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan sektor yang vital bagi keselamatan dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian penting dalam aspek pertahanan negara. Berikut merupakan capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Situbondo.

Indeks Ketahanan Pangan



Gambar 2. 5 Indeks Ketahanan Pangan Kab. Situbondo 2019-2023
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, 2024

Grafik di atas menyajikan capaian indeks ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo selama lima tahun dari 2019 sampai 2024. Secara keseluruhan, indeks ketahanan pangan Kabupaten Situbondo mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, indeks ketahanan pangan adalah 74,34. Kemudian, peningkatan terjadi pada tahun 2020 dimana indeks ketahanan pangan mencapai 77,89 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sejak itu, indeks ketahanan pangan mengalami penurunan sehingga mencapai 76,31 pada tahun 2022. Setahun setelahnya, capaian indeks ketahanan pangan tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung untuk fungsi lindung merupakan kemampuan suatu kawasan dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di dalamnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem (kawasan lindung) pada suatu luasan wilayah tertentu. Kawasan lindung ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Rusthon (1993) melakukan penelitian tentang wanatani dan menemukan sejumlah koefisien penggunaan lahan dalam kaitannya dengan fungsinya untuk menjaga kelestarian hutan yang pada akhirnya dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Penggunaan lahan mempunyai fungsi lindung yang bervariasi dan tergantung pada kemampuan konservasi dari bentuk penggunaan lahan tersebut yang dinyatakan dalam bentuk koefisien fungsi lindung. Nilai Daya

Dukung Lindung (DDL) dapat dhitung dengan rumus di bawah ini :

$$DDL = \frac{\sum(Lgl1.\alpha1 + Lgl2.\alpha2 + Lgl3.\alpha3 + Lglx.\alpha x))}{LW}$$

- Keterangan :
- DDL = Daya Dukung Fungsi Lindung
 - LW = Luas Wilayah (Ha)
 - Lg1 = Luas Guna Lahan Jenis 1 (Ha)
 - α1 = Koefisien Lindung Untuk Guna Lahan 1

Daya dukung fungsi lindung (DDL) memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Oleh karena itu, semakin mendekati nilai 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila mendekati 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dibagi menjadi 5 (lima) kelas dengan rentang nilai DDL sebagai berikut:

- 1. Sangat rendah : 0 – 0,20
- 2. Rendah : 0,21 – 0,40
- 3. Sedang : 0,41 – 0,60
- 4. Tinggi : 0,61 – 0,80
- 5. Sangat Tinggi : 0,81 – 1

Untuk mengetahui Daya Dukung Fungsi Lindung di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel 2. 6 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Situbondo

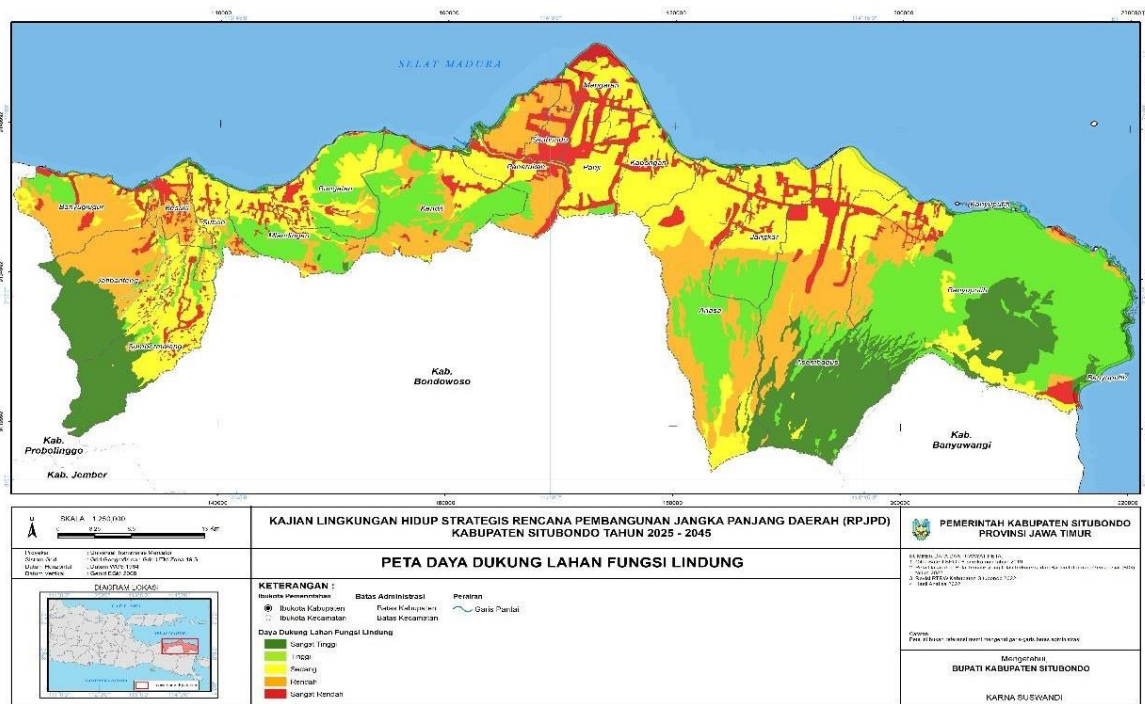
No	Keterangan	Rentang Nilai	Status
1	Cagar Alam	1	Sangat Tinggi
2	Suaka Margasatwa	1	Sangat Tinggi
3	Taman Wisata	1	Sangat Tinggi
4	Taman Buru	0,82	Sangat Tinggi
5	Hutan Lindung	1	Sangat Tinggi
6	Hutan Cadangan	0,61	Tinggi
7	Danau/ Tambak	0,98	Sangat Tinggi
8	Permukiman	0,18	Sangat Rendah
9	Hutan Produksi	0,68	Tinggi
10	Perkebunan Besar	0,54	Sedang
11	Perkebunan Rakyat	0,42	Sedang
12	Persawahan	0,46	Sedang
13	Ladang/ Tegalan	0,21	Rendah
14	Padang Rumput	0,28	Rendah
15	Tanaman Kayu	0,35	Rendah
16	Tanah Kosong	0,01	Sangat Rendah

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045



Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Situbondo memiliki status yang bervariasi. Daya dukung fungsi lindung yang memiliki status sangat rendah adalah permukiman dan tanah kosong. Dari 16 daya dukung fungsi lindung, 6 diantaranya memiliki status sangat tinggi dan 2 diantaranya memiliki nilai sangat rendah, dengan nilai tertinggi diperoleh oleh Danau/ Tambak dengan nilai 0,98, sedangkan nilai sangat rendah diperoleh oleh Tanah Kosong dengan nilai 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung fungsi lindung untuk Danau/ Tambak memiliki nilai tertinggi karena didukung oleh kondisi alamnya, sedangkan untuk tanah kosong memiliki nilai terendah dikarenakan pembangunan yang terus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu dan penambahan penduduk secara terus menerus.

Untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2. 6 Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Situbondo
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045

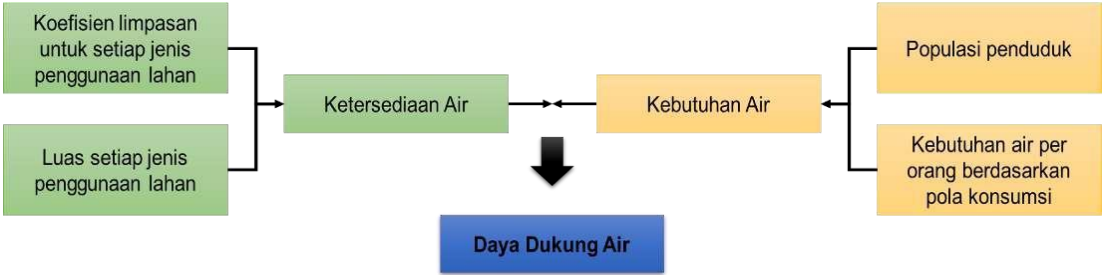
2.1.7.3 Daya Dukung Sumber Daya Air

Daya dukung sumber daya air pada dasarnya mengadopsi istilah daya dukung lingkungan sebagai kemampuan lingkungan atau suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan air bagi populasi didalamnya (penduduk dan kegiatan budidayanya) dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan sumberdaya air yang tersedia. Daya dukung sumberdaya air suatu wilayah merupakan parameter yang memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan maksimal wilayah menyediakan ari bagi penduduk dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya. Apabila daya dukung untuk suatu wilayah telah terlampaui, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak bisa mendapatkan air dalam jumlah yang memadai sehingga terjadilah gejala krisis air atau defisit air.

Analisis daya dukung air dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air yang dihitung berdasarkan pedoman D3TLH yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014. Metode ini menunjukkan cara perhitungan daya dukung air di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa suatu wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Untuk memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaandan kebutuhan air seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 7 Penentuan Daya Dukung Air

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Ketersediaan (*Supply*) air di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional berikut ini.

Rumus :

$$C = \frac{\sum(C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

$$R = \frac{\sum R_i}{m}$$

$$S_A = 10 \times C \times R \times A$$

keterangan :

- SA = ketersediaan air (m³/ tahun)
- C = koefisien limpasan tertimbang
- C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan
- A_i = luas penggunaan lahan (ha)
- R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/ tahunan) R_i= curah hujan tahunan pada stasiun (mm)
- m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan
- A = luas wilayah (ha)
- 10 = faktor konversi dari mm. Ha menjadi m³

Kriteria yang digunakan dalam menyusun kebutuhan air bersih di wilayah adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan Air Untuk Rumah Tangga (Domestik).

Kebutuhan air untuk rumah tangga/domestik ialah pemakaian air untuk aktivitas dilingkungan rumah tangga. Penyediaan air baku untuk keperluan rumah tangga dihitung dengan berdasarkan :

- a. Jumlah penduduk
- b. Prosentase jumlah penduduk yang akan dilayani
- c. Cara pelayanan air
- d. Konsumsi pemakaian air (lt/orang/hari)

Berdasarkan kategori kota yang didasarkan jumlah penduduk, tingkat konsumsi/ pemakaian air rumah tangga = 100 liter/orang/hari.

2. Kebutuhan Air Untuk Non Domestik.

Maksud dari kebutuhan air untuk keperluan non domestik ialah pemakaian air diluar pemakaian untuk rumah tangga. Termasuk ke dalam kelompok kebutuhan air untuk keperluan non domestik meliputi niaga, kesehatan, sosial, perkantoran, pendidikan dan peribadatan. Kebutuhan air non domestik dihitung sebesar 60% dari kebutuhan air domestik (sesuai dengan analisis kebutuhan air non domestik dalam dokumen FA REVISI RTRW).

3. Kehilangan Air.

Dalam setiap penyediaan air bersih, sangat sulit sekali untuk menghindari terjadinya kemungkinan kehilangan air dari sistem. Kehilangan air yang terjadi bias disebabkan oleh factor teknis maupun non teknis. Faktor teknis, kehilangan air disebabkan oleh kebocoran pipa, kerusakan meter air. Sedangkan faktor non teknis, kehilangan air disebabkan oleh kesalahan pembacaan meteran/ pencatatan, kesalahan penjumlahan/ pengurangan dll. Untuk itu dalam perencanaan suatu sistem penyediaan air bersih, selalu diperhitungkan suatu besaran volume air untuk menghindari kemungkinan terjadinya kehilangan air. Hal ini dimaksudkan agar penyediaan air untuk masyarakat konsumen tidak terganggu bila terjadinya kehilangan air baik yang disebabkan oleh faktor teknis maupun oleh faktor non teknis. Kehilangan air diasumsikan sebesar 20% dari kebutuhan arata-rata air bersih penduduk. Besar kehilangan air ini diperkirakan konstan mulai awal sampai tahun rencana.

4. Fluktuasi Pemakaian Air

Dalam perencanaan suatu sistem penyediaan air bersih, dikenal istilah fluktuasi pemakaian air pada waktu hari maksimum dan fluktuasi pemakaian air pada saat jam puncak. Yang dimaksud dengan fluktuasi pemakaian air bersih pada saat jam puncak adalah sebagai berikut :

- a. Selama sehari ada jam-jam tertentu dimana penggunaan air bersih lebih tinggi dari pemakaian perjam rata-rata.
- b. Pemakaian air pada jam tertinggi inilah yang disebut sebagai pemakaian jam puncak, yang biasa terjadi pada pagi dan sore hari. Sedangkan yang dimaksud dengan fluktuasi pemakaian air bersih pada waktu hari maksimum.
- c. Selama setahun ada hari-hari tertentu dimana pemakaian air lebih tinggi dari pemakaian perhari rata-rata, pemakaian inilah yang disebut pemakaian air pada hari maksimum.

- d. Bila tidak ada data yang lengkap, yang menunjukkan berapa factor penggali untuk pemakaian hari maksimum dan jam puncak, maka faktor-faktor tersebut diambil dari Standard Cipta Karya, yaitu :
 - = 1,1 x Kebutuhan rata-rata
- e. Hari maksimum
 - Jam puncak = 1,2 x Kebutuhan rata-rata

Penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA).

- Nilai SA > DA, daya dukung air dinyatakan surplus
- Nilai SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

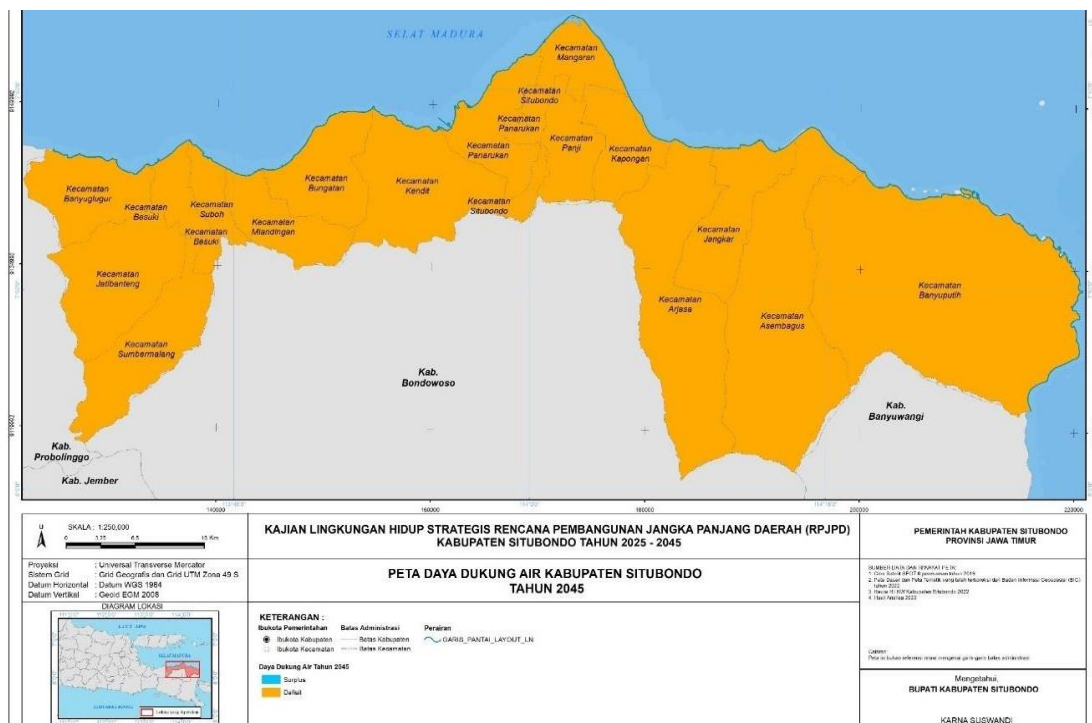
Untuk mengetahui daya dukung sumber daya air Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3 / tahun)			DA = Total Kebutuhan Air (m3 / tahun)	Status Daya Dukung Air
		Limpasan Air (Ro)	Mata Air	SA Total (m3/ tahun)		
1	Sumbermalang	44.102.757,95	133,39	44.102.891,34	45.938.764,616	Defisit
2	Jatibanteng	38.326.760,73	170,16	38.326.930,89	37.166.812,497	Surplus
3	Banyuglugur	17.389.016,31	187,15	17.389.203,46	39.721.017,443	Defisit
4	Besuki	48.880.431,23	365,12	48.880.796,35	104.905.419,319	Defisit
5	Suboh	15.452.728,91	449,76	15.453.178,67	45.450.720,427	Defisit
6	Mlandingan	14.406.800,69	291,89	14.407.092,58	38.362.841,840	Defisit
7	Bungatan	25.547.511,57	304,06	25.547.815,63	41.864.237,808	Defisit
8	Kendit	24.331.386,90	524,12	24.331.911,02	47.123.556,099	Defisit
9	Panarukan	22.433.093,24	545,50	22.433.638,74	94.259.955,465	Defisit
10	Situbondo	23.172.645,70	143,76	23.172.789,46	78.212.291,964	Defisit
11	Mangaran	18.440.627,71	357,00	18.440.984,71	55.105.647,228	Defisit
12	Panji	13.475.856,37	535,90	13.476.392,27	107.189.915,634	Defisit
13	Kapongan	27.533.207,37	921,50	27.534.128,87	62.675.148,369	Defisit
14	Arjasa	23.130.819,01	830,20	23.131.649,21	70.530.412,226	Defisit
15	Jangkar	15.049.664,38	867,55	15.050.531,93	66.462.307,053	Defisit
16	Asembagus	12.611.384,35	824,60	12.612.208,95	79.920.446,622	Defisit
17	Banyuputih	0,00	189,87	189,87	90.172.585,390	Defisit
Kabupaten Situbondo		384.284.692,418	7.641,530	384.292.333,948	1.105.062.080,000	Defisit







Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Situbondo Tahun 2045
 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2045

2.1.7.4 Daya Dukung Kawasan Penyangga Resapan Air

Kawasan resapan air adalah area penyangga atau transisi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang umumnya terletak di bagian atas atau hulu dari sistem wilayah yang berfungsi lindung. Dalam pengelolaan kawasan lindung, kawasan resapan air diartikan sebagai daerah yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meresapkan air tanah, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air. Kriteria penentuan kawasan resapan air adalah curah hujan tinggi, struktur batuan geologi (tanah) yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar – besaran. Dalam manajemen daya dukung kawasan resapan air terdapat dua system yang harus diperhatikan yaitu *system supply* dan *system demand*. Perlindungan kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan upaya menjaga kelestarian fungsi wilayah resapan air, maka penurunan fungsi wilayah tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut, tetapi juga menghambat perkembangan wilayah – wilayah lain yang secara ekologis berhubungan.

Perkembangan wilayah yang semakin pesat akan ditandai dengan penutupan lahan ileh bangunan, jalan, dan lain – lain menjadi kedap air (impermeable), bagian air hujan menjadi limpasan (koefisien run off) semakin meningkat sehingga mengurangi supply air tanha dan mengganggu sistem tata air. Koefisien aliran daerah perkotaan berkisar antara 70 -90 % (Weert, 1994), sedangkan pedesaan berkisar 10–15%. Terdapat dua imlikasi dari pengembangan wilayah dan penggunaan lahan, yaitu meningkatnya kawasna terbangun yang berarti meningkatkan laju aliran permukaan (*run off*), sekaligus mengurangi kapasitas tanah dalam menyerap air (*water holding capacity*). Salah satu indikator dalam pengelolaan kawasan resapan

air adalah koefisien aliran. Dampak meningkatnya areal terbangun berhubungan positif dengan limpasan aliran permukaan (*run off*) dan merusak fungsi kawasan resapan air karena semakin rendahnya jumlah curah hujan yang mampu meresap ke dalam kawasan tersebut. Formula indeks koefisien aliran permukaan (*run off*) adalah sebagai berikut:

$$KA= (\alpha_1 \times A_1 + \alpha_2 \times A_2 + \alpha_i \times A_i) / LW$$

- Keterangan :
- KA : Koefisien Aliran
 - A1 : Luas Penggunaan Lahan Jenis 1
 - a1 : Koefisien runoff untuk penggunaan lahan 1
 - LW : Luas Wilayah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan koefisien *runoff* untuk guna lahan tertentu, yaitu :

Tabel 2. 8 Nilai Koefisien *Runoff* Untuk Jenis Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Koefisien Runoff	
		Koefisien (α)	(%)
1	Hutan tropis basah	0,03	3 %
2	Hutan produksi	0,05	5 %
3	Semak belukar	0,07	7 %
4	Sawah – sawah	0,15	15 %
5	Daerah pertanian	0,40	40 %
6	Daerah permukiman	0,70	70 %
7	Bangunan padat	0,70 – 0,90	70 – 90 %
8	Bangunan terpencar	0,30 – 0,90	30 – 70 %
9	Jalan aspal	0,95	95 %
10	Jalan tanah	0,13 – 0,50	13 – 50 %
11	Lapis keras kerikil batu pecah	0,35 – 0,70	35 – 70 %
12	Lapis keras beton	0,70 – 0,90	70 – 90 %
13	Taman, halaman	0,05 – 0,25	5 – 25 %



No	Penggunaan Lahan	Koefisien Runoff	
		Koefisien (α)	(%)
14	Tanah, lapang	0,10 – 0,30	10 – 30 %
15	Kebung, ladang	0,00 – 0,20	0 – 20 %

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2045

Berdasarkan perhitungan dengan formula diatas, secara sederhana dapat dibuat klasifikasi nilai koefisien aliran permukaan pada kawasan resapan air sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Klasifikasi Nilai Rata-Rata Koefisien Aliran dan Implikasi Pengembangan

No	Nilai Rerata Koefisien Aliran	Klasifikasi	Implikasi Pengembangan
1	>0,50	Berubah fungsi	KRA telah berubah fungsi (menjadi kawasan budidaya)
2	0,41 – 0,50	Sangat tinggi	KRA harus dilindungi atau diproteksi dari semua jenis kegiatan budaya
3	0,31 – 0,40	Tinggi	KRA dikendalikan secara ketat dan hanya jenis kegiatan budidaya non <i>builtup</i> area, seperti pertanian, kehutanan boleh dikembangkan
4	0,21 – 0,30	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk permukiman dan jenis budidaya dengan <i>builtup</i> area seperti industri, perdagangan jasa, dan sebagainya
5	0,10 – 0,20	Rendah	Boleh dikembangkan
6	<0,10	Sangat Rendah	Aman dikembangkan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2045

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien aliran di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Koefisien Aliran Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	C = KA	Keterangan	
1	Arjasa	0,13	Rendah	Boleh dikembangkan
2	Asembagus	0,09	Sangat Rendah	Aman dikembangkan
3	Banyuglugur	0,14	Rendah	Boleh dikembangkan
4	Banyuputih	0,07	Sangat Rendah	Aman dikembangkan
5	Besuki	0,30	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk permukiman dan jenis budidaya dengan builtup area seperti industri, perjas, dan sebagainya
6	Bungatan	0,11	Rendah	Boleh dikembangkan
7	Jangkar	0,18	Rendah	Boleh dikembangkan
8	Jatibanteng	0,13	Rendah	Boleh dikembangkan
9	Kapongan	0,24	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk permukiman dan jenis budidaya dengan builtup area seperti industri, perjas, dan sebagainya
10	Kendit	0,11	Rendah	Boleh dikembangkan
11	Mangaran	0,27	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk permukiman dan jenis budidaya dengan builtup area seperti industri, perjas, dan sebagainya
12	Mlandingan	0,13	Rendah	Boleh dikembangkan
13	Panarukan	0,25	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk permukiman dan jenis budidaya dengan <i>builtup</i> area seperti industri, perjas, dan sebagainya
14	Panji	0,27	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk



No	Kecamatan	C = KA	Keterangan	
				permukiman dan jenis budidaya dengan <i>builtup</i> area seperti industri, perjas, dan sebagainya
15	Situbondo	0,28	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk permukiman dan jenis budidaya dengan <i>builtup</i> area seperti industri, perjas, dan sebagainya
16	Suboh	0,22	Sedang	KRA dikembangkan terbatas dan dikendalikan khususnya untuk permukiman dan jenis budidaya dengan <i>builtup</i> area seperti industri, perjas, dan sebagainya
17	Sumbermalang	0,11	Rendah	Boleh dikembangkan
	Kabupaten Situbondo	0,36	Tinggi	KRA dikendalikan secara ketat dan hanya jenis kegiatan budidaya non <i>builtup</i> area, seperti pertanian, kehutanan boleh dikembangkan

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2045

Secara umum status daya dukung kawasan penyangga air di Kabupaten Situbondo boleh dikembangkan. Hal ini terbukti dari 17 kecamatan, 10 kecamatan memiliki koefisien aliran yang boleh dan aman dikembangkan.

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.8.1 Potensi Pertanian

Kawasan pertanian untuk tanaman pangan merupakan kawasan yang memberikan kontribusi terbesar ditinjau dari sektor pertanian. Tanaman pangan yang mendominasi seluruh Kabupaten Situbondo, antara lain padi, jagung dan kacang tanah. Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan di Kabupaten Situbondo tersebar secara merata di seluruh wilayah. Kabupaten Situbondo memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, dari luas Kabupaten Situbondo yang mencapai 1.638,50 km² atau setara 163.850 Ha. Sebanyak 33.798 Ha, adalah lahan sawah produktif yang terdiri dari sawah berpengairan teknis seluas 32.707 Ha. Dan sawah non irigasi seluas 1.091 Ha, sedangkan lahan tegal (*dry field*) di Kabupaten Situbondo mencapai 30.677 Ha, Besarnya lahan produktif di Kabupaten Situbondo menjadikan sebagian besar penduduk Situbondo bekerja pada lapangan usaha pertanian.

**Tabel 2.11 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Tahun 2018-2023**

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Padi	2018	334,648	5.68
	2019	305,041	5.74
	2020	218,679	7,04
	2021	218,586	5,98
	2022	225,307	5,22
	2023	253,145	5,58
Jagung	2018	255,920	5,15
	2019	264,118	5,19
	2020	277,520	5,45
	2021	299,179	5.44
	2022	301,899	5,7
	2023	345,370	5,85
Kacang Tanah	2018	425	1,10
	2019	369	1,30
	2020	258	1,34
	2021	585	1,32
	2022	238	1,01
	2023	202	1,32

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian produksi padi terbesar di Kabupaten Situbondo terjadi di tahun 2018 yakni 334.648 ton dengan tingkat produktivitas 5,68 ton/ha. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya produksi padi trendnya mengalami kenaikan, di tahun 2022 produksi padi kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yakni mencapai 225.307 ton. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yakni mencapai 253,145. Selanjutnya komoditas jagung sepanjang tahun 2018-2023 trendnya produktivitasnya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023 Kabupaten Situbondo berhasil memproduksi pada sebanyak 343,370 ton. Hasil produksi dan tingkat produktivitas kacang tanah sebagai komoditas pangan juga mengalami trend yang fluktuatif. Bahkan sepanjang tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kendatipun demikian pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 bisa membangkitkan kembali capaian produksi kacang tanah sebesar 585-ton dengan tingkat produktivitas 1.32 ton per hektar.



Selain tanaman pangan, Kabupaten Situbondo juga memiliki potensi komoditas hortikultura khususnya cabai rawit, cabai besar, bawang merah dan Mangga yang menempati luasan lahan pertanian 43.674 Ha. Adapun capaian produksi dan tingkat produktivitas tanaman hortikultura sepanjang tahun 2018 sampai 2023 di Kabupaten Situbondo terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12 Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Tahun 2018 -2023

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Cabai Rawit	2018	14,767	6,45
	2019	8,592	2,86
	2020	14,875	5,48
	2021	20,714	4,70
	2022	28,824	5,57
	2023	19,151	3,29
Cabai Besar	2018	481	3,36
	2019	345	2,70
	2020	661	3,43
	2021	549	3,80
	2022	583	5,07
	2023	442	4,75
Bawang Merah	2018	2,425	7,95
	2019	2,160	7,77
	2020	3,587	8,28
	2021	5,411	8,48
	2022	5,830	10,52
	2023	5,149	8,76
Mangga	2018	15,851	50 (Kg/Pohon)
	2019	26,091	76 (Kg/Pohon)
	2020	27,682	73 (Kg/Pohon)
	2021	30,942	67 (Kg/Pohon)
	2022	29,804	57 (Kg/Pohon)
	2023	40,053	71 (Kg/Pohon)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian produksi dan tingkat produktivitas Cabai Rawit dan Cabai Besar sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif walaupun trendnya terus meningkat. Pada tahun 2018 produksi Cabai Rawit di Kabupaten Situbondo yakni 14.767 ton dengan tingkat produktivitasnya 6,45 ton per hektar, namun mengalami penurunan di tahun 2019 dengan angka produktivitas yang hanya 8.592 ton dan di tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian produktivitas cabai rawit terbesar di kabupaten Situbondo yakni mencapai 28.824 ton. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dengan angka produktivitas hanya 19.151 ton. Untuk komoditas Cabai Besar mengalami penurunan di tahun 2019 yakni 345 ton dan di tahun 2020 menjadi tahun produktivitas tertinggi Cabai Besar di Kabupaten Situbondo yakni mencapai 661 ton dengan tingkat produktivitas 3,43. Sedangkan pada tahun 2023, mengalami penurunan dengan angka produktivitas hanya 442 ton.



Sedangkan untuk Komoditi Bawang Merah, walaupun di tahun 2019 sempat mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2018, namun di tahun 2020 capaian produksi Bawang Merah kembali mengalami peningkatan yakni 3.587 ton dan di tahun 2022 dengan tingkat produktivitas yang juga tumbuh capaian produksi Bawang Merah di Kabupaten Situbondo sebesar 5.830 ton. Namun, di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan produksi Bawang Merah angka produksi Bawang Merah hanya 5.149 ton. Selanjutnya mangga menjadi komoditas buah terbesar di Kabupaten Situbondo dengan capaian produksinya yang relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah produksi mangga mencapai 30.942 ton dan mengalami penurunan di tahun 2022 sehingga angka produksi mangga di Kabupaten Situbondo hanya 29.804 ton. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan angka produksi yakni dengan tingkat produktivitas yang tumbuh capaian produksi mangga di Kabupaten Situbondo sebesar 40.053 ton.

2.1.8.2 Potensi Perkebunan

Komoditi tebu, tembakau, dan Kopi merupakan komoditas unggulan perkebunan yang terus dikembangkan di Kabupaten Situbondo. Luas kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Situbondo yakni 1.780,26 hektar atau sekitar 1,09 % dari luas total Kabupaten Situbondo. Secara umum tanaman perkebunan pada dasarnya dapat dibedakan dalam tanaman semusim (*season plant*) dan tanaman tahunan (*annual plant*). Selain tiga komoditas tersebut secara detail jenis komoditi perkebunan dan sebarannya di Kabupaten Situbondo meliputi:

- a. Komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- b. Komoditi kapuk randu berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- c. Komoditi tembakau berada di Kecamatan: Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih.

Tabel 2.13: Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Tahun 2018-2023

KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
Tembakau	2018	9,028	1,26
	2019	9,552	1,03
	2020	9,629	1,35
	2021	9,870	1.25
	2022	6,883	1,99
	2023	10,322	1.90
Kopi	2018	537	0,21
	2019	587	0,45
	2020	901	0,35



KOMODITAS	TAHUN	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
	2021	826	0,34
	2022	821	1,04
	2023	927	0,35
Tebu	2018	867,463	94,24
	2019	872,629	94,80
	2020	616,594	91,29
	2021	697,566	93,86
	2022	680,136	94,43
	2023	760,095	95,07

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Produksi tembakau di Kabupaten Situbondo mengalami tren positif sepanjang tahun 2018-2023 dan tahun 2023 menjadi tahun dengan jumlah produksi terbanyak yakni 10.322 ton. Namun di tahun 2022 hasil produksi tembakau mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni 6.883. Sedangkan untuk produksi Kopi tahun 2023 menjadi tahun produksi terbesar yakni mencapai 927 ton atau mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Kendatipun demikian produksi kopi di Kabupaten Situbondo dua tahun terakhir juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan hasil produksi sepanjang tahun 2018-2023 juga terjadi pada komoditi tebu di Kabupaten Situbondo. Tingkat penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang hanya mampu menghasilkan produksi tebu 616.594 ton. Namun, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan angka produksi 760.095 ton.

Melihat potensi dan hasil produksi tiga komoditi di atas, Kabupaten Situbondo memiliki peluang untuk pengembangan komoditi sektor perkebunan. Hal tersebut mengingat pada masa mendatang permintaan pasar akan semakin tinggi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo.

2.1.8.3 Potensi Peternakan

Populasi dan hasil produksi peternakan di Kabupaten Situbondo setiap tahunnya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar. Hal tersebut dikarenakan kapasitas peternakan yang ada di Kabupaten Situbondo masih merupakan peternakan perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan sampai saat ini belum ada kawasan khusus yang dijadikan sebagai area pengelolaan peternakan. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat Situbondo akan daging, telur dan susu sampai dengan saat ini kebutuhan sapi masih dipasok dari Pulau Madura melalui Pelabuhan Kalbut Mangum, sedangkan untuk stok ayam bibit dipasok dari Surabaya dan dari kabupaten lainnya. Berikut adalah jumlah populasi setiap jenis peternakan dan hasil produksi ternak sepanjang tahun 2018-2023 di Kabupaten Situbondo.



Tabel 2.14 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Populasi Ternak							
	Sapi Perah	(Ekor)	201	110	85	59	70	50
	Kerbau	(Ekor)	246	229	256	214	225	167
	Kuda	(Ekor)	140	159	162	200	185	162
	Kambing	(Ekor)	40.083	33.856	33.322	31.639	26.716	21.727
	Domba	(Ekor)	52.683	49.153	49.798	49.007	43.078	42.295
	Ayam Buras	(Ekor)	369.160	614.353	380.028	341.734	324.271	323.837
	Ayam Ras Pedaging	(Ekor)	25.500	34.375	55.200	68.411	1.043.417	1.039.690
	Ayam Ras Petelur	(Ekor)	1.132.706	1.126.457	1.674.911	1.264.642	60.495	55.502
	Itik	(Ekor)	60.109	46.492	42.060	41.472	36.032	26.634
	Entok	(Ekor)	18.791	15.224	15.145	16.570	15.084	16.384
2	Jumlah Produksi Ternak							
	Daging Sapi	(Ton)	1,903	1,941	1,782	2,117	1,928	2,163
	Daging Kambing/ Domba	(Ton)	85	404	327	274	112	136
	Daging Ayam	(Ton)	5,899	5,187	5,893	7,011	8,290	11,095
	Telur	(Ton)	965	948	1,055	1,210	1,142	1,097
	Susu	(Liter)	402,245	270,545	194,879	162,637	136,637	121,038

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

2.1.8.4 Potensi Perikanan

Kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang memiliki garis pantai menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor potensial yang masih berpeluang untuk dioptimalkan di Kabupaten Situbondo. Sepanjang tahun 2018 hingga 2023 hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya masih fluktuatif walaupun trendnya mengalami peningkatan. Untuk perikanan tangkap hasil produksi terbesar terjadi pada tahun 2023 yakni 18,772 ton. Sedangkan untuk hasil perikanan budidaya tahun 2023 menjadi produksi terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai 18,483 ton. Tabel di bawah ini merupakan hasil produksi sektor perikanan di Kabupaten Situbondo empat tahun terakhir.



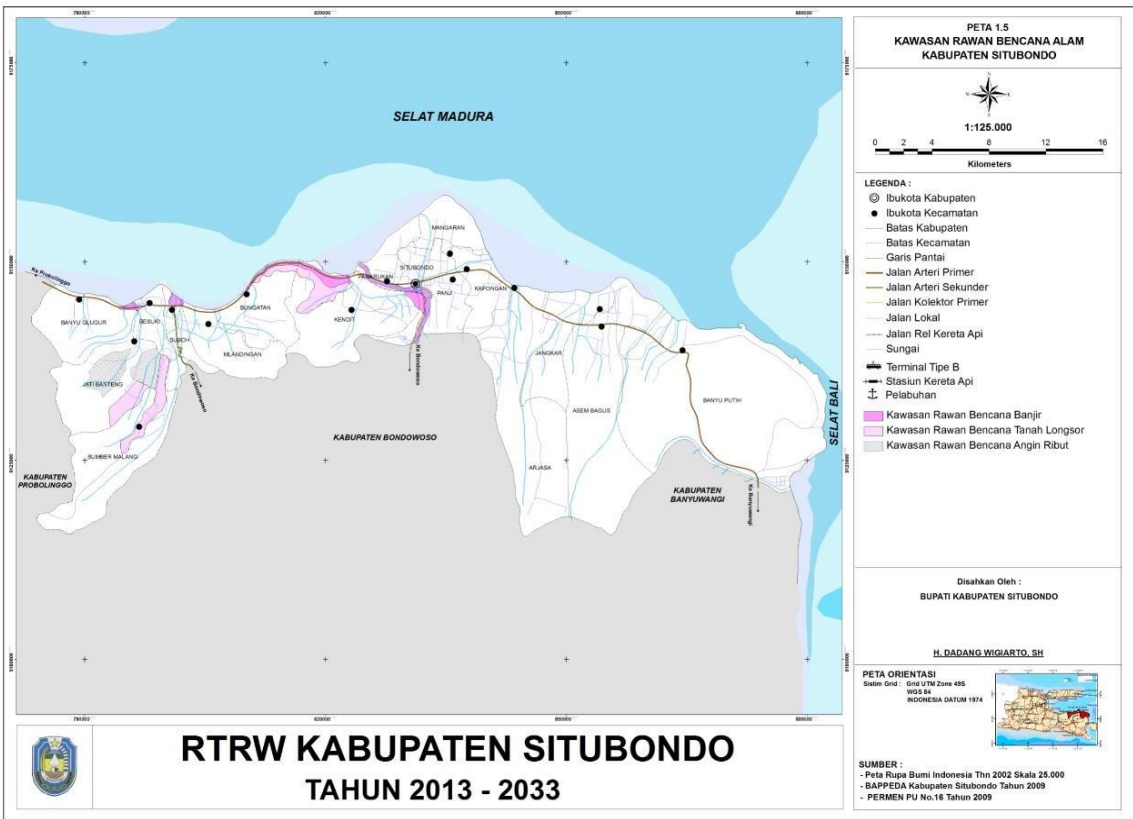
Tabel 2. 15 Produksi Hasil Perikanan Tahun 2018-2023

No	Tahun	Satuan	Hasil Produksi Sektor Perikaan	
			Tangkap	Budidaya
1	2018	Ton	14,294	8,883
2	2019	Ton	14,753	9,869
3	2020	Ton	14,997	10,211
4	2021	Ton	13,097	10,822
5	2022	Ton	18,483	12,600
6	2023	Ton	18,772	18,483

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, 2024

2.1.8.5 Wilayah Rawan Bencana

Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Situbondo dapat dipetakan sebagaimana yang tertuang dalam Peta Rawan Bencana berikut ini:



Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kabupaten Situbondo

Sumber: RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033

Terjadinya bencana pada beberapa daerah di Kabupaten Situbondo dikarenakan perubahan iklim global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Maka dari itu pada tabel dibawah ini dijelaskan potensi bahaya bencana berdasarkan jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Situbondo, dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 2. 16 Potensi Bahaya Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kabupaten Situbondo

No.	Jenis Bencana	Bahaya
1	Banjir Bandang	Tinggi
2	Banjir	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim	Tinggi
5	Gempabumi	Rendah
6	Gunungapi	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
8	Kekeringan	Tinggi
9	Likuefaksi	Tinggi
10	Tanah Longsor	Tinggi
11	Tsunami	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis bencana yang berpotensi bahaya tinggi adalah Banjir Bandang, Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi dan Tanah Longsor. Selain itu, jenis bencana Tsunami dan Gunungapi berpotensi bahaya sedang, sedangkan jenis bencana Gempabumi berpotensi bahaya rendah. Oleh karena hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab dan arah kebijakan, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan tindakan komprehensif untuk penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kejadian bencana hingga pasca bencana serta telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang terdampak bencana sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun penentuan potensi bahaya bencana berdasarkan jenis bencana di Kabupaten Situbondo tersebut berpedoman pada kelas risiko yang termuat dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023. Kelas risiko yang dimaksud merupakan akumulasi dari perhitungan Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C) pada masing-masing jenis bencana. Hal ini dikarenakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko yaitu menggunakan HVC (*Hazard, Vulnerability, and Capacity*). Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana. Data ancaman, data kerentanan, dan data kapasitas dianalisis menggunakan formula perhitungan risiko bencana yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Kelas risiko pada potensi bahaya bencana Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 17 Kelas Risiko Bencana berdasarkan Kelas Kapasitas

No.	Jenis Bencana	Kelas Risiko	Indeks Risiko per Kelas Kapasitas		
			C= 1 (<0.40)	C=2 (0.40-0.80)	C=3 >0.80
1	Gempa Bumi	Rendah	4.00	2.00	1.33
		Sedang	16.00	8.00	5.33
		Tinggi	36.00	18.00	12.00
2	Tsunami	Rendah	4.00	2.00	1.33
		Sedang	26.00	8.00	5.33
		Tinggi	36.00	18.00	12.00
3	Letusan Gunung Api	Rendah	3.00	1.50	1.00
		Sedang	12.00	6.00	4.00
		Tinggi	27.00	13.50	9.00
4	Banjir	Rendah	4.00	2.00	1.33
		Sedang	16.00	8.00	5.33
		Tinggi	36.00	18.00	12.00
5	Tanah Longsor	Rendah	5.00	2.50	1.67
		Sedang	20.00	10.00	6.67
		Tinggi	45.00	22.50	15.00
6	Kekeringan	Rendah	4.00	2.00	1.33
		Sedang	16.00	8.00	5.33
		Tinggi	36.00	18.00	12.00
7	Kebakaran Lahan dan Hutan	Rendah	4.00	2.00	1.33
		Sedang	16.00	8.00	5.33
		Tinggi	36.00	18.00	12.00



No.	Jenis Bencana	Kelas Risiko	Indeks Risiko per Kelas Kapasitas		
			C= 1 (<0.40)	C=2 (0.40-0.80)	C=3 >0.80
8	Cuaca Ekstrem	Rendah	4.00	2.00	1.33
		Sedang	16.00	8.00	5.33
		Tinggi	36.00	18.00	12.00
9	Gelombang Pasang/ Abrasi	Rendah	4.00	2.00	1.33
		Sedang	16.00	8.00	5.33
		Tinggi	36.00	18.00	12.00

Sumber: Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2023

Analisis pada Bahaya (H) dan Kerentanan (V) sebelumnya dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Matriks Bahaya dan Kerentanan Bencana

Tipologi HV	Ancaman Tinggi	Ancaman Sedang	Ancaman Rendah
Kerentanan Tinggi			
Kerentanan Sedang			
Kerentanan Rendah			

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Matriks diatas menjelaskan perkalian antara parameter kelas ancaman dan parameter kelas kerentanan yang selanjutnya disebut dengan tipologi HV. Setiap daerah ancaman yang memiliki informasi kerentanan dan kapasitas maka selanjutnya informasi risiko bencana dapat diperoleh. Hasil kerentanan dan kapasitas didasarkan dengan *element at risk* sehingga tidak semua lokasi memiliki informasi kerentanan dan kapasitas. Element at risk menjadi penentu informasi kerentanan dan kapasitas suatu lokasi. Selanjutnya setelah tipologi HV didapatkan maka hasil tipologi HV disilangkan dengan informasi kapasitas sehingga menghasilkan tipologi risiko seperti pada matrikks berikut:

Tabel 2. 19 Matriks Risiko Bencana

Tipologi HV	HV Tinggi	HV Sedang	HV Rendah
Kapasitas Tinggi			
Kapasitas Sedang			
Kapasitas Rendah			

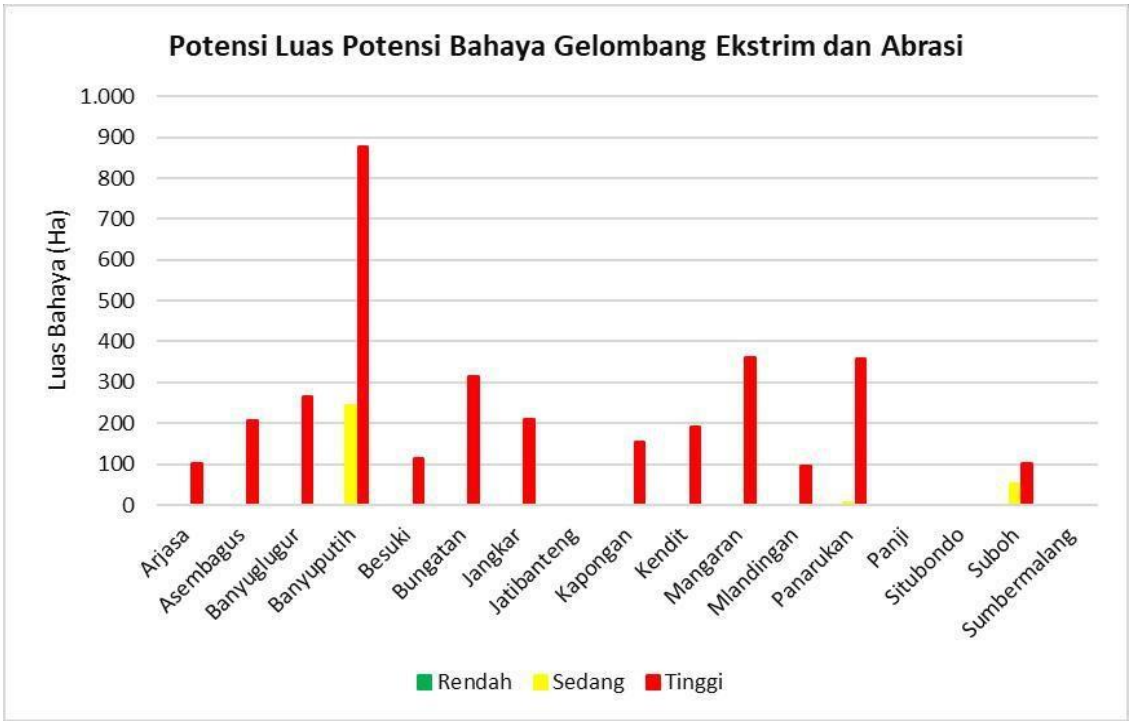
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Situbondo Tahun 2023



Tipologi risiko dibagi menjadi 3 (tiga) warna, yaitu hijau untuk risiko rendah, kuning untuk risiko sedang, dan merah untuk risiko tinggi. Warna tipologi risiko yang digunakan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana.

Secara lebih rinci karakteristik kebencanaan Kabupaten Situbondo dapat ditinjau melalui aspek geografis, geologis, topografis, hidrologis, klimatologis dan demografis. Berdasarkan aspek geografis, Kabupaten Situbondo mempunyai luas 1.638,50 km² atau 163.850 Ha serta mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km. Secara geografis Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara 7°35'–7°44' Lintang Selatan dan 113°30'–114°42' Bujur Timur. Terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 136 Desa. Dari keseluruhan kecamatan yang ada, 13 diantaranya merupakan kecamatan wilayah pesisir.

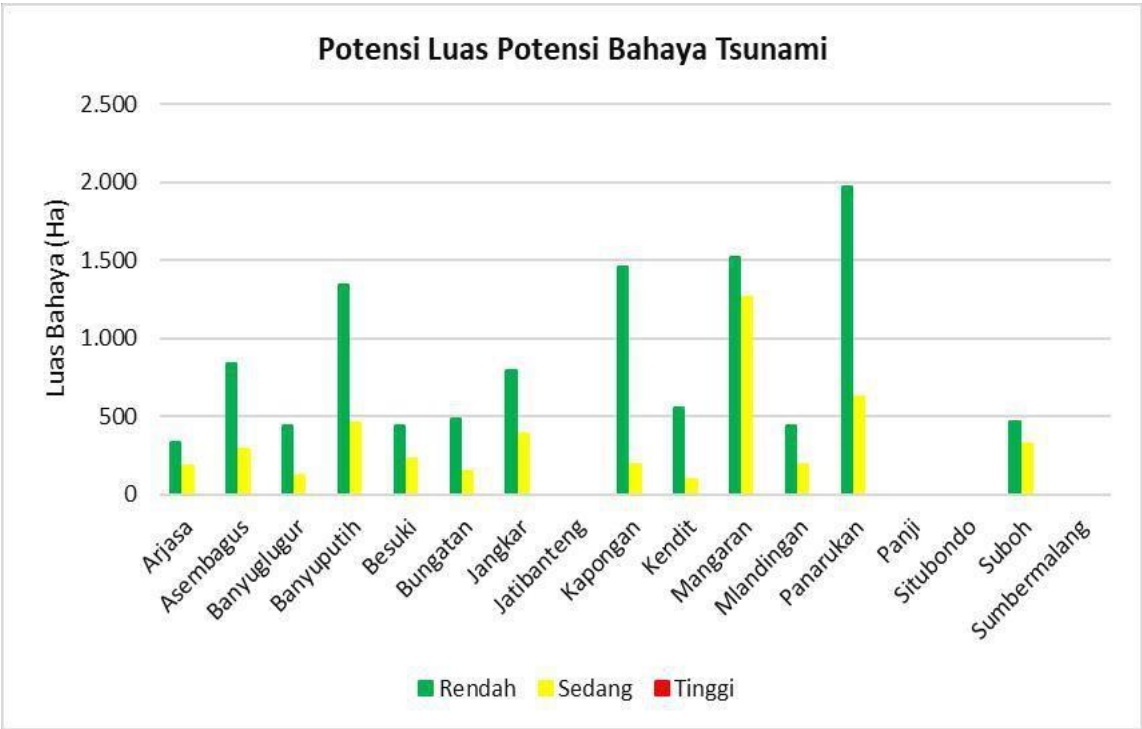
13 Kecamatan yang berada di pesisir mempunyai ancaman bencana berupa gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Situbondo adalah 3.657,33 ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 1.120,23 Ha.



Gambar 2. 11 Potensi Luas Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

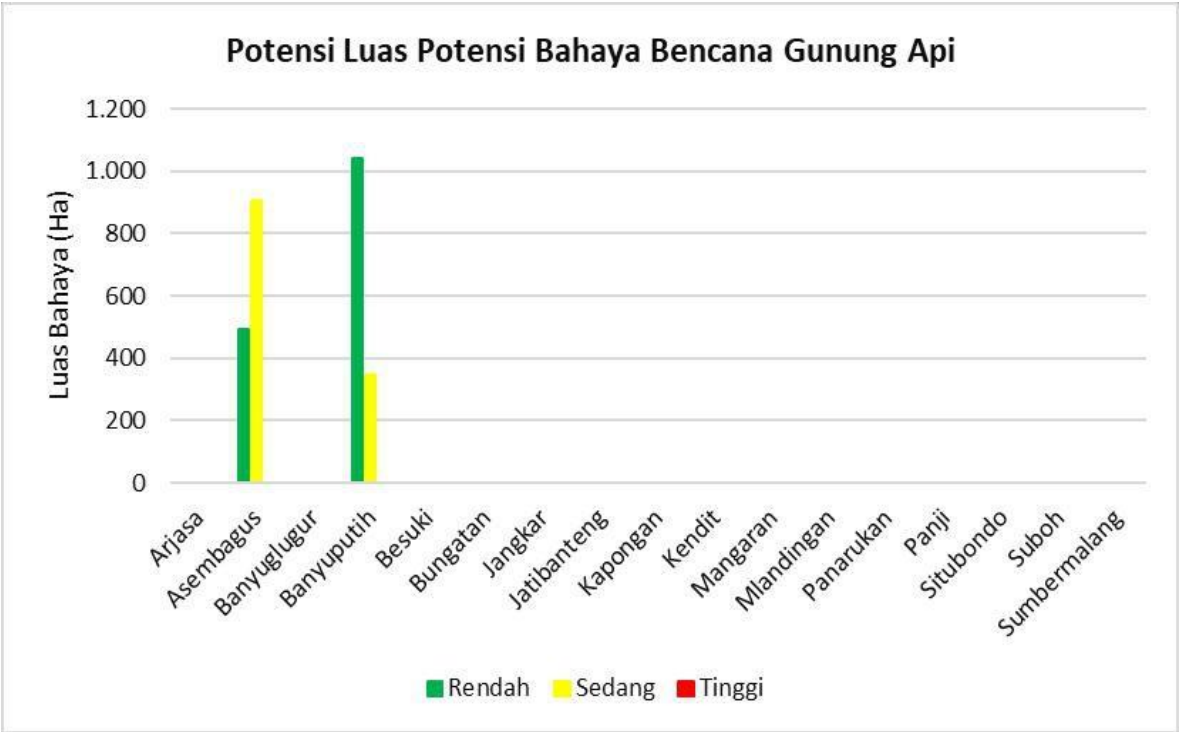
Kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang memiliki wilayah pesisir juga memberikan ancaman bencana berupa bencana tsunami. Luas bahaya tsunami di Kabupaten Situbondo adalah 15.577,65 ha yang berada pada kelas sedang. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Mangaran yaitu seluas 2.788,29 ha dari total luas bahaya keseluruhan.





Gambar 2. 12 Potensi Luas Potensi Bahaya Tsunami
Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

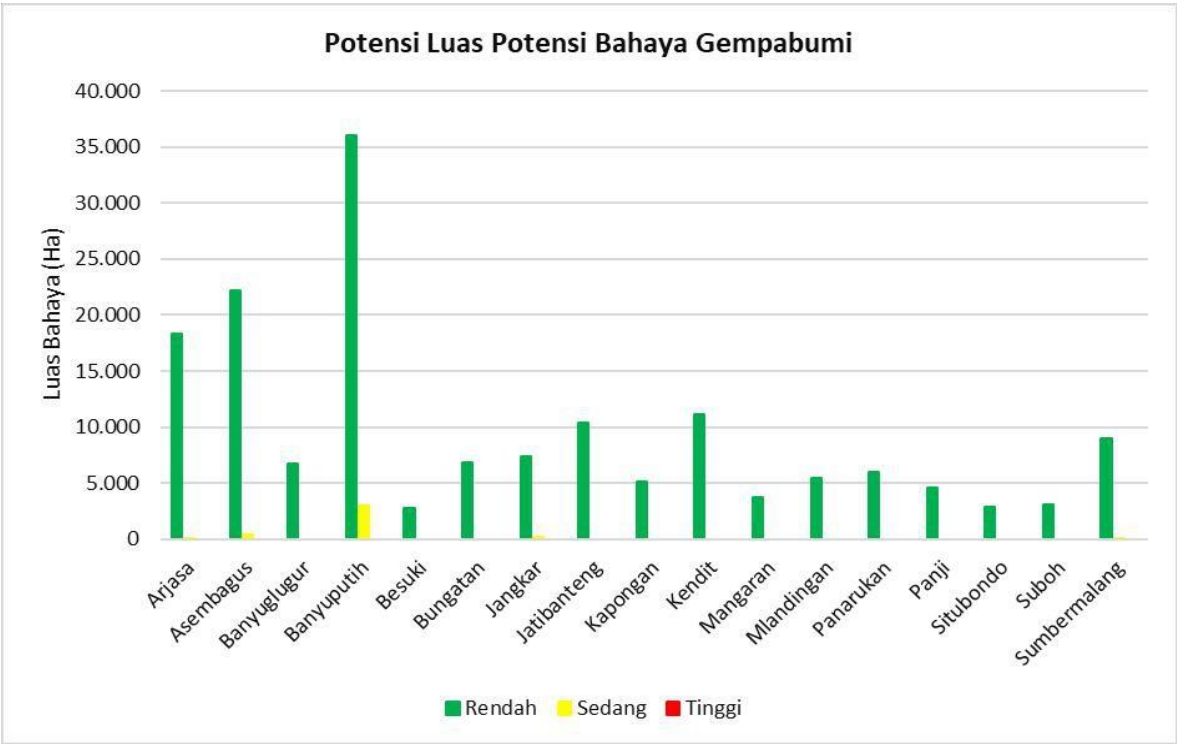
Mengacu Peta KRB Gunungapi Ijen terdapat 2 kecamatan di wilayah Kabupaten Situbondo yang mempunyai potensi bencana Gunungapi. Berdasarkan parameter bahaya Gunung Api, diperoleh potensi luas bahaya di Kabupaten Situbondo adalah 2.790,27 Ha yang berada pada kelas Sedang. Adapun kecamatan yang memiliki potensi bahaya gunung api terbesar adalah Kecamatan Asembagus dengan luas 1.400,94 Ha.



Gambar 2. 13 Potensi Luas Potensi Bahaya Bencana Gunung Api
Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Lebih lanjut jika ditinjau berdasarkan aspek geologi, wilayah Kabupaten Situbondo termasuk daerah yang memiliki aktivitas gempa yang rendah. Sesar yang berada di Kabupaten Situbondo adalah Sesar Wonorejo (yang masih aktif sampai sekarang) dengan dampak bisa menimbulkan gempa magnitudo 5,7 dengan pergerakan kecepatan 0,3 mm/tahun. Selain itu keberadaan sesar aktif di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan juga menimbulkan potensi bahaya di wilayah Kabupaten Situbondo. Keberadaan sesar kambing di utara Kabupaten Situbondo lebih tepatnya terletak di Pulau Kambing, Kabupaten Sampang juga menimbulkan potensi bahaya Gempabumi di Kabupaten Situbondo.

Total luas bahaya bencana Gempabumi di Kabupaten Situbondo adalah 165.504,70 Ha yang berada pada kelas Rendah. Adapun kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 39.100,99 Ha.



Gambar 2. 14 Potensi Luas Potensi Bahaya Gempabumi
Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Keberadaan sesar aktif ini selain memiliki potensi menimbulkan gempa juga dapat menimbulkan kegagalan struktur tanah sehingga tanah tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukung/menopang beban di atasnya (likuefaksi). Banyak pemukiman dan aktivitas masyarakat berada di daerah rawan gempa dan secara tanpa disadari rawan likuefaksi.

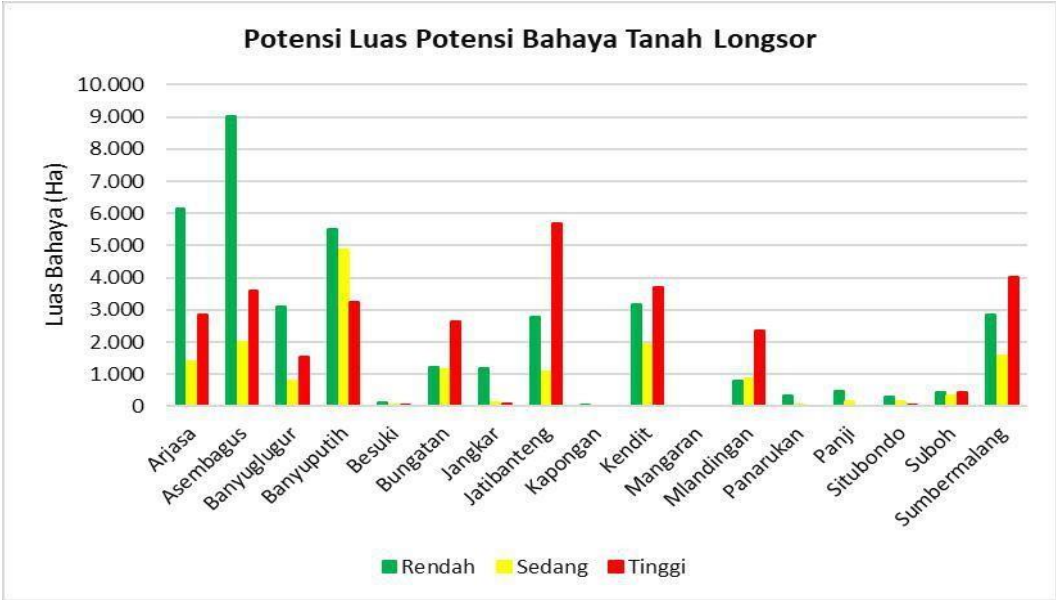
Total luas bahaya bencana likuefaksi di Kabupaten Situbondo adalah 34.878,51 Ha. Adapun kecamatan yang memiliki potensi bahaya likuefaksi terbesar adalah Kecamatan Panarukan dengan luas 5.025,51 Ha.

Tabel 2. 20 Potensi Luas Potensi Bahaya Likuefaksi

No	Kecamatan	Bahaya			
		Luas Bahaya (ha)			Total Luasan
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Arjasa	-	989,28	88,56	1.077,84
2	Asembagus	-	1.101,24	194,85	1.296,09
3	Banyuglugur	-	686,70	90,54	777,24
4	Banyuputih	-	2.138,13	1.145,34	3.283,47
5	Besuki	-	2.446,83	85,14	2.531,97
6	Bungatan	-	1.907,82	108,99	2.016,81
7	Jangkar	-	1.950,12	214,56	2.164,68
8	Jatibanteng	-	728,19	0,00	728,19
9	Kapongan	-	2.720,97	122,85	2.843,82
10	Kendit	-	2.313,99	57,69	2.371,68
11	Mangaran	-	3.542,85	165,96	3.708,81
12	Mlandingan	-	1.335,96	67,05	1.403,01
13	Panarukan	-	4.804,20	221,31	5.025,51
14	Panji	-	2.222,64	0,00	2.222,64
15	Situbondo	-	1.584,18	0,00	1.584,18
16	Suboh	-	1.713,87	122,13	1.836,00
17	Sumbermalang	-	6,57	0,00	6,57
Kabupaten Situbondo		-	32.193,54	2.684,97	34.878,51

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Kemudian jika ditinjau dari aspek topografi, kawasan perbukitan menjadi bagian yang mendominasi Kabupaten Situbondo wilayah Barat dan Timur, karena wilayahnya berada di sepanjang jajaran perbukitan. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki kelerengan >40% yang tergolong sangat curam dan rawan bahaya longsor. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar kawasan di daerah ini rawan bahaya longsor. Luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Situbondo adalah 84.321,27 ha yang berada pada kelas Tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Asembagus yaitu seluas 14.634,00 ha dari total luas bahaya keseluruhan.

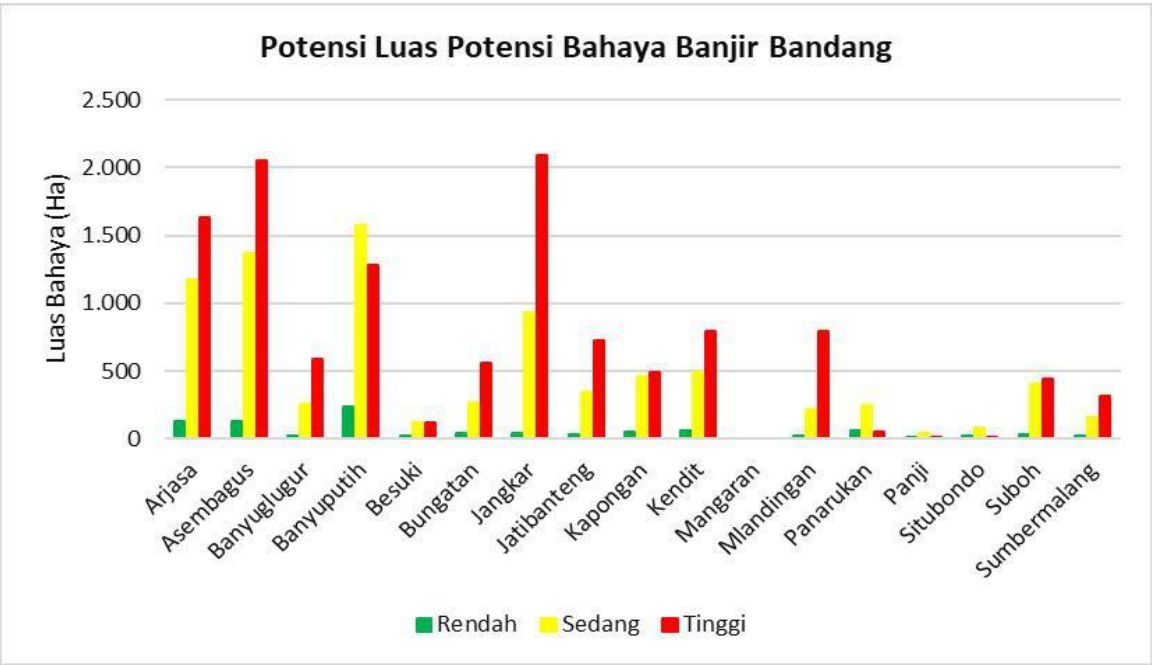


Gambar 2. 15 Potensi Luas Potensi Bahaya Tanah Longsor

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Dan ketika ditinjau secara aspek hidrologi, di wilayah Kabupaten Situbondo terdapat 1 Daerah Aliran Sungai (DAS) kategori sedang, yaitu DAS Sampeyan. Selain itu terdapat 8 DAS dengan kategori kecil, yaitu DAS Lebowang, DAS Deluwang, DAS Pagedungan, DAS Loak Bindung, DAS Jangkar, DAS Banyuputih, Kelokoran, dan DAS Bajul Mati. Sebagian DAS wilayahnya terutama bagian hulunya berada di kabupaten lain yang hilirnya langsung bermuara di Selat Madura.

Keberadaan DAS di Kabupaten Situbondo rentan banjir bandang khususnya ketika terjadi cuaca ekstrem. Tingginya sedimentasi di DAS-DAS ini mengakibatkan kapasitas dan daya tampung air berkurang drastis dan dapat memicu timbulnya kekeringan saat musim kemarau. Total luas bahaya Banjir Bandang di Kabupaten Situbondo adalah 20.970,45 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Asembagus dengan luas 3.551,94 Ha.



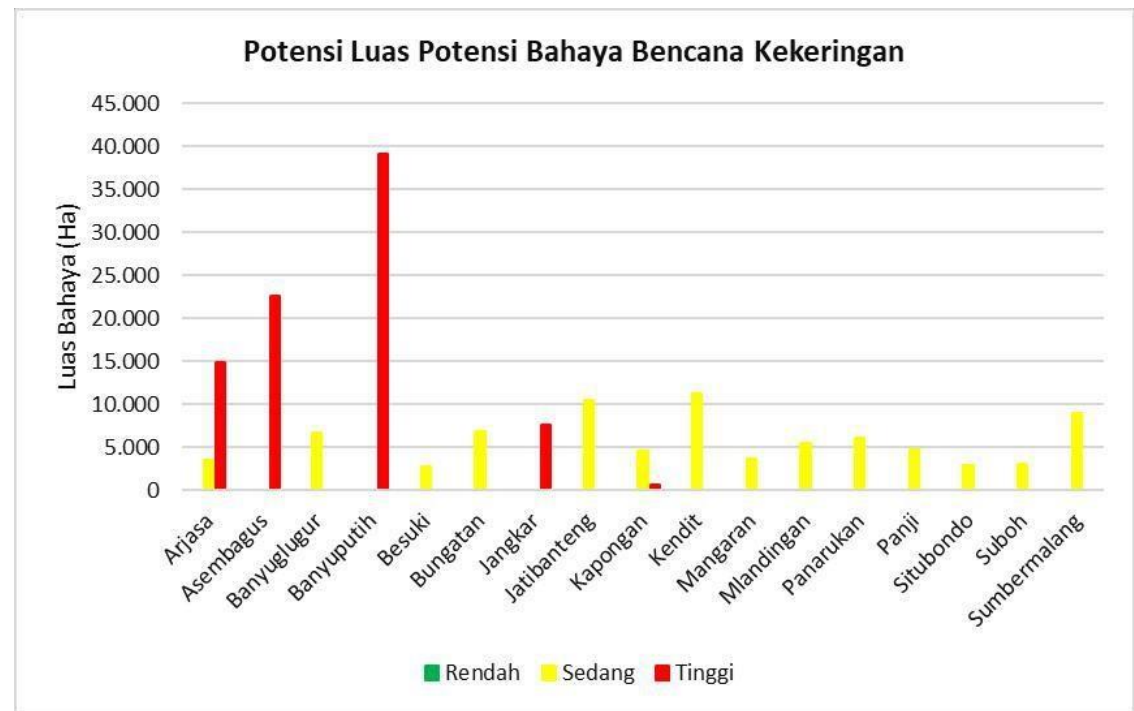
Gambar 2. 16 Potensi Luas Potensi Bahaya Banjir Bandang
Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Tinjauan berdasarkan aspek klimatologi, menunjukan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki iklim tropika basah dan kering, dengan temperatur bervariasi antara 21°C hingga 33°C dan curah hujan yaitu 900– 1300 mm/tahun dengan jumlah hari hujan kurang dari 120 hari hujan per tahun. Kabupaten Situbondo memiliki kelembaban udara berkisar sekitar 78%. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim penghujan antara Desember–Maret dan musim kemarau antara Mei–November.

Situbondo mengalami variasi musiman ekstrim dalam curah hujan bulanan. Bulan dengan curah hujan terbanyak di Situbondo adalah Januari, dengan rata-rata curah hujan 252 milimeter atau kategori menengah. Bulan dengan curah hujan paling sedikit di Situbondo adalah Agustus, dengan curah hujan rata-rata 13 milimeter atau kategori sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan pada saat musim penghujan Kabupaten Situbondo memiliki potensi bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor. Sedangkan pada saat musim kemarau memiliki potensi bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan.

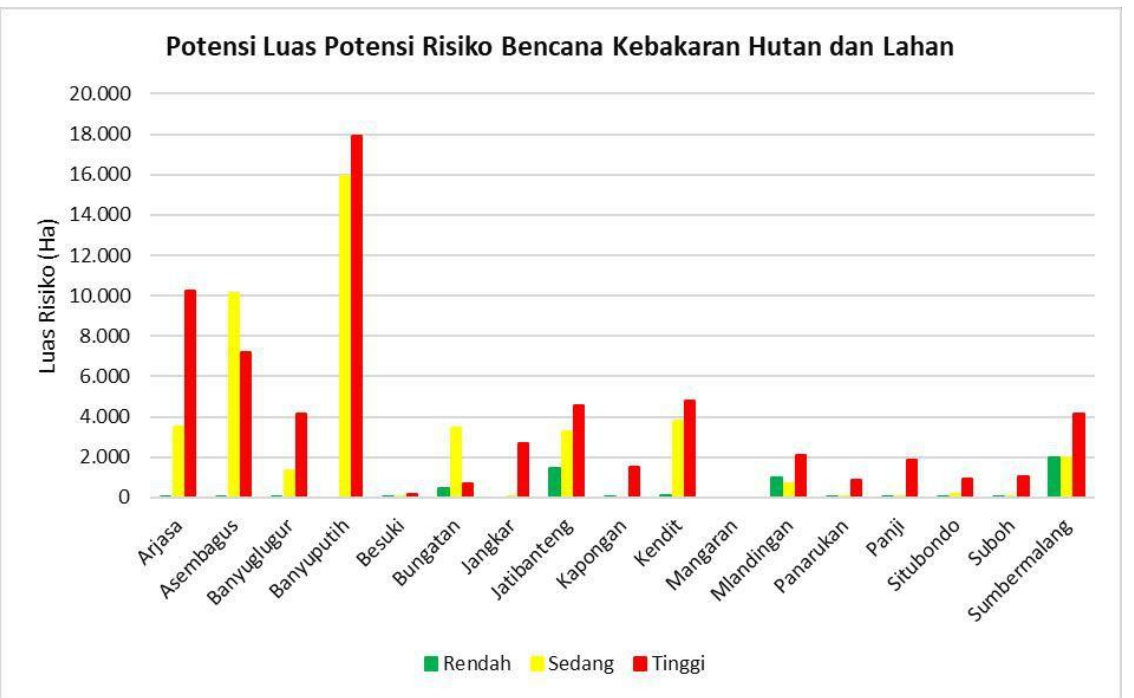


Total luas bahaya kekeringan di Kabupaten Situbondo adalah 165.504,70 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan yang memiliki potensi bahaya Kekeringan terbesar adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 39.100,99 Ha.



Gambar 2. 17 Potensi Luas Potensi Bahaya Bencana Kekeringan
Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

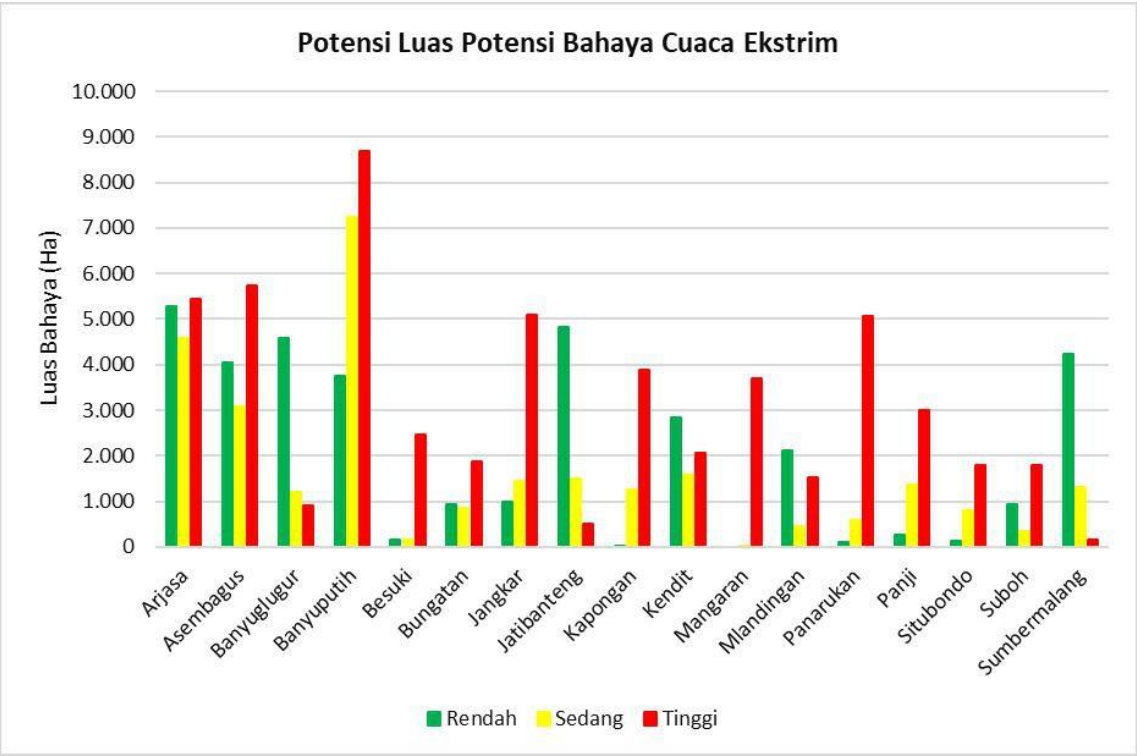
Total luas bahaya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Situbondo total luas bahaya adalah 114.144,25 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan yang memiliki potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan terbesar adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 33.877,69 Ha.



Gambar 2. 18 Potensi Luas Potensi Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Bagian ini membahas vektor angin rata-rata per jam dengan area luas (kecepatan dan arah) di 10 meter di atas permukaan tanah. Angin yang dialami di lokasi tertentu sangat bergantung pada topografi lokal dan faktor lainnya, dan kecepatan dan arah angin seketika sangat bervariasi daripada rata-rata per jam. Rata-rata kecepatan angin per jam di Situbondo mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Masa yang lebih berangin dalam setahun berlangsung selama 5,0 bulan, dari 26 Mei sampai 25 Oktober, dengan kecepatan angin rata-rata lebih dari 11,7 kilometer per jam. Bulan paling berangin dalam setahun di Situbondo adalah Agustus, dengan kecepatan angin rata-rata per jam 14,8 kilometer per jam. Masa angin lebih tenang dalam setahun berlangsung selama 7,0 bulan, dari 25 Oktober sampai 26 Mei. Bulan paling tidak berangin dalam setahun di Situbondo adalah Maret, dengan kecepatan angin rata-rata per jam 9,2 kilometer per jam.

Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Situbondo dengan total luas bahaya adalah 116.615,52 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 19.679,94 Ha.



Gambar 2. 19 Potensi Luas Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Selain ditinjau melalui melalui aspek geografis, geologis, topografis, hidrologis, klimatologis dan demografis, profil wilayah rawan bencana di Kabupaten Situbondo juga dilihat melalui informasi sejarah kebencanaan dan potensi risiko bencana daerah. Informasi risiko bencana serta sejarah kebencanaan di Kabupaten Situbondo dari sejarah kejadian dan dampak bencana, deskripsi penduduk terpapar ancaman bencana, deskripsi potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana, deskripsi potensi luas wilayah terdampak bencana dan informasi tingkat risiko bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana 2019-2023

No	Jenis Ancaman	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka	Hilang	Mengungsi
1	Banjir	31	0	0	0	0
2	Cuaca Ekstrem	248	4	12	0	0
3	Gunung Api	0	0	0	0	0
4	Gelombang pasang dan abrasi	12	0	0	0	0
5	Gempa Bumi	1	0	0	0	0
6	Kebakaran hutan dan lahan	183	0	0	0	0
7	Kekeringan	154	0	0	0	0
8	Tanah longsor	67	0	0	0	0
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Likuefaksi	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Tabel tersebut menunjukkan, di Kabupaten Situbondo telah terjadi 696 kejadian bencana dalam 5 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa dan/atau kerusakan serta kerugian. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan trend meningkat adalah cuaca ekstrem sebanyak 248 kali. Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah cuaca ekstrem, yang menelan korban 4 jiwa meninggal dunia serta kerusakan bangunan dan lain-lain.

Tabel 2. 22 Potensi Penduduk Terpapar

NO	Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir Bandang	106,845	2,126	857	701	Sedang
2	Banjir	66,633	1,139	751	294	Sedang
3	Cuaca Ekstrem	664,959	206,883	148,404	5,376	Sedang
4	Gelombang Ekstrem	40,122	1,064	386	200	Rendah
5	Gempabumi	666,741	206,883	5,376	148,404	Sedang
6	Gunungapi	6,338	82	18	12	Rendah
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-	-
8	Kekeringan	666,741	206,883	148,404	5,376	Sedang
9	Likuefaksi	411,679	150,322	104,090	3,611	Sedang
10	Tanah Longsor	77,605	7,331	1,647	950	Sedang
11	Tsunami	132,858	53,209	38,787	2,329	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas Sedang, kecuali pada Gelombang Ekstrem dan Gunungapi berada pada kelas Rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh gempabumi dan kekeringan sebanyak 666.741 jiwa, Cuaca Ekstrem 664.959 jiwa, dan Likuefaksi 411.679 jiwa. Analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.



Tabel 2. 23 Data Potensi Kerusakan Lingkungan dan Kerugian akibat bencana

NO	Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir Bandang	28,832.56	1,384.67	30,217.24	Sedang	6,145.79	Tinggi
2	Banjir	317,743.41	190.49	317,933.90	Sedang	408.54	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	282,006.39	46,680.22	328,686.60	Sedang	-	-
4	Gelombang Ekstrim	28,097.03	3,169.30	31,266.33	Sedang	84.35	Tinggi
5	Gempabumi	17,917.04	1,725.92	19,642.96	Sedang	-	-
6	Gunungapi	6,080.00	61.50	6,141.50	Sedang	2,086.56	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	5,951.62	5,951.62	Tinggi	20,772.00	Tinggi
8	Kekeringan	-	11,914.22	11,914.22	Tinggi	75,324.45	Tinggi
9	Likuefaksi	79,282.00	1,369.18	80,651.18	Sedang	-	-
10	Tanah Longsor	7,438.90	42,679.27	50,118.17	Tinggi	38,724.15	Tinggi
11	Tsunami	2,437.85	1,886.73	4,324.58	Sedang	6,453.19	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelas kerugian Sedang ada pada bahaya Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Gempa Bumi, Gunungapi, Likuefaksi dan Tsunami, sedangkan jenis bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan serta Tanah Longsor memiliki kelas kerugian tinggi.

Tabel 2. 24 Potensi Luas Wilayah Terdampak Bencana

NO	Bencana	Rekapitulasi Bahaya				
		Luas Bahaya (ha)			Total Luasan	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir Bandang	921.24	8,116.74	11,941.29	20,979.45	Tinggi
2	Banjir	2,018.70	3,128.76	1,190.16	6,337.62	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	35,197.83	27,733.86	53,683.83	116,615.52	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim	-	301.68	3,355.65	3,657.33	Tinggi
5	Gempabumi	161,797.06	3,707.64	-	165,504.70	Rendah
6	Gunungapi	1,536.48	1,253.79	0.00	2,790.27	Sedang
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	23,533.29	48,922.02	42,991.02	115,446.33	Tinggi
8	Kekeringan	-	80,755.40	84,749.29	165,504.70	Tinggi
9	Likuefaksi	-	32,193.54	2,684.97	34,878.51	Tinggi
10	Tanah Longsor	37,528.65	16,619.40	30,173.22	84,321.27	Tinggi
11	Tsunami	11,066.04	4,511.61	-	15,577.65	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas, Rekapitulasi bencana berdasarkan level kelas bahaya di Kabupaten Situbondo adalah :

- Tinggi : Bencana Banjir Bandang, Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi, dan Tanah Longsor
- Sedang: Bencana Gunungapi, dan Tsunami
- Rendah: Bencana Gempabumi



Kondisi ini wajib menjadi pertimbangan di Kabupaten Situbondo untuk memasukan program prioritas dan anggaran penanggulangan bencana khususnya untuk tingkat bahaya tinggi.

Tabel 2. 25 Data Tingkat Risiko Bencana

NO	Bencana	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luasan	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir Bandang	873.36	18,057.06	838.98	19,769.40	Sedang
2	Banjir	2,007.81	3,975.21	128.70	6,111.72	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	53,695.08	37,350.90	8,558.01	99,603.99	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim	3.33	3,190.86	301.77	3,484.98	Sedang
5	Gempabumi	151,987.06	13,498.83	18.81	165,504.70	Sedang
6	Gunungapi	1,387.62	1,285.02	0.00	2,672.64	Sedang
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	4,999.22	44,242.75	64,902.27	114,144.25	Tinggi
8	Kekeringan	941.40	85,503.90	79,059.40	165,504.70	Tinggi
9	Likuefaksi	26,253.99	5,493.78	2,978.55	34,726.32	Tinggi
10	Tanah Longsor	28,552.41	45,216.45	9,809.64	83,578.50	Tinggi
11	Tsunami	10,746.27	4,625.10	4.23	15,375.60	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas, Rekapitulasi bencana berdasarkan level kelas risiko di Kabupaten Situbondo adalah :

- Tinggi : Bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi, dan Tanah Longsor
- Sedang: Bencana Banjir Bandang, Gunungapi, Gelombang Ekstrim, Gempabumi, dan Tsunami
- Rendah: -.

Dari penjelasan diatas, selanjutnya dapat dilaksanakan identifikasi risiko bencana terkait aspek tata ruang. Perencanaan pembangunan dan kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat meningkatkan kerentanan dan risiko bencana. Pemanfaatan daerah resapan dan tangkapan air dapat mengakibatkan ketika musim hujan air terhambat meresap ke dalam tanah dan membentuk genangan sehingga akhirnya terjadi banjir. Pembuangan sampah di sepanjang daerah aliran sungai atau cemaran dari limbah pabrik dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan, rusaknya ekosistem sungai, menurunkan kualitas air tanah dan memicu risiko banjir.

Alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi peruntukan lain seperti pemukiman atau bangunan infrastruktur berpotensi mengurangi peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi cadangan air dalam tanah juga dapat berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan kerentanan ekologis.

2.1.9 Demografi

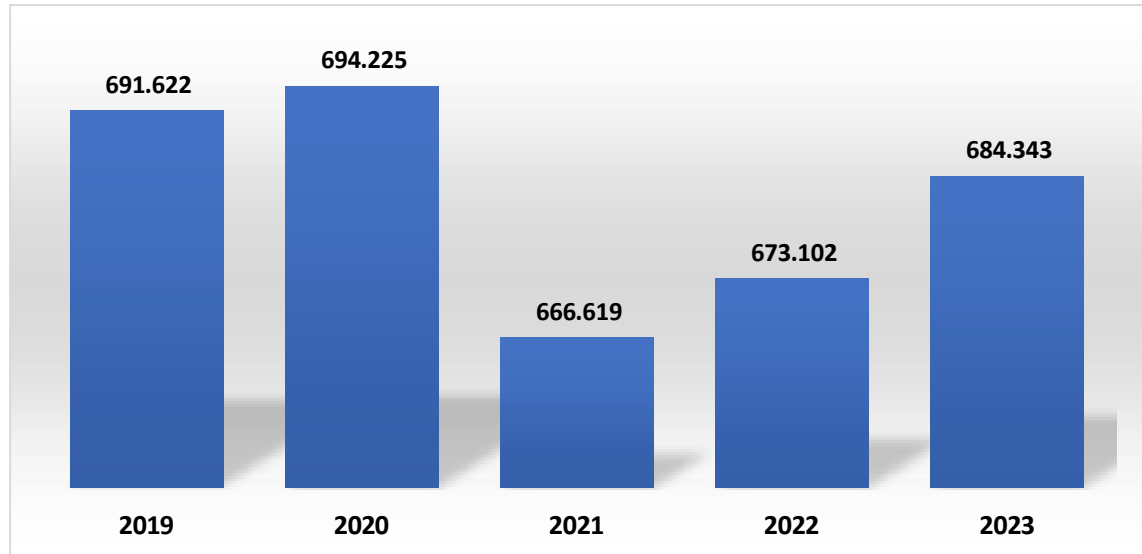
Ditinjau secara demografi, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2022 adalah 673,102 jiwa. Merujuk pada kajian risiko bencana kabupaten/kota tahun 2024-2028, rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 11 jenis ancaman di Kabupaten Situbondo berada pada kelas **Sedang**, kecuali pada Gelombang Ekstrim dan Gunungapi berada



pada kelas **Rendah**. Potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, dan likuefaksi.

2.1.10 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2023 sebanyak 684.343 jiwa dan mengalami kenaikan 11.241 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yang mencapai angka 673.102 jiwa. Berikut merupakan grafis jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir:



Gambar 2. 20 Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan grafis di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di tahun 2021 merupakan jumlah penduduk terendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023 yang trendnya fluktuatif pada setiap tahunnya. Secara komposisi penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 yang berjenis kelamin Perempuan yakni 349.645 jiwa atau lebih banyak jika dibandingkan yang berjenis kelamin Laki Laki yang hanya berjumlah 334.698 jiwa. Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Situbondo berada di Kecamatan Panji dengan jumlah penduduk sebesar 67.000 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jatibanteng yakni 22.713 jiwa. Berikut adalah sebaran penduduk Kabupaten Situbondo di tujuh belas kecamatan.

Tabel 2. 26 Jumlah Penduduk Per kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sumbermalang	14.066	14.493	28.559
2	Jatibanteng	11.352	11.550	22.902
3	Banyuglugur	11.817	12.167	23.984
4	Besuki	32.194	33.287	65.481
5	Suboh	13.991	14.589	28.580

No	Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
6	Mlandingan	11.838	12.555	24.393
7	Bungatan	12.570	13.315	25.885
8	Kendit	14.633	15.266	29.899
9	Panarukan	29.003	30.081	59.084
10	Situbondo	23.754	25.139	48.893
11	Panji	32.981	34.434	67.415
12	Mangaran	16.976	18.012	34.988
13	Kapongan	19.315	20.431	39.746
14	Arjasa	21.299	22.002	43.301
15	Jangkar	19.382	20.541	39.923
16	Asembagus	24.048	25.577	49.625
17	Banyuputih	25.479	26.206	51.685
Kabupaten Situbondo		334.698	349.645	684.343

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Selanjutnya, untuk komposisi penduduk Kabupaten Situbondo dilihat dari kelompok umur sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten SitubondoTahun 2019-2023

Tahun 2019			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0–4	18.730	17.775	36.505
5–9	23.377	22.221	45.598
10–14	24.914	23.279	48.193
15–19	26.988	25.794	52.782
20–24	25.584	24.466	50.050
25–29	23.626	24.024	47.650
30–34	23.313	24.223	47.536
35–39	26.075	28.658	54.733
40–44	26.096	28.020	54.116
45–49	26.366	26.958	53.324
50–54	24.274	26.027	50.301
55–59	21.701	22.969	44.670
60–64	17.167	18.212	35.379
65 – 69	14.278	13.972	28.250
70 – 74	8.511	10.026	18.537
>= 75	9.599	14.399	23.998
Jumlah	340.599	351.023	691.622



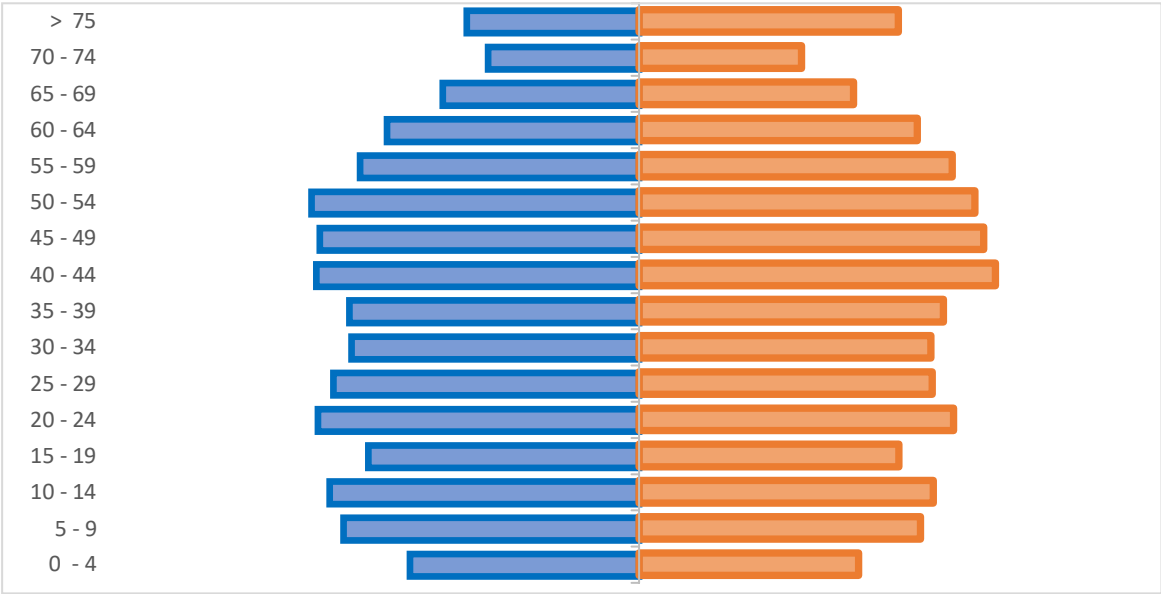
Tahun 2020			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	18.906	17.993	36.899
5-9	23.121	22.183	45.304
10-14	24.897	23.244	48.141
15-19	26.667	25.401	52.068
20-24	26.536	25.538	52.074
25-29	23.959	24.428	48.387
30-34	23.949	24.594	48.543
35-39	25.725	28.022	53.747
40-44	26.686	28.382	55.068
45-49	25.847	27.041	52.888
50-54	24.881	25.500	50.381
55-59	20.414	22.317	42.731
60-64	18.133	19.772	37.905
65 - 69	13.185	13.510	26.695
70 - 74	8.676	10.686	19.362
>= 75	9.049	14.983	24.032
Jumlah	340.631	353.594	694.225
Tahun 2021			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	18.747	18.081	36.828
5-9	22.854	21.688	44.542
10-14	24.670	23.145	47.815
15-19	25.278	24.070	49.348
20-24	26.080	25.244	51.324
25-29	23.092	22.555	45.647
30-34	21.651	22.368	44.019
35-39	23.632	25.492	49.124
40-44	24.424	26.442	50.866
45-49	24.710	26.491	51.201
50-54	24.232	24.866	49.098
55-59	20.072	22.378	42.450
60-64	17.388	18.974	36.362
65 - 69	13.145	13.913	27.058
70 - 74	8.589	10.289	18.878
>= 75	8.279	13.780	22.059
Jumlah	326.843	339.776	666.619



Tahun 2022			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	15.651	15.004	30.655
5-9	22.601	21.477	44.078
10-14	23.705	22.523	46.228
15-19	19.967	19.042	39.009
20-24	24.388	23.893	48.281
25-29	23.411	22.446	45.857
30-34	22.026	22.343	44.369
35-39	22.168	23.318	45.486
40-44	24.735	27.299	52.034
45-49	24.486	26.389	50.875
50-54	25.178	25.745	50.923
55-59	21.455	24.032	45.487
60-64	19.453	21.344	40.797
65 - 69	15.161	16.468	31.629
70 - 74	11.665	12.482	24.147
>= 75	13.300	19.947	33.247
Jumlah	329.350	343.752	673.102
Tahun 2023			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	19.938	19.094	39.032
5-9	22.786	21.677	44.463
10-14	23.727	22.570	46.297
15-19	22.134	21.074	43.208
20-24	24.766	24.217	48.983
25-29	23.384	22.460	45.844
30-34	22.008	22.373	44.381
35-39	22.196	23.306	45.502
40-44	24.708	27.302	52.010
45-49	24.421	26.384	50.805
50-54	25.034	25.702	50.736
55-59	21.261	23.910	45.171
60-64	19.129	21.260	40.389
65 - 69	14.862	16.292	31.154
70 - 74	11.410	12.393	23.803
>= 75	12.934	19.631	32.565
Jumlah	334.698	349.645	684.343

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024





Gambar 2.21 Piramida Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Dilihat dari piramida penduduk di atas, struktur umur penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2023 didominasi usia remaja dan usia produktif yakni rentang umur 15 tahun hingga 64 tahun yang mencapai 467.029 jiwa atau 68,24% dari total penduduk di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023. Adapun jumlah penduduk berusia 0-14 tahun hanya 129.792 jiwa atau lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk berusia 65 tahun ke atas yang hanya berjumlah 87.522 jiwa. Struktur umur Di Kabupaten Situbondo tahun 2023 memiliki kelebihan dan berpeluang untuk meningkat daya saing daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia produktif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu tantangan pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengelola penduduk yang usia produktif agar dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kinerja pembangunan dimasa mendatang.

Berdasarkan sebaran kecamatan, laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020–2023 tertinggi terjadi pada Kecamatan Panji sebesar 2,32%, sedangkan kecamatan yang terendah adalah kecamatan Asembagus yakni 1,07%. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2023:

Tabel 2. 28 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Situbondo

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%)
Sumbermalang	14.066	14.493	28.559	1,79
Jatibanteng	11.352	11.550	22.902	1,62
Banyuglugur	11.817	12.167	23.984	1,37
Besuki	32.194	33.287	65.481	1,39
Suboh	13.991	14.589	28.580	1,76
Mlandingan	11.838	12.555	24.393	1,92
Bungatan	12.570	13.315	25.885	1,84



Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%)
Kendit	14.633	15.266	29.899	1,61
Panarukan	29.003	30.081	59.084	1,96
Situbondo	23.754	25.139	48.893	1,23
Mangaran	16.976	18.012	34.988	1,96
Panji	32.981	34.434	67.415	1,25
Kapongan	19.315	20.431	39.746	1,93
Arjasa	21.299	22.002	43.301	2,07
Jangkar	19.382	20.541	39.923	2,32
Asembagus	24.048	25.577	49.625	1,07
Banyuputih	25.479	26.206	51.685	1,90
Kabupaten Situbondo	334.698	349.645	684.343	1,67

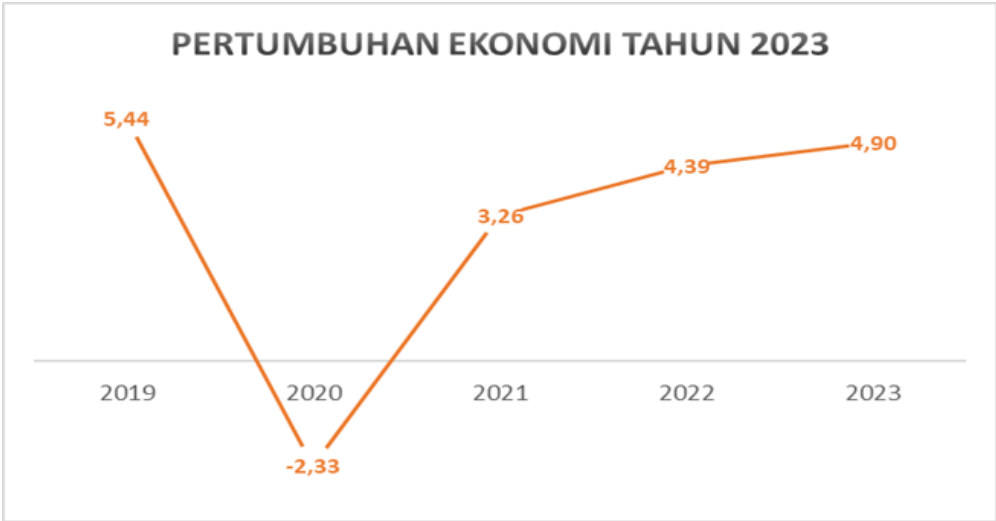
Sumber: LKPJ Kabupaten Situbondo, Tahun 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada Tahun 2019 – 2023 :

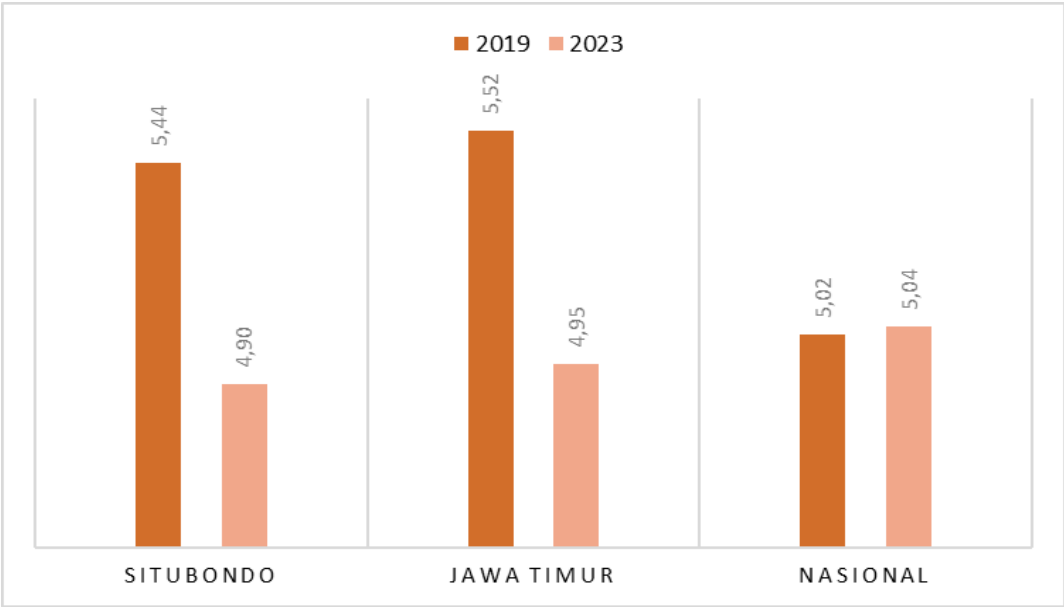


Gambar 2. 22: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuatif dan cenderung konstan. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Sebesar 5,44 dan Tahun 2023 menjadi 4,90. Pada tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan tren pertumbuhan. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -2,33 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak awal Maret 2020. Pembatasan sosial untuk meredam penyebaran virus Covid-19 selama masa pandemi berdampak pada aktivitas bisnis dan perekonomian. Pada tahun 2021, pemerintah berhasil meningkatkan kinerja ekonomi Kabupaten Situbondo dengan pertumbuhan sebesar 3,26 persen, yang terus meningkat hingga mencapai 4,90 persen pada tahun 2023.

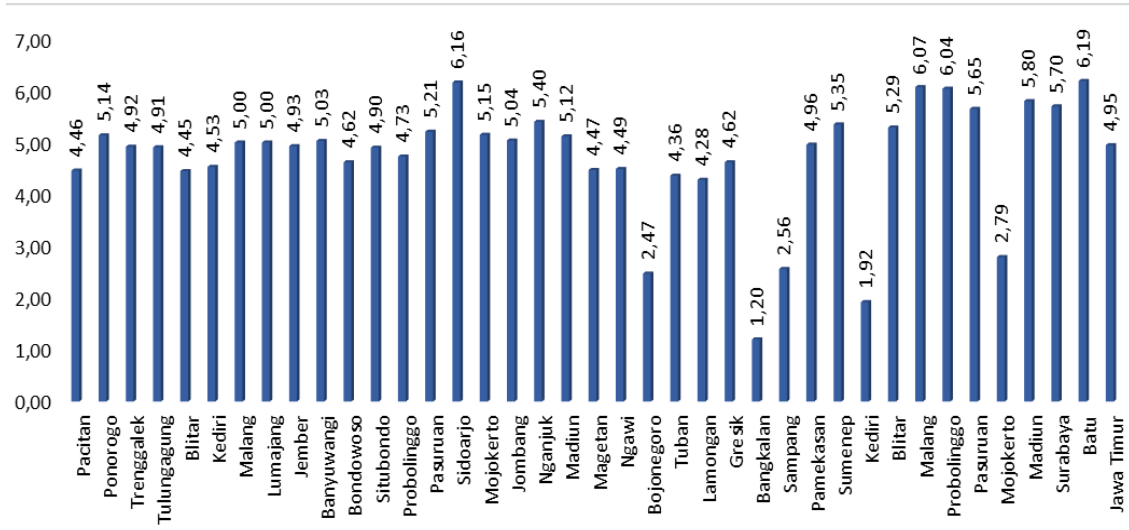
Pulihnya dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi selama tahun 2023 turut mendorong pertumbuhan ekonomi Situbondo. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan terbesar dengan 9,87 persen, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar 6,13 persen. Satu sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2022 namun kembali tumbuh positif pada tahun 2023, yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Sektor Informasi dan Komunikasi tetap menjadi sektor dengan pertumbuhan yang sangat baik, sejalan dengan meningkatnya digitalisasi. Pertumbuhan ekonomi Situbondo selama tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pendukungnya, terutama sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar.



Gambar 2. 23: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo tahun 2023 berada di bawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Kabupaten / Kota di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo termasuk dalam 38 Kabupaten Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Rata-Rata Jawa Timur dengan peringkat 12 Pertumbuhan Ekonomi terendah di Jawa Timur.



Gambar 2. 24: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

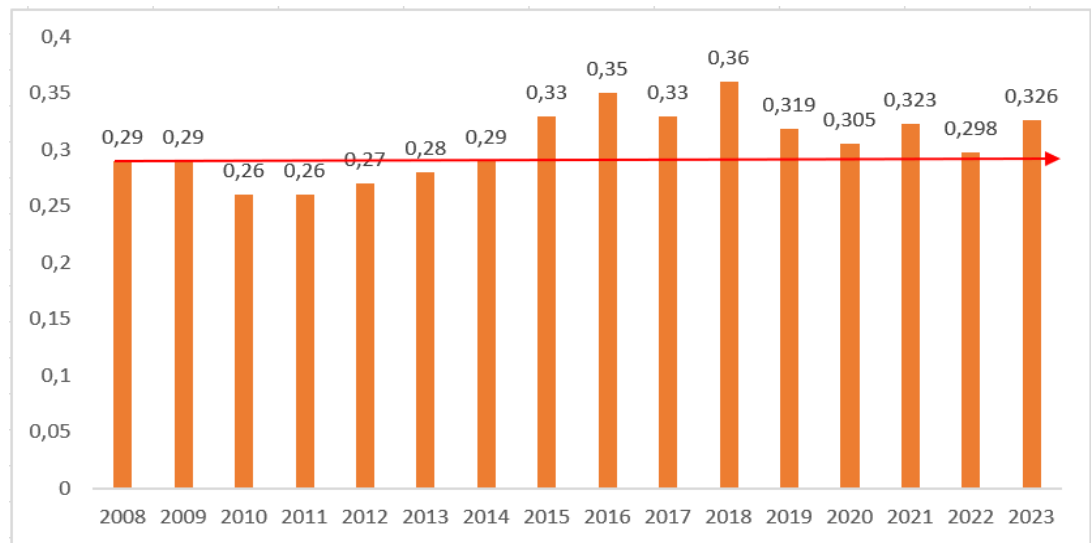
Urusan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Situbondo menarik perhatian karena menggambarkan sebuah dinamika yang kompleks namun berpotensi untuk terus ditingkatkan. Secara umum, terdapat tren positif yang dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, **Pendapatan Ekonomi (PE) masyarakat terus mengalami peningkatan**, menunjukkan adanya kemajuan dalam perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan **PDRB, baik perkapita (ADHK) maupun absolut (ADHB), yang menunjukkan tren kenaikan** yang menggembirakan. Namun, di balik tren positif tersebut, masih terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari **Gini rasio**. Meskipun mengalami tren penurunan yang stabil, namun perlu upaya lebih lanjut untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang masih cukup besar. Selain itu, meskipun **persentase penduduk miskin mengalami penurunan** yang positif, namun **angka kemiskinan** masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak terkait. Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi harus diiringi dengan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif, serta program-program yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Situbondo dapat terus mengalami kemajuan yang berkelanjutan menuju kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

2.2.1.2 Indeks Gini

Indeks Gini adalah alat penting dalam menganalisis ketimpangan ekonomi di suatu negara atau wilayah dengan mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan menyimpang dari pemerataan sempurna. Dengan rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan total dan 1 menandakan ketimpangan ekstrem, Indeks Gini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana kekayaan atau pendapatan tersebar di kalangan masyarakat. Skor yang lebih rendah

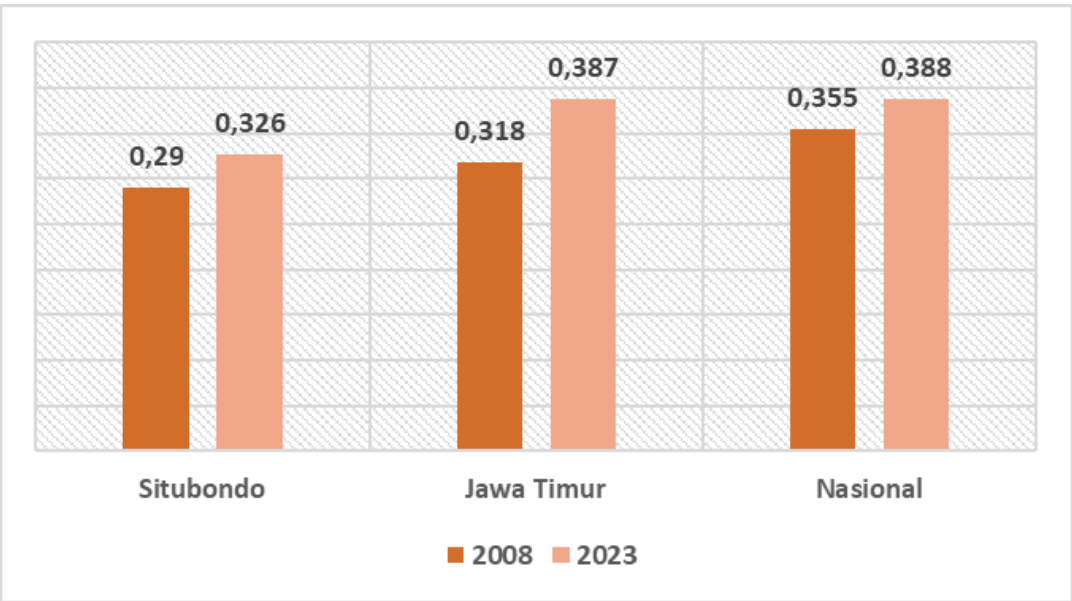
menunjukkan distribusi yang lebih adil dan merata, sedangkan skor yang lebih tinggi mengindikasikan ketimpangan yang lebih besar, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Berikut ini Indeks Gini Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023:



Gambar 2. 25: Indeks Gini Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Indeks Gini sendiri awal data dimulai tahun 2008, dengan angka gini rasio 0,29 tahun 2008 dan meningkat menjadi 0,326 di tahun 2023. Angka menunjukkan adanya peningkatan 0,036 yang artinya ketimpangan semakin meningkat dari tahun 2008 hingga 2023. Angka ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2018 dengan ketimpangan mencapai 0,36.

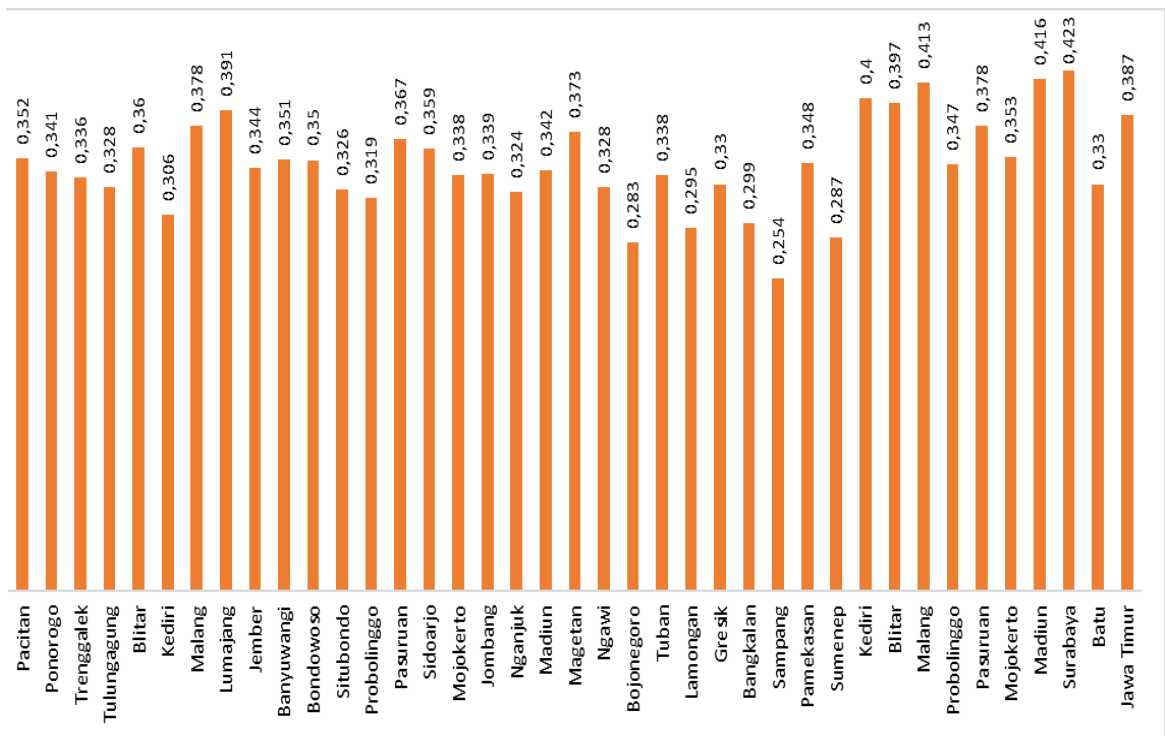


Gambar 2. 26: Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional 2008 dan 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Situbondo Tahun 2008 sebesar 0,29 sedangkan Jawa Timur 0,318 dan Tahun 2023 Indeks Gini Kabupaten Situbondo sebesar 0,326 dan Jawa Timur 0,387. Data ini menunjukkan bahwa Pemerataan di Kabupaten Situbondo lebih baik dibandingkan rata-rata pemerataan di Jawa Timur secara umum.





Gambar 2. 27 Indeks Gini Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Pemerataan ekonomi dan ketimpangan (disparitas atau ketidaksetaraan) adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks distribusi kekayaan dan pendapatan di suatu masyarakat. Pemerataan ekonomi merujuk pada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan peluang ekonomi di antara anggota masyarakat. Pemerataan ekonomi diharapkan menciptakan kondisi di mana manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh populasi. Ketimpangan ekonomi mencerminkan sejauh mana ada perbedaan signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan peluang ekonomi. Ketimpangan bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk pendapatan individu, kekayaan keluarga, dan akses terhadap layanan dasar.

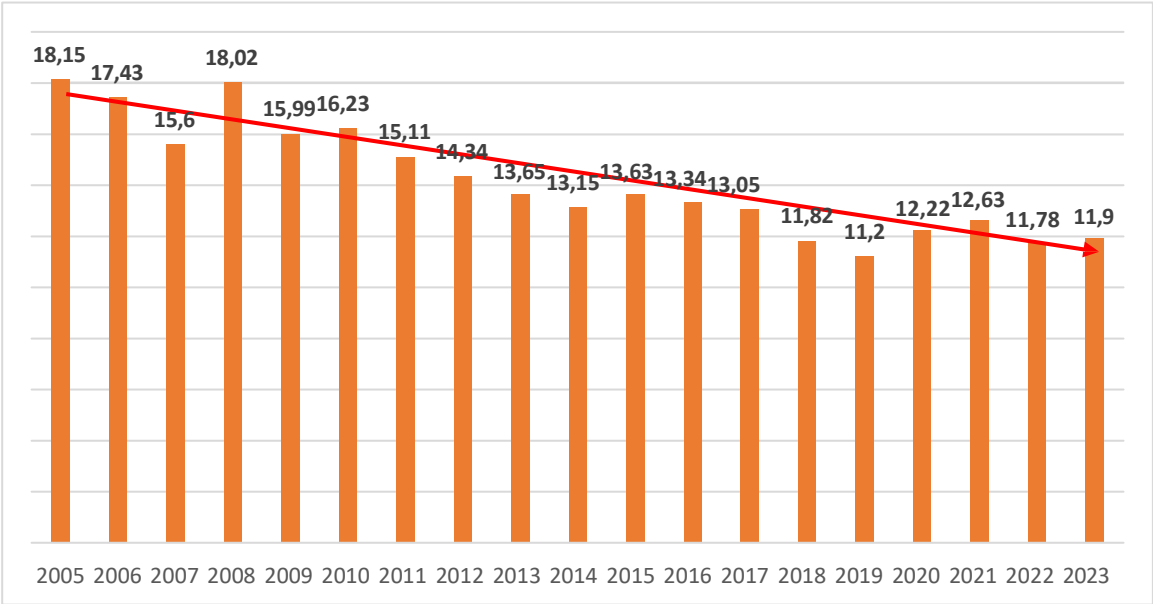
Selain itu, ketimpangan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik **pemanfaatan lahan**. Hal ini terjadi karena ketimpangan dalam penguasaan lahan dapat menimbulkan persaingan dan perselisihan antara kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap lahan tersebut. Konflik pemanfaatan lahan dapat memperburuk ketimpangan. Hal ini terjadi karena konflik dapat menyebabkan kerusakan lahan, hilangnya produktivitas lahan, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Untuk mengatasi konflik pemanfaatan lahan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan lahan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti reforma agraria, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal lain yang mempengaruhi Ketimpangan adalah **daya beli** masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin memiliki pendapatan yang rendah, sehingga mereka tidak mampu membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Penurunan daya beli masyarakat dapat memperburuk ketimpangan. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dan keterbelakangan.



2.2.1.3 Angka Kemiskinan

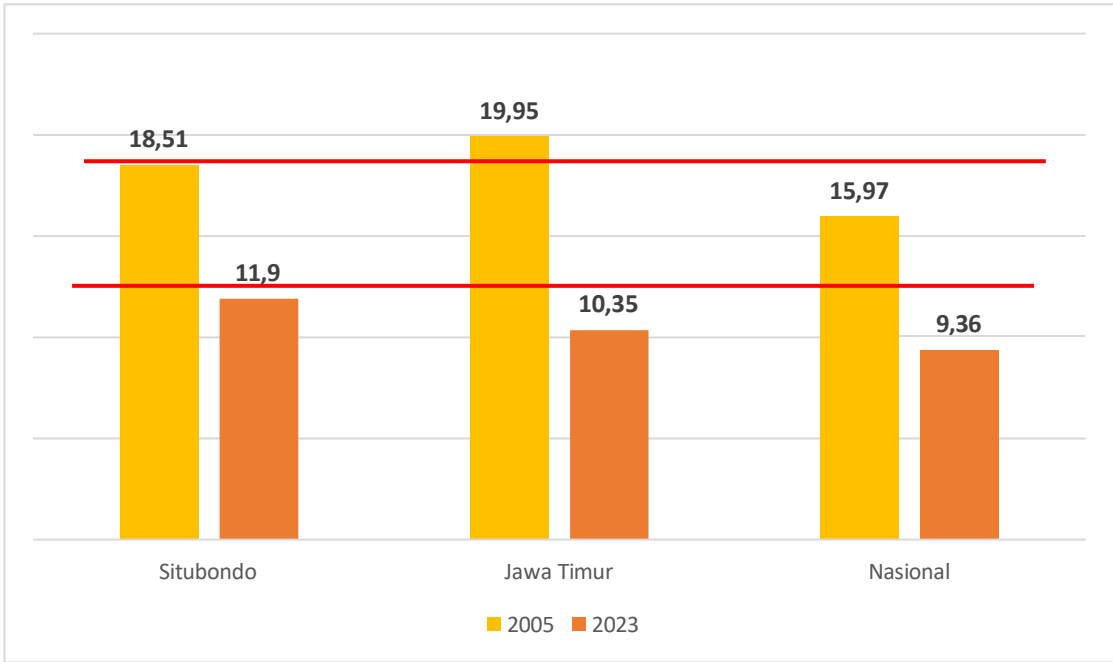
Kemiskinan merupakan ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2005-2023 sebagai berikut:



Gambar 2. 28: Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

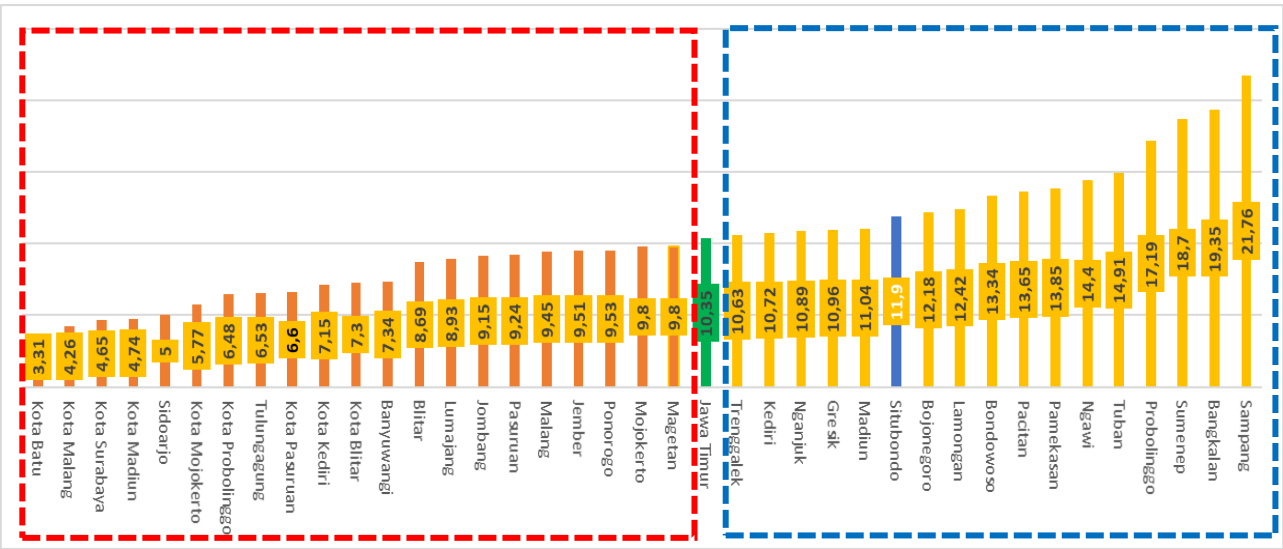
Capaian angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo dari Tahun 2005 hingga 2023 mengalami penurunan 6,25 poin, yang artinya terjadi Penurunan Kemiskinan yang cukup signifikan di Kabupaten Situbondo.



Gambar 2. 29: Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Grafik di atas yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Situbondo tahun 2005 berada di bawah Jawa Timur dan di atas Nasional, namun tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Situbondo berada di atas rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan meskipun angka kemiskinan sudah menurun namun kondisi kemiskinan masih perlu menjadi perhatian. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten / Kota di Jawa Timur, angka kemiskinan Kabupaten Situbondo termasuk 17 Kabupaten / Kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata Jawa Timur.



Gambar 2. 30: Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Melihat pada kondisi tersebut maka dalam 20 tahun ke depan kemiskinan harus menjadi fokus yang serius dalam pembangunan Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat dimulai dengan mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya dalam meningkatkan perekonomiannya, menghilangkan *mindset* ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah serta memberikan kesempatan luas bagi seluruh masyarakat untuk memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan dengan seadil mungkin.

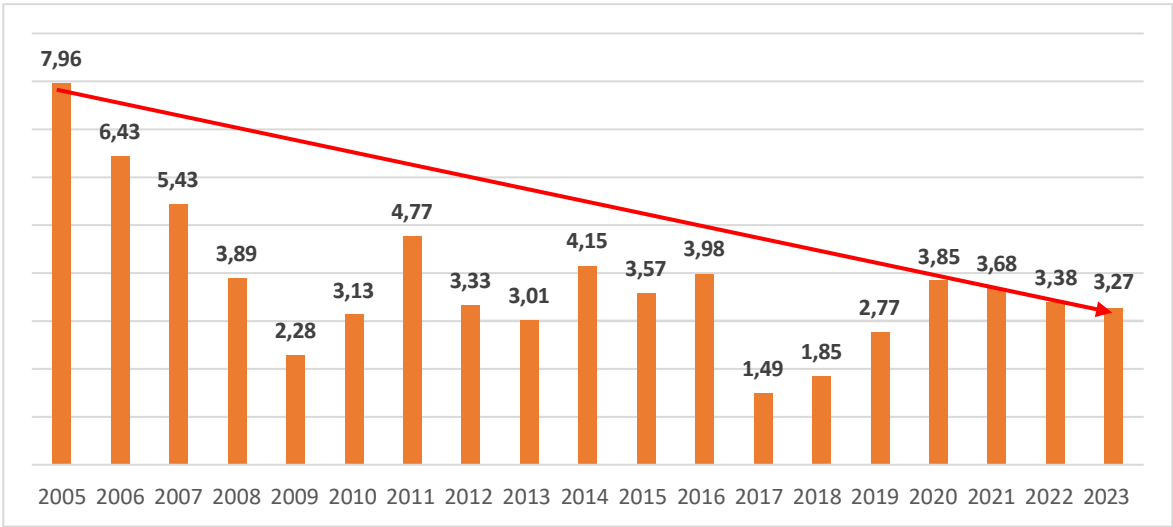
Dilain sisi saat ini kemiskinan merupakan aspek yang memiliki *multiplier effect* yang sangat luas. Salah satu kondisi yang perlu menjadi perhatian di Kabupaten Situbondo saat ini adalah banyaknya konflik pemanfaatan lahan oleh pedagang-pedagang kecil liar di wilayah Kabupaten Situbondo. Hal ini merupakan *domino effect* dari penduduk dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan yang tidak memiliki wadah dalam menyalurkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan. Kepercayaan masyarakat kecil pada fasilitas pemerintah untuk dapat menyelesaikan kemiskinan merupakan dilematis masyarakat Situbondo saat ini. Penyaluran bantuan yang tidak sesuai sasaran, bukan hanya tidak menyelesaikan kemiskinan akan tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Situbondo.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan serta tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Perhitungan TPT adalah



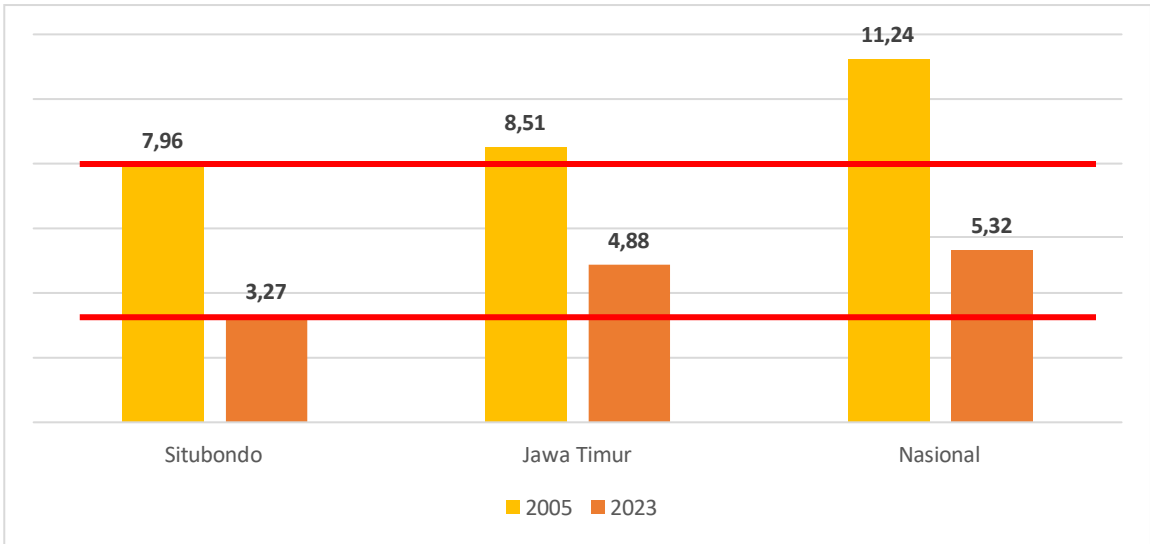
persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia produktif yaitu yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun yakni penduduk yang digolongkan mampu memproduksi barang dan jasa. Penduduk dengan usia produktif diharapkan dapat menanggung penduduk dengan usia tidak produktif. Namun, realitas menunjukkan bahwa penduduk usia produktif ini tidak seluruhnya berpenghasilan. Di Kabupaten Situbondo, angka pengangguran masih cukup tinggi. Adapun data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 31: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

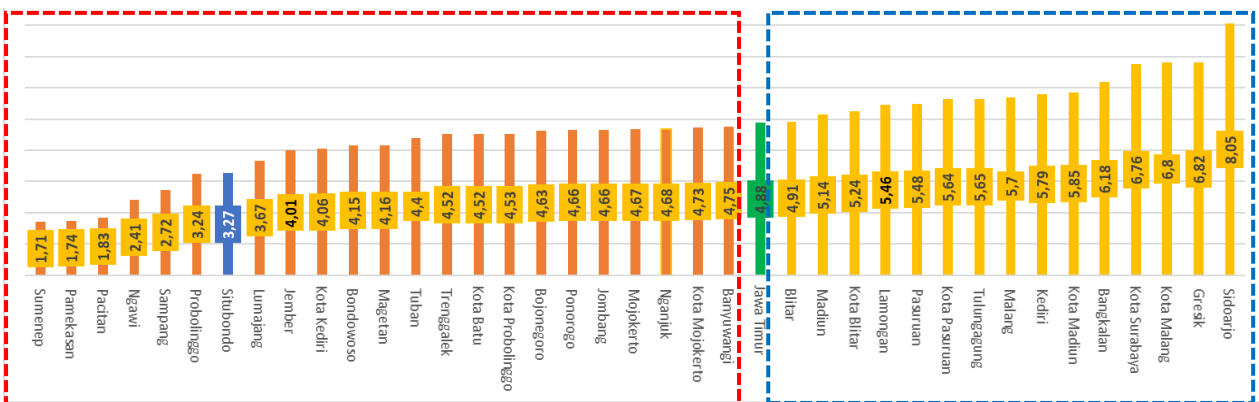
Data di atas menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Situbondo mengalami kondisi yang fluktuatif. Upaya penekanan TPT tidak berjalan dengan stabil. Namun, apabila dilihat dalam kurun 18 tahun terakhir, angka TPT menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu dari 7,96 di Tahun 2005 menjadi 3,27 di Tahun 2023. Penurunan yang terjadi mencapai 4,69 poin atau melebihi 50%. Menurunnya angka TPT berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup baik.



Gambar 2. 32: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional 2005 dan 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Perbandingan TPT antara Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Situbondo berada di bawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2005, TPT Kabupaten Situbondo mencapai 7,96 sedangkan rata-rata Jawa Timur sebesar 8,51. Kemudian, pada tahun 2023, TPT Situbondo sebesar 3,27 dan TPT Jawa Timur sebesar 4,88. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo termasuk dalam 23 Kabupaten / Kota dengan TPT dibawah Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Situbondo telah berhasil melakukan penyerapan tenaga kerja.



Gambar 2. 33: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Dalam rangka memaksimalkan upaya untuk menekan tingkat pengangguran, Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat memanfaatkan aspek-aspek lain. Pada perkembangannya, pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM merupakan dua faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor ketenagakerjaan diharapkan mampu untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja. Kondisi ini akan berimplikasi pada dihasilkannya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga ketimpangan di masyarakat dapat berkurang. Kemudian, pemerataan ekonomi juga perlu dilakukan untuk mendistribusikan pendapatan agar merata dan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Setelah itu, perluasan lapangan kerja dan usaha sangat vital untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran yang dapat menyebabkan keresahan dan kerusakan sosial. Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu mengambil langkah-langkah penting di atas agar dapat menekan angka pengangguran sehingga dapat menghindari berbagai dampak negatif

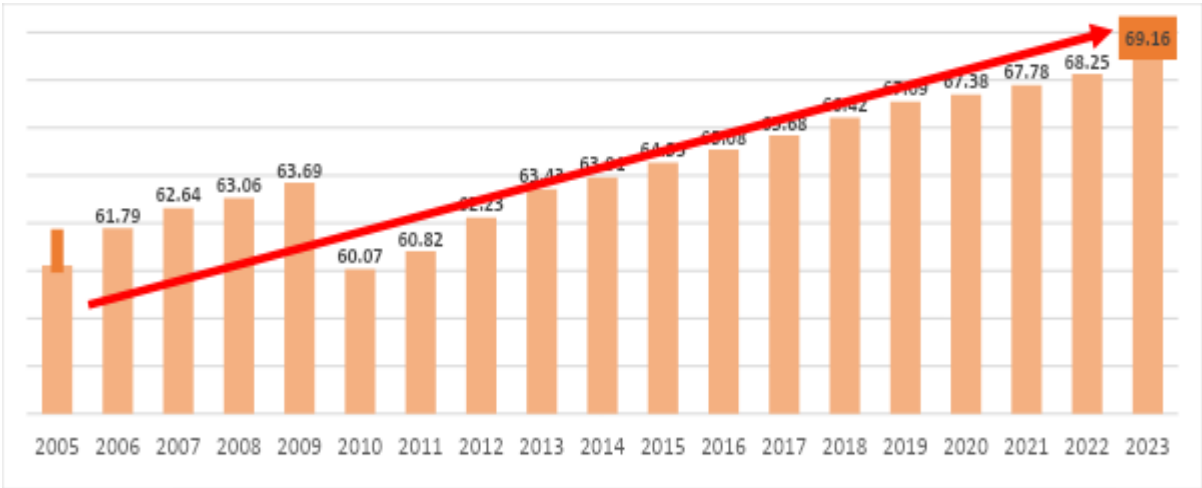
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang berbicara mengenai bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagai medium untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, IPM berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pada konteks sektor publik, IPM dapat menentukan peringkat atau level



pembangunan suatu wilayah sehingga IPM menjadi salah satu indikator makro dalam penyusunan RPJPD. Pada dasarnya, IPM dibentuk oleh tiga dimensi yang terdiri dari Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak.



Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Dalam kurun 18 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Situbondo cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 yang mengalami penurunan dari 63, 69 pada tahun 2009 menjadi 60, 07. Salah satu faktor penyebab penurunan ini adalah perubahan metode IPM. Perlu diketahui bahwa metode IPM telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali sejak diterbitkan tahun 1990. Adapun perubahan metode tersebut adalah sebagai berikut:

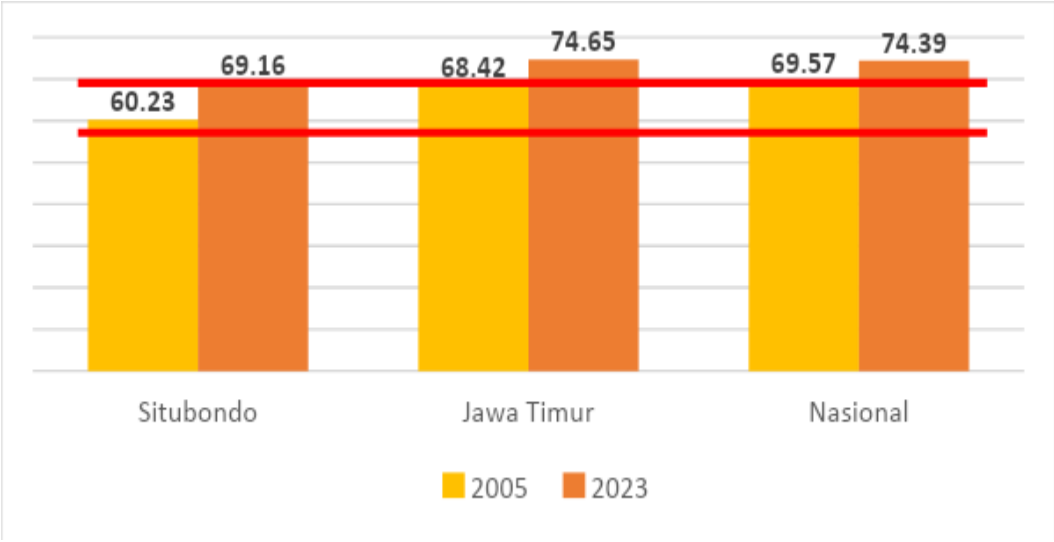
Tabel 2. 29 Perubahan Metode Indeks Pembangunan Manusia

1990	2010	2014
Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup
Angka Melek Huruf	Harapan Lama Sekolah	Merubah Metode Agregasi Indeks Pendidikan dari geometrik menjadi aritmatik
	Rata-Rata Lama Sekolah	
PDB Perkapita	PNB Perkapita	PNB Perkapita disesuaikan

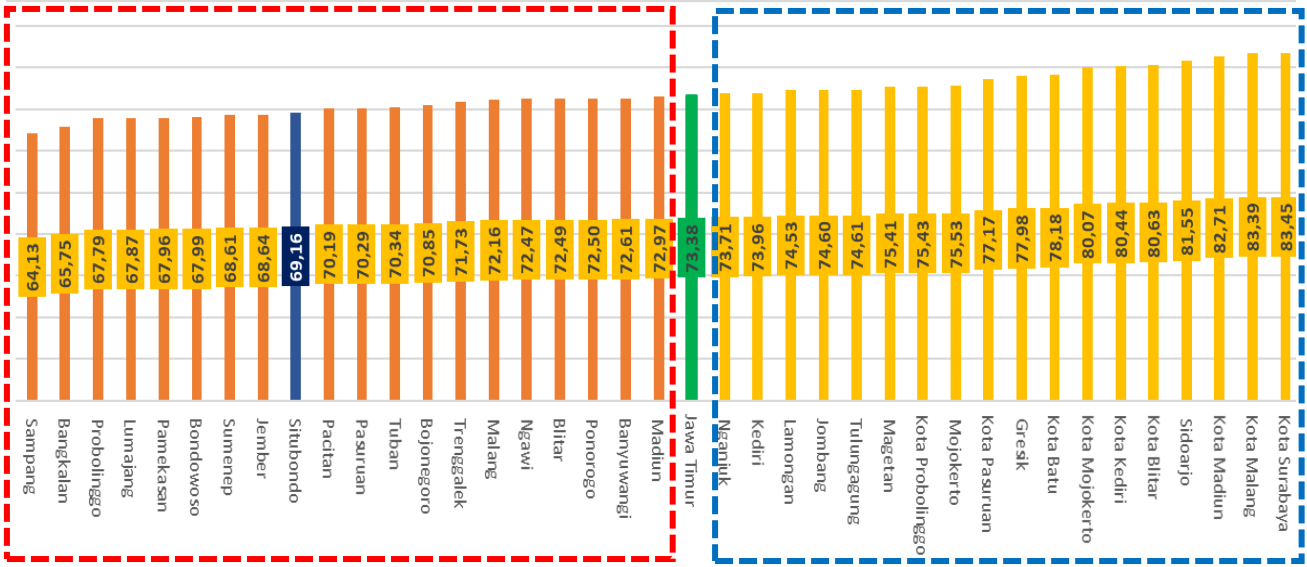
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

Pasca 2010, nilai IPM Kabupaten Situbondo terus mengalami kenaikan secara konsisten sampai mencapai skor 69, 16 pada tahun 2023. Jika dihitung sejak tahun 2005 maka IPM Situbondo mengalami kenaikan sebesar 8,91 poin. Jika dikomparasikan sejak tahun 2025 dan tahun 2023 dengan IPM Provinsi Jawa Timur yang mengalami kenaikan sebesar 6,23 poin dan IPM skala nasional yang mengalami kenaikan sebesar 4,82 poin, maka peningkatan nilai IPM Kabupaten Situbondo masih lebih baik dari Provinsi Jawa Timur dan nasional. Namun, nilai IPM Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 masih dibawah dari Provinsi Jawa Timur dan nasional.





Gambar 2. 35 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2005 dan 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024



Gambar 2. 36: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Rendahnya IPM Kabupaten Situbondo disebabkan oleh berbagai masalah yang salah satunya mencakup permasalahan kemanusiaan, seperti aktivitas premanisme, degradasi moral, masyarakat dengan *fixed mindset* yang kemudian berimplikasi pada rendahnya kualitas daya saing SDM di Situbondo. Dari segi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masih cukup rendah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kultur masyarakat yang kurang mendorong anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Fenomena ini terjadi beriringan dengan meningkatnya pernikahan dini yang juga memiliki *multiplier effect* pada kualitas SDM. Adapun dampak tersebut mencakup dimensi kesehatan terutama pada aspek kesehatan ibu hamil dan stunting karena pelaku pernikahan dini belum sepenuhnya siap dengan aktivitas reproduksi dan perawatan bayi akibat belum termasuk dalam usia reproduksi sehat.



Melihat kondisi pembangunan yang tertinggal baik dari daerah lain maupun dalam skala nasional maka upaya pembangunan manusia di Kabupaten Situbondo membutuhkan perhatian yang serius. Dari sisi pendidikan, HLS dan RLS merupakan indikator penting dalam mendegradasi pelaku pelajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang nilai kedua indikator ini perlu ditingkatkan. Kemudian, kesehatan juga merupakan dasar penting bagi seorang manusia untuk mengembangkan pribadinya. Dalam aspek ini, pemerintah perlu mempersiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni dalam rangka menyongsong kesehatan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Situbondo. Membaiknya aspek pendidikan dan kesehatan akan berimplikasi pada meningkatnya standar hidup layak masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat. Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga perlu memperhatikan dimensi rohani.

Pemanfaatan terhadap luasnya daerah pesisir dan lahan pertanian sebagai potensi Kabupaten Situbondo dapat menjadi langkah awal pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia. Pemerintah dapat mendukung petani dan nelayan serta masyarakat luas agar mandiri dalam segi ekonomi sehingga masyarakat tidak lagi berorientasi pada bantuan seperti saat ini. Dengan Demikian, melalui peningkatan daya saing SDM yang kedepannya dapat dilakukan di seluruh lini dan profesi, masyarakat Kabupaten Situbondo dapat menjadi masyarakat yang berdaya saing, bermoral, dan *open minded*, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dan nilai Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo.

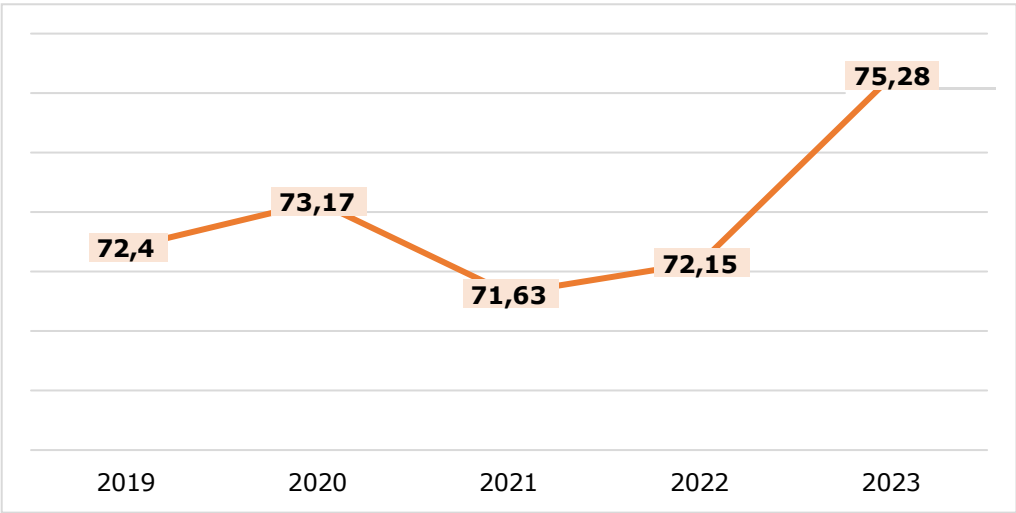
2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan keluarga di suatu daerah. Di Kabupaten Situbondo, IKS mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum, termasuk aspek kesehatan ibu dan anak, gizi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta akses terhadap layanan kesehatan. Peningkatan IKS di Situbondo menjadi prioritas dalam upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas hidup warganya. Upaya tersebut meliputi peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, program edukasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta dapat mengurangi angka kematian ibu sebagai salah satu indikator Renstra dan MDGs. Upaya kesehatan ibu ini meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di Kabupaten Situbondo, implementasi Undang-Undang ini menjadi fondasi dalam berbagai program kesehatan, khususnya yang terkait dengan peningkatan IKS. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai target IKS yang lebih baik. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Situbondo diharapkan dapat mencapai tingkat kesehatan keluarga yang lebih optimal, sehingga mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

2.2.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Situbondo merupakan indikator penting dalam menggambarkan keterlibatan aktif penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Di daerah ini, TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, serta peluang kerja yang tersedia. Kabupaten Situbondo telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan TPAK melalui berbagai program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti perempuan dan pemuda. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak masih menjadi hambatan dalam mencapai TPAK yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan TPAK secara berkelanjutan. Berikut merupakan grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023:



Gambar 2. 37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

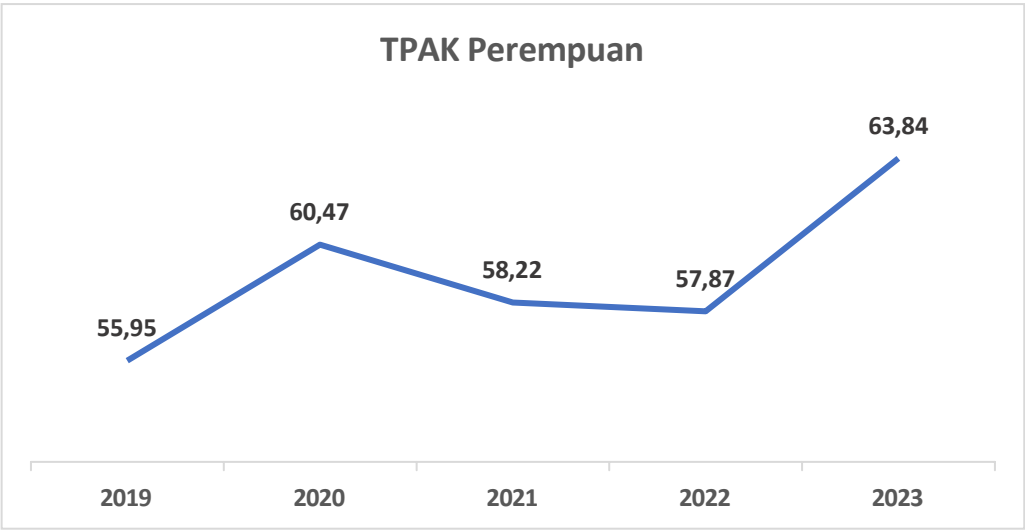
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Grafik yang ditampilkan menggambarkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Situbondo selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, TPAK di Kabupaten Situbondo berada pada angka 72,4%. Tahun berikutnya, 2020, menunjukkan peningkatan moderat menjadi 73,17%, yang bisa diindikasikan sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan peluang kerja melalui berbagai program pelatihan dan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Namun, memasuki tahun 2021, TPAK mengalami penurunan yang cukup signifikan ke angka 71,63%. Penurunan ini mungkin mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas ekonomi dan menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau memilih untuk tidak berpartisipasi di pasar kerja akibat ketidakpastian yang tinggi. Situasi ini memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang untuk menangani dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap angkatan kerja.

Pada tahun 2022, kondisi mulai menunjukkan perbaikan dengan TPAK meningkat kembali menjadi 72,15%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya perekonomian setelah pandemi, serta langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya dalam meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk aktif dalam angkatan kerja melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan baru dan bantuan usaha kecil, mulai menampakkan hasil positif.

Puncak dari perkembangan ini terlihat pada tahun 2023, di mana TPAK melonjak tajam mencapai 75,28%. Lonjakan ini merupakan indikator kuat dari keberhasilan program pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Situbondo. Faktor-faktor seperti penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menyediakan peluang kerja yang lebih luas, kemungkinan besar berkontribusi terhadap peningkatan ini. Selain itu, peningkatan TPAK juga bisa mencerminkan pergeseran masyarakat Situbondo yang semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pasar kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo telah berhasil melewati masa-masa sulit dan sedang berada pada jalur yang positif dalam mengelola angkatan kerja, meskipun tantangan-tantangan tertentu, seperti peningkatan kualitas pekerjaan dan stabilitas ekonomi, masih perlu terus diperhatikan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan TPAK di tahun-tahun mendatang.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Situbondo tahun 2019-2023 sebagai berikut:



Gambar 2. 38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, 2024

Grafik diatas menggambarkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Situbondo selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, TPAK Perempuan di Kabupaten Situbondo berada pada angka 55,95%. Tahun berikutnya, pada tahun 2020, menunjukkan peningkatan menjadi 60,47%, yang bisa diindikasikan sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam

meningkatkan peluang kerja melalui berbagai program pelatihan dan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Namun, memasuki tahun 2021-2022, TPAK Perempuan mengalami penurunan ke angka 58,22-57,87%. Penurunan ini mungkin mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas ekonomi dan menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau memilih untuk tidak berpartisipasi di pasar kerja akibat ketidakpastian yang tinggi. Situasi ini memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang untuk menangani dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap angkatan kerja. Pada Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan TPAK Perempuan meningkat kembali menjadi 63,84%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya perekonomian setelah Pandemi, serta langkah langkah pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.

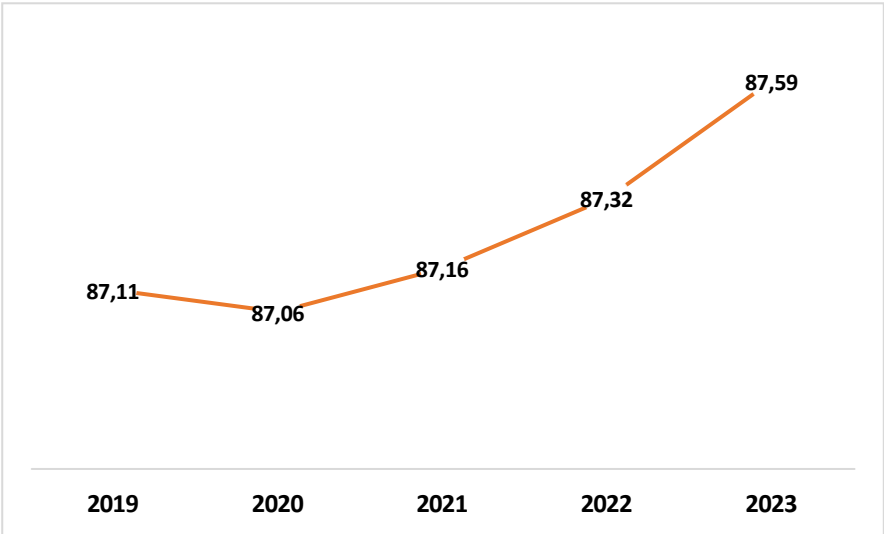
2.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang menunjukkan upaya dan pencapaian suatu daerah dalam melindungi hak-hak anak, termasuk di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anak melalui berbagai program dan kebijakan proaktif di bidang pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan. Langkah konkret yang telah diambil mencakup penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Pada tahun 2022, Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 58,80. Meskipun angka ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya perlindungan anak, masih terdapat tantangan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan memperluas jangkauan program hingga ke pelosok desa. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka IPA di Kabupaten Situbondo terus meningkat, mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal.

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Situbondo digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam menikmati hasil pembangunan. Di Kabupaten Situbondo, pencapaian IPG menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengurangi kesenjangan gender. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan tenaga kerja, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan IPG di Kabupaten Situbondo. Pemerintah setempat terus berupaya meningkatkan IPG melalui program-program pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses terhadap layanan publik yang inklusif dan setara. Berikut grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2023:



Gambar 2. 39 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Situbondo pada periode 2019-2023 memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di wilayah tersebut. Pada tahun 2019, IPG Kabupaten Situbondo berada pada angka 87,11, yang menunjukkan adanya kesenjangan gender yang masih perlu diperbaiki. Berikutnya pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 87,06. Penurunan ini bisa mencerminkan adanya tantangan dalam upaya mempertahankan tingkat kesetaraan gender. Namun, sejak tahun 2021, IPG mulai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun tersebut, IPG naik menjadi 87,16, menandakan adanya perbaikan dalam kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022, di mana IPG mencapai 87,32.

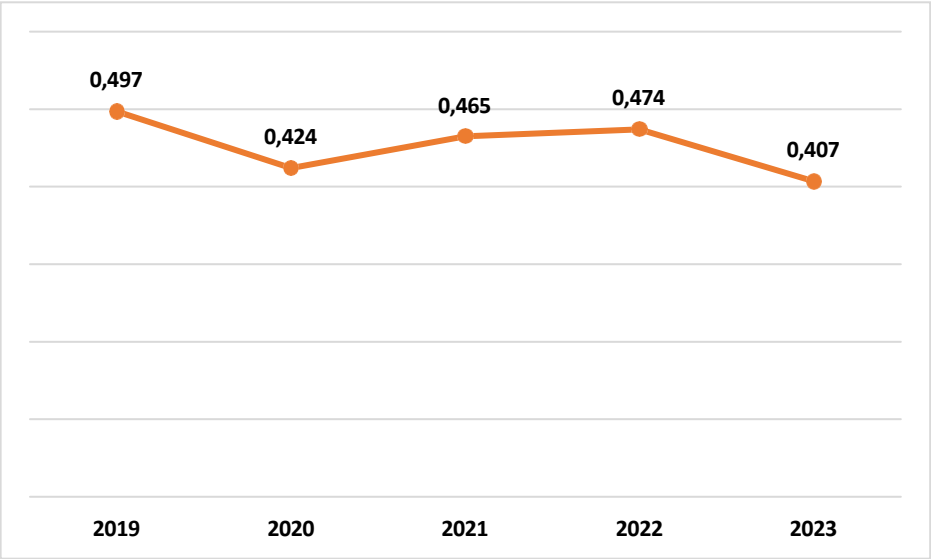
Pada tahun 2023, di mana IPG Kabupaten Situbondo mencapai 87,59, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mengurangi kesenjangan gender dan memperkuat peran perempuan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan IPG dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang positif dalam mengurangi kesenjangan gender di Kabupaten Situbondo. Namun, meskipun terjadi peningkatan, angka IPG tersebut juga mengindikasikan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih sempurna, termasuk memperbaiki akses perempuan terhadap peluang yang lebih luas di berbagai sektor.

2.2.2.6 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Situbondo merupakan indikator yang mengukur sejauh mana ketidaksetaraan gender terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan kesenjangan yang masih ada antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses serta peluang yang setara. Di Kabupaten Situbondo, nilai IKG memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai



kesetaraan gender secara penuh. Ketimpangan gender yang terlihat dalam aspek-aspek seperti rendahnya partisipasi perempuan di sektor ekonomi formal, terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi bagi perempuan, serta rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, menjadi isu-isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus memperkuat kebijakan dan program pemberdayaan perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan keterampilan, serta dukungan untuk partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Berikut terdapat grafik mengenai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2023:



Gambar 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Situbondo pada periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ketidaksetaraan gender di wilayah tersebut. Pada tahun 2019, IKG berada di angka 0,497, yang mengindikasikan adanya kesenjangan gender yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 0,424. Selanjutnya, pada tahun 2021, IKG mengalami kenaikan menjadi 0,465, yang menunjukkan adanya peningkatan kembali dalam ketidaksetaraan gender. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai IKG mencapai 0,474. Kenaikan ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan dalam mempertahankan kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan gender.

Pada tahun 2023, IKG kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 0,407, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini menandakan kemajuan yang cukup berarti dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan di berbagai bidang. Penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi ketimpangan gender semakin membuahkan hasil positif.

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran perkapita dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan dan semakin tinggi pengeluaran untuk non-makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2. 30 Pengeluaran per Kapita Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

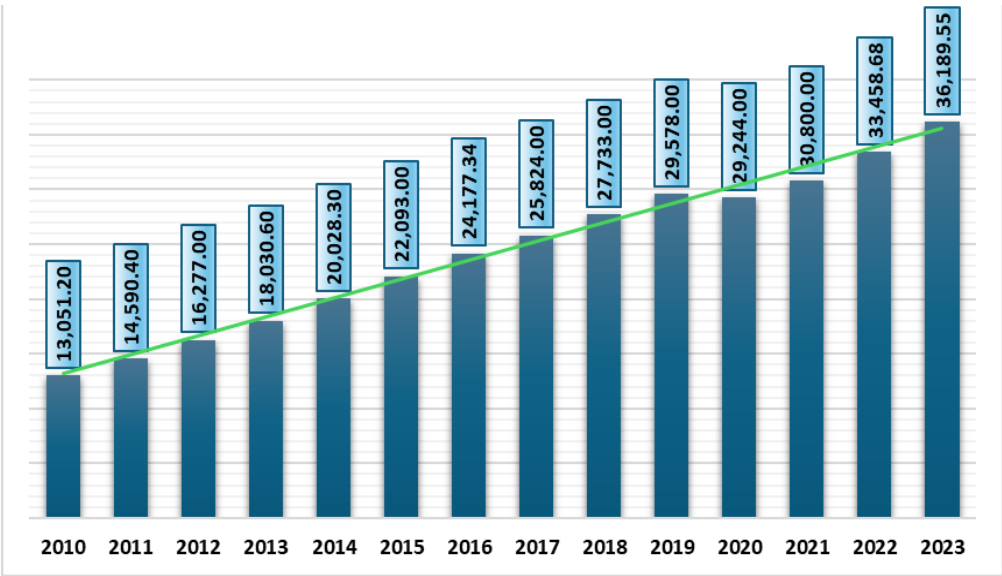
No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran per kapita (dalam ribuan)	Rp	9.692	10.097	9.857	9.996	10.263	10.702

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Situbondo pada tahun 2018-2023 cenderung mengalami kenaikan. Adapun penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kemudian, pengeluaran perkapita kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 walaupun tidak signifikan.

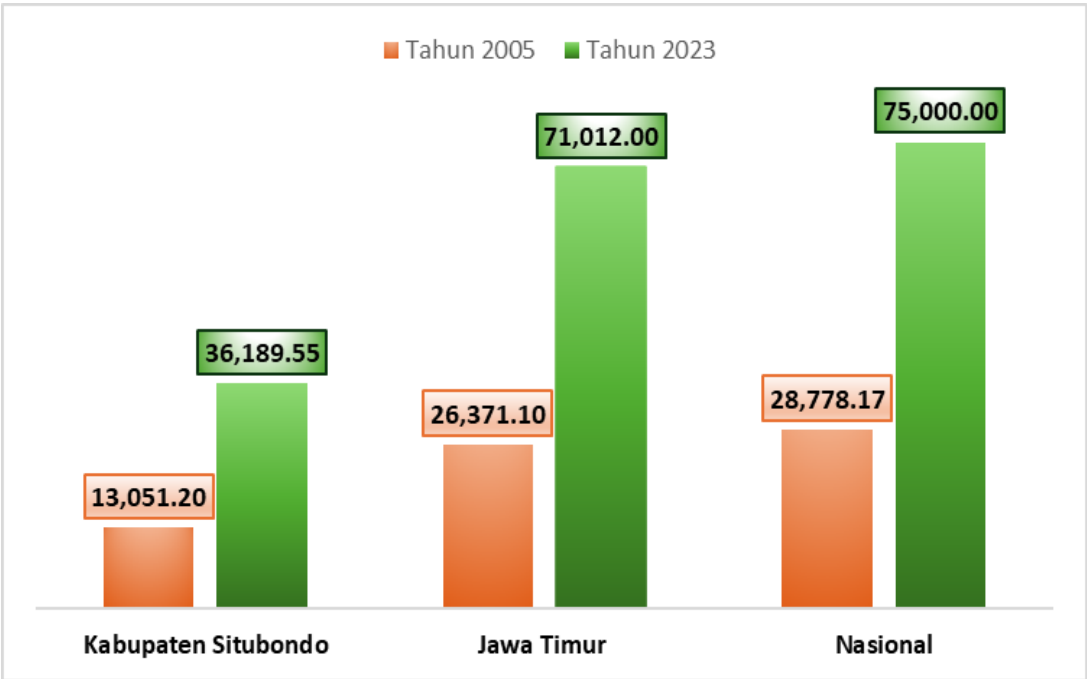
Sedangkan PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Perhitungan dapat diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Adapun data PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo sebagai berikut:





Gambar 2. 41: PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

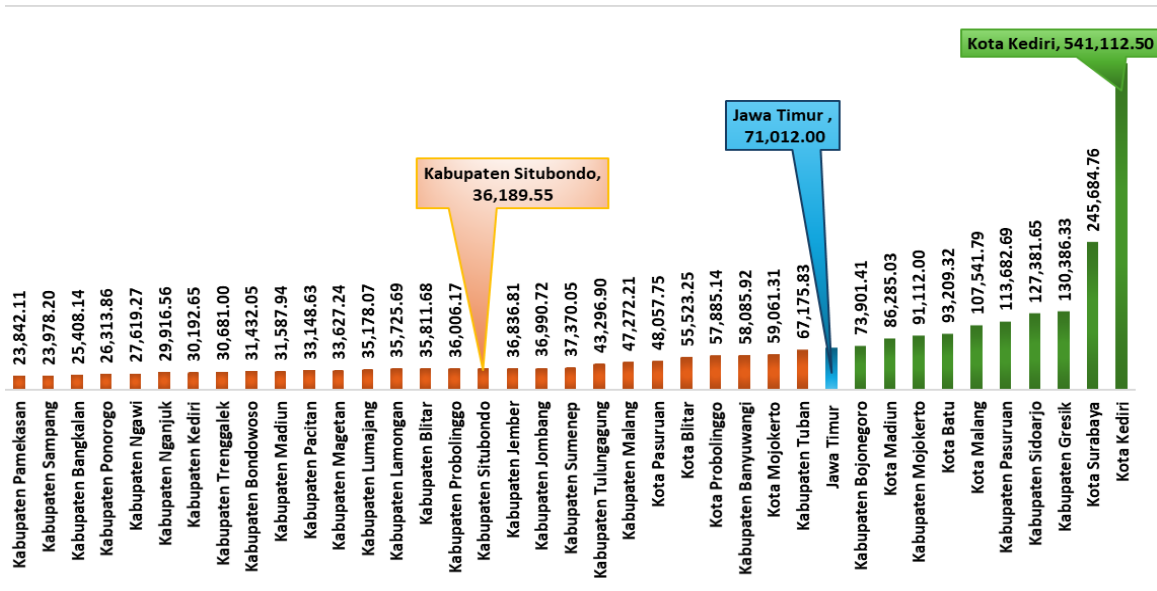
PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2010 PDRB Perkapita sebesar 13.051.200 sedangkan Tahun 2023 mencapai 36.189.550, terjadi peningkatan 23.132.350.



Gambar 2. 42: Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2003 dan 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

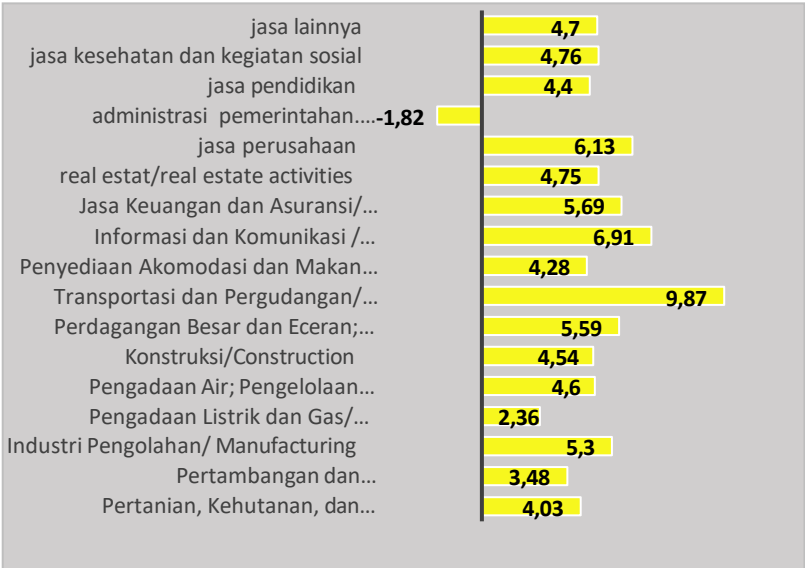
PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo tahun 2010 dan 2023 masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Situbondo mencapai 36.189.550 sedangkan Jawa Timur mencapai 71.012.000. Nilai Jawa Timur tidak cukup jauh dengan PDRB nasional yang mencapai 75.000.000. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten/Kota dengan PDRB Perkapita peringkat 17 terendah PDRB di Jawa Timur.





Gambar 2. 43 PDRB Perkapita Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan kedua indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat perekonomian Kabupaten Situbondo belum cukup baik. Akan tetapi jika dilihat pada tren Kabupaten Situbondo sendiri dapat terlihat adanya peningkatan dan pemulihan perekonomian dalam 4 tahun terakhir. Tumbuhnya perekonomian Situbondo tentunya tidak terlepas dari pulihnya dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi selama tahun 2023. Salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mampu tumbuh hingga 9,87 persen. Setelah itu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen dan Jasa Perusahaan juga tumbuh tinggi mencapai 6,13 persen. Terdapat satu lapangan usaha yang tumbuh negatif di tahun 2022 dan mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Lapangan saha Informasi dan Komunikasi masih merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini tentunya seiring dengan perkembangan digitalisasi yang semakin meningkat. Selain itu terdapat satu lapangan usaha yang masih tumbuh negatif, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan tingkat pertumbuhan sebesar -1,82 persen.

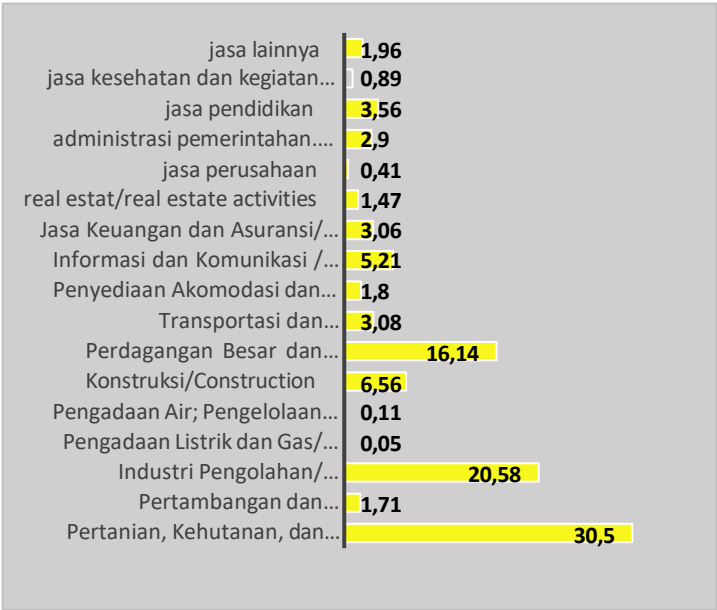


Gambar 2. 44 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo menurut Lapangan Usaha Tahun 2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024



Tumbuhnya perekonomian Situbondo selama tahun 2023 tentu didorong oleh tumbuhnya sektor-sektor ekonomi pendukungnya. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar selama tahun 2023. Share dari pertumbuhannya sendiri mencapai 1,08 persen dari total 4,90 persen pertumbuhan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini merupakan salah satu lapangan usaha yang dominan sehingga pengaruh terhadap pertumbuhannya pun juga akan besar. Share pertumbuhan terbesar kedua yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencapai 1,05 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 masih didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 30,50 persen; kemudian diikuti Industri Pengolahan sebesar 20,58 persen; dan dilanjutkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,14 persen. Sedangkan kategori lapangan usaha lain yang memiliki share dibawah 7 persen yakni meliputi: Konstruksi sebesar 6,56 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,21 persen; Jasa Pendidikan sebesar 3,56 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,08 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,06 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,90 persen; Jasa Lainnya sebesar 1,96 persen; Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,80 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,71 persen; Real Estate sebesar 1,47 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,89 persen; Jasa Perusahaan sebesar 0,41 persen; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,11 persen; dan terakhir Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen.



Gambar 2. 45 Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo menurut Lapangan Usaha Tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Dilihat dari Gambar 6 dan Gambar 7 terlihat bahwa sebagian besar lapangan usaha dengan kontribusi besar telah mampu tumbuh positif. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik dan mendukung pulihnya kondisi perekonomian Situbondo. Jika dibandingkan dengan kondisi saat pandemi Covid-19 (tahun 2020), secara agregat perekonomian Situbondo sudah menunjukkan pemulihan. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.



2.3.2 Daya Saing SDM

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan penduduk.

2.3.2.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat Pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat Pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	2019	2020	2021	2022	2023
1	TIDAK/ BELUM SEKOLAH	242.808	244.586	235.747	243.770	250.295
2	BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	53.025	53.091	51.759	45.066	46.056
3	TAMAT SD/ SEDERAJAT	204.173	200.583	187.518	188.391	188.387
4	SLTA/ SEDERAJAT	87.614	89.856	88.655	92.077	94.376
5	SLTP/ SEDERAJAT	76.379	77.118	73.424	72.597	72.943
6	DIPLOMA I/ II	1.877	1.845	1.795	1.770	1.740
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/ S. MUDA	3.216	3.343	3.343	3.446	3.543
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	21.454	22.678	23.249	24.763	25.708
9	STRATA II	1.010	1.055	1.061	1.150	1.222
10	STRATA III	66	70	68	72	73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024



2.3.2.2 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka dapat digambarkan jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 32 Rasio Ketergantungan Kabupaten Situbondo

Sektor	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)	Jiwa	490.541	493.792	469.439	463.118	467.029
Jumlah Penduduk Usia non Produktif (<15 tahun dan >64 tahun)	Jiwa	201.081	200.433	197.180	209.984	217.314
Rasio Ketergantungan	%	40,99%	40,59%	42,00%	45,34%	46,53%

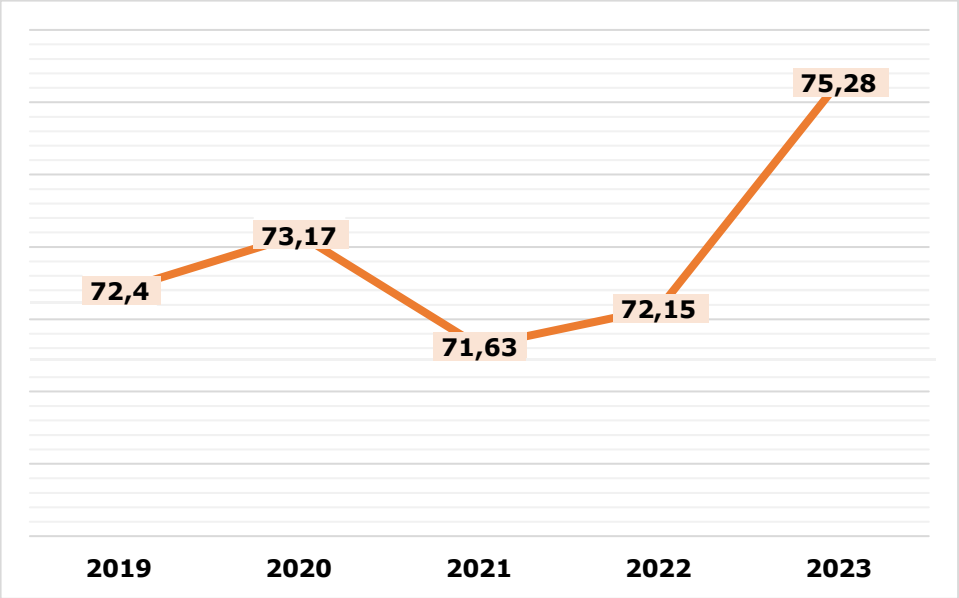
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Situbondo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Nilai rasio ketergantungan ini diharapkan kedepannya terus mengalami penurunan agar rasio beban jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin berkurang juga.



2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Situbondo menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK mencerminkan sejauh mana masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Di Kabupaten Situbondo, TPAK menjadi cerminan dinamika ekonomi lokal, di mana fluktuasi TPAK bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan angkatan kerja. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, TPAK yang rendah bisa menjadi indikasi adanya kendala dalam akses ke lapangan kerja, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan atau kaum muda. Berikut terdapat grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2023:



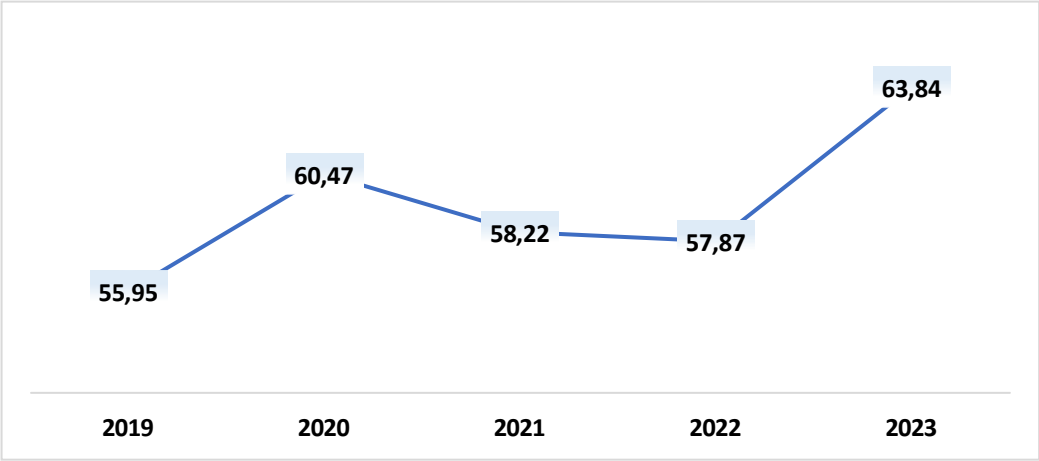
Gambar 2. 46 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Situbondo di atas menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dalam periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, TPAK berada di angka 72,4%, mencerminkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi. Tahun 2020 melihat sedikit peningkatan menjadi 73,17%, yang mungkin terkait dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pada tahun 2021, TPAK mengalami penurunan menjadi 71,63%, menunjukkan dampak dari ketidakpastian ekonomi yang masih dirasakan. Tahun berikutnya, 2022, menunjukkan pemulihan dengan TPAK meningkat kembali menjadi 72,15%. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, ketika TPAK mencapai 75,28%, menandakan perbaikan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Situbondo. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja dan mungkin menunjukkan efek positif dari kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesempatan kerja di daerah tersebut.

2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merujuk pada persentase perempuan dalam angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total perempuan dalam kelompok usia kerja. Kenaikan TPAK perempuan menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di tempat kerja, serta dapat mencerminkan keberhasilan kebijakan-kebijakan yang mendukung perempuan dalam dunia kerja, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke fasilitas kerja yang ramah keluarga. Sebaliknya, penurunan TPAK perempuan bisa mengindikasikan adanya hambatan atau kesulitan yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi, seperti masalah diskriminasi, ketidaksetaraan gaji, atau tanggung jawab keluarga yang membatasi kesempatan kerja mereka. Memantau dan menganalisis TPAK perempuan secara rutin penting untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender di dunia kerja.



Gambar 2. 47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Selama periode 2019 hingga 2023, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, TPAK perempuan tercatat sebesar 55,95%. Angka ini kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 60,47%, menunjukkan peningkatan partisipasi yang positif. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2021, TPAK perempuan mengalami penurunan menjadi 58,22% dan kembali menurun sedikit pada tahun 2022 menjadi 57,87%. Meskipun demikian, pada tahun 2023, TPAK perempuan kembali meningkat secara signifikan mencapai 63,84%, angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam keterlibatan perempuan di pasar kerja, yang kemungkinan didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan akses terhadap kesempatan kerja atau program pemberdayaan perempuan di Situbondo.

2.3.2.5 Indeks Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kabupaten Situbondo saat ini salah satunya dapat dilihat dari trend Indeks Pendidikan. Adapun pada tahun 2023, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari tahun 2022 sebesar 0.587 menjadi 0.596 di tahun 2023. Dengan kata lain kondisi pendidikan di Kabupaten Situbondo kembali terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2. 48 Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo 2018-2023
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Demi mencegah terjadinya krisis Sumber Daya Manusia, maka perlu adanya peningkatan Indeks Pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, handal, berketerampilan serta berdaya saing. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

2.3.2.6 Angka Literasi/Numerasi

Angka Literasi/Numerasi merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan jangka Panjang. Angka Literasi mengacu pada tingkat kemampuan masyarakat dalam membaca, menulis, dan memahami teks, sementara Angka Numerasi mengukur keterampilan individu dalam memahami dan menggunakan angka serta operasi matematika dasar. Keduanya merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pencapaian angka literasi dan numerasi yang tinggi menunjukkan kemajuan dalam pendidikan dan keterampilan dasar yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penyediaan sumber daya yang memadai.

Tabel 2. 33 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2023

No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
1	Capaian kompetensi Literasi SD	53,31	62,03
2	Capaian kompetensi Literasi SMP	50,76	61,17
3	Capaian kompetensi Numerasi SD	31,31	47,93
4	Capaian kompetensi Numerasi SMP	37,95	44,02

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo, 2024



Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Situbondo menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Capaian kompetensi literasi di tingkat SD meningkat dari 53,31 pada tahun 2022 menjadi 62,03 pada tahun 2023, menunjukkan kemajuan yang positif dalam kemampuan membaca dan memahami teks di kalangan siswa SD. Capaian kompetensi literasi di tingkat SMP juga mengalami peningkatan dari 50,76 menjadi 61,17, mencerminkan perbaikan dalam keterampilan literasi yang lebih mendalam di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di sisi numerasi, capaian kompetensi di tingkat SD meningkat dari 31,31 pada tahun 2022 menjadi 47,93 pada tahun 2023, menandakan kemajuan dalam kemampuan matematika dasar. Namun, capaian kompetensi numerasi di tingkat SMP mengalami sedikit penurunan dari 37,95 menjadi 44,02, meskipun masih menunjukkan adanya kemajuan dalam kemampuan matematika di kalangan siswa SMP. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan literasi dan numerasi di Kabupaten Situbondo, meskipun beberapa area masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan.

2.3.2.7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat perkembangan literasi di suatu daerah atau komunitas. Indeks ini mengukur berbagai aspek kemampuan membaca, menulis, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari, serta mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan literasi. IPLM mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program literasi, ketersediaan sumber daya pendidikan, serta efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi. Dengan menggunakan IPLM, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan merancang strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan budaya membaca dan menulis, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 34 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2023

No	Indikator	2022	Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	67,56	62,81

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo, 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Situbondo menunjukkan penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 67,56, yang menunjukkan tingkat pembangunan literasi masyarakat yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2023, angka ini mengalami penurunan menjadi 62,81. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam kebijakan pendidikan, sumber



daya yang tersedia, atau faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan upaya strategis untuk mengidentifikasi penyebab penurunan ini dan merancang intervensi yang efektif guna meningkatkan kembali IPLM, sehingga pembangunan literasi masyarakat dapat terus berkembang secara positif.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pada aspek daya saing infrastruktur di Kabupaten Situbondo dilihat dari pemenuhan kebutuhan dan kualitas infrastruktur dari masing-masing sektor seperti sektor bina marga, sektor perumahan dan permukiman, sektor pemenuhan air, sektor sanitasi dan SPAM, sektor perhubungan, dan sektor infrastruktur penunjang pelayanan dasar. Sektor sanitasi, yang mencakup sistem pembuangan dan pengelolaan limbah, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ini ditunjukkan dengan upaya untuk meningkatkan fasilitas umum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara itu, SPAM sangat penting untuk menyediakan air bersih yang cukup dan berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari penduduk. Membangun dan memelihara sistem penyediaan air yang efisien memastikan bahwa air bersih dapat diakses secara merata di seluruh wilayah, mengurangi risiko pencemaran dan kekurangan air. Pada sektor perumahan dan permukiman, peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni termasuk pembangunan kawasan permukiman yang terencana dengan baik dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas infrastruktur dalam sektor-sektor ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada daya saing Kabupaten Situbondo dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dan kualitas infrastruktur pada lingkungan Kabupaten Situbondo kemudian dinilai melalui indeks infrastruktur pada 10 Instansi/Perangkat Daerah yang berkaitan yakni Dinas Perhubungan, DPUPP, Dinas Pertanian, PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan variabel pada masing-masing Instansi/ Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Variabel Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo

No	Instansi	Variabel	Metode Kuantifikasi
1	Dinas Perhubungan	Fasilitas Pelengkap Jalan	Rasio panjang jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan /panjang jalan
		Prasarana Transportasi	Rasio antara jumlah prasarana transportasi (terminal, halte/shelter, pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang) / jumlah kebutuhan prasarana



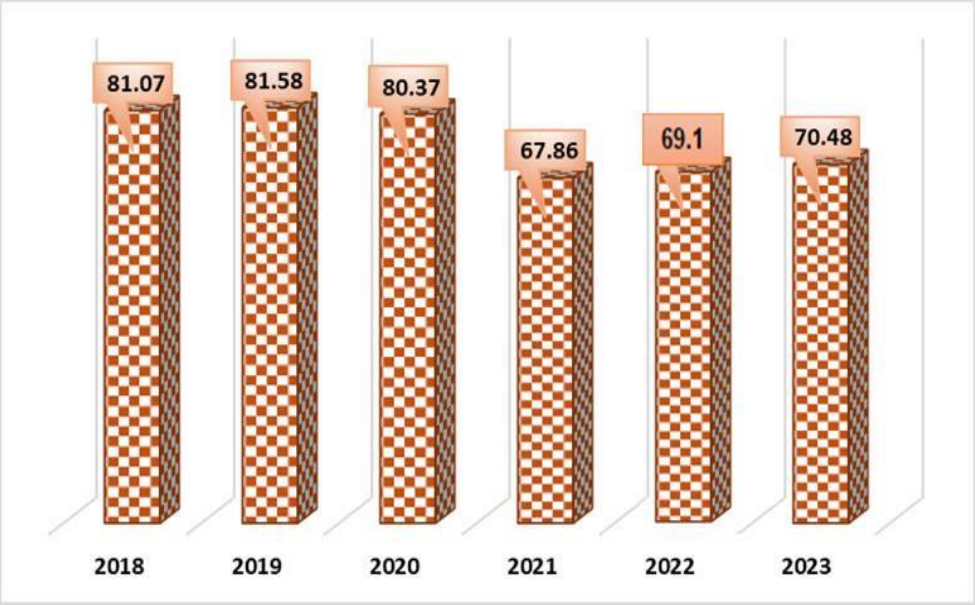
No	Instansi	Variabel	Metode Kuantifikasi
		Tingkat Konektivitas	$\text{Alpha} = \frac{e-v+p}{2v-5}$ <p><i>Alpha index</i> e = jumlah ruas jalan v = jumlah persimpangan p = luas wilayah</p>
		Jumlah ijin trayek	Rasio antara jumlah perpanjangan ijin trayek/jumlah ijin trayek
		Pembangunan Pelabuhan	Rasio kapasitas Pelabuhan / jumlah bongkar muat barang
			Rasio persentase jumlah Pelabuhan eksisting / jumlah Pelabuhan
		Angkutan umum	Rasio Ruas Jalan yang dilalui angkutan umum / ruas Jalan total wilayah Kabupaten Situbondo
2	DPUPP	Kondisi Jalan	Rasio antara kondisi jalan (baik, sedang) / panjang jalan di Kabupaten Situbondo
		Persentase penduduk dengan akses air minum	Rumah tangga dengan akses air minum / jumlah roral rumah tangga
		Kinerja pelayanan SPALD-S akses layak	Jumlah rumah dengan pengolahan tangka septik / jumlah total keluarga
		Tingkat pelayanan drainase	Rasio persentase panjang drainase kondisi baik / panjang total drainase
		Kondisi jembatan	Jumlah jembatan kondisi baik / jumlah jembatan
		Tingkat pelayanan perumahan	Rasio luas Kawasan kumuh (sesuai SK) / luas wilayah Kabupaten Situbondo
			Rasio rumah layak huni / jumlah total rumah
3	Dinas Pertanian	Tingkat pelayanan irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
			Rasio persentase luas tanam irigasi teknis / luas total tanam
4	PDAM	Jumlah sumber air minum	Jumlah sumber air yang digunakan / total sumber air yang ada
5	Dinas Kesehatan	Tingkat pelayanan fasilitas Kesehatan	Rasio jumlah posyandu / jumlah posyandu seharusnya
			Rasio jumlah apotik eksisting / jumlah apotik seharusnya
			Rasio jumlah puskesmas eksisting / jumlah puskesmas seharusnya



No	Instansi	Variabel	Metode Kuantifikasi
			Rasio jumlah puskesmas pembantu eksisting / jumlah puskesmas pembantu seharusnya
			Rasio jumlah TT RS di wilayah eksisting / jumlah TT rumah sakit seharusnya
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang ekonomi	Jumlah pasar yang difasilitasi sarana prasarana / jumlah pasar yang ada
			Jumlah bedak pasar yang dihuni / jumlah total bedak pasar
		Tingkat pelayanan koperasi	Rasio jumlah koperasi berijin / jumlah koperasi total
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketersediaan PKMB di tingkat kecamatan	Rasio jumlah PKMB / jumlah kecamatan
		Tingkat pelayanan PAUD	Jumlah PAUD / jumlah desa dan kelurahan
		Tingkat pelayanan SD	Jumlah SD akreditasi A, B, C / jumlah total SD
		Tingkat pelayanan SMP	Jumlah SMP akreditasi A, B, C / jumlah total SMP
		Angka partisipasi murni SD	Jumlah siswa SD / sederajat usia 7-12 tahun
		Angka partisipasi murni SMP	Jumlah siswa SMP / sederajat usia 13-15 tahun
		Angka partisipasi kasar SD	Jumlah penduduk SD, MI / jumlah penduduk usia 7-12 tahun
		Angka partisipasi kasar SMP	Jumlah penduduk SMP, MTs / jumlah penduduk usia 13-15 tahun
		Angka melek huruf	Jumlah penduduk usia ≥ 15 th dapat baca tulis/ Jumlah penduduk usia ≥ 15 th
8	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang lingkungan	Rasio persentase antara jumlah sampah masuk TPA / jumlah sampah total
			Rasio persentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah / jumlah total penduduk
			Rasio pengoperasian TPA / jumlah sampah masuk TPA
9	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Tingkat jaringan informasi dan komunikasi	Rasio Persentase antara jumlah rumah tangga dengan akses internet / jumlah total rumah tangga
			Rasio BTS berijin / jumlah total BTS
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Tangguh bencana	Desa Tangguh bencana / desa rawan bencana

Sumber: Dokumen Laporan Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo, 2023

Dari masing-masing perhitungan indeks infrastruktur pada masing-masing Instansi/Perangkat Daerah tersebut, maka bila di kompositkan maka dapat digambarkan menjadi Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo. Adapun capaian indeks infrastruktur di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 49 Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Pada Grafik diatas persentase Indeks Infrastruktur Kabupaten Situbondo dalam enam tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang cukup tinggi hingga tahun 2023. Pada tahun 2018 capaian indeks infrastruktur mencapai 81,07%, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 81,58%. Akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 80,37%. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan hingga menjadi 67,86%. Penurunan yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya penurunan pada beberapa variabel perhitungan Indeks Infrastruktur pada masing-masing Instansi/ Perangkat Daerah di tahun 2021 diantaranya:

- Kondisi Jalan yang menurun dari 85.25 menjadi 84.86;
- Jumlah puskesmas eksisting/jumlah puskesmas seharusnya menurun dari 46.66 menjadi 46.42;
- Jumlah puskesmas pembantu eksisting/jumlah puskesmas pembantu seharusnya dari 35.00 menjadi 34.81;
- Jumlah SD akreditasi A, B, C / jumlah total SD dari 85.08 menjadi 84.98;
- Jumlah SMP akreditasi A, B, C / jumlah total SMP dari 83.52 menjadi 82.42;
- Jumlah siswa SD/ sederajat usia 7-12 tahun / jumlah penduduk usia 7-12 tahun dari 91.50 menjadi 90.41
- Jumlah sampah masuk TPA/ jumlah total sampah dari 64.02 menjadi 52.48;
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari 69.82 menjadi 68.75; dan
- Ruang tangga dengan akses internet/ jumlah total rumah tangga dari 70.00 menjadi 69.69;

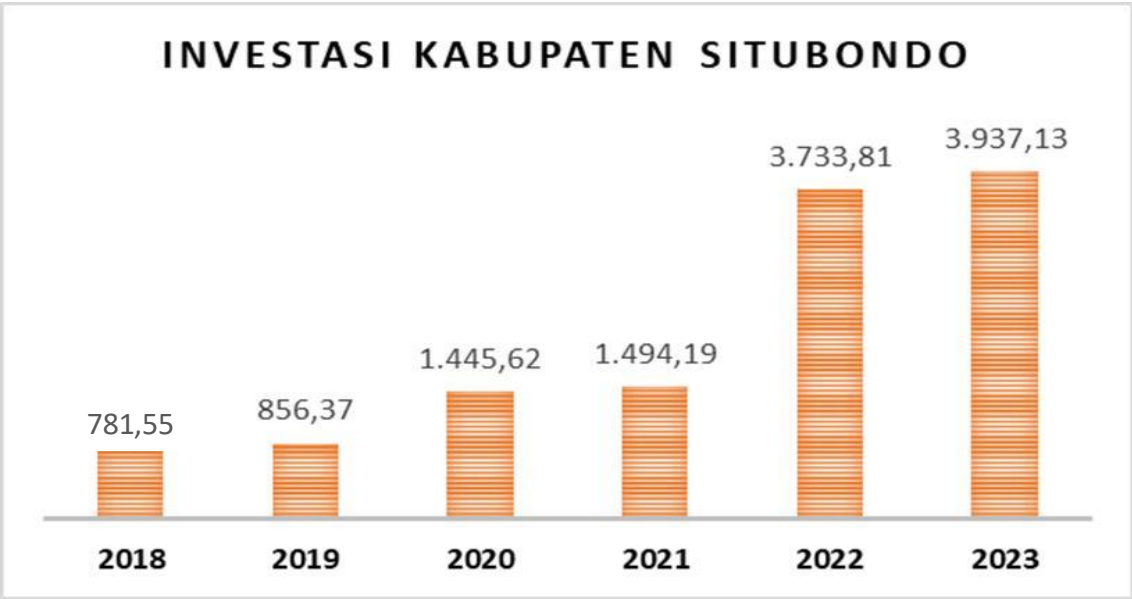
Akan tetapi pada tahun 2022, Indeks Infastruktur Kabupaten Situbondo dapat kembali meningkat menjadi sebesar 69,1%. Setelah itu, indeks infrastruktur kembali mengalami kenaikan menjadi 70.48% pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi fluktuatif yang terjadi khususnya pada tahun 2021, Kabupaten Situbondo memerlukan usaha keras untuk tetap konsisten menaikkan peningkatan di tahun berikutnya.

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi daya saing usaha. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung kegiatan usaha, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Infrastruktur transportasi dapat memudahkan mobilitas barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi biaya logistik. Selain itu, infrastruktur yang baik dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi waktu dalam sistem transportasi. Infrastruktur transportasi yang baik mencakup jalan, jembatan, rel, pelabuhan, dan bandara yang dapat meningkatkan aksesibilitas antara berbagai lokasi. Semakin baik konektivitas antar wilayah, semakin cepat dan efisien waktu tempuhnya. Infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan perlu diperluas dan ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali. Jarak yang lebih besar juga dapat meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, menyebabkan kemacetan dan emisi polusi. Infrastruktur yang baik dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana, sementara bencana dapat merusak infrastruktur secara signifikan. Infrastruktur yang dirancang dengan prinsip-prinsip pembangunan tahan bencana dapat membantu mengurangi risiko dan dampak bencana.

Infrastruktur memainkan peran penting dalam membentuk dan mendukung pola pemanfaatan lahan. Berkaitan dengan regulasi tata ruang dan zonasi. Undang-undang tata ruang dan regulasi pemanfaatan lahan menentukan di mana dan bagaimana infrastruktur dapat dikembangkan, serta batasan-batasan pemanfaatan lahan di sekitarnya. Jenis penggunaan lahan, apakah itu perumahan, komersil, industri, atau pertanian, mempengaruhi jenis infrastruktur yang diperlukan. Misalnya, wilayah industri mungkin memerlukan infrastruktur energi dan air yang khusus, sementara kawasan perumahan membutuhkan infrastruktur pendidikan dan transportasi publik.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Adapun perbandingan nilai investasi dengan pertumbuhan investasi dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2. 50: Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2018- 2023

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2018-2023 total realisasi investasi di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari Rp. 781,55 Miliar pada tahun 2018 menjadi 3.937,13 Miliar di tahun 2023. Pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kembali secara signifikan. Peningkatan realisasi investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif dalam perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Namun, di balik angka yang meningkat itu, seringkali terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Di Kabupaten Situbondo, peningkatan realisasi investasi telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Angka-angka yang tercatat menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam sektor industri dan infrastruktur. Namun, peningkatan tersebut belum selalu berdampak positif secara merata bagi masyarakat setempat.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketimpangan dalam distribusi manfaat investasi. Investasi besar cenderung lebih menarik bagi investor, namun seringkali kurang memberikan dampak langsung dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ketergantungan pada sektor tertentu juga menjadi perhatian. Meskipun sektor industri dan infrastruktur mengalami peningkatan investasi yang signifikan, sektor lain seperti pertanian dan pariwisata masih belum mendapat perhatian yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kerentanan terhadap perubahan pasar global. Kualitas investasi juga menjadi fokus perhatian.

Meskipun jumlah investasi meningkat, kualitas investasi dalam hal inovasi, peningkatan produktivitas, dan transfer teknologi masih belum optimal. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, diversifikasi ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan kualitas investasi. Selain itu, kebijakan yang kondusif bagi

investasi jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Situbondo.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kinerja Urusan Penanaman Modal adalah Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan dan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal. Dimana pada 5 tahun terakhir (2019-2023) capaian pada kedua indikator tersebut dapat mencapai 100%. Secara lebih jelas capaian kedua indikator tersebut pada masing-masing tahun selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

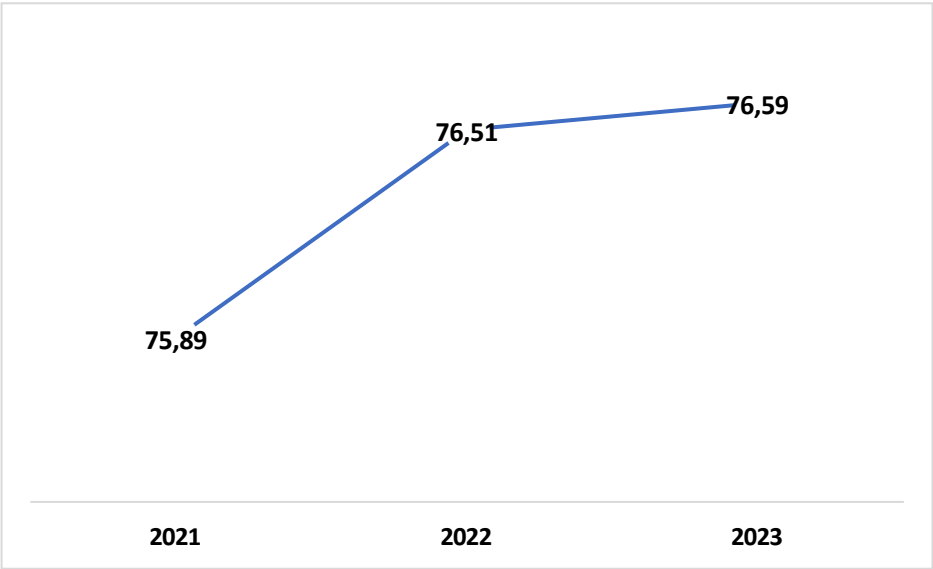
No	Indikator Sasaran	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perkembangan Total Investasi Kabupaten Situbondo	Miliar	856,37	1.445,62	1494,19	3.771,81	3.937,13
2	Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

2.3.4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) digunakan untuk menilai tingkat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di suatu wilayah. IKUB biasanya mencakup berbagai indikator yang mencerminkan hubungan antarumat beragama, seperti tingkat interaksi sosial, keterlibatan dalam kegiatan lintas agama, dan sikap saling menghormati. Indeks ini penting untuk memahami dinamika sosial di masyarakat yang multikultural dan multireligius, serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dan program-program dialog antaragama. Dengan adanya IKUB, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat untuk merancang strategi yang lebih baik dalam mempromosikan kerukunan dan mengatasi potensi konflik antarumat beragama, sehingga tercipta lingkungan sosial yang harmonis dan saling menghargai.





Gambar 2. 51 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023

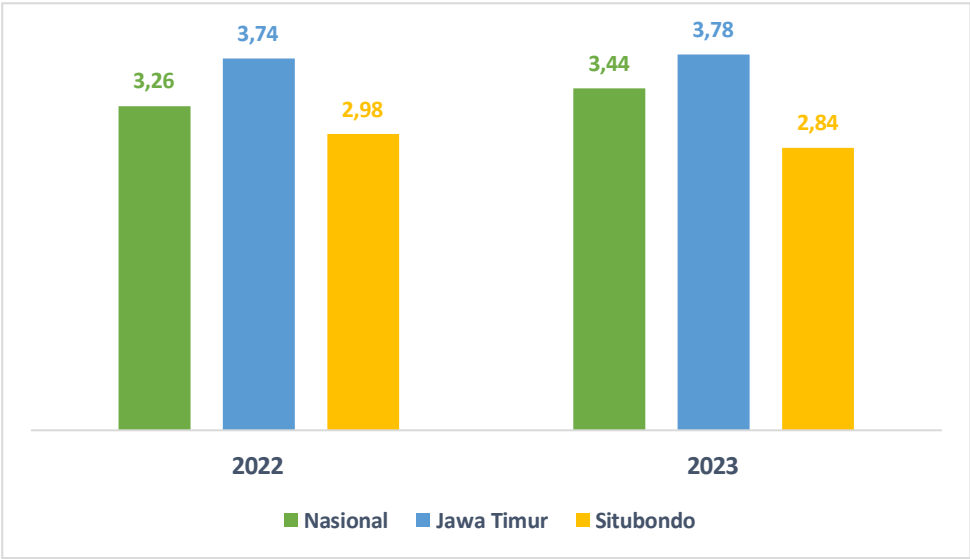
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan grafik di atas Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Situbondo menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2021, indeks ini mencatat peningkatan yang tajam, mencapai 75,89. Ini menandakan adanya langkah signifikan dalam upaya untuk mempromosikan kerukunan dan toleransi antarumat beragama di wilayah ini. Pada tahun 2022, indeks kerukunan mengalami sedikit peningkatan menjadi 76,51 dan tetap stabil pada angka 76,59 di tahun 2023. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Situbondo telah berhasil mempertahankan tingkat kerukunan yang tinggi di antara komunitas beragam keyakinan, yang menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis di daerah tersebut.

2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah mampu bersaing dalam konteks ekonomi dan sosial. Indeks Daya Saing Daerah menggabungkan berbagai faktor, termasuk kualitas infrastruktur, efisiensi birokrasi, kemampuan inovasi, dan keberlanjutan lingkungan, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan daya tarik daerah tersebut bagi investor dan pelaku ekonomi. Indeks Daya Saing Daerah juga berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya. Sebagai hasilnya, Indeks Daya Saing Daerah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Berikut adalah grafik Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Situbondo:





Gambar 2. 52 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menunjukkan bagaimana daya saing suatu daerah dibandingkan dengan nasional dan provinsi. Pada tahun 2022, IDSD Nasional tercatat sebesar 3,26, sementara Provinsi Jawa Timur berada sedikit lebih tinggi dengan nilai 3,74. Kabupaten Situbondo, pada periode yang sama, mencatat nilai terendah di antara ketiganya dengan IDSD sebesar 2,98. Namun, data tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan. IDSD Nasional meningkat menjadi 3,44, dan Provinsi Jawa Timur juga mengalami kenaikan menjadi 3,78. Meskipun terdapat peningkatan pada kedua level tersebut, Kabupaten Situbondo mengalami penurunan IDSD dari 2,98 menjadi 2,84. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah, meskipun terdapat kemajuan di tingkat nasional dan provinsi. Perubahan ini menyoroti pentingnya upaya tambahan untuk memperbaiki daya saing Kabupaten Situbondo, guna memperkuat posisinya dalam skala yang lebih luas dan memanfaatkan potensi daerah secara lebih efektif.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1 Pendidikan

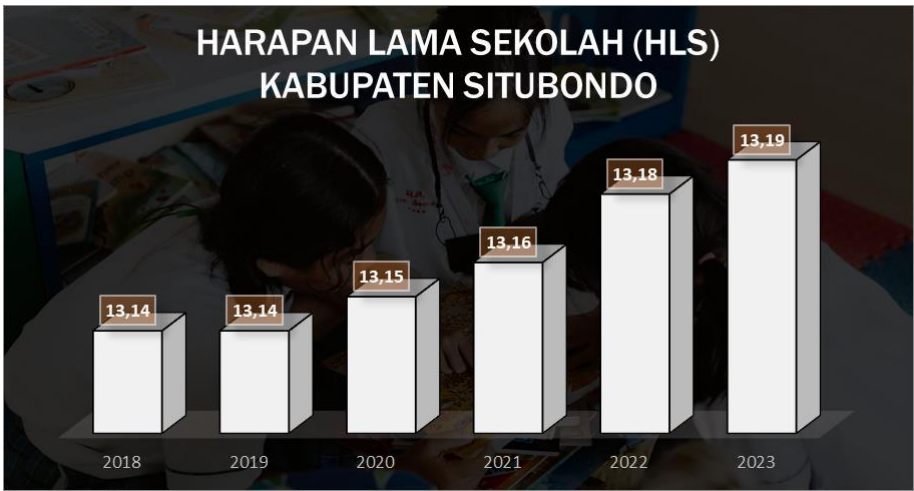
Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah termasuk pada Kabupaten Situbondo. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tombak dasar pembentukan karakter dan kepribadian sumber daya manusia dalam suatu daerah. Selain itu pendidikan merupakan aspek yang memiliki multiplier efek yang bersifat jangka panjang dan makro.

Untuk mengukur pencapaian pendidikan, angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi indikator penting. Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh



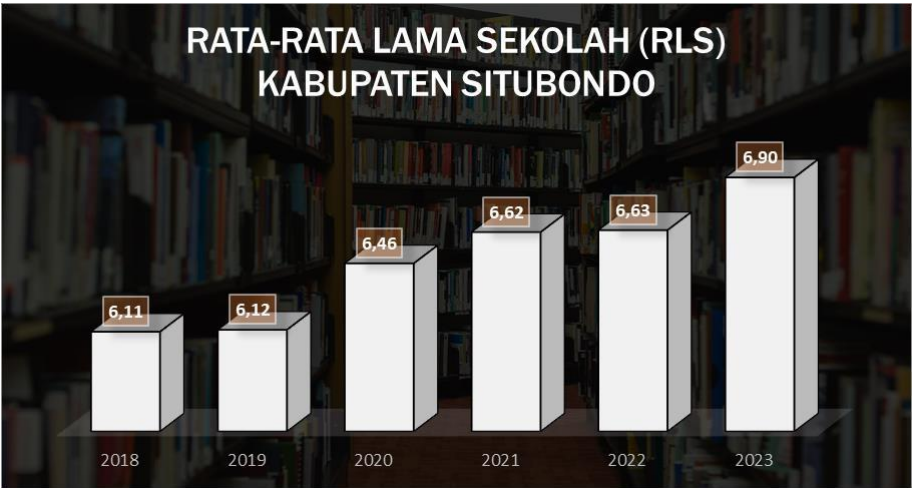
penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, di mana penduduk yang tamat SD diperhitungkan memiliki lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 9 tahun, tanpa memperhitungkan apakah mereka pernah tinggal kelas atau tidak.

Di Kabupaten Situbondo, baik HLS maupun RLS menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian pendidikan di daerah tersebut, yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Dengan terus berfokus pada pengembangan sektor pendidikan, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdampak positif pada pembangunan daerah secara keseluruhan.



Gambar 2. 53 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, 2024

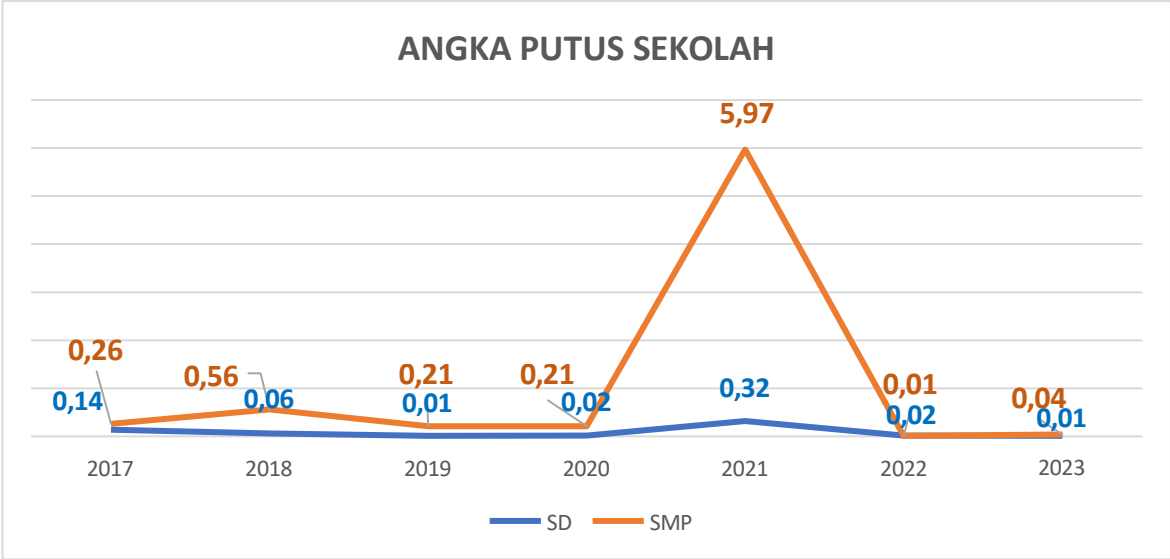


Gambar 2. 54 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, 2024

Jika dilihat lebih jauh, permasalahan yang terjadi saat ini di Situbondo pada aspek pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka Putus Sekolah (APS) adalah angka (jumlah siswa) putus sekolah per 100 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Kondisi yang terjadi adalah adanya social kultur masyarakat desa dengan kondisi ekonomi yang secara mindset akan lebih

memilih untuk bekerja dan menikah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut ilmu menyebabkan pelajar berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan. Oleh karenanya pembangunan pendidikan Inklusif dan ramah terhadap anak kedepannya penting untuk dilakukan untuk dapat memberi bekal kemampuan yang mumpuni pada generasi kedepan. Pada tahun 2021 APS tingkat SMP di Kabupaten Situbondo meningkat cukup banyak, yakni dari angka 0.21 di tahun 2020 kemudian meningkat hingga menjadi 5.97 di tahun 2021 dan selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Adapun capaian data angka putus sekolah tingkat SD dan SMP di tahun 2023 adalah sebesar 0,01 untuk tingkat SD dan 0,04 untuk tingkat SMP.



Gambar 2. 55 Angka Putus Sekolah SD dan SMP Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, 2024

Kondisi tersebut merupakan permasalahan yang harus segera ditangani mengingat pendidikan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa dan negara. Literasi masyarakat pada usia sekolah memiliki peranan penting dalam luasnya wawasan berpikir kedepannya. Pencegahan terhadap minimnya literasi masyarakat akan menurunkan kecenderungan masyarakat untuk terkurung dalam *mindset* tidak mau berkembang.

Selain itu salah satu penyebab Angka Putus Sekolah cukup tinggi di Kabupaten Situbondo dikarenakan angka pernikahan usia anak yang masih cukup tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Kondisi yang terjadi di Kabupaten Situbondo pernikahan anak di bawah usia 19 tahun cukup banyak terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Terutama pada tahun 2020 jumlah pernikahan anak sebanyak 323, perubahan peraturan usia pernikahan perempuan yang awalnya 16 tahun kemudian berubah menjadi 19 tahun menambah tingginya angka pernikahan anak pada dua tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan angka yang sama yakni sebanyak 248 pernikahan anak dibawah umur. Dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 292 pernikahan anak dibawah umur.

Tabel 2. 37 Jumlah Pernikahan Anak di bawah Usia 19 Tahun

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	22	23	113	80	58	58	16
Perempuan	15	95	20	243	190	190	276
Jumlah	37	118	133	323	248	248	292

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, 2023

Kondisi tersebut merupakan permasalahan yang harus segera ditangani mengingat pendidikan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa dan negara. Literasi masyarakat pada usia sekolah memiliki peranan penting dalam luasnya wawasan berpikir kedepannya. Pencegahan terhadap minimnya literasi masyarakat akan menurunkan kecenderungan masyarakat untuk terkurung dalam mindset tidak mau berkembang. Literasi pada pelajar tidak hanya memberikan kemampuan akademik saja, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Penuntasan literasi dan kebhinekaan harus dilaksanakan dengan maksud pencegahan terhadap degradasi perilaku pelajar, mengingat sebagai bumi santri masyarakat Kabupaten Situbondo secara kultur memegang erat peranan pendidikan yang berkarakter dan berperilaku budi. Beberapa hal lain yang juga berperan penting adalah mengenai kesesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman saat ini. Pendidikan perlu diarahkan terhadap peminatan dengan mengacu pada kompetensi masing masing peserta didik. Sehingga kedepannya pendidikan dapat dirasakan hasilnya secara nyata oleh peserta didik.

Untuk mewujudkan pendidikan yang dapat menghasilkan SDM yang unggul maka peran tenaga pendidik juga menjadi dasar penting. Tenaga pendidik harus memiliki kompetensi yang berkualitas agar dapat menjadi insan profesional dan bermartabat yang dapat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat. Kualitas pendidik yang baik diyakini akan mendorong peningkatan kualitas SDM pada suatu daerah. Sehingga tenaga pendidik harus aktif mengaktualisasi diri dengan mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Di sisi lain kesejahteraan tenaga pendidik harus selalu diperhatikan, hal ini dapat menjadi motivasi bagi tenaga pendidik serta sebagai tanda jasa terimakasih atas peran pentingnya dalam membentuk generasi penerus bangsa.

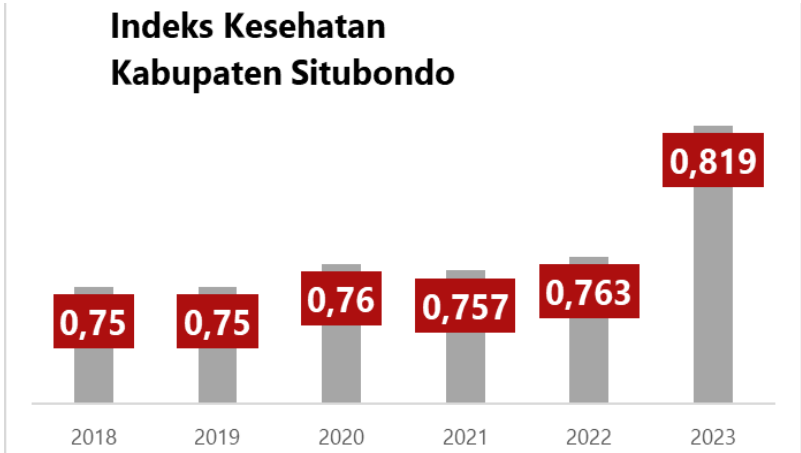
Selain beberapa hal diatas, peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor penunjang yang tidak dapat dikesampingkan. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah, tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pendidikan tidak akan berjalan efektif. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu aspek dari Delapan Standar Nasional Pendidikan sebagai penunjang untuk menjamin lancarnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini menuntut bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan sarana prasarana yang mendukung



pembelajaran peserta didik agar dengan mudah menyerap perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang.

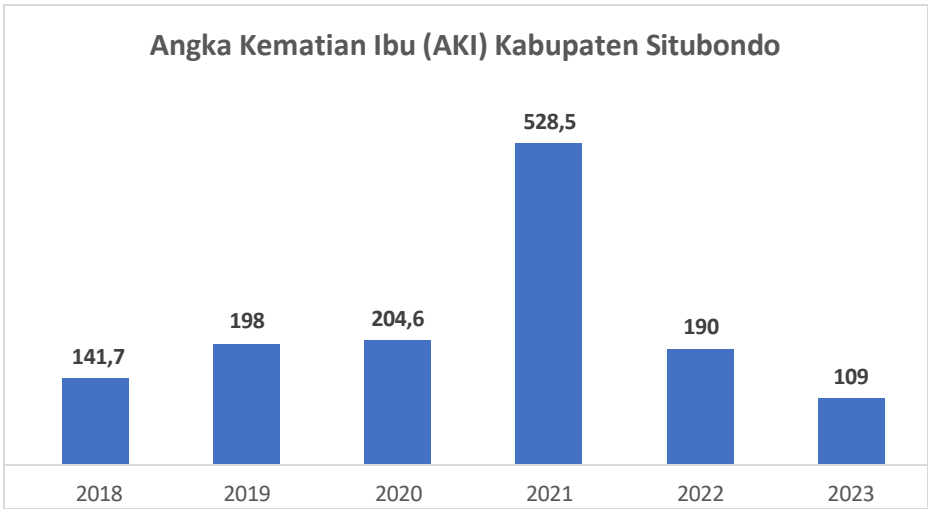
2.4.1.2 Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan kebutuhan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Pendidikan, kesehatan dan gizi, serta karakter menjadi penciri SDM berkualitas. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan suatu masyarakat adalah Indeks Kesehatan.



Gambar 2. 56 Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo 2018-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2024

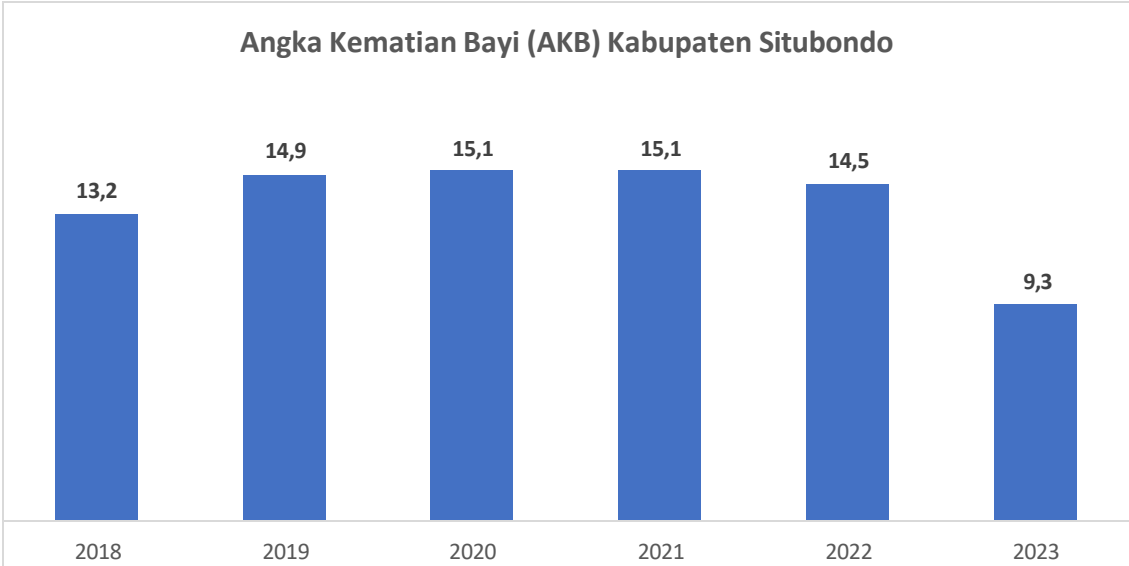
Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang positif dalam lima (5) tahun terakhir. Indeks kesehatan yang meningkat secara langsung maupun tidak langsung dapat menggambarkan peningkatan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Adapun jika dilihat lebih dalam, permasalahan kesehatan yang saat ini terjadi di Kabupaten Situbondo adalah mengenai kesehatan ibu dan bayi. Pada tahun 2021, kondisi kematian ibu menempati urutan ke 9 tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan kematian bayi menempati urutan ke 12 tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Adapun Angka Kematian Ibu sampai tahun 2021 tersebut mencapai 528.50 per 100.000 KH.



Gambar 2. 57 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Situbondo 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2024

Nilai AKI Kabupaten Situbondo termasuk tinggi jika dibandingkan dengan kondisi seharusnya adalah 0. Adapun adanya peningkatan kematian ibu yang terus terjadi disebabkan oleh minimnya pengetahuan calon ibu dalam proses kehamilan, kelahiran dan perawatan bayi. Hal ini dikarenakan sebagian ibu hamil merupakan perempuan dengan usia dibawah standar pernikahan sehingga belum matang dalam aspek reproduksi. Selain itu juga banyak terjadi pemenuhan gizi ibu hamil yang tidak optimal karena keterbatasan ekonomi, sehingga hal ini berdampak pada kesehatan Ibu maupun bayi yang dikandungnya. Kurangnya pemahaman ibu hamil akan pentingnya konsistensi cek kehamilan juga menjadi penyebab terlambatnya deteksi masalah kehamilan. Masyarakat dengan kondisi wilayah pinggiran masih cukup awam untuk memeriksakan kehamilan dan melakukan pencegahan masalah sejak dini. Sehingga hal ini juga berpengaruh pada meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) di Situbondo karena Pemeriksaan kehamilan sesuai standar merupakan komponen pelayanan kesehatan terpenting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.



Gambar 2. 58 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2024

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Situbondo, beberapa program dan inovasi pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang masih menghambat seperti tidak terintegrasinya data kesehatan Dinas Kesehatan dengan RSUD, tidak adanya akses data kesehatan dari pusat, serta belum optimalnya sarana dan prasarana inovasi rekam medik elektronik yang terintegrasi dengan OPD dan pusat. Dilain sisi, sinergitas Dinas Kesehatan dengan RSUD serta konsistensi pelaksanaan regulasi daerah masih perlu ditingkatkan. Mengingat saat ini kompetisi pemberian layanan kesehatan juga terjadi seiring tumbuhnya jumlah layanan kesehatan di Kabupaten Situbondo. Akan tetapi kondisi demografis dan ekonomi di Situbondo kurang menarik bagi para dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Situbondo serta mengentaskan Situbondo dari tingginya nilai AKI dan AKB.

Diluar masalah kesehatan ibu dan bayi, secara umum masyarakat sendiri sudah seharusnya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya

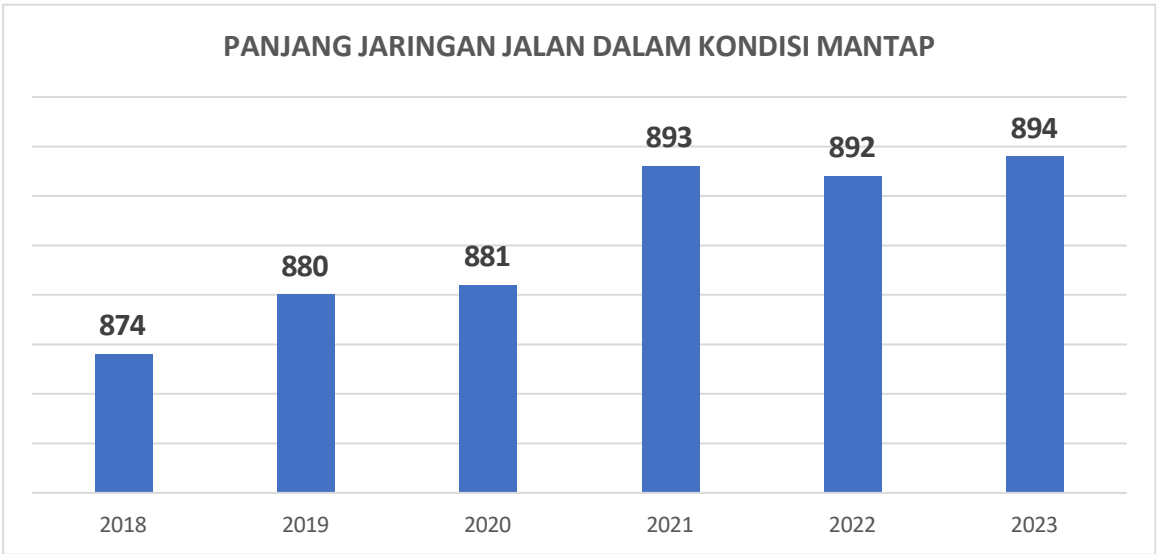


kesehatan. Kesadaran masing-masing orang untuk melakukan pencegahan penularan penyakit mematikan yang diakibatkan mobilitas sosial, melakukan pola hidup sehat serta memperhatikan status gizi. Pola hidup sehat yang salah satunya adalah dengan menerapkan sanitasi yang baik dan penggunaan air bersih yang optimal. Air bersih dan sanitasi yang layak dapat mencegah kejadian infeksi berulang, mencegah diare, mencegah penyakit yang disebabkan oleh racun tinja serta dapat mencegah kekurangan nutrisi dan stunting. Kondisi yang terjadi saat ini, masih diperlukan adanya pemerataan sanitasi dan penggunaan air bersih pada wilayah-wilayah pinggiran seperti wilayah pegunungan dan pesisir di Kabupaten Situbondo.

2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Situbondo yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sarana prasarana publik yang dimaksud salah satunya digambarkan melalui panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Perhitungan pada panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri PUPR nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/210/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi, serta Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang penetapan fungsi jalan.

Berikut merupakan capaian Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir:



Gambar 2. 59 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

Sumber: DPUPP Kabupaten Situbondo, 2024

Pada Grafik diatas persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi hingga tahun 2023. Yakni dari angka 874 hingga menjadi 894. Akan tetapi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Situbondo sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 892 dari sebelumnya sebesar 893 di tahun 2023.



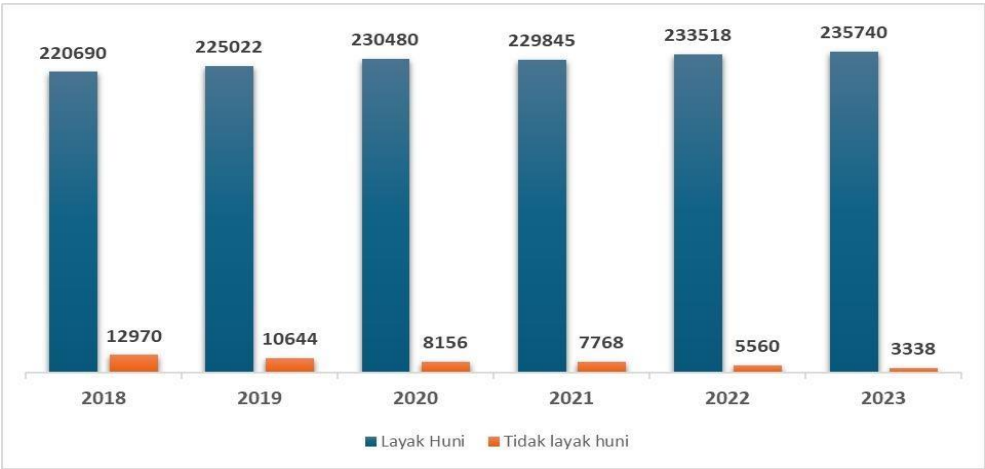
Penurunan capaian yang terjadi pada tahun 2022 dikarenakan pada tahun tersebut terdapat cukup banyak kondisi jalan yang perlu diperbaiki. Adapun total panjang jalan yang diperbaiki sepanjang 126.910 km atau 12,15% dari total ruas jalan kabupaten. Sehingga total Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Situbondo menjadi 892. Sedangkan pada tahun 2023, total panjang jalan yang diperbaiki adalah 100.865 km atau 9,66% dari total ruas jalan kabupaten. Sehingga pada tahun 2023 apabila dilihat pada total Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap hanya bertambah 2 menjadi 894.

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi daya saing usaha. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung kegiatan usaha, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Infrastruktur transportasi dapat memudahkan mobilitas barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi biaya logistik. Selain itu, infrastruktur yang baik dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi waktu dalam sistem transportasi. Infrastruktur transportasi yang baik mencakup jalan, jembatan, rel, pelabuhan, dan bandara yang dapat meningkatkan aksesibilitas antara berbagai lokasi. Semakin baik konektivitas antar wilayah, semakin cepat dan efisien waktu tempuhnya. Infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan perlu diperluas dan ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali. Jarak yang lebih besar juga dapat meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, menyebabkan kemacetan dan emisi polusi. Infrastruktur yang baik dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana, sementara bencana dapat merusak infrastruktur secara signifikan. Infrastruktur yang dirancang dengan prinsip-prinsip pembangunan tahan bencana dapat membantu mengurangi risiko dan dampak bencana.

Selain itu, infrastruktur juga memainkan peran penting dalam membentuk dan mendukung pola pemanfaatan lahan. Berkaitan dengan regulasi tata ruang dan zonasi. Undang-undang tata ruang dan regulasi pemanfaatan lahan menentukan di mana dan bagaimana infrastruktur dapat dikembangkan, serta batasan-batasan pemanfaatan lahan di sekitarnya. Jenis penggunaan lahan, apakah itu perumahan, komersil, industri, atau pertanian, mempengaruhi jenis infrastruktur yang diperlukan. Misalnya, wilayah industri mungkin memerlukan infrastruktur energi dan air yang khusus, sementara kawasan perumahan membutuhkan infrastruktur pendidikan dan transportasi publik.

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Saat ini pemenuhan kebutuhan dasar manusia menjadi peran yang sangat penting. Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Perlu diketahui bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri Pembinaan, Penyelenggaraan perumahan, Pemeliharaan, Perbaikan, Pencegahan, Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Penyediaan tanah, Pendanaan, Sistem pembiayaan dan Peran masyarakat.



Gambar 2. 60 Persentase Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

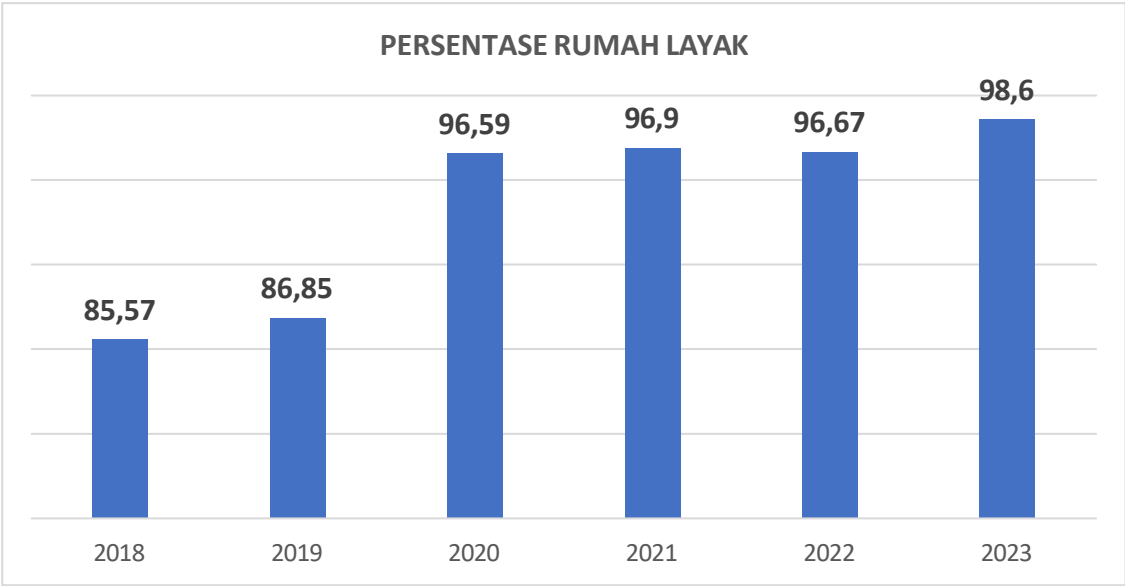
Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo, 2024

Jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni di Kabupaten Situbondo berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nampak bahwa rumah layak huni dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2018 sebanyak 220.690 rumah layak huni, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 225.022 rumah layak huni sampai dengan tahun 2023 jumlah rumah layak huni menjadi 235.740 rumah layak huni. Hal ini berbanding terbalik dengan rumah tidak layak huni di Kabupaten Situbondo dimana sejak tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami penurunan dan menjadi hal yang baik bagi Kabupaten Situbondo. Tercatat pada tahun 2018 sebanyak 12.970 rumah tidak layak huni yang kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10.644 rumah tidak layak huni, dan pada tahun 2020-2023 kembali mengalami penurunan menjadi 3.338 rumah tidak layak huni.

Urban sprawl memiliki dampak yang signifikan pada perumahan dan kawasan permukiman. Urban sprawl, yang sering kali ditandai oleh pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali, dapat memengaruhi karakteristik dan dinamika perumahan serta kawasan permukiman secara umum. Urban sprawl seringkali diiringi oleh pengembangan perumahan yang tidak terkendali di luar batas perkotaan. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan perumahan yang cenderung linier dan kurang terorganisir, mempengaruhi struktur dan tata ruang kawasan permukiman. Urban sprawl cenderung menciptakan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah, di mana rumah-rumah tersebar di area yang luas. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup, transportasi, dan aksesibilitas ke fasilitas umum, karena jarak yang lebih jauh antar tempat-tempat tersebut.

Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari kebijakan perumahan hingga pengelolaan kawasan permukiman. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan perumahan. Kepercayaan yang tinggi dapat mendukung penerimaan masyarakat terhadap program-program perumahan yang diimplementasikan oleh pemerintah, termasuk program pembiayaan perumahan, subsidi, atau kebijakan penyediaan rumah bagi kelompok rentan. Disamping itu Perumahan dan kawasan permukiman yang baik merancang dan membangun dapat meminimalkan risiko serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik setelah terjadi bencana. Bangunan yang

dirancang dengan ketahanan terhadap gempa, banjir, angin topan, atau bencana lainnya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerusakan dan bahaya bagi penghuninya. Mengetahui potensi risiko bencana dapat membantu dalam menentukan lokasi yang aman untuk perumahan dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.



Gambar 2. 61 Persentase Rumah Layak Tahun 2018-2023
Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, 2024

Persentase rumah layak huni di kabupaten situbondo mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 di angka 96,59%, dengan presentase di tahun sebelumnya yakni 86,85% yang berarti naik sebanyak 29,04%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 69,9% dan di tahun 2023 menjadi 98,6%. Walaupun Prosentase kenaikan dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan tetapi pemerintah sudah menunjukkan upaya untuk terus meningkatkan presentase rumah layak huni. Sementara itu, tantangan pemerintah masih banyak untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni di kabupaten situbondo. Rumah tidak layak huni sering kali menyebabkan masalah kesehatan dan keamanan bagi penghuninya, serta dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap perumahan yang layak di masyarakat. Solusi untuk masalah rumah tidak layak huni melibatkan berbagai upaya, termasuk perbaikan infrastruktur, kebijakan perumahan yang lebih inklusif, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kondisi perumahan mereka.

Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran kritis dalam pembangunan di daerah, karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari penduduk. Infrastruktur perumahan yang layak, seperti rumah yang aman dan terjangkau, dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Ini memberikan akses ke tempat tinggal yang nyaman dan aman. Rumah tidak layak huni dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan penghuninya, seperti risiko penyakit, kecelakaan, atau trauma. Namun penting untuk diperhatikan berkaitan dengan Lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang baik berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Fasilitas sanitasi yang memadai, sistem pengelolaan limbah, dan akses ke air bersih semuanya membantu mengurangi risiko penyakit.



2.4.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Melalui penyelenggaraan urusan tersebut diharapkan dapat menjaga kondusifitas dan stabilitas politik, sosial, hukum, ekonomi dan budaya serta harmonisasi masyarakat di Kabupaten situbondo. Sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan bisa berjalan secara dinamis. Representasi keberhasilan pemerintah Kabupaten situbondo dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diterjemahkan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 38 Indikator Kinerja Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tindak Pidana atau Kriminalisasi	369	806	459	0	915	756
Persentase Tanggap Kebakaran (Response Time Rate Fire)	-	-	-	42,1%	79%	89%
Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	23%
Indeks Ketahanan Daerah	0,32	0,44	0,7	0,71	0,72	0,73
Nilai Toleransi Daerah	-	-	-	72,8	81,8	81,28
Nilai Stabilitas Daerah	-	-	-	57,2	72,68	76,65
Persentase LSM yang mendapatkan pembinaan wawasan pancasila	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo 2024 (diolah)

Berdasarkan data di atas, jumlah tindak pidana di kabupaten situbondo, menunjukkan grafik yang fluktuatif dari tahun ke tahun terus meningkat. Tercatat di tahun 2018 terdapat 369 kasus, kemudian di tahun 2019 meningkat hampir 3 kali lipat di angka 806 kasus. Namun, di tahun 2020 kembali menurun hingga 459 kasus. Sedangkan di tahun 2021 masih belum ada data kasus tindak pidana yang tercatat. Kemudian, di tahun 2023, kasus yang tercatat mengalami Penurunan daripada tahun sebelumnya sebesar 756 kasus.

Aktivitas premanisme dapat mengancam ketentraman dan ketertiban umum karena dapat menimbulkan berbagai gangguan. Pada umumnya Premanisme merupakan tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan keuntungan atau kekuasaan, namun saat ini premanisme berkembang hingga pada lingkup

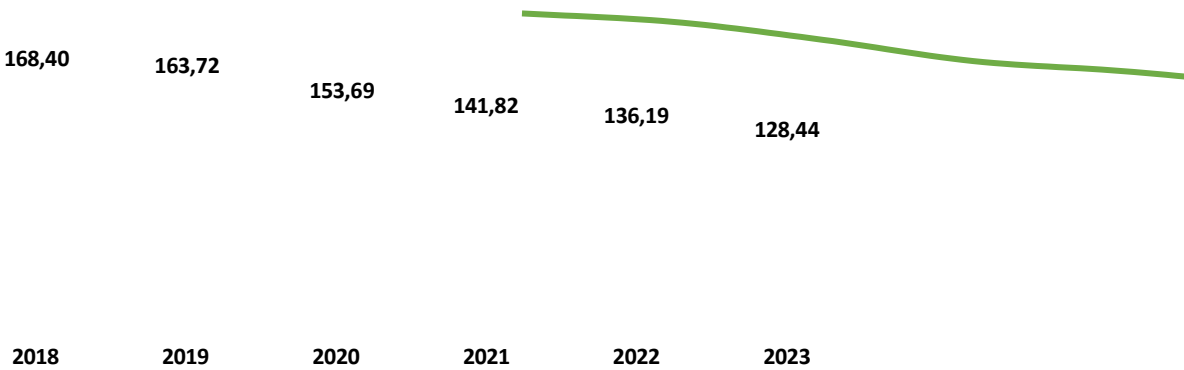


birokrasi dan digitalisasi. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap stabilitas daerah, dimana diharapkan dengan situasi yang stabil, dapat menciptakan suasana yang kondusif dan aman, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Selain itu, ketentraman dan ketertiban umum dapat dipengaruhi oleh bencana yang dapat menimbulkan berbagai gangguan aktivitas masyarakat seperti aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas pendidikan.

Kabupaten situbondo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi bencana banjir. Kabupaten situbondo belum memiliki kajian terkait pemetaan tingkat risiko banjir dan perangkat rencana mitigasi bencana. Kejadian bencana tentu telah memberikan dampak kemanusiaan, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta mempengaruhi aktivitas keseharian masyarakat. Oleh karena itu untuk mengukur tingkat ketangguhan bencana dan kualitas penanganan bencana di Kabupaten situbondo, yakni dengan indeks risiko bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau potensi kerentanan suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Sebagai indikator, IRB digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan risiko bencana. Capaian IRB dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam merancang strategi mitigasi yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memperhatikan tiga komponen yang terdiri dari *faktor hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Berikut merupakan capaian indeks risiko bencana di Kabupaten Situbondo.

Indeks Risiko Bencana



Gambar 2. 62 Indeks Risiko Bencana Tahun 2018-2023
Sumber: BPBD Kab. Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, indeks risiko bencana mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 berada di angka 168,40 sampai pada tahun 2023 di angka 128,44. Sementara itu, Indeks Kapasitas Daerah, Kabupaten Situbondo di tahun 2023 masih masuk dalam kategori sedang. Sehingga perlu upaya manajerial dan taktis serta penguatan sinergitas antar stakeholder maupun kerjasama antar daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten situbondo.



2.4.1.6 Sosial

Pemantauan perkembangan jumlah PPKS dapat digunakan sebagai salah satu indikator sosial ekonomi. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa penurunan PPKS di Kabupaten Situbondo mengalami fluktuatif di setiap tahun. Tahun 2018 persentase penurunan PPKS berada di angka 3,56%, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 11,07%, tahun 2020 turun lagi menjadi (2,12%). Peningkatan paling banyak yakni pada tahun 2020 menuju tahun 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar 74,88%. Sampai pada tahun 2023 turun sampai dengan 0,11%. Peningkatan penurunan PPKS secara signifikan di setiap tahunnya mengindikasikan hal yang positif karena semakin meningkatnya angka penurunan PPKS maka akan bertambah pula angka masyarakat yang berstatus sejahtera.

Tabel 2. 39 Data PPKS Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS Kabupaten	satuan	42.026	41.134	83.511	81.311	78.200
2	Target PPKS yang Ditangani	satuan	5.680	1.062	2.200	2.515	2.565
3	Realisasi PPKS yang ditangani	satuan	5.229	892	19.254	65.372	40.729
4	Sisa Jumlah PPKS Kabupaten	satuan	36.797	40.242	64.257	15.939	38.067
6	Persentase PPKS dari Jumlah Penduduk	%	6,18	5,98	12,17	11,85	11,49
7	Persentase Penanganan PPKS	%	11,07	2,12	-	-	-
	Persentase Penurunan PPKS	%	-	-	77	19,60	0,11

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, 2024

Tabel di atas menjabarkan mengenai data PPKS di Kabupaten Situbondo diantaranya yakni: Jumlah PPKS Kabupaten Situbondo, Target PPKS yang ditangani, Realisasi PPKS yang di tangani, Sisa Jumlah PPKS Kabupaten Situbondo, Jumlah Keseluruhan Penduduk Situbondo dan yang terakhir Persentase PPKS dari Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo.



Penanganan terhadap PPKS serta dampaknya terhadap penurunan jumlah PPKS menjadi isu Kepercayaan Publik terhadap Instansi Pemerintah serta menjadi tolak ukur Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan dalam aspek sosial. Penanganan terhadap masalah sosial seperti PPKS menjadi dilematis pemerintah bidang sosial, hal ini dikarenakan keterbatasan kewenangan tanpa adanya laporan dari pihak keamanan seperti Satpol PP maupun kepolisian. Hal lain yang menjadi kendala adalah pelaku PPKS merupakan objek yang sangat dinamis, yakni dengan adanya urbanisasi PPKS seperti keberadaan anak punk yang secara periodik hanya singgah namun tetap meresahkan warga, munculnya ODGJ, orang/anak-anak terlantar yang disebabkan kondisi keluarga dan lain sebagainya.

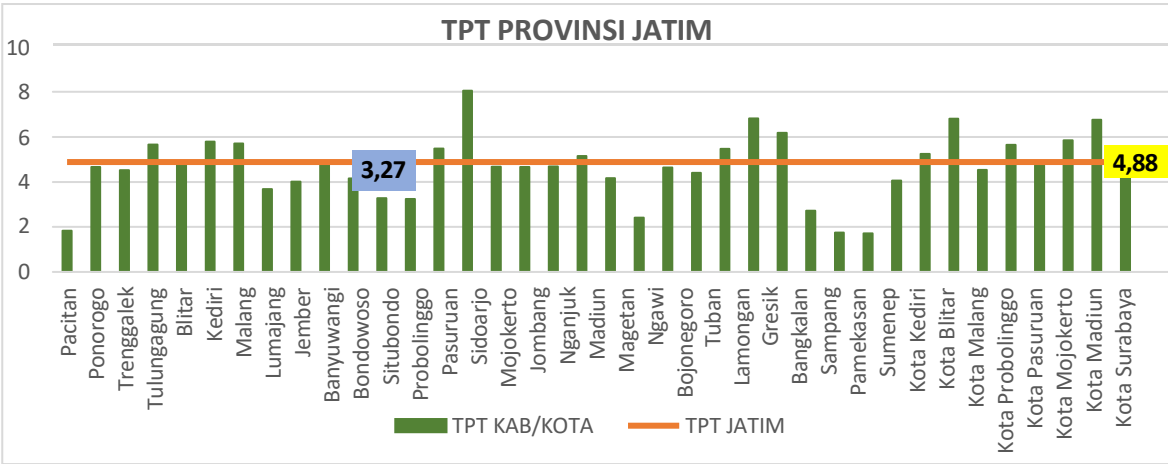
Oleh karena itu, penanganan terhadap masalah sosial perlu dilakukan dengan hati-hati, tegas dan tepat sasaran. Tingginya egosentris dalam pendataan sosial menimbulkan hambatan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan layanan sosial. Hal ini juga akan berdampak pada ketepatan sasaran pemberian bantuan dan penanganan masalah sosial. Akibatnya penerima bantuan yang tidak layak akan tetap terkurung dalam mindset tidak mau berkembang.

2.4.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1 Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja menjadi salah satu aspek layanan non dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di Situbondo, terdapat kurangnya ketertarikan anak-anak untuk melanjutkan bekerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal dan pelatihan kerja, serta kurangnya kesempatan kerja yang menarik bagi mereka di daerah. Dampaknya adalah rendahnya jumlah tenaga kerja yang tersedia di Situbondo, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Di sisi lain, terlihat tingginya minat anak-anak untuk bekerja sebagai konten kreator dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh popularitas media sosial dan platform digital, yang memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka buat. Konten kreator telah menjadi salah satu profesi yang diminati oleh generasi muda saat ini, karena fleksibilitas dan potensi penghasilan yang tinggi. Namun, kita juga perlu menyadari adanya tingkat pengangguran terbuka di Situbondo.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk bekerja sama dalam menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan menarik bagi anak-anak di Kabupaten Situbondo. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan formal dan pelatihan kerja, pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi, dan dukungan untuk pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kurangnya ketertarikan anak-anak untuk bekerja di Situbondo dan mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi. Berikut ini merupakan grafik persentase TPT Per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur:

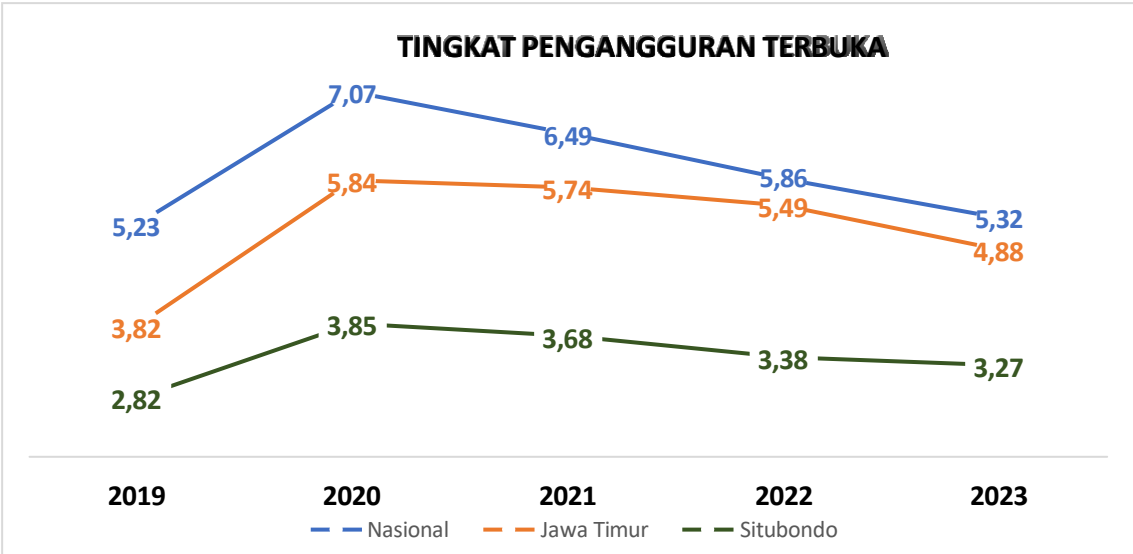


Gambar 2. 63 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan data yang terlihat pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi. Pada tahun 2023, persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo adalah sebesar 3,27%, sementara rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi mencapai 4,88%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki Persentase TPT dengan angka tertinggi di Tahun 2023 yakni Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,05%.

Namun, meskipun Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Situbondo dapat terus mengoptimalkan potensi ekonominya dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan.



Gambar 2. 64 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur terus mengalami penurunan secara konsisten. Bahkan, saat ini angka TPT Jawa Timur lebih rendah daripada TPT nasional. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 6 November 2023 menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2023, TPT Jawa Timur mencapai angka 4,88 persen atau sekitar 1,17 juta jiwa. Angka ini lebih rendah 0,61 persen poin dibandingkan dengan TPT pada bulan Agustus 2022, yang mencapai 5,49 persen atau sekitar 1,26 juta jiwa. Penurunan TPT di Jawa Timur juga terjadi dengan tingkat yang tinggi, mengingat sebelumnya hanya terjadi penurunan sebesar 0,25 persen poin dalam periode Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Namun, dalam periode Agustus 2022 hingga Agustus 2023, terjadi penurunan sebesar 0,61 persen poin. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam mengatasi masalah pengangguran di Jawa Timur

Pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Situbondo juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen menjadi 3,27. Penurunan ini menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Situbondo mampu memenuhi permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Situbondo.

Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dilakukan dengan upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Berikut merupakan indikator beserta capaiannya selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. 40 Capaian Indikator Dinas Ketenagakerjaan

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan	Lowongan Kerja	n/a	n/a	741	268	1.902
2	persentase peserta pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100
3	Prosentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	n/a	n/a	n/a	95,7	95,5
4	Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100
5	Prosentase penempatan transmigran	%	100	100	0	0	0
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72.20	73.74	73.17	71.63	75.28

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024



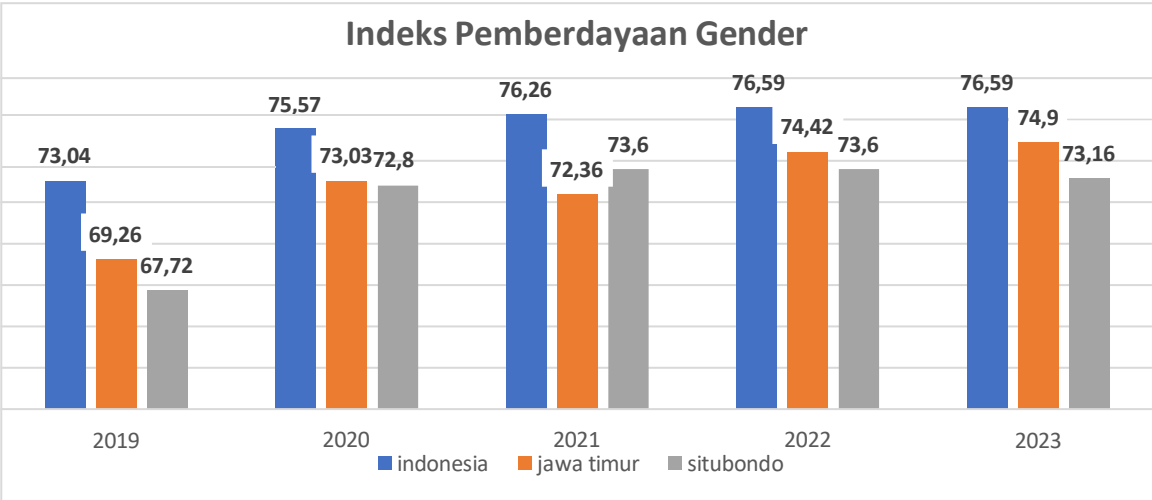
2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan yang sangat penting. Di Situbondo, terdapat berbagai tantangan serius yang perlu diatasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya pernikahan dini yang terjadi. Pernikahan dini tidak hanya menghambat perkembangan fisik dan mental anak perempuan, tetapi juga berdampak pada tingginya angka stunting pada anak. Stunting adalah kondisi ketika anak mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Selain itu, masih ada masalah perdagangan orang dan eksploitasi anak di Situbondo. Praktik ini mengancam keamanan dan masa depan anak-anak yang menjadi korban. Mereka dipaksa untuk bekerja serta kehilangan hak-hak mereka, dan tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Upaya perlindungan yang lebih kuat perlu dilakukan untuk memerangi perdagangan orang dan eksploitasi anak, serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.

Pemberdayaan perempuan di Situbondo adalah fokus penting dalam menghadapi tantangan Perempuan berharap memiliki penghasilan sendiri dan mandiri secara ekonomi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung usaha mikro dan kecil bagi perempuan. Masih ada masalah serius dalam kekerasan terhadap perempuan di Situbondo. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis masih terjadi dalam berbagai bentuk dan lingkungan. Perlindungan dan penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kekerasan. Di sisi politik, representasi dan partisipasi perempuan masih menjadi masalah. Anggota parlemen perempuan sering kali hanya dijadikan formalitas di partai politik. Budaya patriarki masih menghalangi perempuan untuk memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Pendidikan dan kesadaran harus ditingkatkan untuk mencegah pernikahan dini, stunting pada anak, dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan perlu didukung melalui program pelatihan dan akses keuangan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak harus menjadi prioritas, dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Budaya patriarki perlu diubah melalui pendidikan dan kesadaran gender yang lebih luas, sehingga perempuan dapat memiliki peran yang setara dan kuat dalam masyarakat.

Perempuan dalam kaitan dengan pembangunan dan hasil pembangunan selalu menarik jika dikaji dan dibanding- bandingkan antar tahun maupun antar Kabupaten /Kota. Dari tahun ke tahun perempuan selalu ada peningkatan dalam perannya di berbagai bidang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan selalu meliris hasil dari pembangunan, dan bagaimana peran dalam pembangunan. Sasaran program adalah perempuan dan anak yang rentan terhadap tindakan pidana kekerasan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak melalui upaya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan sosialisasi serta advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang mendukung yaitu: Sosialisasi perlindungan perempuan dan

anak korban kekerasan, orientasi UU tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta relawan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dan hasilnya adalah terpecahkannya dan terselesaikannya beberapa permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



Gambar 2. 65 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2023 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, 2024

Selain itu ada beberapa indikator lain yang menjadi tolak ukur keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tertangani	Kasus	32	142	41	37	49
2	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	30%	36%	100%	100%	100%
4	Presentase Kelompok Usaha	%	67,81	62,13	62,13	68	68



No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Perempuan Mandiri						
5	Presentase Organisasi Perempuan yang Berdaya	%	100%	90%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan table diatas pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Situbondo terlihat pada indikator perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu memilih capaian yang stabil yakni 100% selama 5 tahun terakhir, sedangkan indikator perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2023 memiliki capaian sebesar 100% pada tahun 2022 sebesar 100% dan 100% pada tahun 2021. Serta indikator Presentase Kelompok Usaha Perempuan Mandiri memiliki angka capaian 62,13% pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi menjadi 68% pada tahun 2022 dan tahun 2023 Indikator yang terakhir yakni persentase organisasi perempuan yang berdaya memiliki capaian hasil pada tahun 2021 yakni 100% dan sampe pada tahun 2023 tetap bertahan pada 100%.

2.4.2.3 Pangan

Ketahanan Pangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Implementasi Kebijakan dan Program Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan Sub-Sistem Ketahanan Pangan, yang mencakup : (1) Sub-Sistem Ketersediaan Pangan; (2) Sub-Sistem Keterjangkauan Pangan; serta (3) Sub-Sistem Konsumsi Pangan dan Gizi. Kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian (a) Angka Pola Pangan Harapan; (b) Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras), dan (c) Stabilisasi Harga Bahan Pangan Strategis di Tingkat Konsumen.

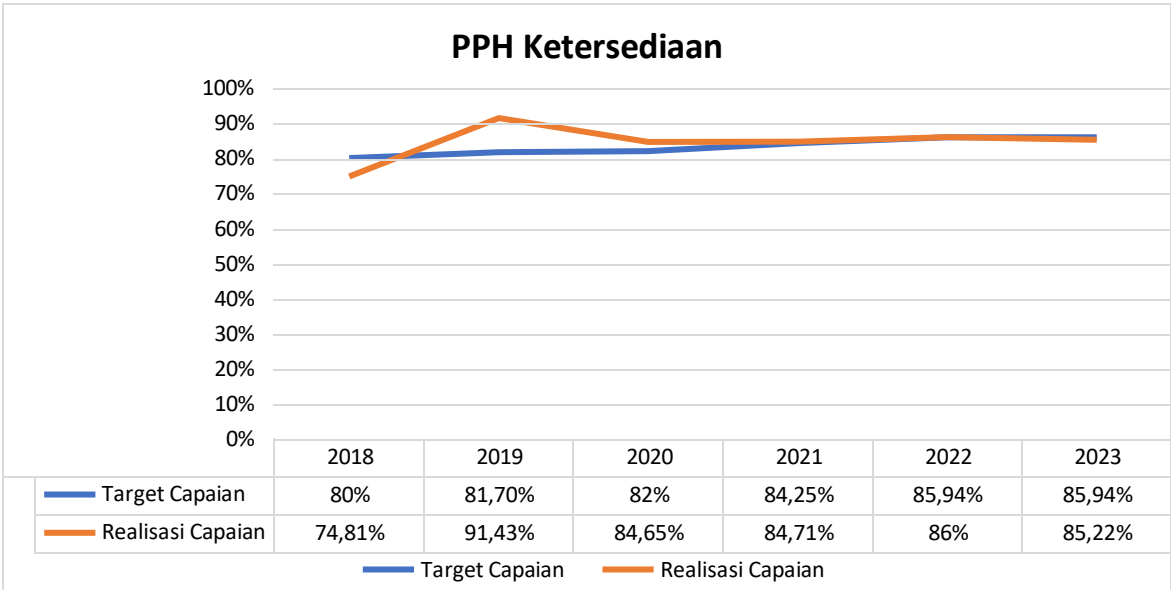


Tabel 2. 42 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Diversifikasi pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ketersediaan Energi	kkl/ kapita/ hr	2524,66	2814,98	2.154,09	2.454,72	2.550,24	2.517,33
2	Jumlah Ketersediaan Protein	gr/kapita / hr	113,74	122,05	61,43	76,28	79,39	78,58
3	Jumlah LPM yang dibangun	%	N/A	N/A	N/A	1	1	-
4	Prosentase Koefisien Keragaman Harga Tingkat Konsumen	%	39,06	13	13,29	10,78	12,80	N/A
5	Prosentase Keragaman Konsumsi Pangan	%	72,1	88,1	80,2	78,47	83,28	85,22
6	Prosentase capaian keamanan pangan segar	%	100	83,33	80	100	58,82	86,96
7	Jumlah desa rawan pangan yg diintervensi	Desa	N/A	N/A	N/A	1	1	1

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, 2024

Ketahanan pangan merupakan salah satu ukuran dalam melihat ketercukupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang layak (bergizi). Adapun indikator dari keterpenuhan pangan tersebut adalah Skor Pola Pangan Harapan masyarakat. Berikut adalah Skor Pola Pangan Harapan masyarakat di Kabupaten Situbondo tahun 2018 hingga tahun 2023:



Gambar 2. 66 Skor Pola Pangan harapan Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, 2024

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas ketersediaan pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan yang ditetapkan minimal 2400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH Ketersediaan selama 5 (lima) tahun secara keseluruhan sudah melebihi target, kecuali pada Tahun 2018, dimana realisasi capaian kurang dari target, bila dibandingkan target rata – rata capaian sebesar 81,54% dengan realisasi sebesar 83,65%. Namun demikian rata – rata capaian sebesar 83,65% dinilai masih jauh dari angka ideal yaitu 100 %, hal ini menunjukkan bahwa kualitas keragaman kelompok bahan pangan yang tersedia di Kabupaten Situbondo belum seimbang pada 9 (sembilan) kelompok bahan pangan.

Tabel 2. 43 Skor PPH Konsumsi Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Kelompok Pangan	Skor Maks	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,85	1,23	0,97	0,99	1,04	1,08
3	Pangan Hewani	24,0	10,12	18,67	16,74	14,94	17,56	15,88
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,23	0,19	0,25	0,21	0,25	0,25
6	Kacang-Kacangan	10,0	9,15	9,11	8,02	8,70	9,36	9,61
7	Gula	2,5	2,5	2,14	2,07	1,99	2,09	2,11
8	Sayur dan Buah	30,0	19,24	26,8	22,16	21,64	22,98	26,30
	Total	100	72,09	88,15	80,22	78,47	83,28	85,22

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Dari tabel di atas, skor PPH kelompok pangan padi-padian (padi, jagung, terigu) mencapai Skor Maksimal (25,0). Hal ini dapat menggambarkan bahwa kecukupan gizi karbohidrat sudah tercukupi dengan baik, akan tetapi sebagai makanan pokok (sumber zat tenaga), kelompok pangan padi-padian mendominasi dibanding umbi-umbian, dimana skor PPH untuk umbi-umbian masih jauh dari skor maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa beras (Nasi) tetap menjadi menu utama dalam pemenuhan karbohidrat, dan pemakaian terigu juga mendominasi sebagai bahan campuran membuat olahan pangan seperti kue atau jajanan karena resep olahan pangan banyak yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasar.



Skor PPH Maksimum juga terjadi pada kelompok pangan minyak dan lemak. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap minyak dan lemak telah mencukupi standart ideal konsumsi. Dominasi konsumsi terhadap minyak kelapa sawit dikarenakan masyarakat cenderung mengolah bahan pangannya dengan cara menggoreng, hampir semua olahan lauk pauk (tempe, tahu, ikan) diolah dengan digoreng karena lebih praktis dari sisi bumbu. Bahkan mengolah sayur pun dengan menumis bukan direbus. Selain itu jajanan atau olahan pangan juga banyak yang digoreng, bahkan penjual gorengan (pisang goreng, tahu petis, ote-ote, kripik singkong) banyak sekali dijumpai di pinggir jalan. Fenomena penggemar krupuk juga mempengaruhi, banyak orang merasa kurang nikmat jika makan tanpa krupuk.

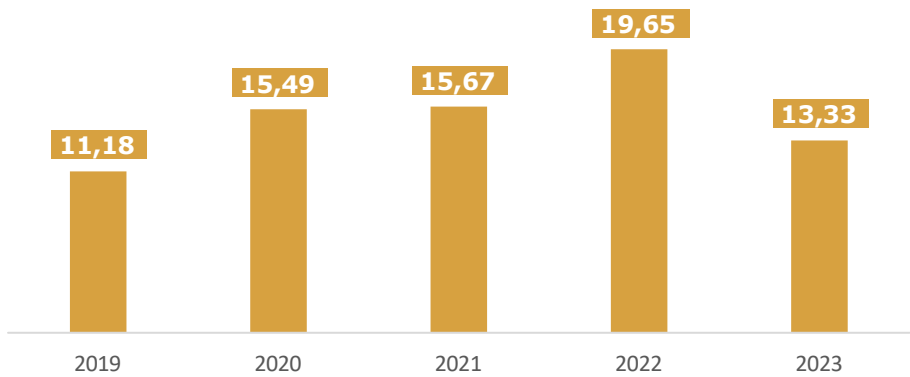
Kelompok pangan Gula juga memiliki skor PPH yang relatif mendekati Skor Maksimum (2,5), sehingga dapat diartikan bahwa konsumsi kelompok pangan ini cukup baik dilihat dari kecukupan gizi. Berdasarkan data pola konsumsi pangan Gula Pasir pastinya mendominasi konsumsi gula karena hampir semua makanan dan minuman yang membutuhkan rasa manis akan memakai gula pasir sebagai bahan tambahannya. Pemakaian gula pasir bukan hanya pada makanan dan minuman sehari-hari seperti teh dan kopi, pelaku usaha, khususnya penjual minuman seperti es campur, sop buah, es puding, dan warung makan juga memakai gula pasir sebagai pemanis pada dagangannya (minumannya). Hanya sebagian kecil makanan atau jajanan saja yang menggunakan gula merah sebagai bahan pemanisnya seperti kue lupis, putu, apem, serabi dan es dawet.

Skor PPH yang masih jauh dari Skor Maksimal adalah konsumsi buah dan sayur. Diperlukan intervensi secara intensif untuk membiasakan masyarakat agar mengkonsumsi sayur dan buah. Beberapa masyarakat tidak setiap hari mengkonsumsi sayur bahkan beberapa orang ada yang tidak suka sayur atau hanya mau memakan jenis sayur tertentu saja, bahkan ketika ikan, tempe atau tahu telah diolah menjadi lauk yang berkuah maka sayur sudah tidak lagi dikonsumsi. Menurunnya skor PPH untuk sayur juga disebabkan makin beragamnya macam sayur dalam daftar survey sehingga mempengaruhi jumlah secara kuantitatif akan tetapi konsumsi sayur masyarakat secara kualitatif cukup tinggi dan beragam. Rendahnya skor PPH konsumsi buah karena masyarakat tidak terbiasa mengkonsumsi buah setiap hari, buah untuk sebagian besar masyarakat masih berupa bahan pangan yang mewah karena harganya mahal. Disamping daya beli, kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah setiap hari masih sangat kurang, biasanya konsumsi buah hanya sesekali saja. Penjualan buah yang harus dalam jumlah banyak (pisang harus beli sesisir, buah lainnya setidaknya harus beli 0,5 kg) juga mempengaruhi minat masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Dengan pendekatan Pola Pangan Harapan, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (*nutritional adequacy*), akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung oleh citarasa (*palatability*), daya guna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas, dan kemampuan daya beli (*affordability*). Selain dilihat melalui Pola Pangan Harapan, ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Situbondo juga digambarkan melalui Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yang menggambarkan proporsi penduduk

di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Sehingga Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dapat dijadikan pedoman untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi masyarakat Kabupaten Situbondo. Nilai Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir terlihat cukup fluktuatif, yakni dari angka 11.18 di tahun 2019 yang kemudian terus meningkat pada tiga tahun berikutnya hingga menjadi 19.65 di tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Situbondo dapat kembali menurun hingga menjadi 13.33.

**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment)**



**Gambar 2. 67 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Situbondo 2019-2023**

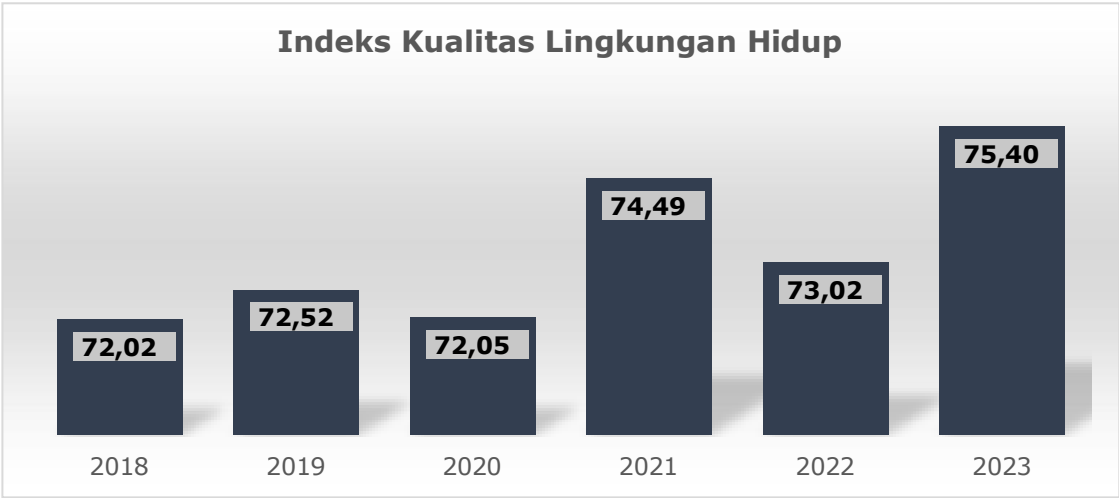
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Berdasarkan dengan surat edaran Nomor 100.4.4.1/1627/SJ tentang Pengelolaan Rumah Potong Hewan Ruminansia/Unggas ketahanan pangan juga harus mendukung terkait kualitas pangan. Akan tetapi saat ini masih adanya sektor peternakan yang belum memiliki Rumah Potong Hewan yang kapasitasnya memadai, modern dan tempat yang higienis. Selain itu Rumah Potong Hewan. Adanya surat menteri dalam negeri Republik Indonesia tersebut mengharuskan dan mewajibkan RPH sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan pengajuan sertifikasi halal. Akan tetapi saat ini di Kabupaten Situbondo kondisi RPH masih belum sesuai dan RPH yang modern serta higienis masih kurang. Sehingga perlunya penekanan pada OPD terkait untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

2.4.2.4 Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang tercermin dengan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH terdiri atas nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2023 indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten situbondo terealisasi sebesar 75,40 dengan capaian sebesar 104,45% dari target 72,19-72,22. Dalam upaya mencapai realisasi tersebut, indeks kualitas lingkungan hidup diampu oleh dinas lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang tercermin dengan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Berikut merupakan gambaran variabel IKLH dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:





Gambar 2. 68 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, 2024

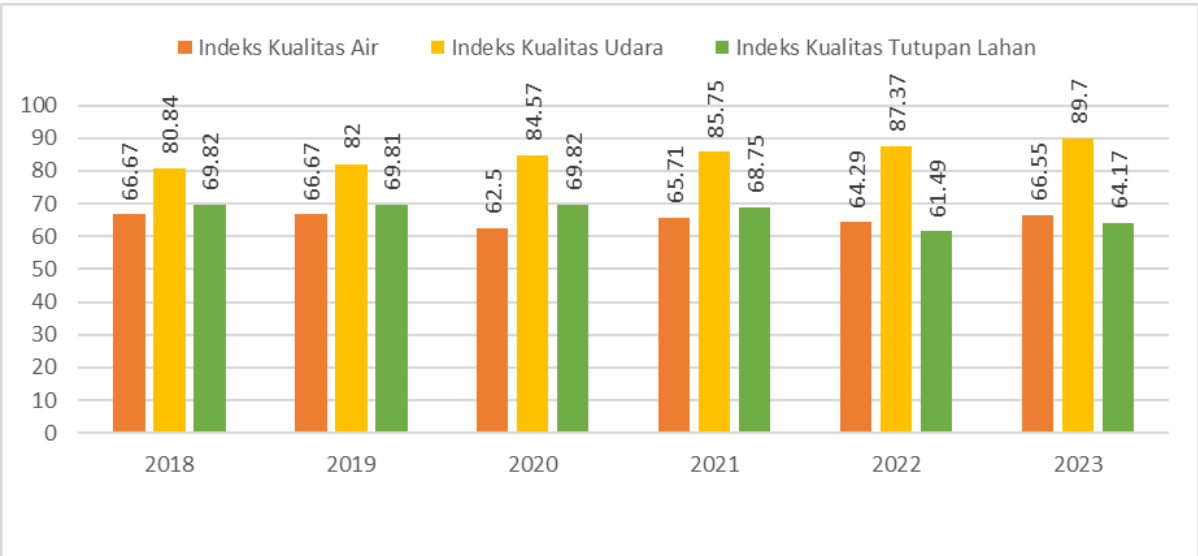
Dalam menganalisa IKLH diketahui dengan melihat hasil dari nilai IKLH yang didapat dan masuk dalam kategori mana nilai IKLH tersebut. Berikut adalah kategori dan range nilai IKLH setiap IKLH:

Tabel 2. 44 Kategori dan Range Nilai IKLH

KATEGORI	RANGE NILAI
Unggul	>90
Sangat baik	82 – 90
Baik	74 – 82
Cukup	66 – 74
Kurang	58 – 66
Sangat Kurang	50 – 58
Waspada	<50

Sumber: IKLH Kabupaten Situbondo, 2024

pembentuk IKLH yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan adalah sebagai berikut:



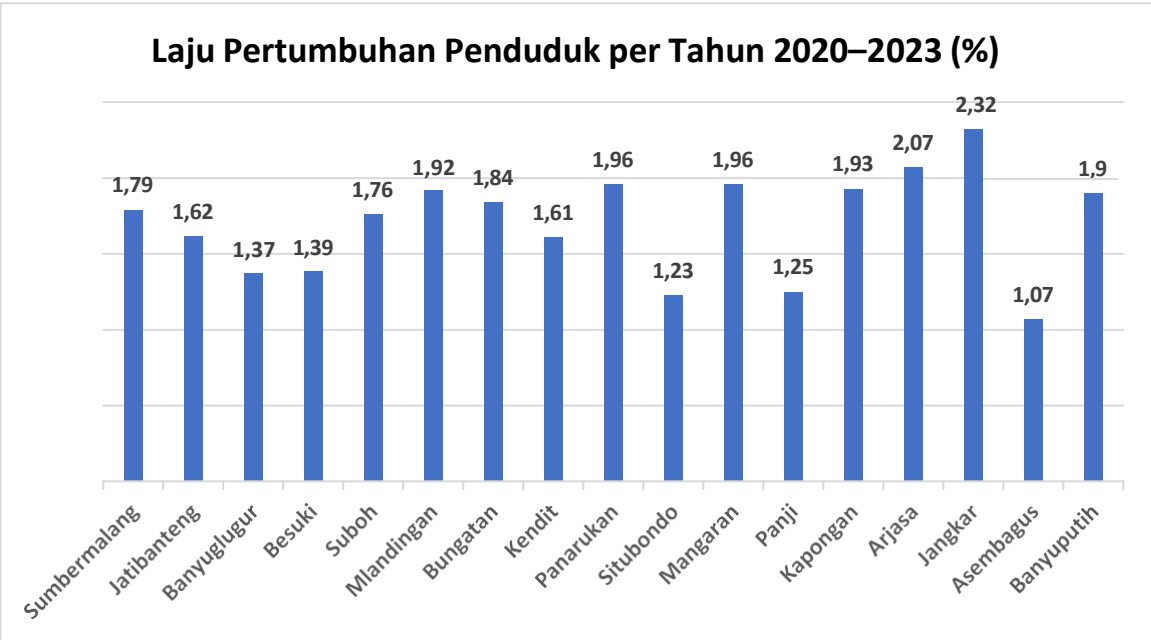
Gambar 2. 69 Indeks Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, 2024

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari tiga penilaian. Indeks kualitas lingkungan hidup meliputi penilaian kualitas air, udara dan tutupan lahan. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Air memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 66,55%, sedangkan kualitas udara meningkat menjadi 89.7%, serta indeks tutupan lahan meningkat menjadi 64.17. Akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka IKTL memiliki tren yang cenderung menurun dari nilai 69.82 di tahun 2018 kemudian menjadi 64.17 di tahun 2023.

2.4.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.2.5.1 Pertumbuhan penduduk

Urusan administrasi terkait pertumbuhan penduduk menjadi aspek krusial dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan administrasi yang efektif juga berperan dalam memastikan distribusi sumber daya yang merata dan tepat sasaran, sehingga setiap warga mendapatkan manfaat yang optimal dari pertumbuhan wilayah.



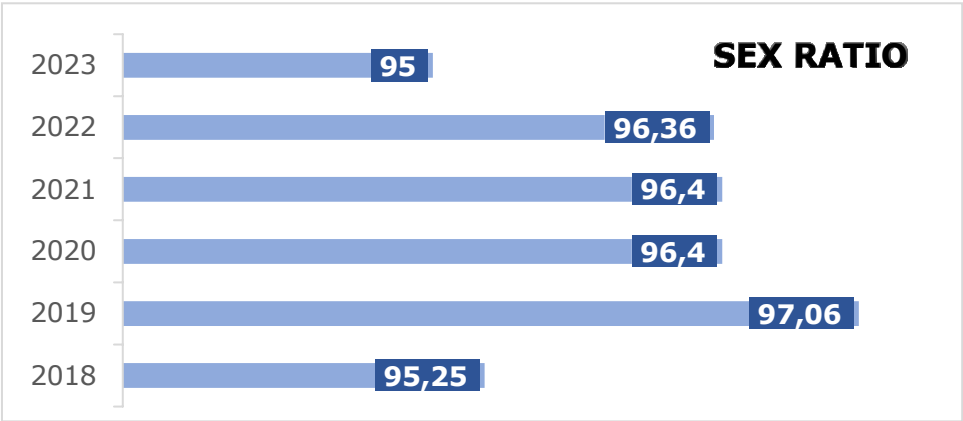
Gambar 2. 70: Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2023
Sumber: LKPJ Kabupaten Situbondo, Tahun 2023

Berdasarkan sebaran kecamatan, laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020–2023 tertinggi terjadi pada Kecamatan Panji sebesar 2,32%, sedangkan kecamatan yang terendah adalah kecamatan Asembagus yakni 1,07%. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2023 Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penduduk masih harus ditingkatkan kembali.

2.4.2.5.2 Sex Rasio

Urusan administrasi terkait sex ratio menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan di bidang kependudukan. Administrasi yang akurat dan terkelola dengan baik memungkinkan pengumpulan data sex ratio yang tepat, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dari setiap kelompok gender.





Gambar 2.71: Rasio Jenis Kelamin tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Seks rasio di tahun 2018 sebesar 95,25 yang menunjukkan bahwa dari 100 perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Tahun 2019 sebesar 97,06 hal ini menunjukkan dari 100 perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Tahun 2020 sebesar 96,04. Rasio tersebut stagnan sampai dengan pada tahun 2021 menjadi 96.4. Hal ini menunjukkan setiap 100 perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Namun, pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 96,36 dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 95.00.

2.4.2.5.3 Kepemilikan Kartu Keluarga

Urusan administrasi terkait kepemilikan Kartu Keluarga (KK) merupakan aspek penting dalam manajemen data kependudukan. Oleh karena itu, setiap keluarga diwajibkan untuk memiliki dan memperbarui KK secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan dalam keluarga seperti kelahiran, pernikahan, perceraian, atau kematian. Berikut adalah grafik jumlah dan persentase dari kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Situbondo tahun 2019-2023:



Gambar 2. 72 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Grafik di atas menyajikan data jumlah dan persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Situbondo dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 235.417 KK yang terdaftar, dengan persentase kepemilikan sebesar 92,85%. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 243.727 KK dengan persentase sebesar 93,55%. Namun, pada



tahun 2021 terjadi penurunan baik dalam jumlah maupun persentase kepemilikan KK, dengan 230.420 KK dan persentase sebesar 89,33%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah KK turun menjadi 222.291 dan persentase kepemilikan menjadi 85,63%. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan, dengan jumlah KK yang terdaftar mencapai 268.246 dan persentase kepemilikan KK hampir sempurna, yaitu 99,99%. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kepemilikan KK di Kabupaten Situbondo selama lima tahun terakhir, namun diakhiri dengan peningkatan drastis pada tahun 2023.

2.4.2.5.4 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Urusan administrasi terkait kepemilikan KTP merupakan langkah penting dalam memastikan keakuratan data kependudukan dan memudahkan berbagai layanan publik. Keberhasilan implementasi KTP juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik, mengurangi potensi pemalsuan identitas, dan meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan di Indonesia. Berikut adalah grafik jumlah dan persentase kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Situbondo tahun 2019-2023:



Gambar 2. 73 Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Grafik di atas menunjukkan data jumlah dan persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Situbondo dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang memiliki KTP tercatat sebanyak 522.249 orang, dengan persentase kepemilikan sebesar 96,11%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 541.200 orang, dengan persentase yang meningkat menjadi 99,22%. Pada tahun 2021, jumlah pemilik KTP terus bertambah menjadi 547.077 orang, bahkan dengan persentase kepemilikan yang melebihi 100%, yaitu 104,87%, yang bisa mengindikasikan penyesuaian data populasi. Namun, di tahun 2022 terjadi sedikit penurunan jumlah pemilik KTP menjadi 510.156 orang, dengan persentase kepemilikan 97,45%. Pada tahun 2023, jumlah ini kembali naik menjadi 530.541 orang, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,26%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Situbondo telah memiliki KTP, dengan persentase kepemilikan yang tetap tinggi sepanjang lima tahun terakhir.

2.4.2.5.5 Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu urusan administrasi yang sangat penting bagi setiap individu, karena akta kelahiran berfungsi sebagai bukti legal pertama dari identitas seseorang. Berikut adalah grafik jumlah dan persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Situbondo tahun 2019-2023:



Gambar 2. 74 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan grafik di atas selama lima tahun terakhir, Kabupaten Situbondo mencatat peningkatan yang signifikan dalam kepemilikan akta kelahiran. Pada tahun 2019, sebanyak 155.643 penduduk atau sekitar 89,38% dari total populasi telah memiliki akta kelahiran. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 158.363 penduduk, dengan persentase kepemilikan sebesar 93,03%. Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2021, di mana 158.779 penduduk atau 94,44% telah memiliki akta kelahiran. Namun, pada tahun 2022, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sedikit menurun menjadi 149.271 orang, meskipun persentase kepemilikannya meningkat menjadi 94,93%. Pada tahun 2023, terdapat penurunan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran menjadi 147.706 orang, namun persentase kepemilikan akta kelahiran tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 96,12%.

2.4.2.5.6 Kepemilikan Akta Kematian

Akta kematian tidak hanya berfungsi sebagai bukti legal atas kematian seseorang, tetapi juga menjadi dokumen penting yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai hal administratif, seperti pembagian warisan, pembaruan status kependudukan keluarga yang ditinggalkan, serta penutupan akun bank dan asuransi almarhum. Oleh karena itu, proses pengurusan akta kematian harus dilakukan dengan cepat dan akurat, agar tidak menimbulkan kendala bagi keluarga dalam menyelesaikan urusan hukum dan administratif. Berikut adalah grafik persentase kepemilikan akta kematian di Kabupaten Situbondo tahun 2019-2023:





Gambar 2. 75 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

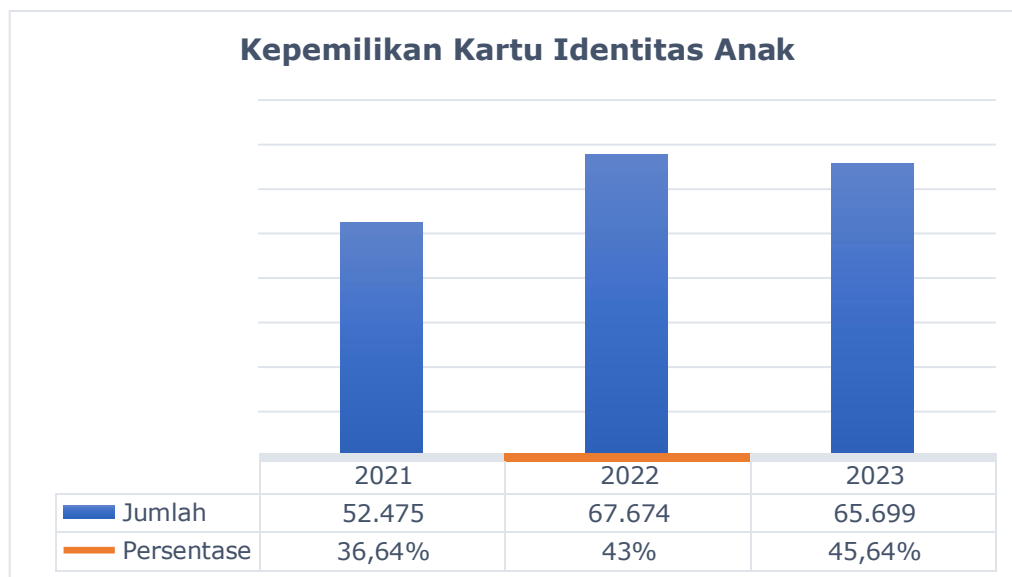
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2019, kepemilikan akta kematian di Kabupaten Situbondo masih relatif rendah, dengan jumlah 1.996 akta kematian yang tercatat, yang mewakili 57,03% dari total kematian yang terjadi. Namun, pada tahun 2020, meskipun jumlah akta kematian yang tercatat meningkat menjadi 14.351, persentase kepemilikan justru mengalami penurunan drastis menjadi 33,84%. Kondisi ini kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2021, di mana jumlah akta kematian yang dimiliki meningkat menjadi 16.447 dengan persentase sebesar 70,96%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana seluruh kematian yang terjadi tercatat dengan akta, mencapai 21.741 atau 100% dari total kematian. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan peningkatan jumlah menjadi 26.568 dan persentase tetap 100%. Data ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kepemilikan akta kematian, yang kini telah mencapai cakupan penuh di Kabupaten Situbondo.

2.4.2.5.7 **Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Pengelolaan administrasi KIA yang efektif memastikan bahwa data anak dikelola dengan baik, meminimalisir kemungkinan kesalahan, dan mempercepat proses penerbitan. Selain itu, administrasi yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administratif dan mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pemantauan layanan berbasis data yang lebih akurat. Berikut adalah grafik jumlah persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2023:





Gambar 2. 76 Jumlah dan Persentase Kepemilikan KIA Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2024

Data mengenai Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2020 belum tersedia karena sistem pencatatan KIA baru mulai diimplementasikan pada tahun 2021. Berdasarkan data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Situbondo dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah dan persentase kepemilikan KIA. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 52.475 anak memiliki KIA, dengan persentase sebesar 36,64%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana jumlah anak yang memiliki KIA mencapai 67.674, dengan persentase naik menjadi 43%. Meskipun jumlah KIA yang dimiliki sedikit menurun menjadi 65.699 pada tahun 2023, persentase kepemilikan tetap menunjukkan peningkatan, yakni sebesar 45,64%. Data ini menunjukkan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mendorong pembuatan KIA di kalangan masyarakat Situbondo.

2.4.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Hal tersebut yang membuat desa memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial dan politik. Berikut merupakan gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2. 45 Capaian Indikator Sasaran Daerah Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Maju	29 Desa	39 Desa	39 Desa	61 Desa	63 Desa
2	Jumlah Desa Mandiri	0 Desa	0 Desa	6 Desa	16 Desa	35 Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, 2024

Selama periode 2019 hingga 2023, Kabupaten Situbondo telah mengalami kemajuan signifikan dalam capaian indikator sasaran daerah terkait urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Data menunjukkan peningkatan jumlah desa maju yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2019, terdapat 29 desa maju, angka ini meningkat menjadi 39 desa pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan yang substansial dengan 61 desa maju, dan mencapai 63 desa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah desa maju mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan dan pengembangan desa yang efektif.

Sementara itu, jumlah desa mandiri menunjukkan pada tahun 2019 dan 2020 belum terdapat desa. Pada tahun 2021 terdapat 6 desa mandiri, dan jumlah ini meningkat menjadi 16 desa pada tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan 35 desa mandiri. Peningkatan jumlah desa mandiri menandakan kemajuan dalam kemandirian desa, yang dapat diartikan sebagai kemampuan desa untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan serta pelayanan publik dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

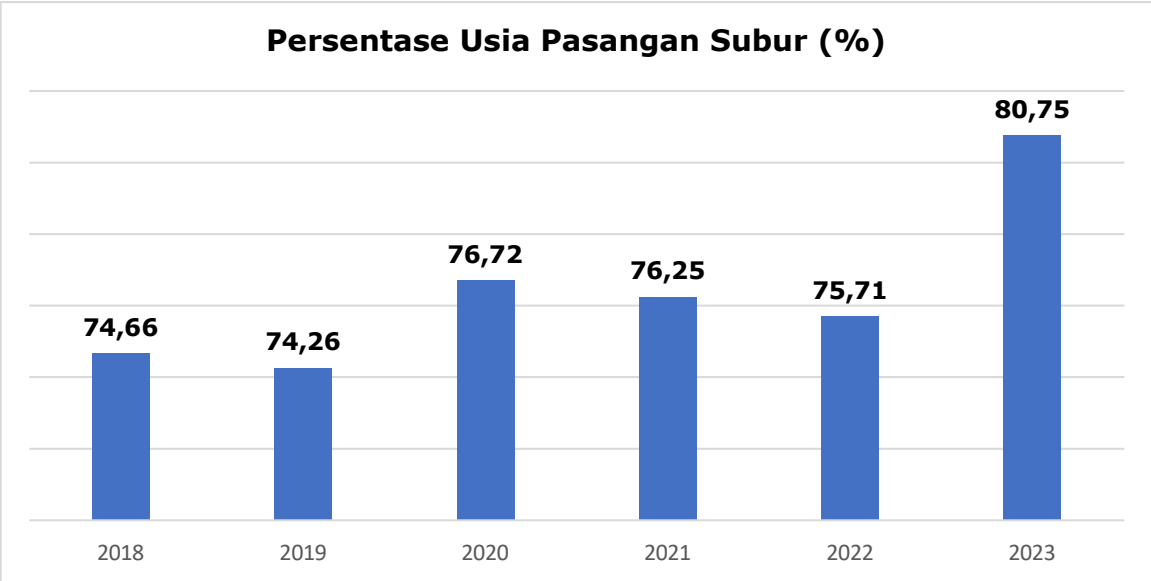
Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksanaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strategi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan.

Keberdayaan desa merupakan kondisi di mana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahannya sendiri. Upaya untuk meningkatkan kemampuan desa adalah melalui pemberdayaan desa, sehingga desa dapat meningkat menjadi desa maju. Selain itu Daya saing SDM yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk bersaing di pasar kerja global dan mengembangkan usahanya. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan desa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, akses masyarakat desa terhadap sumber daya, dan kapasitas organisasi masyarakat desa. Hal ini akan meningkatkan kemampuan SDM desa untuk bersaing di pasar kerja global. Dalam hal meningkatkan daya saing Desa, maka Kemandirian keuangan desa menjadi hal yang penting, dimana desa memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu kemampuan keuangan Daerah menjadi penting untuk meningkatkan dana transfer ke Desa untuk membiayai pembangunan di Desa.



2.4.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mengatur kelahiran/kehamilan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, telah dilaksanakan pemasangan alat kontrasepsi KB kepada pasangan usia subur (PUS), baik itu kepada suami maupun kepada istri (salah satu dalam keluarga) secara umum pasangan usia subur (PUS) telah ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program KB artinya telah menjadi Akseptor KB Aktif tanpa adanya paksaan dari pihak lain.



Gambar 2. 77 Persentase Pasangan Usia Subur tahun 2018-2023

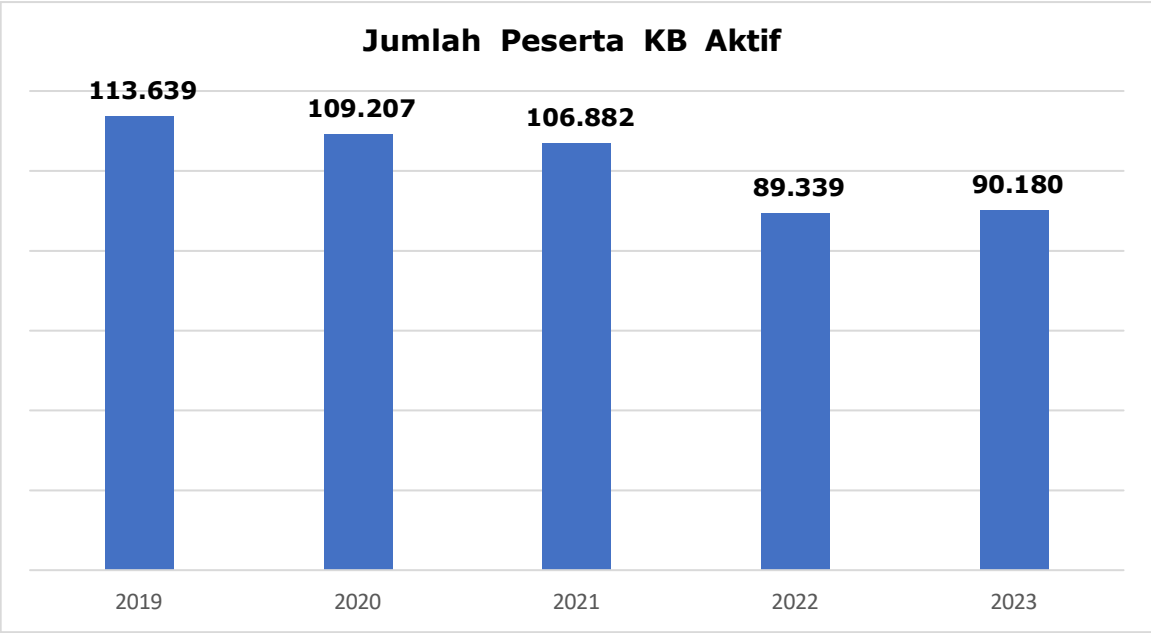
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, 2024

Jumlah pasangan usia subur Kabupaten Situbondo dari tahun 2018-2023 fluktuatif. Dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 yang menunjukkan jumlah usia subur sebanyak 80.75%. Adapun pada tahun 2018, persentase pasangan usia subur adalah sebesar 74.66%. Kemudian jumlah pasangan usia subur tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 74.26%. Pasangan usia subur di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 76.72%, pada tahun 2021 dan 2022 persentase usia subur mengalami penurunan menjadi sebesar 76.25% dan 75.71%. Lalu kemudian terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 80.75%.

Daya saing SDM yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk merencanakan kehamilan dan memiliki jumlah anak yang sesuai dengan kemampuannya. Pengendalian penduduk yang berhasil akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM dan daya saingnya di pasar kerja global. Namun dalam hal ini, fenomena pernikahan dini dapat menghambat Daya Saing SDM, dimana pernikahan dini dapat meningkatkan angka kelahiran, kemiskinan dan risiko kesehatan pada ibu dan bayi. Selain itu dalam hal pengendalian penduduk, keluarga berencana merupakan salah satu upaya pengendalian penduduk untuk mengendalikan jumlah kelahiran dan mencapai angka kelahiran yang diinginkan. Pengendalian penduduk yang berhasil akan menciptakan kondisi yang kondusif.



Keluarga Berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.



Gambar 2. 78 Jumlah Peserta KB aktif tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, 2024

Jumlah Peserta KB aktif Kabupaten Situbondo dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Jumlah peserta KB tahun 2019 sebanyak 113.639 orang, tahun 2020 sebanyak 109.207 orang, tahun 2021 sebanyak 106.882 orang, tahun 2022 sebanyak 89.339 orang, serta tahun 2023 sebanyak 90.180 orang. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah berkurang, yang akan berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk, meskipun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Selain indikator diatas, ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan usia subur	153.035	142.341	140.179	117.992	110.496



No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
2	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	18	18	18	18,5	18,3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tahun 2024

2.4.2.8 Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya. Meningkatnya kebutuhan transportasi sebagai akibat meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi memerlukan kelancaran mobilitas. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.

Pemerintah pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengaktualisasikannya khususnya urusan wajib bidang perhubungan di Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo merasa perlu meningkatkan pelayanan transportasi yang mencakup berbagai aspek yang penting sejak perencanaan hingga pengelolaan sistem transportasi sebagai bentuk keterkaitan antara jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Situbondo

Dalam capaiannya, tampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan yang sudah masuk dalam kategori Baik. Terdapat 3 (tiga) layanan yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat tersebut yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Pelabuhan, dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).



Pada tahun 2022 berdasarkan laporan periodik Polres Situbondo angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo sebanyak 387 kali kejadian sehingga meningkat sebesar 29,43% dibanding tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2023, terdapat indikator baru yang dicantumkan dalam perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan yaitu Indeks Infrastruktur Perhubungan dengan nilai realisasi 38,64. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang jasa layanan perhubungan pada tahun 2023 dilakukan dengan melaksanakan survei pada 5 titik layanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo yaitu Jasa Kepelabuhan Besuki, Jasa Terminal Besuki, Jasa Parkir Berlangganan di Samsat, Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor dan Jasa Penggunaan Bahu Jalan.

Dari analisis dan laporan serta lokasi kejadian, mayoritas hal tersebut disebabkan oleh faktor human error karena kelelahan atau kurangnya kewaspadaan pengemudi terhadap rambu rambu lalu lintas dan terjadi pada lokasi Jalan Nasional atau area Pantura, yang tentunya merupakan kawasan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Disamping itu, sadar bahwa Pelabuhan yang dimiliki merupakan asset yang sangat berharga yang merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan memegang peranan penting dalam rantai distribusi logistik Nasional, maka pada tahun 2023 tepat pada Hari Jadi Kabupaten Situbondo ke-205, Pemerintah kabupaten Situbondo bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan menggandeng PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola kepelabuhanan secara resmi mencanangkan pembukaan lintasan penyeberangan Jangkar – Lembar (NTB) sebagai pengembangan sektor angkutan penyeberangan.

Untuk itu, sejak Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan perubahan indikator target kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan melalui perubahan Renstra yang memiliki indikator yang lebih terukur dan spesifik kewenangan Pemerintah Kabupaten, yaitu Prosentase Capaian IKM dan Indeks Infrastruktur Bidang Perhubungan, dengan unsur pembangun didalamnya terdiri atas persentase fasilitas pelengkap jalan terhadap Panjang jalan yang sudah diaspal, persentase kelengkapan prasarana transportasi, persentase pemenuhan ijin trayek, presentase pembangunan pelabuhan dan cakupan layanan angkutan umum. Adapun capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Perhubungan

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	IKM Perhubungan	80,3	69,71	68,10	80,58	80,53
2	Prosentase penurunan angka kecelakaan	18,75	16,72	-20,08	-29,43	-
3	Jumlah pemenuhan faskes jalan	3	1	134	21	50



No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
4	Data jaringan transportasi menuju simpul transportasi (Pelabuhan, terminal, dan lain-lain)	71	18	39	35	35
5	Jumlah transportasi umum	8197	8462	8779	8956	5957

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, 2024

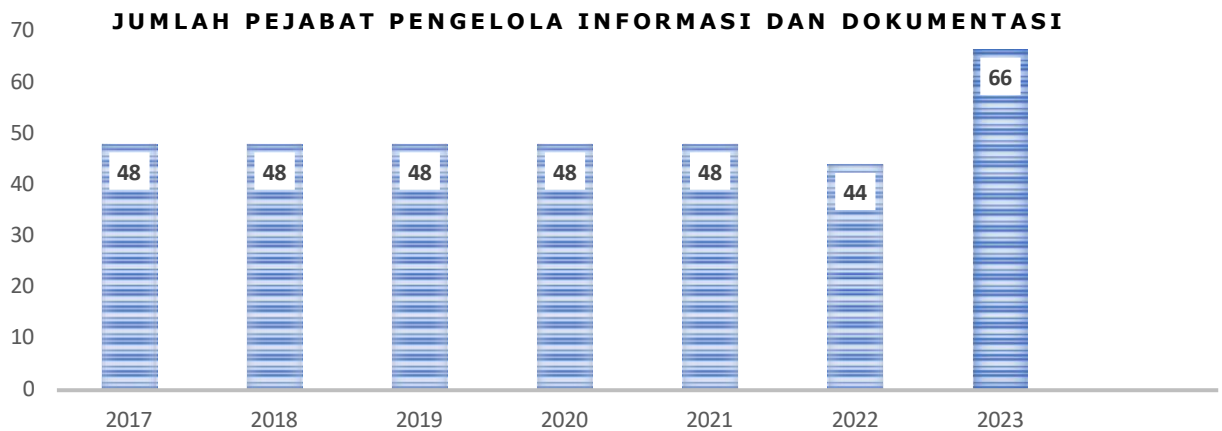
Tabel di atas menyajikan capaian kinerja urusan perhubungan Kabupaten Situbondo selama lima tahun dari 2019 sampai 2023. Capaian IKM perhubungan dan data jaringan transportasi menuju simpul transportasi mengalami kondisi yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun, IKM perhubungan cenderung meningkat. Sementara itu, data jaringan transportasi menuju simpul transportasi mengalami penurunan. Lalu, prosentase penurunan angka kecelakaan mengalami penurunan secara konsisten pada periode 2019 sampai 2022. Jumlah transportasi umum di Kabupaten Situbondo juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023, yakni berkurang hingga menjadi 5.957 angkutan dibanding tahun 2022 sebanyak 8.956 angkutan.

2.4.2.9 Komunikasi dan Informatika

Perkembangan informasi yang cepat saat ini menuntut Pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk menyediakan, menyebarkan dan memanfaatkan informasi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat dan program peningkatan implementasi *e-government* sampai tingkat daerah, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut dan dapat mengembangkan kapasitas kapasitas Yang ada dalam masyarakat serta terlaksananya dengan baik sistem e-government pada Kabupaten Situbondo. Berikut beberapa indikator dalam bidang komunikasi dan informatika.

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Berikut akan disajikan data mengenai jumlah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Situbondo:

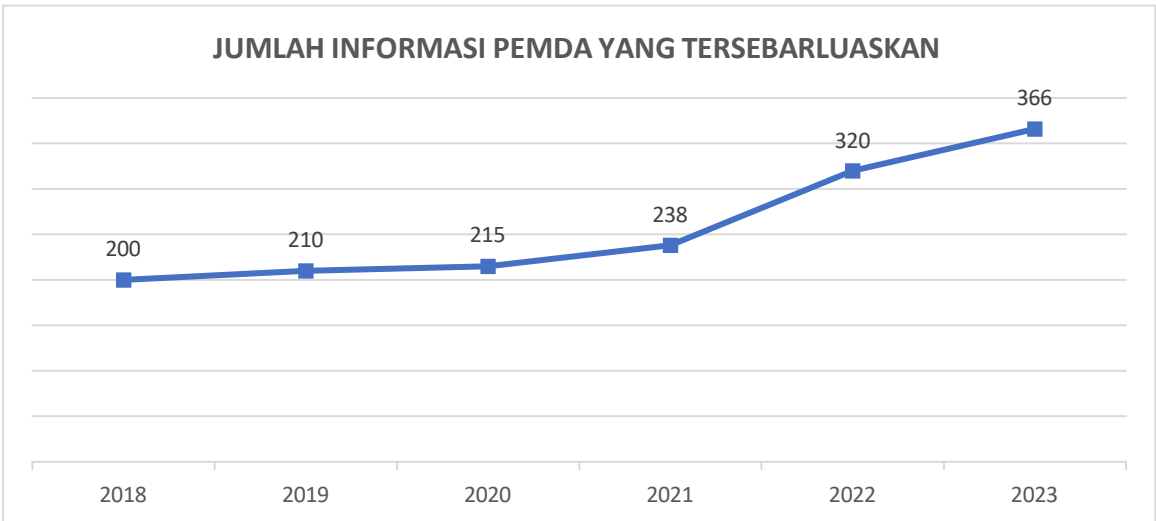




Gambar 2. 79 Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Kabupaten) Tahun 2017-2023
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Melihat pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dari kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 stagnan di angka 48 pejabat. Namun pada tahun 2022 mengalami pengurangan pegawai menjadi 44 pejabat. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebanyak 66 Pegawai. Hal tersebut menandakan bahwa pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan angka dari jumlah pejabat yang mengelolah informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Situbondo.

Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi dan mewujudkan amanat dari Pasal 28f UUD 1945 mengenai hak atas informasi, pemerintah membentuk Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Maka dari itu sangat diperlukan ketersebarluasan informasi dari Pemerintah Daerah setempat kepada masyarakat secara keseluruhan. Berikut akan disajikan data tentang indikator tersebut:



Gambar 2.80 Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang Tersebarluaskan Tahun 2018-2023
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan pada grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan di wilayah Kabupaten Situbondo meningkat dari kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Dapat dilihat dari data tahun 2018 berada pada angka 200 informasi dan pada tahun 2022 dan 2023 meningkat secara drastis menjadi 320 dan 366 informasi.

Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Inikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase aplikasi dan jaringan PD dan Pemdes yang terintegrasi	%	92,86	65	60,87	60,87	59,78	59,78
2	Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	37	77	86	91	100	100
3	Jumlah pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (PPID Kabupaten)	%	48	48	48	48	44	66,5
4	Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan	Angka	200	210	215	238	320	366
5	Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Situbondo Tahun 2024

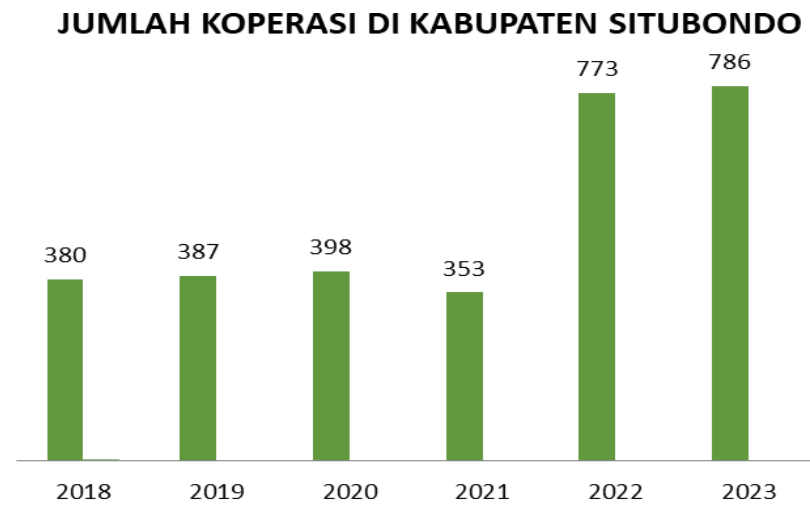
2.4.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam sistem agribisnis diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuat kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Dalam mendukung ekonomi kerakyatan salah satunya adalah pengembangan koperasi dimana koperasi merupakan salah satu sebagai penunjang ekonomi masyarakat karena merupakan unit usaha yang bersifat kebersamaan dan berdasarkan asas kekeluargaan sehingga antar anggota koperasi saling mendukung dalam bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun Rumah digital yang masih bisa dikembangkan untuk pengembangan Usaha mikro menjadi salah satu kekuatan pemerintah. Walaupun memiliki beberapa faktor yang menjadi kelemahan pemerintah untuk meningkatkan Usaha Mikro di kabupaten situbondo, seperti faktor kultural di masyarakat yang masih berorientasi pada bantuan, serta komitmen kepala daerah untuk menuntaskan pengembangan sektor usaha mikro.



Dengan membuka akses jalan toll juga dapat meningkatkan distribusi produk usaha mikro yang di mana hal ini perlu pertimbangan pemerintah. Beberapa hambatan pun akan dihadapi seperti bisa terjadinya pemberlakuan regulasi yang menyulitkan untuk masuknya produk usaha mikro ke wilayah bersangkutan, dan masih rendahnya inovasi produk usaha mikro karena cenderung mengikuti tren sesaat.

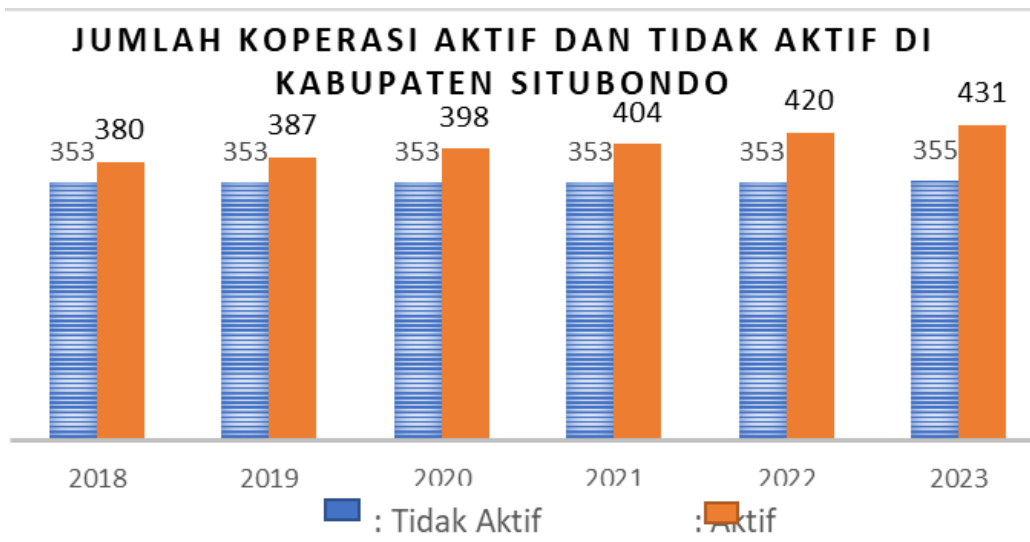
Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Secara hukum, koperasi diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012. Pada pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah koperasi di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2. 81 Jumlah Koperasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Merujuk pada data yang tersajikan dalam grafik di atas yaitu menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Situbondo rata-rata meningkat. Dari tahun 2018 menunjukkan angka 380 koperasi, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 387 koperasi dan 2020 menjadi 398 koperasi. Kemudian pada tahun 2021 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 353 koperasi. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan signifikan yaitu 773 koperasi dan 786 koperasi. Hal tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat meningkat dengan mempercayakan pemenuhan kebutuhannya ke koperasi, secara tidak langsung juga menandakan adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo.

2.4.2.10.1 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Situbondo
Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha. Dalam hal ini koperasi yang sistem kepengurusannya tidak berjalan dengan baik. Berikut grafik mengenai jumlah koperasi yang tidak aktif dari kurun waktu 2018-2023 di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2.82 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

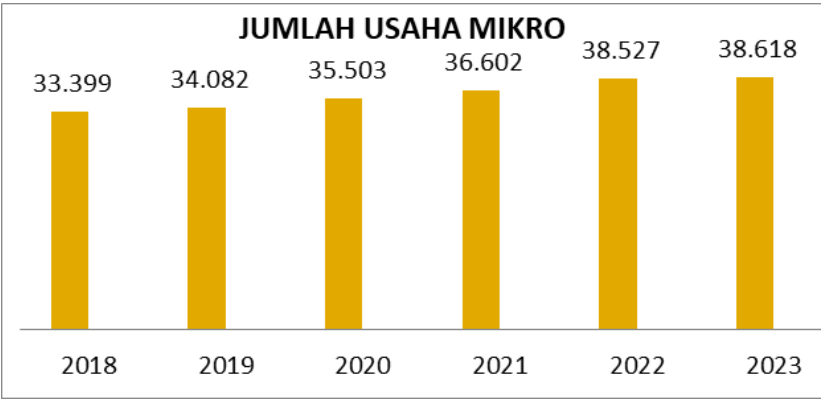
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan dengan data grafik diatas jumlah koperasi tidak aktif di wilayah Kabupaten Situbondo bersifat stagnan. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2023 jumlah koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Situbondo berada pada angka 353 koperasi. Sedangkan pada koperasi aktif, terlihat menunjukan tren yang positif yakni dari sejumlah 380 koperasi di tahun 2018 kemudian terus meningkat hingga menjadi 431 koperasi di tahun 2023. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai leading sektor dalam Upaya mewujudkan keberadaan koperasi sehat, melakukan berbagai Upaya salah satunya melalui penguatan kelembagaan koperasi. Adapun Upaya yang dilakukan berupa Peningkatan Tata Kelola Koperasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Akses Pembiayaan dan Modal, serta Penguatan Regulasi dan Kebijakan. Semua itu diwujudkan dengan melakukan pelatihan, pembinaan, sosialisasi serta pengawasan kepada semua koperasi Aktif yang ada di Kabupaten Situbondo yang tentunya disesuaikan dengan porsi anggaran yang diberikan kepada Dinas.

2.4.2.10.2 Jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo

Dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah UMKM dengan peringkat 26 terbanyak dimana secara persentase Kabupaten Situbondo memiliki jumlah UMKM sebanyak 2,22% dari total jumlah UMKM di Jawa Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Adapun bila dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

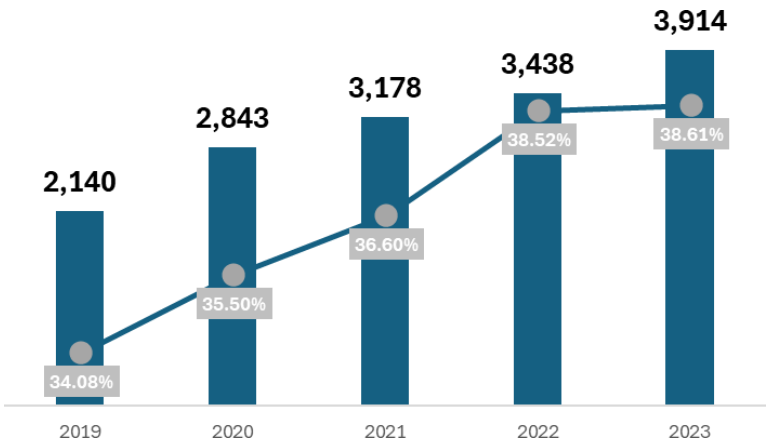




Gambar 2. 83 Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Situbondo pada Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pada jumlah usaha mikro di Kabupaten situbondo dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo dikarenakan selain jumlahnya meningkat, pada sisi usaha mikro yang dibina juga mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir. Yakni dari 2.140 UMKM atau 34.08% dari keseluruhan UMKM di Kabupaten Situbondo telah di bina pada tahun 2019 yang kemudian jumlah UMKM yang dibina terus meningkat hingga mencapai 38.61% dari keseluruhan UMKM di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 atau sebanyak 3.914 UMKM. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2. 84 Jumlah dan Persentase UMKM yang di Bina

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, 2024

Sebagian besar UMKM Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 juga telah memiliki standarisasi dan sertifikasi Produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing menuju persaingan global diantaranya Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), P.IRT, Higenitas Olahan, serta Uji Nutrisi. UMKM sebagai salah satu roda penggerak perekonomian di Kabupaten Situbondo terus didorong untuk dapat meningkatkan peran aktifnya. Peningkatan peran UMKM baik pada struktur kelembagaan, permodalan maupun akses pemasaran melalui lembaga keperantaraan pasar dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui beberapa hal diantaranya:



1. **Marketplace Digital:** Mendorong UMKM untuk terlibat dalam platform digital atau e-commerce yang difasilitasi oleh lembaga keperantaraan pasar, sehingga produk mereka bisa lebih mudah diakses oleh konsumen.
2. **Promosi dan Distribusi:** memperkenalkan produk UMKM melalui pameran, festival, atau kerja sama dengan distributor besar yang memiliki jaringan pemasaran yang luas.
3. **Kemitraan dan Kolaborasi:** Mendorong UMKM untuk membentuk asosiasi atau kelompok yang bisa saling mendukung dalam hal pengelolaan usaha dan berbagi informasi. Dengan struktur kelembagaan yang solid.
4. **Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan:** Memperkuat akses UMKM ke sumber pembiayaan dengan memfasilitasi kerja sama antara UMKM dan bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya.

2.4.2.11 Penanaman Modal

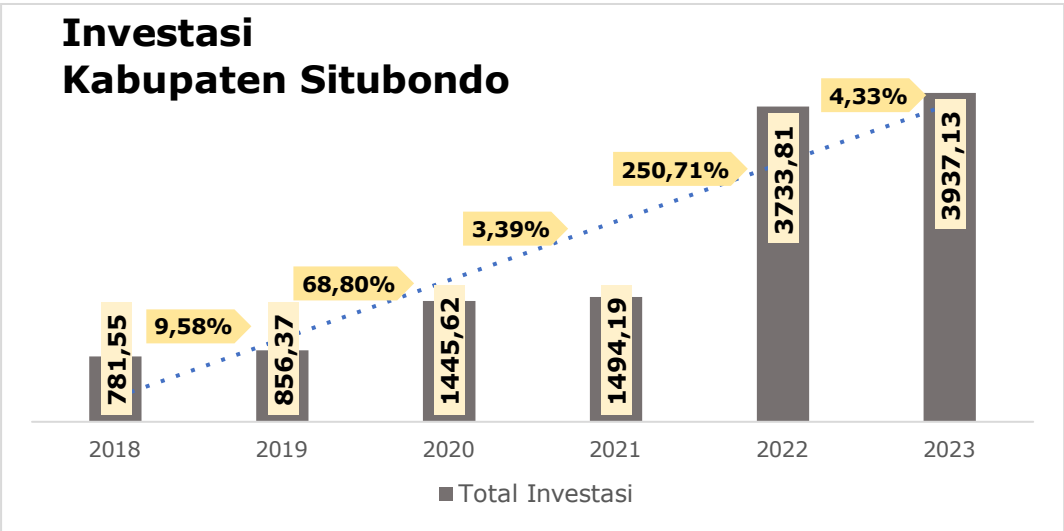
Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya. Hal ini diselaraskan dengan kenyataan bahwa investasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Penanaman Modal merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam rangka mencapai target yang ditentukan yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sedangkan permasalahan penanaman modal telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan arah pengembangan kebijakan Penanaman Modal di Indonesia.

Daya saing investasi meliputi beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menarik investasi luar negeri. Pemerintah kabupaten situbondo sendiri telah menyediakan peta potensi yang disusun menggambarkan identifikasi, klarifikasi, dan inventarisasi kondisi dan potensi ekonomi, infrastruktur, demografi, serta profil para pelaku usaha. Kemudian, adanya proses pembangunan sistem informasi peta potensi, tersedianya rencana umum penanaman modal, regulasi yang relatif mudah diakses masyarakat, dan perhatian dan komitmen pimpinan yang fluktuatif pada penyelenggaraan urusan PTSP. Adapun tugas tambahan PBG yang harusnya diampu oleh PUPP, yang dianggap membebani. Kemudian, masih terdapatnya hambatan teknis dalam penegakkan retribusi PBG.

Peluang untuk meningkatkan daya saing investasi yakni terbukanya akses perekonomian dengan adanya exit toll. Hal ini mengacu pada kebijakan atau infrastruktur yang memungkinkan perusahaan dan investor

untuk lebih mudah mengakses pasar dan lokasi bisnis yang strategis. Dengan adanya exit toll yang efisien dna terhubung dengan jaringan jalan tol utama, perusahaan dapat lebih mudah mengakses lokasi produksi, distribusi, dan pasar. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ancaman yang masih harus dihadapi pemerintah yakni laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan kegiatan usahanya.

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Adapun perbandingan nilai investasi dengan pertumbuhan investasi dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat dari gambar berikut :

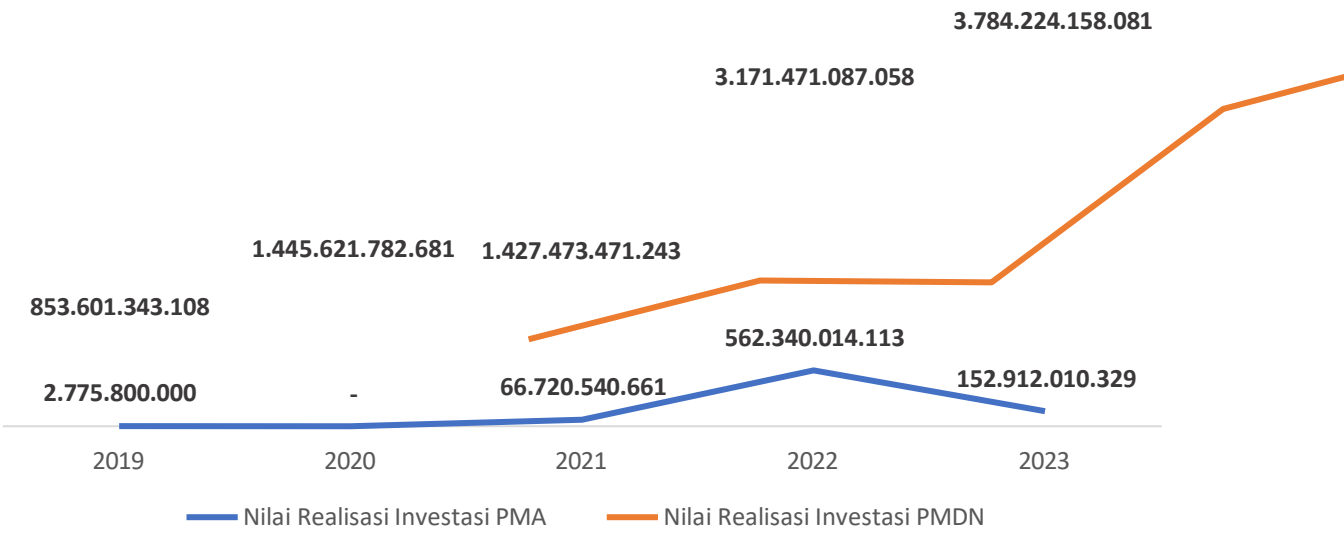


Gambar 2. 85 Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Situbondo Tahun 2018- 2023
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2018-2023 total realisasi investasi di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari Rp. 781,55 Miliar pada tahun 2018 menjadi 856,37 Miliar di tahun 2019. Pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan kembali secara signifikan sebesar 1.445,62 Miliar. Pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp. 1.494,19 Miliar pada tahun 2021 menjadi 3.937,13 Miliar di tahun 2023. Sedangkan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 250,71% dan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 3,39%.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan sumber/ jenisnya, investasi Kabupaten Situbondo bersumber dari Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Sedangkan Penanaman

Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri baik perorangan maupun badan usaha.



Gambar 2. 86 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Situbondo 2019-2023
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, 2024

Bila dilihat trennya, maka terlihat bahwa nilai Investasi PMDN cenderung mengalami peningkatan yang progresif dalam 5 tahun terakhir. Yakni dari Rp. 853,601,343,108 di tahun 2019 hingga menjadi Rp. 3,784,224,158,081 di tahun 2023. Sedangkan pada nilai Investasi PMA menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Yakni dari Rp. 2,775,800,000 di tahun 2019 menjadi Rp. 152,912,010,329 di tahun 2023. Adapun pada tahun 2020 tidak terdapat Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Situbondo, sehingga pada tahun tersebut sumber/jenis investasi di Kabupatenn Situbondo hanya dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 1,445,621,782,681.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kinerja Urusan Penanaman Modal adalah Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan dan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal. Dimana pada 5 tahun terakhir (2019-2023) capaian pada kedua indikator tersebut dapat mencapai 100%. Secara lebih jelas capaian kedua indikator tersebut pada masing-masing tahun selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perkembangan Total Investasi Kabupaten Situbondo	Miliar	781,55	856,37	1.445,62	1494,19	3.773,81	3.937,13



No	Indikator Sasaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, 2024

2.4.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan urusan wajib non layanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Melalui pelayanan dibidang kepemudaan dan olahraga diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Para Pemuda sangat menentukan laju sebuah perubahan dalam dunia yang dinamis. Pelayanan kepemudaan mencakup upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan layanan dan pembinaan keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Atlet merupakan profesi yang menekuni dan berkompetisi pada satu atau lebih bidang olahraga, yang menggunakan kekuatan, ketangguhan, atau kecepatan fisik di dalamnya. Dalam beberapa cabang olahraga tertentu, atlet harus mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi dari rata-rata orang biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah atlet berprestasi di Situbondo. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena atlet-atlet merupakan aset berharga dalam dunia olahraga dan juga membanggakan daerah. Selain itu, kurangnya fasilitas olahraga yang memadai juga dapat menjadi hambatan bagi perkembangan atlet-atlet berprestasi. Fasilitas yang terbatas atau tidak memadai dapat menghambat latihan dan pengembangan kemampuan atlet, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat prestasi yang tinggi. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah atlit berprestasi yang ada di Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:

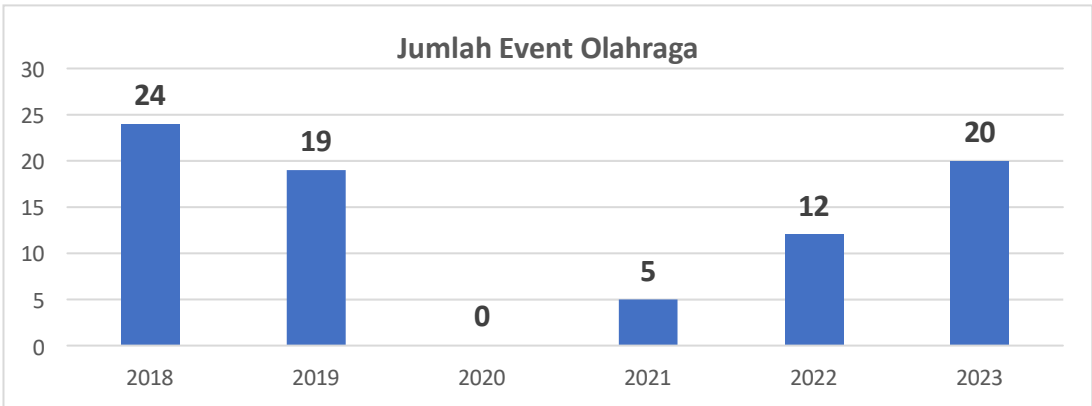




Gambar 2. 87: Jumlah Atlet Berprestasi
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah atlet berprestasi pada tahun 2018 sebesar 217 atlet. Pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan angka yaitu 202 atlet di tahun 2019, 138 atlet di tahun 2020, 48 atlet di tahun 2021, dan mengalami peningkatan menjadi 90 atlet berprestasi di tahun 2022, dan di tahun 2023 tetap konsisten menyumbangkan atket berprestasi sebanyak 69 atlet. Untuk mengatasi penurunan jumlah atlet berprestasi, perlu adanya upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga olahraga, dan masyarakat. Diperlukan program pembinaan bakat olahraga yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan pelatih yang berkualitas dan fasilitas yang memadai. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat, diharapkan Situbondo dapat mengatasi penurunan jumlah atlet berprestasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bakat olahraga secara berkelanjutan.

Event olahraga merupakan ajang atau perlombaan dalam bidang oalahraga yang biasanya dibagi mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan nasional. Event yang diadakan dalam beberapa jenis olahraga dan dilaksanakan dalam momen-momen tertentu. Dalam momen-momen yang penuh antusiasme, berbagai cabang olahraga menyatukan peserta dari beragam latar belakang, menggambarkan keberagaman dan kekayaan budaya yang mempesona. Setiap sudut lapangan menjadi saksi bisu akan semangat persaingan yang menyala-nyala dan keinginan untuk meraih prestasi yang gemilang. Berikut merupakan grafik yang menyajikan data mengenai jumlah event olahraga di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 2018-2023:



Gambar 2.88 Jumlah Event Olahraga
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo, Tahun 2024



Berdasarkan pada grafik diatas jumlah event olahraga di Kabupaten Situbondo bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017, Kabupaten Situbondo menyelenggarakan 12 event olahraga yang mencerminkan semangat dan antusiasme masyarakat dalam menggelar kegiatan olahraga. Ditahun berikutnya, terjadi lonjakan yang luar biasa dengan jumlah event melonjak dua kali lipat menjadi 24 even. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan partisipasi dalam kegiatan olahraga,pada tahun 2019, jumlah event olahraga mengalami penurunan menjadi 19 even. Meskipun terjadi penurunan, tetapi tetap terlihat adanya semangat dan dedikasi dalam menggelar kegiatan olahraga. Sayangnya, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia dan menghentikan hampir semua kegiatan olahraga, termasuk di Kabupaten Situbondo. Tidak ada event olahraga yang diselenggarakan, karena keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama.Pada tahun 2021, dengan adanya perkembangan iklim perubahan di berbagai aspek, termasuk olahraga, terlihat adanya tanda-tanda pemulihan. Meskipun masih dalam skala yang terbatas, ada beberapa even olahraga yang kembali diadakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Ini menunjukkan semangat dan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan kembali menghidupkan semangat olahraga di Kabupaten Situbondo.Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah event olahraga menjadi 12 even, di tahun 2023 ada 20 even. Hal ini merupakan progress yang positif bahwa semangat olahraga di Kabupaten Situbondo kembali bangkit.

Tabel 2. 50 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemuda yang berprestasi minimal nasional	%	27,64	89,00	n/a	58	21	55
2	Presentase Prestasi olahraga tingkat nasional	%	50	87,00	n/a	131	34	47
3	Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri	%	n/a	1	19	21	41	85
4	Jumlah Atlit Berprestasi	Angka	n/a	107	n/a	11	90	69
5	Jumlah Event Olahraga	Angka	24	19	24	5	12	20

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pemuda berprestasi minimal nasional ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 55%, uuntuk persentase prestasi olahraga tingkat nasional mengalami penurunan sebesar 47%, persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri sebanyak 85%, sedangkan jumlah atlit berprestasi sebanyak 69 dan jumlah even olahraga mengalami 20 event.



2.4.2.13 Statistik

Pembangunan di bidang statistik memiliki tujuan utama untuk menyediakan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci, dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan upaya dalam memastikan bahwa data dan informasi statistik yang disediakan memenuhi kaidah statistik yang valid dan akurat. Namun, belum semua data memenuhi kaidah statistik dan belum semua data dipublikasikan. Dalam realitasnya, tidak semua data yang ada memenuhi kaidah statistik yang diperlukan. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas data, seperti metode pengumpulan yang kurang tepat, kesalahan pengukuran, atau kekurangan sumber daya untuk melakukan analisis yang mendalam.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap data yang tersedia sebelum mengambil kesimpulan atau membuat kebijakan. Selain itu, belum semua data yang dihasilkan dapat dipublikasikan. Ada pertimbangan etis, hukum, atau kebijakan yang mengatur akses dan penggunaan data. Beberapa data mungkin tidak dapat diungkapkan karena pertimbangan privasi atau kepentingan keamanan. Dalam hal ini, transparansi dalam penyediaan data menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa data yang dipublikasikan dapat dipercaya dan digunakan dengan bijaksana. Meskipun belum semua data memenuhi kaidah statistik dan belum semua data dipublikasikan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan meningkatkan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di bidang statistik di Situbondo dapat terus memberikan manfaat yang signifikan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada informasi yang akurat dan relevan.

Tabel 2. 51 Capaian Indikator Kinerja PD Urusan Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun	%	100	100	100	N/A	76	97,24
2	Persentase Penyusunan Data & Informasi Statistik	%	n/a	61	100	N/A	76	97.24
3	Jumlah Petugas Pengelola Pusda	Orang	n/a	n/a	n/a	4	6	6
4	Persentase Data Statistik Daerah yang dipublikasikan	%	100	100	90	81	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penyusunan data dan informasi statistik meningkat dari 61% di tahun 2019 menjadi 100% di tahun 2020. Untuk mewujudkan Publikasi Data Statistik yang optimal diukur melalui persentase Data Statistik Daerah yang dipublikasikan dengan target 80% dan terealisasi 90% di tahun 2020.



Untuk mewujudkan Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang akurat dan tepat diukur dengan persentase data informasi dan statistik capaiannya sebesar 98,39%. Pencapaian realisasi kinerja sebesar 62% didapatkan dari 5 data informasi dan statistic (SIPD, Data Dinamis, IKM, IPM, PDRB) sesuai target tahun 2019, dibandingkan seluruh data sebanyak 8 data informasi dan statistik (SIPD, pusda, data dinamis, IKM, IPM, PDRB, Situbondo Dalam Angka dan data statistik lainnya) yang diharapkan.

2.4.2.14 Persandian

Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Pengamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian merupakan langkah yang sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan informasi yang semakin kompleks. Dalam program ini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas persandian dan pengamanan informasi agar dapat menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dimiliki. Program ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan infrastruktur keamanan informasi.

Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesadaran yang masih minim terhadap keamanan informasi. Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin berkembang, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan informasi untuk memahami pentingnya menjaga keamanan informasi dan mengadopsi praktik-praktik yang aman. Selain itu, keamanan informasi yang masih kurang juga menjadi perhatian dalam program ini. Dalam meningkatkan keamanan informasi, perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan infrastruktur yang ada. Peningkatan teknologi keamanan informasi, seperti sistem deteksi intrusi dan enkripsi data, juga perlu diperhatikan untuk mengatasi risiko keamanan yang mungkin timbul. Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatik melaksanakan program pembangunan yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Persandian dan Pengamanan Informasi dengan nilai capaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 52 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Dokumen Sandi dan Keamanan Informasi yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase data dan informasi daerah yang diamankan	jumlah	377	676	2304	193	976	455

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Situbondo, 2024



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase Dokumen Sandi dan Keamanan Informasi yang dikelola sebesar 100% di tahun 2019 hingga tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pencapaian dalam merumuskan kebijakan, peraturan teknis, serta mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan bidang persandian. Selain itu, juga menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan survei, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang statistik. Selama periode yang sama, persentase data dan informasi daerah yang diamankan mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam upaya menjaga keamanan data dan informasi penting Kabupaten Situbondo, yang merupakan indikator positif dalam menjaga integritas dan keamanan informasi.

2.4.2.15Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 1 program pembangunan yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya, dimana dalam program tersebut ada 4 kegiatan yang di laksanakan. Berikut capaian Kinerja Urusan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:

Tabel 2. 53 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase seni dan budaya lokal diakui Tingkat Provinsi dan Nasional.	%	n/a	18,00%	38%	n/a	n/a	80.73 %
2	Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan	Angka	n/a	76,00%	78%	118,75%	101,90 %	140%
3	Jumlah keragaman seni dan budaya	Satuan	-	10	18	20	29	49

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase seni dan budaya lokal yang diakui tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 18% menjadi 80.73%. Sedangkan jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2019 hingga 2020 juga mengalami kenaikan yaitu dari angka 76% menjadi 78% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dan mencapai angka 140%. Kemudian, jumlah keragaman seni dan budaya mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dengan capain 49 pada tahun 2023.



2.4.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah. Saat ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar sistem pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Adanya perpustakaan pada setiap daerah dianggap penting karena dapat menunjang berbagai aspek untuk sarana pembelajaran. Adapun capaian program, indikator kinerja untuk pembangunan daerah Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	IKM Perpustakaan	%	80,42	78,38	79,30	81,42	82,71	82,75
2	Kunjungan Perpustakaan/ Jumlah Pemustaka Aktif	orang	34.087	37.398	14.294	14.294	13.231	35.522
3	Koleksi buku	judul	13.189	13.189	13.620	13.763	14.396	14.638

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator IKM Perpustakaan memiliki capaian fluktuatif, dapat dilihat dari data tahun 2018 sebesar 80,42% dan mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 79,30% namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 81,42% dan terus meningkat hingga pada 2022 menjadi 82.71 dan 82.75 di tahun 2023. Begitu pula, terjadi pada Indikator yang kedua yakni kunjungan perpustakaan/ jumlah pemustaka aktif pada tahun 2019 mencapai angka 37.398 pemustaka namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan lumayan signifikan menjadi 14.294 pemustaka. Hal tersebut sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan jumlah pengunjung perpustakaan sehingga juga adanya pengurangan jumlah pemustaka. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 2022 yang menunjukkan jumlah kunjungan terus menurun hingga menyentuh angka 13.321 di tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 kunjungan perpustakaan dapat kembali meningkat mendekati kondisi tahun 2019, yakni menjadi 35.522 orang. Terakhir, pada indikator jumlah koleksi buku yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai pada tahun 2023.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pada urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan beberapa langkah penting untuk meningkatkan kapasitas pustakawan, meningkatkan jumlah pembinaan dan pengembangan budaya baca perpustakaan serta meningkatkan kapasitas literasi masyarakat melalui e-literasi. Pertama, pada tahun 2023, Dinas Perpustakaan melaksanakan peningkatan kapasitas pustakawan dengan memberikan workshop INLISLite yang diikuti 35 peserta pengelola perpustakaan sekolah. INLISLite merupakan aplikasi pengelola



perpustakaan secara digital untuk mempermudah tugas-ugas administratif dan operasional dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada penggunanya. Melalui aplikasi tersebut, perpustakaan mendapatkan kemudahan dalam mengelola koleksi dan layanannya serta memastikan bahwa informasi yang tersedia dengan cepat dan akurat. Kedua, pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengembangan budaya baca perpustakaan di 38 perpustakaan pada tahun 2023. Ketiga, pemerintah meningkatkan kapasitas literasi masyarakat melalui e-literasi. Upaya e-literasi dengan inovasi Tali Puser (digitalisasi perpustakaan dan kearsipan) merupakan upaya digitalisasi perpustakaan yang memungkinkan seluruh layanan perpustakaan, seperti katalog buku, pendaftaran anggota, permohonan layanan pusling, layanan becak mapan, permohonan pembinaan, pemesanan buku serta *e-book* dapat dilakukan secara *online*.

2.4.2.17 Kearsipan

Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan sebagai bentuk pengorganisasian informasi guna mencapai tujuan dalam proses pembangunan. Hal tersebut dikarenakan arsip merupakan naskah yang dibuat sebagai bukti autentik atas kinerja suatu organisasi, berbagai jenis kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil evaluasi atas kinerja sebuah organisasi terekam dalam sebuah arsip. Arsip juga dapat diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun capaian program, indikator kinerja untuk pembangunan daerah Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 55 Realisasi Capaian Urusan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perangkat Daerah yang pengelolaan Arsipnya sudah baik	PD	0	0	3	0	1	5
2	Jumlah pengelola kearsipan yang mendapatkan pembinaan	orang	197	137	25	113	203	98

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Kondisi pengelolaan arsip Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja PD yang pengelolaan arsipnya sudah baik berdasarkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 18%. Hal ini sejalan dengan hasil monitoring dan evaluasi tentang pengklasifikasian surat terhadap penyimpanan arsip belum tertata sesuai standar karena minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PD belum memadai, yang mana grafik nya terbilang fluktuatif dari tahun ke tahun.

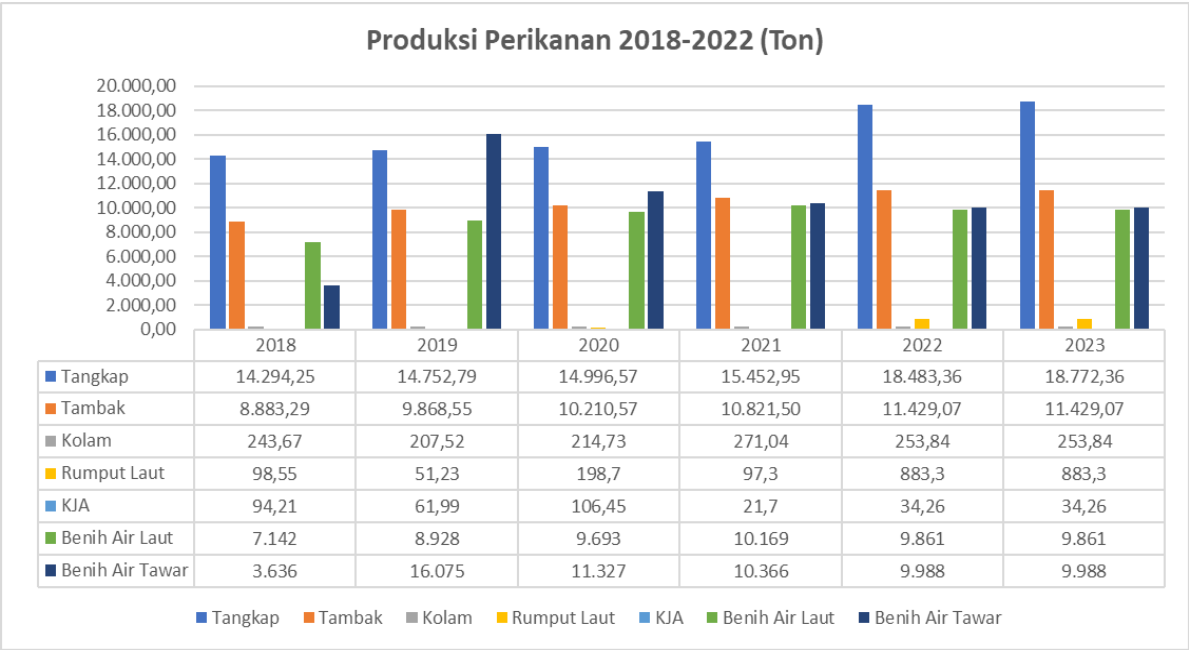


Bahkan di tahun 2023 hanya mencapai 98 orang sehingga perlu adanya pendampingan dan pembinaan tindak lanjut agar pengelolaan arsipnya lebih baik sesuai dengan standart tata kelola kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

2.4.3 Pelayanan Urusan Pilihan

2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pada sektor perikanan di Kabupaten Situbondo terdiri atas perikanan tambak, perikanan tangkap, perikanan kolam, budidaya rumput laut, budidaya keramba jaring apung, budidaya benih air laut, dan budidaya air tawar. Berikut adalah hasil produksi dari perikanan di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2. 89: Grafik Produksi Perikanan 2018-2023 (Ton)
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024

Grafik tersebut merupakan produksi perikanan di kabupaten Situbondo periode tahun 2018 hingga tahun 2023, dapat kita cermati Bersama bahwa terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap pada setiap tahunnya,. Peningkatan hasil perikanan tangkap ini dikarenakan semua nelayan mentaati aturan pemakaian alat tangkap serta tidak melakukan penangkapan ikan yang berlebihan pada tahun sebelumnya sehingga ketersediaan sumberdaya ikan di laut tetap terjaga.

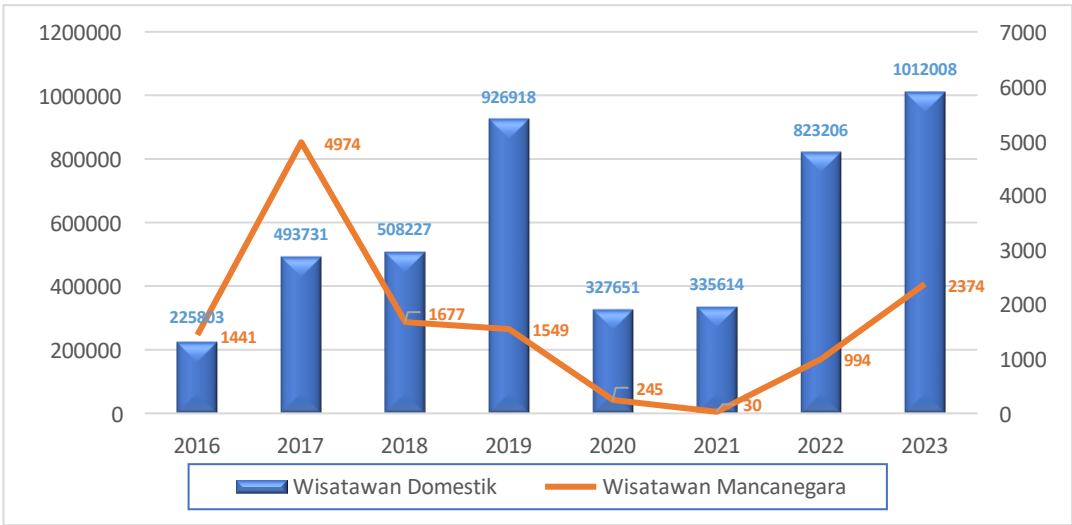
Pada jenis perikanan kolam, budidaya rumput laut, budidaya KJA, budidaya benih air laut, dan budidaya benih air tawar cenderung mengalami fluktuasi. Dan hanya pada jenis perikanan tambak saja yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2023 dan mencapai angka 11.429,07 ton. Penurunan produksi di beberapa indikator juga disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat khususnya anak muda untuk menjadi peternak dan nelayan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak anak muda cenderung tertarik pada pekerjaan yang terkait dengan teknologi, bisnis, atau hiburan karena itu lebih sesuai dengan tren urbanisasi dan modernisasi. Pemerintah situbondo pun kurang menyediakan sarana-sarana pelatihan untuk melatih anak-anak muda agar memiliki akses atau pengetahuan tentang potensi karir di bidang perikanan. Kemudian, adanya



pangambek “pengijon”, di mana pemberian pinjaman untuk modal berlayar dan akad jual ikan pertama harus kepadanya, sehingga pendapatan nelayan menjadi tipis, dan nilai NTN cukup kecil.

2.4.3.2 Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu potensi unggulan karena memiliki potensi destinasi wisata yang banyak mulai dari pariwisata pantai, pegunungan, padang savana, wisata religius, dan wisata kesenian dan budaya. Untuk semakin mengoptimalkan potensi ini, penciptakan tren pariwisata baru melalui penerapan *digital tourism* menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Situbondo. *Digital tourism* memungkinkan promosi yang lebih luas, kemudahan akses informasi, dan pengalaman wisata yang lebih interaktif bagi wisatawan. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pariwisata, mulai dari pemasaran hingga layanan, Situbondo dapat menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan durasi kunjungan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif. Berikut adalah jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2. 90 Grafik Jumlah Wisatawan Domestik & Mancanegara Tahun 2016-2023

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Grafik jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 memperlihatkan kecenderungan jumlah data kunjungan meningkat. Jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara menunjukkan pola peningkatan dan penurunan jumlah yang sama pada tahun-tahun tertentu. Kunjungan wisata Tahun 2018 yaitu sejumlah 508.227 orang wisatawan domestik dan 1677 orang wisatawan mancanegara. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah wisatawan mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan terutama wisatawan domestik yaitu sejumlah 926.918, berbanding terbalik dengan wisatawan mancanegara dimana pada tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan menjadi 1549 orang wisatawan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah wisatawan mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 327.651 orang wisatawan domestik dan 245 orang wisatawan mancanegara. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan domestik 335,614 wisatawan sedangkan



jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 30 wisatawan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa ada penurunan jumlah wisatawan di tahun 2020 dan tahun 2021, dikarenakan adanya bencana pandemi Covid-19. Kendati demikian berdasarkan data tersebut, pariwisata Kabupaten Situbondo sangat menarik bagi wisatawan domestik sehingga ada peluang pengembangan pariwisata daerah guna menarik minat wisatawan domestik. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah wisatawan domestik kembali mengalami peningkatan sebanyak 823.206 orang dan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 994 orang dan kembali meningkat di tahun 2023 jumlah wisatawan domestik 1.012.008 orang dan jumlah wisatawan mancanegara 2.374 orang.

Peningkatan yang cukup progresif salah satunya merupakan hasil dari upaya penciptaan tren pariwisata baru melalui penerapan *digital tourism* yang diantaranya dilaksanakan melalui:

- 1. Penerapan Digital Tourism dengan pembuatan website promosi pariwisata Situbondo di laman pariwisata.situbondokab.go.id.
- 2. Pembuatan Virtual Tour Desa Wisata diikutkan dalam Festival Dewi Cemara 2024 di Kabupaten Ngawi dan mendapat penghargaan Top 10 Penyaji Terbaik Virtual Tour Desa Wisata.
- 3. Pemasaran Pariwisata melalui Online Travel Agent yang bekerja sama dengan Kemenparekraf RI dengan platform djalanin.com

Setelah melihat data kunjungan wisatawan di Kabupaten Situbondo, perlu dipahami bagaimana faktor jumlah kunjungan tersebut berkaitan dengan rata-rata lama tinggal wisatawan. Rata-rata lama tinggal wisatawan merupakan indikator penting yang mencerminkan daya tarik destinasi, kenyamanan, serta variasi kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan selama berada di Kabupaten Situbondo. Berikut adalah grafik rata rata lama tinggal wisatawan selama berada di Kabupaten Situbondo:

Tabel 2. 56 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	2.25 hari	1 hari	0.9 hari	1.1 hari	1.01 hari

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, wisatawan menghabiskan rata-rata 2,25 hari di Situbondo, menunjukkan minat yang tinggi terhadap destinasi wisata di daerah ini. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis, di mana rata-rata lama tinggal hanya mencapai 1 hari. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, dengan rata-rata lama tinggal turun menjadi 0,9 hari. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1,1 hari, angka ini kembali menurun pada tahun 2023, dengan rata-rata lama tinggal tercatat sebesar 1,01 hari. Data ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan daya tarik wisata Situbondo agar wisatawan dapat tertarik untuk tinggal lebih lama di daerah tersebut.



Sertifikasi SDM bagi pelaku dan pengelola destinasi wisata juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing pariwisata di Kabupaten Situbondo. Akan tetapi pada tahun 2019 – 2023 mengalami penurunan yg signifikan jumlah peserta yang bersertifikasi kompetensi *Tour Guide* yaitu pada tahun 2019 sebanyak 20 pelaku/pengelola pariwisata dan pada tahun 2020-2021 tidak ada sertifikasi *Tour Guide* dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 37 pelaku/pengelola pariwisata dengan sertifikasi *Tour Leader*. Pada Tahun 2023 dengan indikator skema sertifikasi kompetensi *Tour Guide* (TG) yaitu sebanyak 6 peserta yang lulus. SDM yang terlibat dalam sektor pariwisata akan memiliki standar kompetensi yang diakui, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengunjung, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan karir SDM pariwisata, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, serta mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata.

Dengan adanya sertifikasi SDM, pengelola destinasi wisata tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan destinasi dengan lebih efektif. Hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah destinasi wisata yang dibina dan dikembangkan secara profesional di Kabupaten Situbondo. Dengan SDM yang terlatih dan tersertifikasi, destinasi-destinasi wisata di Situbondo dapat dikelola dengan standar yang lebih tinggi, memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pengunjung, serta mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang datang. Berikut adalah data jumlah destinasi wisata yang dibina dan dikembangkan di Kabupaten Situbondo:

Tabel 2. 57 Jumlah Destinasi Wisata yang dibina dan dikembangkan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Destinasi Wisata yang Dibina dan Dikembangkan	21 ODTW	20 ODTW	23 ODTW	22 ODTW	22 ODTW

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, jumlah destinasi wisata yang dibina dan dikembangkan di Kabupaten Situbondo menunjukkan variasi yang relatif stabil. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 21 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dibina dan dikembangkan. Namun, pada tahun 2020, jumlah ini sedikit menurun menjadi 20 ODTW. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2021, dengan 23 ODTW yang dikelola. Meski demikian, pada tahun 2022 dan 2023, jumlah destinasi wisata yang dibina dan dikembangkan sedikit menurun dan stabil di angka 22 ODTW. Data ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata di Situbondo, meskipun terdapat beberapa fluktuasi dalam jumlah destinasi yang dikelola setiap tahunnya.

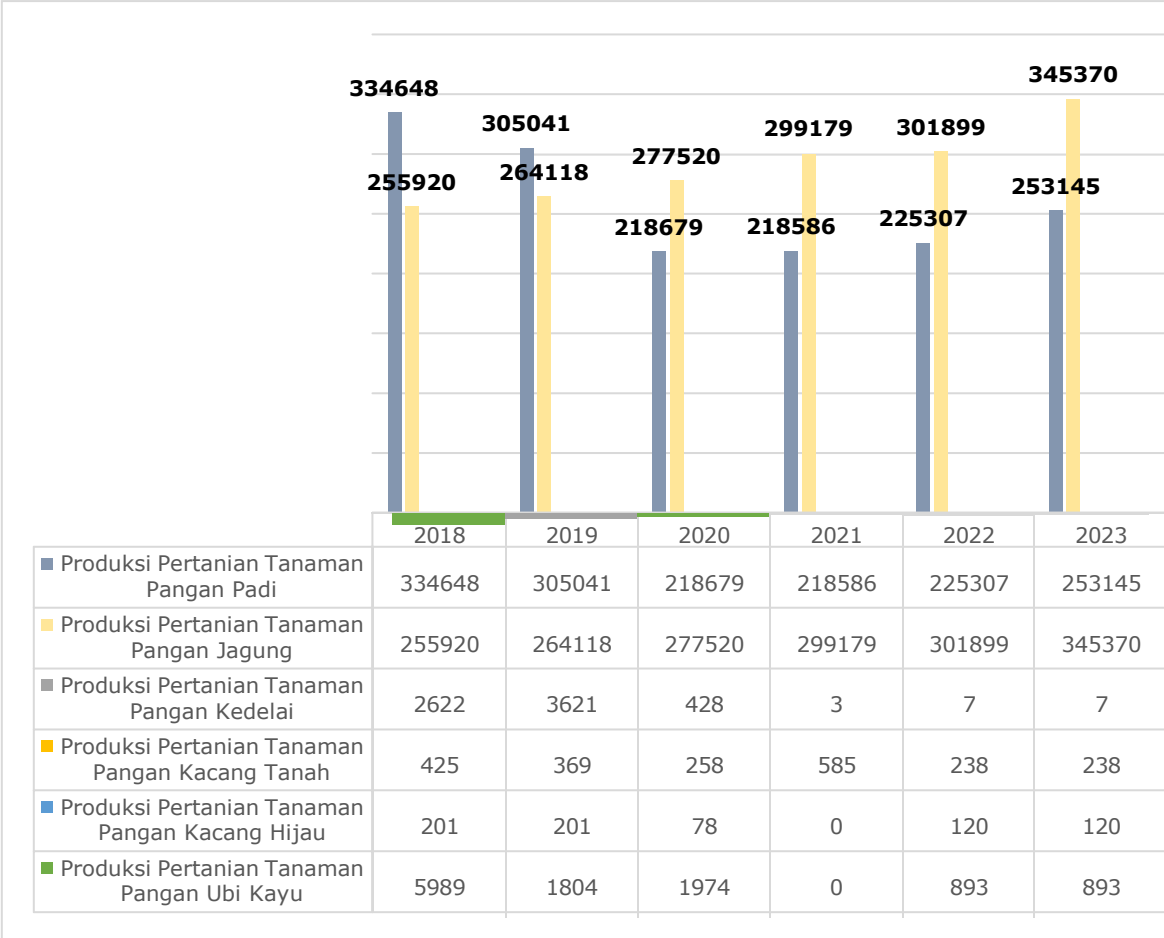


2.4.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Situbondo karena meyumbang PDRB terbesar. Adapun dalam pertanian terbagi atas pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan.

2.4.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan terdiri atas pada, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Berikut penjabaran atas produksi pertanian pangan di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2. 91 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2018-2023 (Ton)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah produksi padi tahun 2018 sebesar 334.648 ton. Namun di tahun 2019 hingga 2021 produksi padi konsisten mengalami penurunan hingga mencapai angka 218.586 Ton. Kemudian pada tahun 2022, produksi padi akhirnya bangkit dari keterpurukan dan bisa mencapai angka 225.307 Ton dan terus meningkat hingga mencapai 253.145 Ton di tahun 2023.

Produksi jagung pada tahun 2018-2023 selalu mengalami kenaikan hingga menjadi 345.370 ton. Produksi pertanian kacang hijau mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 78 ton dari sebelumnya sejumlah 201 Ton, akan tetapi pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 120 ton. Hal yang sama terjadi dengan produksi pertanian kedelai dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi 3 ton pada tahun 2021 dan 7 ton pada tahun 2023. Dari semua produksi pertanian yang mengalami kenaikan pada tahun 2023 adalah jagung dan ubi kayu yakni sebanyak 345.370 ton dan 893 ton.



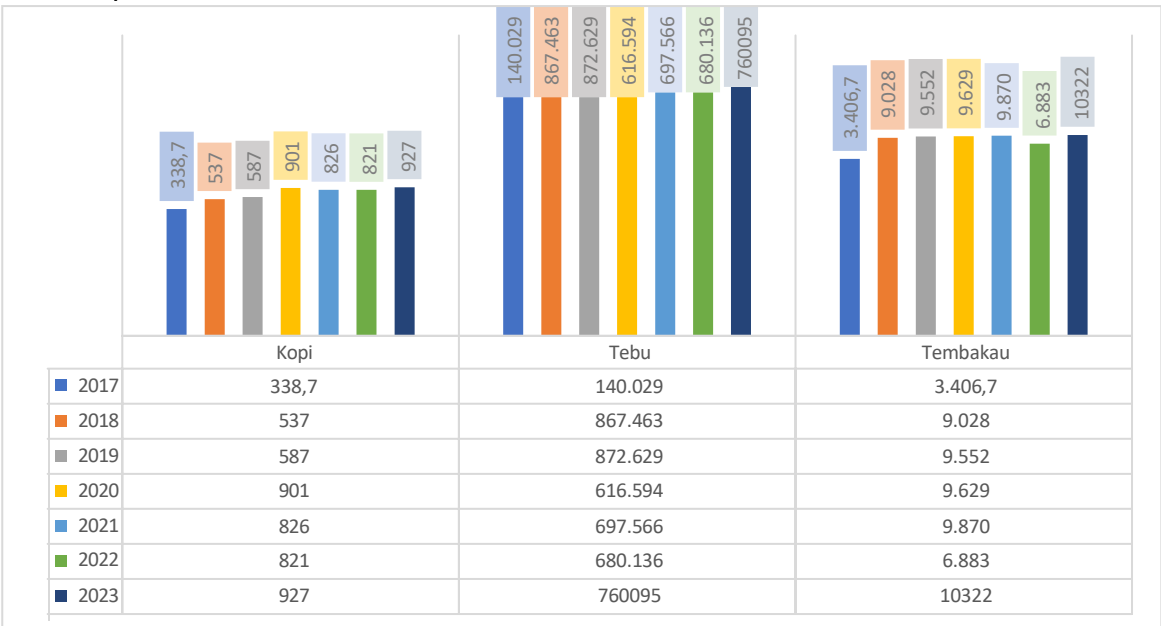
Tabel 2. 58 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi	Ton	334,648	305,041	218,679	218.586	225,307	253,145
2	Jagung	Ton	255,920	264,118	277,520	299.179	301,899	345,370
3	Kedelai	Ton	2,622	3621	428	2,69	7	7
4	Kacang Tanah	Ton	425	369	258	585	238	238
5	Kacang Hijau	Ton	201	201	78	n/a	120	120
6	Ubi Kayu	Ton	5,989	1804	1974	n/a	839	893

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo 2024

2.4.3.3.1 Perkebunan

Pada pertanian perkebunan di Kabupaten Situbondo adalah kopi, tebu, dan tembakau. Berikut adalah hasil produksi pertanian perkebunan di Kabupaten Situbondo:



Gambar 2. 92 Grafik Produksi Perkebunan 2017-2023 (Ton)

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo 2024

Berdasarkan grafik produksi perkebunan tersebut diketahui produksi tanaman kopi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020 yakni mencapai 901 ton, namun pada tahun 2021-2022 produksi kopi terus mengalami penurunan hingga berada pada angka 821 ton. Akan tetapi produksi kopi dapat kembali meningkat menjadi 927 ton di tahun 2023. Selanjutnya, penurunan tren terjadi pada tanaman tebu dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 872.629 ton namun menurun hingga menjadi 616.594 ton pada tahun 2020. Akan tetapi sejak tahun 2021 hingga 2023 produksi tebu dapat kembali meningkat hingga menjadi 760.095 ton.

Berbeda dengan produksi tebu, produksi tembakau mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2017 hingga 2023 dan mencapai 10.322 ton. Namun sebelumnya sempat mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 6.883 ton. Agar produksi komoditas perkebunan terus meningkat, maka pemerintah akan membangun UPH kopi di sentra penghasil kopi (kayumas dan sumber malang) dan gudang tembakau untuk rakyat di sentra penghasil tembakau (kecamatan Sumber Malang, Jatibanteng, dan Besuki).



2.4.3.3.2 Pertanian Holtikultura

Pada pertanian holtikultura di Kabupaten Situbondo adalah cabai rawit, cabai besar, bawang merah, tomat, dan mangga. Berikut adalah hasil produksi pertanian holtikultura di Kabupaten Situbondo:

**Tabel 2. 59 Produksi Pertanian Holtikultura Kabupaten Situbondo
Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cabai Rawit	Ton	14.767	8.592	14.875	20.714	28.824	19.151
2	Cabai Besar	Ton	481	345	661	549.1	583	442
3	Bawang Merah	Ton	2.425	2.160	3.587	5.411,8	583.0	5.149
4	Tomat	Ton	148	2.761	6.962	435.885	996,7	996.7
5	Mangga	Ton	15.851	23.503	27.682	30.942	29.804	40.053

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo 2024

Berdasarkan data tabel diatas, pada sub sektor tanaman holtikultura produksi cabai rawit pada tahun 2018 sejumlah 14.767 Ton. Jumlah produksi di tahun berikutnya bergerak fluktuatif, dimana di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8.592, kenaikan kembali di tahun 2020 menjadi 14.875, dan naik lagi di tahun 2021 hingga 2022 menjadi 28,824 ton. Akan tetapi produksi cabai rawit pada tahun 2023 menurun cukup banyak menjadi 19.151 ton.

Kemudian cabai besar di tahun 2018 sebesar 481 ton menjadi 345 ton di tahun 2020, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan menjadi 661 ton, sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2021 terjadi penurunan hingga menyentuh 549,1 ton. Pada tahun 2022, produksi cabai besar kembali meningkat hingga berada pada angka 583 ton. Akan tetapi pada tahun 2023 produksi cabai besar kembali menurun pada angka 443 ton.

Sedangkan pada komoditas bawang merah, produksi terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 5.411,8 ton, yang mana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memiliki tren capaian meningkat pada umumnya, penurunan hasil produksi terjadi pada tahun 2019 yakni mencapai 2.160 ton dan pada tahun 2022 mencapai angka 583 ton, dimana hal tersebut merupakan sebuah penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2023, produksi bawang merah di Situbondo dapat kembali meningkat mendekati kondisi tahun 2021 yakni sebesar 5.149 ton.

Adapun pada hasil produksi tomat paling rendah terjadi di tahun 2018 yakni sebesar 148 ton dan terus berlanjut mengalami kenaikan dari tahun berikutnya yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yakni dengan hasil akhir 435.885 ton. Pada tahun 2022 dan 2023, produksi tomat di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai angka 996.7 ton. Hasil produksi yang terakhir pada sub ini yaitu produksi mangga



yang memiliki tren capaian meningkat pada setiap tahun dari kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan hasil produksi mencapai 30.942 ton. Namun sayangnya, pada tahun 2022 terjadi penurunan hingga menyentuh angka 29.804 ton yang kemudian dapat kembali meningkat menjadi 40.053 ton pada tahun 2023.

2.4.3.3.3 Peternakan

Tabel 2. 60 Produksi Peternakan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging Sapi	ton	1.903	1.941	1.782	2.117	1.928	2.163
2	Daging Kambing/ Domba	ton	404	327	274	111	112	136
3	Daging Ayam	ton	5.899	5.817	5.893	7.011	8.290	11.095
4	Telur	ton	965	948	1.055	1.210	1.142	1.097
5	Susu	Liter	402.245	270.545	194.879	162.593	136.637	121.038

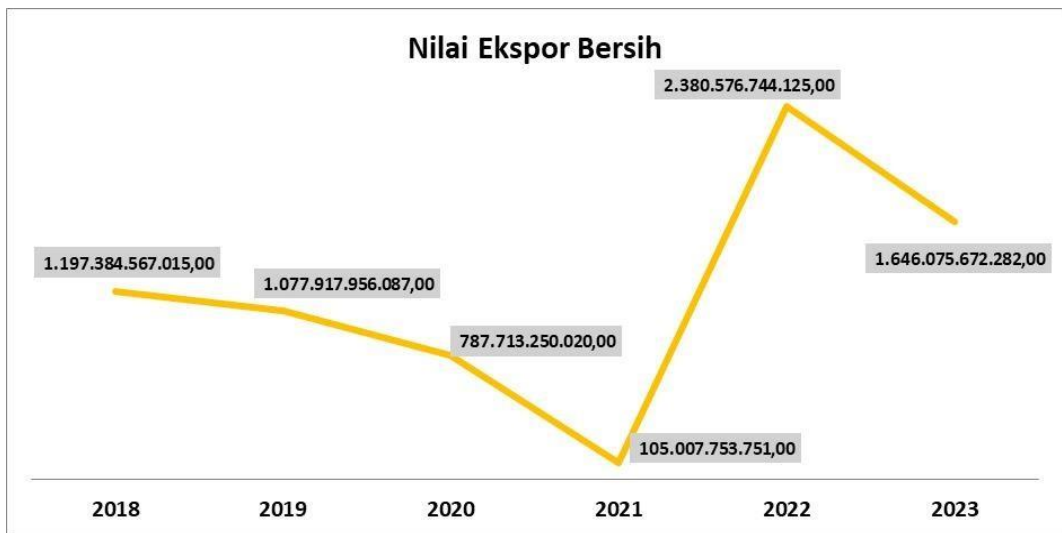
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas secara garis besar dapat terlihat bahwasannya pada komoditas hasil peternakan Daging Kambing dan Daging Ayam rata-rata terjadi peningkatan produksi pada kurun waktu 2018 hingga 2023. Salah satu gambaran terjadi peningkatan signifikan pada hasil produksi daging kambing pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 381% hingga sebesar 404 Ton namun di tahun selanjutnya terjadi penurunan hingga menjadi 136 ton di tahun 2023. Komoditas telur maupun susu terjadi penurunan dan peningkatan yang beragam di tiap tahunnya. Produksi tertinggi pada komoditas telur hanya terjadi pada tahun 2021 yaitu sejumlah 1.210 Ton yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya kembali mengalami penurunan hingga pada pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga menjadi 1.097 ton. Sedangkan pada komoditas susu, produksi paling tinggi berada di tahun 2018 yaitu sebesar 402.245, namun pada tahun 2019 hingga 2023 terjadi penurunan signifikan hingga menjadi 121.038 Liter. Sedangkan pada produksi daging sapi terlihat kecenderungan dari 1.903 ton di tahun 2018 menjajdi 2.163 di tahun 2023. Meskipun begitu, produksi daging sapi sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2022.

2.4.3.4 Perdagangan

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan pilihan perdagangan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo Yaitu “Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap Pembangunan”. Hasil capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah untuk urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan KabupatenSitubondo. Urusan perdagangan menjadi salah satu urusan prioritas karena urusan perdagangan berkaitan dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah.





Gambar 2. 93 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Situbondo 2018-2023
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024

Dari data di atas menunjukkan nilai ekspor perdagangan bersih Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan yang cukup baik dari Rp. 1.053.391.274.047 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.197.384.567.015 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.077.917.956.087 dan menurun signifikan menjadi Rp. 787.713.250.202 di tahun 2020. Memasuki tahun 2020 merupakan masa Pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2017-2020 proses ekspor impor masih berjalan normal seperti biasanya akan tetapi memasuki tahun 2020 sudah mulai banyak negara-negara dibelahan dunia yang membatasi aktivitas keluar, termasuk produk-produk yang akan masuk ke negara-negara tersebut dilarang, sehingga banyak proses-proses transaksi yang dilaksanakan pada tahun 2020 banyak yang dibatalkan. Seiring dengan gejolak perekonomian pada masa pandemi yang masih berlangsung pada tahun 2021, maka nilai ekspor bersih pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 105,007,753,751.

Era digitalisasi membawa dampak perubahan pola bekerja pada sektor perdagangan dan pengembangan SDM dalam persaingan usaha. Pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring menjadikan banyak model usaha. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan Nilai Ekspor Kabupaten Situbondo mulai mengalami peningkatan yang sangat progresif pada tahun 2022, yakni dengan adanya peningkatan jumlah investasi hingga mencapai Rp. 2.380.576.744.125, walaupun pada tahun 2023, nilai Ekspor Kabupaten Situbondo mengalami penurunan sebesar Rp. 1.646.075.672.282.

2.4.3.5 Perindustrian

Peningkatan pembangunan perindustrian di Kabupaten Situbondo diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil serta promosi dan peningkatan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi dalam sektor industri di wilayah ini memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pembangunan sektor industri sangat bergantung pada

sumber daya yang tersedia, karakteristik wilayah, dan kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaannya dengan memberikan nilai tambah, terutama dalam hal bahan baku, penyerapan tenaga kerja, dan peluang berusaha yang lebih luas, serta meningkatkan devisa.

Kendala dalam pembentukan kawasan industri masih berlangsung karena ketergantungan pada dana dari pusat yang belum memadai, ditambah dengan perubahan tema pembangunan yang menyulitkan penentuan lokasi yang sesuai. Ambisi dari beberapa pemilik usaha yang ingin menjadi pusat industri sendiri juga menjadi faktor yang mempersulit proses ini. Namun, ada titik terang dengan adanya masterplan untuk kawasan industri yang mencakup sektor-sektor vital seperti industri tembakau, kerajinan kerang (yang telah dibangun di Pasir Putih), dan RPIK. Meskipun demikian, potensi pengembangan industri kayu di Sukorejo yang sebelumnya gagal menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi, meskipun potensi besar tetap ada. Hasil capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah untuk urusan Pilihan Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 61 Capaian Urusan Perindustrian Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	2,98	3,07	3,00	3,14	3,23	2,71
2	Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan	%	17,39	18,06	19,16	19,53	20,21	20,58

Sumber: LKPJ Kabupaten Situbondo dan BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Data menunjukkan bahwa industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2019, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 3,07% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan ke 3,00%. Meskipun demikian, industri pengolahan tidak menyerah dan berhasil mengatasi tantangan tersebut. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian indikator kembali mengalami peningkatan menjadi 3,14% dan 3,23%. Hal ini menunjukkan adanya upaya dan inovasi yang dilakukan oleh industri pengolahan untuk terus berkembang. Akan tetapi, pada tahun 2023 industri pengolahan mengalami penurunan hingga menjadi 2,71%

Sedangkan pada indikator Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan, data menunjukkan bahwa persentase peningkatan produksi industri pengolahan mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 17,39% dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 20,58%.

2.4.3.6 Transmigrasi

Urusan transmigrasi dilaksanakan pada bidang Pelatihan kerja dan Prodiktivitas dengan program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian dan Kegiatan Peningkatan Transmigran Berhasil dan Mampu Hidup Mandiri. Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian terdapat 1 indikator program yaitu Prosentase calon transmigrasi yang dilatih dengan capaian



0% di tahun 2020. Target pada indikator program ini adalah 0% dan terealisasi sebesar 0%. Urusan Transmigrasi yang diampu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memiliki 1 Program Pembangunan pada Tahun 2019 yaitu Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian dengan pencapaian kinerja 100%. Lebih jelasnya trend data 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 62 Realisasi Capaian Urusan Transmigrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase calon transmigrasi yang dilatih	%	100	0	100	n/a	100

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, 2024

2.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.4.1 Perencanaan

Berdasarkan, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dengan capaian sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 63 Realisasi Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 %	90,00%	97,67%	108,53%
Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD	Presentase Program RKPD tahun berkenaan	96,70%	100,00%	103,00%
	Presentase Program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan			
Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	Jumlah renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	91,00%	100,00%	110,00%

Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo 2024



Capaian indikator urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 (empat) indikator yang dimana masing-masing indikator sasaran capaian kinerjanya lebih dari 100%. Pencapaian ini menandakan bahwa Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo telah melaksanakan programnya sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang ada serta pendampingan yang dilakukan bidang-bidang di Bappeda Kabupaten Situbondo kepada OPD koordinasi telah dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat permasalahan pada aspek pembagian kerja dimana pemerintah pusat dianggap tidak konsisten. Berkaitan dengan ketidakkonsistenan, aspek ini juga harus berhadapan dengan kemungkinan adanya perubahan regulasi dari pemerintahan pusat. Perubahan regulasi yang mengharuskan adanya perubahan teknis, indikator, konsep, dan komponen-komponen lainnya merupakan hal yang sudah lumrah terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu bertindak responsif dan agile untuk beradaptasi.

2.4.4.2 Keuangan

Dalam upaya keseriusan pemerintah dalam melaksanakan transparansi publik dalam bidang keuangan maka pemerintah berusaha melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki target untuk mencapai opini laporan keuangan WTP oleh BPK RI. Opini WTP oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2. 64 Opini Laporan Keuangan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Berdasarkan Indikator capaian diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Situbondo telah mampu mengelola keuangan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya sehingga mencapai Opini BPK Wajar, tanpa Pengecualian selama 6 tahun berturut – turut. Pencapaian ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan dan terus dipertahankan hingga waktu yang akan datang.

Namun, sektor keuangan Kabupaten Situbondo masih memiliki beberapa permasalahan terutama terkait pengelolaan anggaran dan aset. Postur anggaran Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh belanja pegawai. Kemudian, koordinasi terkait pengawasan dan pengelolaan aset masih relatif lemah sehingga menimbulkan penyalahgunaan aset. Berkaitan



dengan aset, terdapat banyak aset daerah yang diakui oleh masyarakat. Pada sisi pengelolaan pendapatan, masih rendahnya kepatuhan dan kepedulian wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini berimplikasi pada kurang maksimalnya penerimaan daerah. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah terbatasnya SDM pengelola pendapatan daerah baik secara kualitas dan kuantitas. Belum adanya petugas pemeriksa pajak dan juru sita pajak menjadi alasan belum optimalnya penegakan sanksi bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Selain itu juga disebabkan belum tersedianya sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah. Dibutuhkannya upaya digitalisasi sektor komersial yang disesuaikan dengan regulasi sehingga potensi dan realisasi pajak dan retribusi bisa meningkat. Dari sisi eksternal, dinamisnya perubahan regulasi mengenai pengelolaan keuangan dari pusat mengakibatkan aparatur daerah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri yang berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Untuk urusan kepegawaian capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 65 Realisasi Capaian Urusan Kepegawaian Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 %	86,00%	100,00%	116,28%
Meningkatnya Kinerja ASN dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapatkan nilai prestasi kerja minimal 76 (baik) selaras dengan perjanjian kinerja	87,00%	97,44%	112,00%
	Persentase pegawai ASN yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	98,00%	120,83%	123,30%
	Persentase updating data kepegawaian tepat waktu	87,00%	100,43%	115,44%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Situbondo 2024



Berdasarkan Indikator capaian di atas dapat dilihat perubahan realisasi capaian-capaian indikator urusan kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Indeks Profesionalitas ASN secara substansial memuat komponen kapasitas dan kapabilitas ASN dalam melaksanakan tugas aparatur. Untuk melihat kinerja ASN yang tangkas dan profesional diperlukan alat ukur atau instrumen yang digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, yaitu indeks profesionalitas ASN, yang akan diukur dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan. Berkaitan dengan kualitas ASN, masih ditemukan beberapa permasalahan mikro yang mendegradasi kinerja ASN seperti ketidakdisiplinan sehingga kedisiplinan kode etik perlu ditegakkan. Pemerintah perlu memaksimalkan implementasi reward dan punishment yang belum optimal.

2.4.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah. Pengembangan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, sehingga berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat. Capaian indikator sasaran untuk urusan Penelitian dan Pengembangan mulai dari tahun 2017-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Realisasi Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023

Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai <i>policy brief</i>	90	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Pada APBD tahun anggaran 2020 untuk Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan di-refocusing sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi coronavirus 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.



2.4.4.5 Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo mempunyai Tugas dan Fungsi menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD, Administrasi Keuangan DPRD, tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Capaian indikator sasaran untuk urusan Sekretariat DPRD mulai dari tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 67 Realisasi Capaian Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD kabupaten	10	13	13	14	14	13
2	Jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten	45	45	45	45	45	45

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Situbondo selama tahun 2018-2023 cenderung stagnan, namun mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020 yang berjumlah 13 orang dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 10 orang tetapi harus mengalami penurunan di tahun 2023 hingga menjadi 13 orang. Sedangkan jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo selama tahun 2018-2023 selalu berjumlah 45 orang dan tidak pernah mengalami perubahan. Sehingga persentase jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD di tahun 2023 sebesar 29%, sedangkan persentase anggota laki-laki yang menjadi DPRD sebesar 71%.

2.4.4.6 Sekretariat Daerah

Capaian indikator sasaran untuk urusan Sekretariat Daerah dari Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Capaian Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kategori Evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang (2.8861)
2	Capaian Nilai Sakip Pemerintah Daerah	BB	A	A	A	A	A

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024



Berdasarkan tabel capaian urusan sekretariat daerah Kabupaten Situbondo terdapat 2 (dua) indikator. Kategori evaluasi LPPD Kabupaten Situbondo periode 2018 s/d 2023 tergolong prestasi sangat baik. Hal tersebut terbukti dari data tabel diatas, yang mulai dari tahun 2018-2021 selalu mencetak predikat "Sangat Baik". Pada tahun 2023 mencetak predikat "Sedang". Seiring dengan semangat Reformasi Birokrasi maka Pemerintah Kabupaten Situbondo optimis untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan indikator kedua adalah Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2018 capaian nilai SAKIP terealisasi dengan memperoleh kategori BB dengan nilai 70,88, kemudian untuk tahun 2019 target capaian nilai SAKIP Kabupaten Situbondo adalah kategori BB, dengan realisasi kategori A dengan nilai 81,5 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah di atas 100% atau sangat baik. Sedangkan untuk tahun 2020 target capaian nilai SAKIP Kabupaten Situbondo adalah kategori A begitu pula bertahan hingga tahun 2023. Secara umum terdapat kenaikan yang signifikan terhadap nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Situbondo dari tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya perubahan yang cukup signifikan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun komitmen dari pimpinan. Untuk itu diperlukan upaya upaya yang lebih baik dalam rangka mempertahankan predikat tersebut.

2.4.4.7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Inspektorat diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat memberikan informasi umpan balik kepada Bupati Situbondo melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikut ini adalah capaian indikator sasaran dari urusan pengawasan :

Tabel 2. 69 Realisasi Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A	%	47,62	72,91	93,75	97,78	91	93,18
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	91,06	75,41	85,34	n/a	100	73



No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase penyelesaian kasus/ pengaduan yang ditangani	%	75,73	100	100	100	100	100
4	Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja diatas, dari 4 indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah untuk Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, selama periode 2018 s/d 2023 secara keseluruhan sudah cukup membaik dan memenuhi target. Pada tahun 2020 Persentase Kategori Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A, realisasinya terdapat 45 OPD yang nilai evaluasi SAKIPnya A dari 48 OPD yang dinilai SAKIPnya, atau sebesar 93,75%. Tercapainya capaian kinerja pada indikator ini disebabkan SAKIP OPD telah dievaluasi internal oleh Inspektorat Daerah, dokumen disusun dengan memperhatikan ukuran kinerja atas program/kegiatan yang dianggarkan serta keterkaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang pada akhirnya menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di OPD.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang Telah Ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 85% dari rekomendasi pada Tahun 2020, realisasinya telah mencapai 85,34% atau 649 rekomendasi dari 899 rekomendasi pemeriksaan internal dan 19 rekomendasi dari 19 rekomendasi eksternal pada tahun 2020 yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 100,04%. Objek pemeriksaan pada tahun 2020 hanya sebanyak 67 entitas dari 722 entitas yang dapat diperiksa dengan output 69 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Entitas sebanyak 67 yang diperiksa terdiri atas 13 OPD, 6 Kecamatan, 16 Desa untuk Pemeriksaan atas APBDes 2019, dan 32 Desa untuk Pemeriksaan atas APBDes 2020.

Persentase penyelesaian kasus/pengaduan yang ditangani selama tahun 2015 s/d 2020 secara umum terealisasi sebesar 100%, hanya di tahun 2018 realisasinya sebesar 75,73%. Hal ini disebabkan meningkatnya kompetensi Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Sedangkan persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP selama tahun 2017-2020 realisasinya sebesar 100%. OPD telah menyusun laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, realisasinya seluruh OPD telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SIRKA. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual telah memudahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP.



2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025

2.5.1 RPJPD PERIODE 1

2.5.1.1 RPJPD Periode 2006 – 2010

Fokus misi ke 1 dan arah kebijakan pada RPJPD Kabupaten Situbondo yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis agribisnis sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam rangka mengetahui tingkat ketecapaian pembangunan sektor ekonomi pada periode ke satu atau sepanjang tahun 2006 hingga 2010, maka perlu dirumuskan indikator yang relevan dengan tujuan pembangunan pada Misi ke satu. Adapun indikator kinerja yang relevan di antaranya adalah Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kinerja indikator tersebut secara umum positif dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan memberikan kontribusi mencapai 31,56% terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi ditahun 2010. Jika dilihat dari ADHB dan ADHK kinerja disektor pertanian juga cukup baik dengan angka masing-masing pada tahun 2010 mencapai 2.610.923,02 dan 1.151.164,26. Perkembangan ekonomi berbasis sektor unggulan juga dapat direpresentasikan melalui jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terus meningkat hingga menjadi 13.047 yang tersebar di 17 Kecamatan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan ada 14.355 orang di tahun 2010. Selanjutnya terkait dengan potensi alam dan status Situbondo sebagai salah satu kawasan wisata di Jawa Timur maka memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan PDRB sektor akomodasi. Pada tahun 2010 sektor akomodasi mampu memberikan kontribusi 35,13% dengan ADHB yang mencapai 2.906.698,92. Sehingga dapat disimpulkan kinerja indikator pada Misi ke satu periode 2006-2010 cukup baik.

Representasi yang dapat menggambarkan hasil pembangunan pada misi ke dua dengan fokus pada pembangunan sumberdaya manusia diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian pada tahun 2010 yang berada diangka 64,26 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitar dan provinsi Jawa Timur. Sektor pendidikan sebagai komponen pembentuk IPM, secara kualitas dapat dilihat dari capaian angka melek huruf maupun rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2010 angka melek huruf hanya 78,24% artinya masih 20% lebih dari total penduduk di Kabupaten Situbondo yang belum melek huruf. Sedangkan harapan lama sekolah juga masih rendah dan masih setara dengan usia Sekolah Dasar, artinya belum sampai pada wajib belajar minimal sembilan tahun. Sehingga dapat disimpulkan kinerja pembangunan sektor sumber daya manusia khususnya sektor pendidikan masih rendah dan belum sesuai dengan harapan bersama.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi fokus dari Misi ke tiga RPJPD melalui pembangunan sektor kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga indikator yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan pembangunan pada misi ketiga diantaranya Usia Harapan Hidup masyarakat. Pada tahun 2010 usia harapan hidup dengan angka 63,19 masih relatif rendah. Sedangkan Asektor KB AktiF dalam rangka terwujudnya keluarga berencana sehingga dapat menekan jumlah kelahiran penduduk. Upaya pemerintah dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan efektif dan berhasil menekan angka tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2010 TPT Kabupaten Situbondo hanya 3,13 atau masih masuk kategori rendah. Hal tersebut seiring dengan angka TPAK yang juga

relatif rendah. Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan transmigrasi dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Namun kinerja yang baik pada sektor ketenagakerjaan tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS pada tahun 2010, persentase penduduk miskin masih berada di angka yang cukup tinggi yakni 16,23%.

PDRB sektor perikanan menjadi indikator yang relevan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan pada sumber daya laut. Capaian kinerjanya sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Bahkan untuk PDRB berdasarkan ADHK dan ADHB nilainya juga cukup tinggi yakni mencapai 317.205,18 untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan 138.691,62 untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sektor perikanan pada periode satu cukup baik.

Indikator yang dapat merepresentasikan kualitas manajemen pemerintahan di Kabupaten Situbondo pada periode ke satu yakni Pembangunan di bidang Hukum, Pembangunan Politik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kontestasi pemilu. Menjaga kondisi Keamanan dan Ketertiban wilayah serta Pembangunan Keuangan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan serta memperkuat pendapatan keuangan daerah. Realisasi PAD tahun 2010 mencapai 23.029.415.454,41 atau masih relatif rendah.

2.5.1.2 RPJMD Tahun 2006 – 2010

RPJMD Tahun 2006-2010 merupakan periode pertama dalam Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo. RPJMD periode ini disusun dengan visi pembangunan sebagai berikut, **“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Agamis, Demokratis, Berkualitas, Berpola Pikir Maju, Sejahtera, Dan Berwawasan Lingkungan Serta Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme”** yang dijabarkan kedalam 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Pada periode ini dokumen RPJMD disusun dengan belum mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 54 Tahun 2010 sehingga secara format dan muatan substansi dokumen secara garis besar masih bersifat kualitatif dan belum memenuhi standar sistematika sebagai mana ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010. Hal tersebut menjadikan proses evaluasi pada periode ini cukup sulit untuk dilakukan dikarenakan indikator kinerja yang ditetapkan masih belum ditetapkan secara tersurat melainkan masih perlu dilakukan interpretasi. Selain itu, dukungan pencatatan data pada periode tersebut juga masih cukup minim, sehingga beberapa indikator kinerja masih belum dapat didukung dengan target maupun realisasi kinerja yang representatif.

Mengacu pada kondisi sebagaimana dijelaskan tersebut, maka hasil penilaian atas capaian kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan representatif. Namun demikian jika penilaian masih tetap harus diberikan

dengan mengacu pada indikator yang tersedia data target dan realisasinya, maka predikat kinerja pada periode pertama ini adalah pada kategori **Tinggi** dengan capaian 85,77%.

2.5.2 RPJPD PERIODE 2

2.5.2.1 RPJPD Periode 2011 – 2015

Keberhasilan arah kebijakan yang dilaksanakan pada periode 2011-2015 misi 1, secara umum dapat dilihat melalui capaian pada beberapa indikator dibawah ini:

1. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang ada di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, Hal ini dapat dilihat dari capaian PDRB (dalam Miliar) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.891,91 sedangkan di tahun 2015 mencapai Rp. 5.361,70 , sehingga dalam lima tahun peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai angka Rp. 2.470 angka. Dengan distribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar dengan presentase sebesar 36,24 dan laju pertumbuhan produk sebesar 3,13 di tahun 2015;
2. Jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu lima tahun juga mengalami perkembangan yang pesat di tahun 2015 tercatat sebanyak 59.726 usaha, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 usaha yang tercatat hanya sebesar 13.522 usaha
3. Pada sektor pariwisata, meskipun perkembangannya tidak meningkat pesat, akan tetapi dalam lima tahun terakhir jumlah wisatawan di Kabupaten Situbondo cenderung fluktuatif. Dengan jumlah wisatawan tertinggi ada di tahun 2012 sebesar 270.000 dan jumlah wisatawan terendah ada pada tahun 2014 sebesar 75.000, akan tetapi di tahun 2015 mengalami peningkatan yang pesat yakni sebesar 240.000 dengan kunjungan wisata terfavorit di objek wisata pasir putih sebesar 144.376 pada tahun 2015

Keberhasilan arah kebijakan yang dilaksanakan pada periode 2011-2015 misi 2, secara umum dapat dilihat melalui capaian pada beberapa indikator dibawah ini:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu yang dapat diapresiasi, di tahun 2011 tercatat capaian IPM sebesar 60,82 sedangkan di tahun 2015 tercatat sebesar 64,53. Hal ini menunjukkan, kesuksesan Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan capaian IPM meskipun capaian di tahun 2015 masih terbilang jauh dari target yang ditetapkan Kabupaten Situbondo yakni sebesar 69,18 .
2. Dalam capaian rata-rata lama sekolah, meskipun pada prosesnya peningkatan capaian dalam lima tahun tidak mengalami peningkatan yang cukup jauh akan tetapi masih terdapat proses, dapat dilihat pada angka capaian rata-rata lama sekolah di tahun 2011 hanya mencapai 5,04 sedangkan di tahun 2015 telah mencapai 5.67. Dengan Harapan Lama Sekolah di tahun 2011 sebesar 11,54 dan di tahun 2015 sebesar 12,98.

Keberhasilan arah kebijakan yang dilaksanakan pada periode 2011-2015 misi 3, secara umum dapat dilihat melalui capaian pada beberapa indikator dibawah ini:

1. Jumlah Balita yang mengidap Gizi Buruk dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan dengan capaian di tahun 2011 sebesar 204 balita dan ditahun 2015 meningkat menjadi 238. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya perhatian Ibu hamil untuk calon bayi saat masih ada di dalam kandungan dengan mempertimbangkan gizi yang di dapat oleh calon bayi serta penurunan kunjungan pemeriksaan untuk ibu hamil.
2. Penurunan persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Situbondo dalam empat tahun terakhir mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Di tahun 2011 jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo mencapai 98.560 dengan persentase 15,11% sedangkan di tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 87.670 dengan persentase 13,15% dibanding dengan jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Situbondo. Hal ini membuktikan bahwa Pemerataan ekonomi masyarakat cukup baik sehingga jumlah penduduk miskin kurang dari 15%.

Keberhasilan arah kebijakan yang dilaksanakan pada periode 2011-2015 misi 4, dapat dilihat dari peningkatan Produksi perikanan budidaya air kolam di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan, Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya produksi di tahun 2015 sebesar 319,14 ton. Produksi di tahun 2015 ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun 2011 sebesar 224,90 ton. Dapat dikatakan pertumbuhan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Situbondo mengalami perkembangan. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya tambak Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan cukup tinggi dengan capaian di tahun 2015 sebesar 6.010,48 ton.

Keberhasilan arah kebijakan yang dilaksanakan pada periode 2011-2015 misi 5, dapat dilihat dari proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2011 sebesar 58,94% sedangkan proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik sebesar 92,05%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah masih kurang dalam merawat jalan daerah. Oleh karena itu di akhir periode penetapan target proporsi panjang jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 72,05% dengan ini diharapkan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

2.5.2.2 RPJMD Periode 2011 – 2015

Periode kedua RPJMD Kabupaten Situbondo disusun dengan mengusung Visi pembangunan sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan”. Visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta memberi perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran dan tanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan serta peningkatan

- elayanan kesehatan masyarakatMeningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat.
 4. Meningkatkan kualitas dan mentalitas pengabdian pengelola pemerintahan demi terwujudnya profesionalitas kinerja pelayanan.
 5. Meningkatkan kualitas demokrasi, supremasi hukum dan HAM melalui peningkatan kesadaran hukum bagi aparaturnya dan masyarakat.

Seperti halnya pada RPJMD Periode pertama, pada periode ini, RPJMD yang disusun masih belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010, sehingga penetapan indikator beserta targetnya masih belum secara eksplisit sehingga perlu dilakukan penafsiran. Oleh karena hal tersebut, tidak semua indikator yang dianggap relevan tersedia data pendukungnya. Hasil penilaian pada setiap indikator yang berhasil diidentifikasi dapat diketahui bahwa mayoritas indikator telah mencapai target kinerja pembangunan. Jika mengacu pada perhitungan lebih lanjut untuk melihat rata-rata capaian kinerja, maka kinerja pembangunan pada periode ini dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan skor sebesar dengan skor sebesar **178%**.

2.5.3 RPJPD PERIODE 3

2.5.5.1 RPJPD Periode 2016 – 2020

Keberhasilan pembangunan pada tahap ketiga (2016-2020) RPJPD Kabupaten Situbondo 2005-2025 pada dasarnya dapat dilihat melalui capaian 124 agenda pembangunan yang merupakan breakdown dari 6 Misi dan 27 Arah kebijakan. Secara eksplisit, tidak terdapat indikator kinerja spesifik yang ditetapkan dalam upaya mengukur capaian pembangunan dalam RPJPD RPJPD Kabupaten Situbondo 2005-2025 ini, namun terdapat beberapa Indikator yang secara substantif dapat menjadi ukuran keberhasilan agenda-agenda pembangunan tersebut, sehingga ditetapkan keberadaanya sebagai instrumen pengukuran ketercapaian agenda pembangunan pada tahap ini.

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan merupakan indikator yang dapat mengukur “nilai tambah produksi agribisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal dan nasional” yang tertuang dalam arah kebijakan Penyelarasan Sistem Agribisnis di Misi 1 (Mengembangkan Perekonomian Berbasis Agribisnis). Namun capaian Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami tren penurunan dalam rentang waktu 2016-2020. Sedangkan dalam konteks arah kebijakan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam sistem agribisnis, pertambahan Jumlah UMKM menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari arah kebijakan ini. Jumlah UMKM yang secara spesifik juga merupakan indikator dari agenda Penguatan UKM untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing mengalami pertambahan sebanyak 222 hingga akhir periode 2016-2020 ini. Adapun arah kebijakan Pengembangan Pariwisata, dalam tahapan ketiga RPJPD ini memiliki 3 agenda prioritas yaitu penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, promosi pariwisata daerah

dan, Peningkatan SDM pariwisata yang kompeten. Ketiga agenda tersebut bertujuan untuk “meningkatkan jumlah kunjungan wisata serta lama tinggalnya” sehingga dapat memacu geliat ekonomi sektor pariwisata yang dapat diukur melalui Pertumbuhan Pertumbuhan PDRB Sektor akomodasi dan penyediaan makan minuman di Situbondo. Namun indikator ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di akhir periode 2016-2020, hal tersebut merupakan imbas dari adanya pandemi Covid-19 yang berdampak serius pada kontraksi sektor pariwisata di tahun 2020.

Dalam upaya pencapaian misi 2: Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya pada tahap ketiga (2016-2020) RPJPD Kabupaten Situbondo 2005-2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukur yang tidak dapat dilepaskan. IPM mengalami tren positif dalam tahap ini dengan konsisten mengalami kenaikan sampai akhir periode, dengan total kenaikan sekitar 2,3 poin. Selain IPM, Indeks Pendidikan, yang dianggap mampu mengukur “upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat” dalam arah kebijakan pembangunan pendidikan, juga mengalami kenaikan hingga akhir periode 2016-2020. Lebih lanjut, Rata-rata lama sekolah yang dapat mengukur agenda kebijakan “penuntasan wajib belajar 9 tahun” mengalami peningkatan dalam tahap ini, meskipun masih relatif jauh dari rata-rata 9 tahun yaitu 6,46.

Selain pembangunan pendidikan, misi kedua RPJPD juga memuat arah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan beragama, kebudayaan, pembangunan pemuda dan olah raga. Dalam tahapan ketiga, capaian pembangunan beragama dan pembangunan gender belum dapat diukur dikarenakan belum adanya data indikator dijadikan tolok ukur keberhasilannya yaitu Indeks Toleransi dan Indeks Solildaritas Sosial. Sedangkan pembangun kebudayaan yang salah satu agendanya pada tahapan ini adalah Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dan tradisional, mencapai kinerja yang cukup optimal jika dilihat dari tren meningkatnya persentase budaya lokal yang dilestarikan. Adapun arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang di tahap 3 ini, di antara agenda prioritasnya adalah Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda dan olah raga, Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda serta Peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dapat dilihat melalui 2 indikator utama yaitu Persentase Pemuda wirausaha baru dan Jumlah Atlet berprestasi. 2 indikator ini memiliki kecenderungan yang kurang baik dalam kurun waktu 2016-2020, khususnya Jumlah atlet berprestasi cenderung fluktuatif, namun mengalami penurunan di tahun terakhir periode (2020).

Misi 3 RPJPD Kabupaten Situbondo 2005-2025 memuat arah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Kebijakan kesehatan pada tahapan ini mencapai kinerja yang cukup baik terbukti dari capaian indikator utamanya, Indeks Kesehatan yang mengalami perbaikan dengan kondisi akhir sebesar 0,76 di tahun 2020. Capaian positif ini diikuti pula dengan penurunan prevalensi gizi buruk sampai akhir periode sehingga menjadi indikasi baik pada penanganannya. Sedangkan dalam konteks pembangunan kependudukan memiliki kinerja yang relatif tidak optimal dibuktikan dari capaian jumlah akseptor KB yang di tahun terakhir lebih rendah dibanding tahun awal tahap ketiga ini. Kondisi yang relatif sama juga

dicapai agenda pembangunan ketenagakerjaan yang belum cukup optimal di tahap ketiga ini dibuktikan dari Tingkat pengangguran terbuka cenderung fluktuatif namun mengalami tren kenaikan hingga mencapai 3,85% di akhir periode. Sebaliknya, capaian positif diraih agenda penanggulangan Kemiskinan di tahap 3 ini, dibuktikan dengan Persentase Penduduk Miskin cenderung fluktuatif dengan kondisi akhir yang lebih rendah sehingga berindikasi baik.

Dari misi 4, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi tolok ukur keberhasilan agenda-agenda dalam arah kebijakan Pengembangan Keanekaragaman Hayati mengalami tren peningkatan di tahap 3 ini meskipun turun di tahun akhirnya, sehingga tren tersebut menyiratkan bahwa agenda Konservasi dan pengawasan pengelolaan keanekaragaman hayati dan nabati untuk pemanfaatan secara lestari relatif berhasil tercapai. Adapun Agenda Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan dalam misi ini mencapai kinerja yang cukup baik dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, kedua indikator tersebut sejatinya mewakili agenda Pengembangan ekonomi kelautan secara sinergis, optimal, dan berkelanjutan serta Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Dalam arah kebijakan penanganan kebencanaan, Kabupaten Situbondo mencapai pembangunan yang sangat optimal yang tercermin dari Indeks Resiko Bencana yang mengalami tren penurunan hingga akhir periode.

Misi 5 yang mencakup arah kebijakan pembangunan transportasi, Pengelolaan Sumber Daya Air serta Pengembangan Wilayah mencapai kinerja yang cukup optimal kecuali pada pengembangan kewilayahan. Kinerja arah kebijakan Pengembangan Wilayah dalam tahap ini kurang bisa diukur karena ketiadaan data capaian indikator yang digunakannya yaitu Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lahan. Namun, 2 arah kebijakan lain dalam misi ini agaknya telah mencapai kinerja yang optimal dengan semakin banyaknya jalan dengan kondisi baik jika dilihat dari tren kenaikan persentase jalan dalam kondisi baik serta jumlah jembatan dalam kondisi baik yang juga mengalami kenaikan hingga akhir periode tahap ketiga ini. Kedua capaian tersebut setidaknya dapat menjadi gambaran keberhasilan agenda meningkatkan kemantapan jaringan jalan dan jembatan & peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang termasuk dalam tahap ketiga arah kebijakan pembangunan transportasi. Keberhasilan yang sama juga dicapai oleh agenda Pendayagunaan (pembangunan, peningkatan dan memelihara) sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku (irigasi, domestik dan industri) yang tercakup dalam arah kebijakan pengelolaan sumber daya air tahap ketiga ini, keberhasilan tersebut dibuktikan dengan Air baku bagi kebutuhan rumah tangga yang tercukupi dengan adanya tren kenaikan persentase Pemenuhan air baku bagi rumah tangga.

Adapun misi 6 RPJPD Kabupaten Situbondo: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yang di dalamnya meliputi arah kebijakan Pembangunan Hukum, arah kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Politik, Pembangunan Komunikasi dan Informasi, Pembangunan Keamanan dan Ketertiban serta Pembangunan Keuangan Daerah mencapai kinerja yang baik, kecuali pada arah pembangunan hukum yang kurang dapat diukur karena ketidakcukupan data capaian jumlah perda dan perkara yang ditetapkan sebagai indikator

ukuran kinerja arah kebijakan ini. Selain arah kebijakan tersebut, capaian agenda-agenda dalam arah kebijakan dan misi 6 RPJPD Kabupaten Situbondo dapat dikatakan cukup memuaskan, misalnya agenda Mengembangkan potensi untuk keuangan daerah, Menarik investor untuk menambah pendapatan daerah dan Meningkatkan sistem pendapatan asli daerah untuk pengelolaan sumber-sumber keuangan dari dalam dan dari luar daerah, yang termasuk agenda prioritas dalam misi ke 6 thaap ketiga, mengalami capaian kinerja yang gemilang jika dilihat dari Sektor investasi yang semakin baik dengan peningkatan Petumbuhan Total Investasi hingga mencapai 68,8% di akhir periode serta Rasio Pendapatan Asli Daerah yang mengalami fluktuasi namun dengan capaian akhir yang lebih tinggi dari tahun awal di tahap ini. Adapun dalam araha kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, kinerja baik pada tahap ini tercermin dari Nilai SAKIP yang semakin membaik hingga mencapai dan mempertahankan predikat A di akhir periode, konsistennya Kabupaten Situbondo meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK dalam kurun 2016-2020 kecuali tahun 2019 yang tidak memiliki data.

2.5.5.2 RPJMD Periode 2016 – 2020

Periode ketiga RPJPD dijabarkan lebih lanjut kedalam RPJMD yang pada periode ini mengusung visi pembangunan “Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Visi tersebut diuraikan kedalam empat misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan
- 2. Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera, dan berkeadilan
- 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal
- 4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah

Penyelenggaraan pembangunan pada periode ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil evaluasi kepada seluruh indikator kinerja pembangunan menunjukkan bahwa mayoritas indikator kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari skor rata-rata pada seluruh indikator kinerja maka kinerja pembangunan pada periode ini masuk dalam kategori tinggi dengan skor 89%. Berikut merupakan rincian hasil evaluasi pada setiap indikator pembangunan pada RPJMD periode ketiga.

Tabel 2. 70 Tabel Capaian RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2020

Periodisasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas SDM	IPM	64.53	71.76	67.78	94%
	a. Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	n/a	0.6	0.59	98%
	b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	n/a	0.77	0.757	98%



Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
	4 pendapatan masyarakat	Pendapatan Per Kapita	n/a	31.9	Rp 9,996,000.00	
Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera, dan berkeadilan	Tujuan 2.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Kemiskinan	13.63	8.5	12.63	67%
	5 pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3.57	1.49	3.68	40%
	b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa maju	n/a	83	39	47%
	6 kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PPKS	n/a	1.12 atau 97,37%	77%	126.45%
Misi 3 Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal	Tujuan 3.1 Meningkatkan perkenomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan	Pertumbuhan ekonomi	4.86	6.38	3.26	51%
		Indeks Gini Rasio	0.33	0.262	0.323	81%
	a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, untuk meningkatkan kesejahteraan	3.14%	3.22%	1.69%	52%



		Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7.77%	8.80%	3.74%	43%
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	6.35%	10.02%	6.93%	69%
		Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi	8.53%	10.01%	4.12%	41%
	b. Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi PMA dan PMDN	n/a	563.6785 Miliar Rupiah	Rp 1,494,194,011,904.00	265%
	c. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	1. IKLH	71	73.5	74.49	101%
		2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	n/a	B (81)	81.91	101%
Misi 4 Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraa n pemerintah	Tujuan 4.1 Meningkatkan birokrasi pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik	Indeks reformasi birokrasi	n/a	75.91	74.21	98%
	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	n/a	81.26	80.63	99%



Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
	b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1. Kategori Evaluasi LPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		2. Capaian Nilai SAKIP Kabupaten	CC	A	A	100%
	c. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset	Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WDP	WTP	WTP	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2016 – 2020						89%
Predikat Kinerja						Tinggi

2.5.6 RPJPD PERIODE 4

2.5.6.1 RPJPD Periode 2021 – 2025

Merujuk pada arah kebijakan, representasi keberhasilan Misi 1 RPJPD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2025 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Pada arah kebijakan 1-5 merupakan agenda dalam rangka mengembangkan produksi sampai pemasaran yang berdaya saing pada sektor pertanian dan agribisnis dalam rangka mencapai Misi Perekonomian berbasis Agribisnis. Hingga tahun 2023, struktur perekonomian Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan besaran persentase 30,61%. Hal ini dikarenakan besarnya potensi pertanian baik geografi maupun demografi di Kabupaten Situbondo. Sumbangsih sektor pertanian dalam perekonomian daerah dapat tercermin dari nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adapun pada tahun 2022 nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 7 079 218,48 Juta Rupiah dan dapat meningkat 0,34% pada tahun 2023 menjadi Rp. 7 693 481,41 juta Rupiah.
2. Pendukung perekonomian selanjutnya yakni pada sektor industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha penyumbang terbesar kedua setelah pertanian, perikanan dan peternakan. Kabupaten Situbondo memiliki jumlah industri yang cukup besar yakni 14.713 industri pada tahun 2022 dan masih bertambah 475 industri pada tahun 2022. Sehingga jumlah industri di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 sejumlah 14.713 industri. Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya meningkatkan perekonomian daerah salah satunya dengan memberdayakan industri dan UMKM yang ada. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk membuat UMKM naik kelas dan dapat bersaing secara global sehingga dapat memperbaiki ekonomi pelaku usaha. Akan tetapi, kembali pada besarnya jumlah industri di Kabupaten Situbondo, hal ini tidak sebanding dengan anggaran pemerintah daerah yang tersedia, hingga tahun 2021 hanya 1,16% usaha mikro yang diberdayakan, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,79%. Sedangkan pada ranah koperasi, pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki capaian yang cukup baik, tercermin dari adanya peningkatan usaha koprasi sebesar 30,56% pada tahun 2021 dan 80,36% pada tahun 2022.



3. Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Situbondo memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sektor akselerasi perekonomian daerah. Pariwisata telah menjadi stimulan bagi perkembangan perekonomian daerah dimana memiliki dampak positif yang cukup tinggi terhadap pendapatan daerah dan juga dampaknya yang dapat mempengaruhi ke berbagai sektor (multiplier effect). Pasca pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menggerakkan upayanya dalam mengembangkan pariwisata daerah yang sempat terhenti pada 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 23 objek wisata yang dikembangkan dan mendapatkan prestasi ditingkat Jawa Timur dan Nasional. Pariwisata Kabupaten Situbondo pada periode ini (2021-2025) khususnya pada tahun 2022 dan 2023 dapat dikatakan lebih stabil dibandingkan pada periode sebelumnya. Sarana akomodasi seperti perhotelan menjadi lebih stabil dibandingkan dengan pada tahun 2020, kondisi tersebut juga dilihat dari lama hunian wisatawan di Situbondo sebesar 1,2 hari di tahun 2022 dan meningkat menjadi 1,4 hari di tahun 2023. Keseluruhan upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menggerakkan pariwisata guna mengembangkan perekonomian dapat tercermin dari adanya pertumbuhan nilai PDRB sektor Akomodasi dari Rp. 428 353,17 Miliar Rupiah di tahun 2022 menjadi Rp. 454 139,20 Miliar Rupiah di tahun 2023, atau dengan kata lain tumbuh sebesar 5,95%.

Merujuk pada arah kebijakan, representasi keberhasilan Misi 2 RPJPD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2025 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Sebuah pembangunan manusia salah satunya dapat diukur melalui peningkatan pengetahuan, kesehatan dan umur yang panjang serta kehidupan yang layak pada masing-masing individu. Sebagai upaya untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten Situbondo telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Pada periode ini (2021-2025) pembangunan SDM Kabupaten Situbondo dapat dikatakan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya tercermin dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat pada 10 tahun terakhir hingga pada tahun 2023 mencapai 69,11 dan kembali meningkat hingga 69,62 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan arah kebijakan 1-7 yang sudah baik. Akan tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, pemenuhan perbaikan kualitas SDM Kabupaten Situbondo yang lebih difokuskan dari sisi pendidikan dalam hal ini masih menunjukan tren yang stagnan pada tahun 2022 dan 2023. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Situbondo tidak banyak mengalami peningkatan. Adapun HLS 2022 sebesar 13,18 dan HLS 2023 sebesar 13,19. Sedangkan RLS 2022 sebesar 6,63 dan RLS 2023 sebesar 6,90. Dengan capaian angka tersebut maka nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo juga stagnan pada angka 0,60 di tahun 2022 dan 2023.
2. Selain membangun SDM melalui ranah pendidikan, Pemerintah Situbondo berupaya mewujudkan SDM yang memiliki akhlak mulia

dan berbudaya. Upaya ini dilakukan dengan pelaksanaan arah kebijakan terkait dengan kerukunan umat beragama, fasilitas tempat ibadah, lembaga keagamaan, nilai moral pada masyarakat serta pengembangan budaya lokal dan tradisional sebagai aset pendidikan dan pengetahuan (arah kebijakan 8-16). Pengukuran pembangunan SDM dalam hal ini dapat dilakukan melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Pada tahun 2023 capaian IKS Kabupaten Situbondo pada predikat Baik yakni sebesar 78,38. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kab. Situbondo dalam peningkatan kesalehan sosial masyarakat Situbondo, seperti penguatan relasi sosial melalui Kegiatan keagamaan, kegiatan seni budaya, event yang melibatkan semua entitas kultural dan religi, penguatan budi pekerti, kepedulian lingkungan, kepedulian sosial serta kepatuhan pada peraturan. Sehingga pada tahun 2023 nilai IKS Kabupaten Situbondo meningkat pada angka 78,38 dan masih dalam predikat Baik.

3. Arah kebijakan selanjutnya dalam menunjang pembangunan SDM di Kabupaten Situbondo adalah terkait pembangunan pada pemuda (arah kebijakan 17-22). Kabupaten Situbondo memiliki potensi pemuda yang cukup baik, khususnya pada bidang keolahragaan. Pemerintah Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan KONI untuk memberikan support pada kalangan pemuda dengan melaksanakan program-program yang mendukung pemuda dan atlet untuk berprestasi secara nasional maupun internasional. Adapun pada tahun 2022 terdapat 13 pemuda dan 11 Atlet yang berprestasi nasional dan internasional, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 6 pemuda berprestasi dan 19 Atlet yang berprestasi nasional dan internasional.
4. Kesenjangan gender juga merupakan hal yang penting dalam membangun SDM pada suatu wilayah. Perlindungan pada Perempuan dan anak perlu dilakukan karena sejauh ini, mereka adalah pihak yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan serta diskriminasi. IPG dan IDG merupakan indikator yang dapat menjadi tolak ukur pembangunan kesetaraan gender pada suatu wilayah. IPG Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 sebesar 87,32 dan menurun menjadi 73,16 pada tahun 2023. Artinya kesenjangan pembangunan pada laki-laki dan perempuan di tahun 2023 semakin tinggi. Pencapaian peningkatan IPG di Kabupaten Situbondo juga terjadi seiring dengan meningkatnya angka IPM. Berarti, perbedaan perlakuan terhadap perempuan menurun seiring dengan meningkatnya capaian pembangunan manusia. Dengan kata lain, penghargaan atau pengakuan terhadap peran perempuan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi bukti bahwa program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Situbondo memang dilakukan dengan berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender. Kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam ranah publik di Kabupaten Situbondo juga terlihat semakin baik, tercermin dengan adanya peningkatan IDG dari 73,60 di tahun 2022 menjadi 74,77 di tahun 2023. Tingginya pertumbuhan IDG ini disebabkan adanya peningkatan yang terlihat pada Keterlibatan Perempuan di parlemen yang pada tahun sebelumnya 28,89% menjadi 31,11%.

Merujuk pada arah kebijakan, representasi keberhasilan Misi 3 RPJPD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2025 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup pada suatu wilayah dapat diukur melalui nilai Indeks Kesehatan beserta komponen penyusunnya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). Adapun pelaksanaan peningkatan kualitas hidup melalui sektor kesehatan dijalankan pada arah kebijakan 1-5. Nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 sebesar 0,763. Akan tetapi pada 2023 dapat kembali meningkat menjadi 0,768. Meskipun begitu, nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Situbondo menempati 5 daerah dengan nilai terendah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga selaras dengan tingginya nilai prevalensi stunting dan balita gizi buruk di Kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2022 Kabupaten Situbondo terpilih sebagai salah satu wilayah yang mendapat intervensi penanganan penurunan stunting pada tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan RI. Hal ini dikarenakan prevalensi stunting Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 mencapai 4,1% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2022) sebesar 26,7%. Begitu juga dengan tingginya jumlah balita gizi buruk, pada tahun 2021 terdapat 85 kasus balita gizi buruk di Kabupaten Situbondo dan pada tahun 2022 dapat sedikit menurun menjadi 84 kasus. Penyebab utama terjadinya gizi buruk pada Balita di Kabupaten Situbondo tahun 2021 adalah pengetahuan ibu/keluarga yang masih rendah, yakni sebanyak 39 kasus (38%), penyebab terbesar kedua adalah BBLR sebanyak 23 kasus (22%), kemudian yang ketiga penyebab karena sakit sebanyak 19 kasus (18%), penyebab keempat miskin sebanyak 19 kasus (18%) dan yang terakhir penyebab lain-lain sebanyak 3 kasus (3%).
2. Arah Kebijakan 6-9 menunjukkan upaya peningkatan kualitas hidup melalui kependudukan, baik dari sisi pertumbuhan, persebaran, peningkatan kualitas keluarga sampai lansia, serta mengenai status kependudukan masyarakat pada ranah administrasi kependudukan. Beberapa hal tersebut dapat diukur capaiannya melalui jumlah aseptor KB Aktif yang pada tahun 2025 menunjukkan angka 80,75%. Artinya, sebagian pasangan subur di Kabupaten Situbondo sudah melaksanakan keluarga berencana, sedangkan sebagian kecil sisanya ada yang menghentikan program KB dan ada yang tidak melaksanakan KB. Selain memperhatikan kelangsungan hidup bayi dan penduduk usia muda, penduduk lansia juga perlu mendapat perhatian. Hal ini tercermin dengan adanya puskesmas yang mencakup pelayanan kesehatan usia lanjut dengan kemandirian, adapun pada tahun 2022 terdapat 20 puskesmas dan pada tahun 2023 masih dengan angka yang sama yaitu 20 puskesmas. Administrasi kependudukan sebagai sarana penduduk memperoleh kepastian status penduduk dapat dinilai dari Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran, pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengupayakan bayi lahir dapat langsung menerima akta kelahiran. Sehingga capaian indikator ini pada tahun 2022 dan 2023 sudah cukup baik, yakni sebesar 94,93% pada 2022 dan 96,12% pada 2023.
3. Peningkatan Kualitas Hidup seorang individu di Kabupaten Situbondo selanjutnya dilakukan melalui sektor ketenagakerjaan. Seorang

individu harus bekerja dan memiliki pendapatan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo sebesar 3.68% dan pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Situbondo berhasil menurunkan TPT pada angka 3.38%, pada tahun terakhir ini di tahun 2023 pemerintah mampu meurunkan TPT sebesar 3,27%. Tingginya nilai TPT pada tahun 2021 dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada perekonomian Kabupaten Situbondo, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga nilai pengangguran meningkat. Sedangkan pada tahun 2022, kondisi pasca pandemi sudah mulai stabil, usaha – usaha yang ada mulai pulih pasca pandemik covid-19, sehingga mengakibatkan naiknya kesempatan untuk berusaha/ bekerja yang pada akhirnya dapat menurunkan angka pengangguran. Selain itu hal ini juga dibarengi dengan upaya perluasan kesempatan kerja dan pelaksanaan pelatihan kerja yang diadakan dinas ketenagakerjaan. Salah satu upaya perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat melalui indikator Jumlah transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri, dimana pada tahun 2023 berhasil mencapai angka 30 transmigran dari sebelumnya (2021) tidak ada capaian transmigran yang dapat hidup mandiri. Adanya Refocusing Anggaran Covid-19 dan aturan social distancing menyebabkan tidak adanya pengiriman transmigran pada tahun 2021, namun pelaksanaan sosialisasi untuk calon trnasmigran tetap dilaksanakan dengan capaian prosentase calon transmigran yang terlatih sebesar 30%.

Selain mengupayakan masyarakat dapat memiliki pekerjaan, Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan jika ada kasus mengenai hubungan industrial. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Situbondo berhasil 100% menyelesaikan kasus Hubungan Industrial sebanyak 53 Kasus, dan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo berhasil 104% menyelesaikan kasus Hubungan Industrial sebanyak 26 Kasus.

4. Meskipun Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki kehidupan yang layak. Pada tahun 2022 terdapat 11,78% masyarakat Kabupaten Situbondo yang berada dibawah garis kemiskinan, dan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pada poin-poin sebelumnya pada tahun 2023 persentase penduduk miskin dapat menurun menjadi 11,67%. Penurunan persentase kemiskinan ini salah satunya didukung oleh tertanganinya 65.732 jiwa penduduk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di tahun 2022. Atau dengan kata lain, 80,40% dari 83.311 PPKS di Kabupaten Situbondo telah tertangani dan hal ini sangat berdampak pada angka kemiskinan pada tahun tersebut. Pencapaian turunnya angka kemiskinan yang sangat baik ini didukung oleh kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menangani kemiskinan terutama dalam bentuk pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang ekonominya sangat rentan terdampak covid-19, bantuan berupa uang bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang terdampak Inflasi kenaikan harga BBM dan bantuan berupa uang (BLT) kepada masyarakat buruh Tani Tembakau.

Merujuk pada arah kebijakan, representasi keberhasilan Misi 4 RPJPD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2025 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Kabupaten Situbondo memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar dari usaha pembenihan, budidaya air payau, penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Terdapat 13 Kecamatan berpantai dengan total panjang \pm 150 Km. Oleh karena itu, tentunya pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan di Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari sektor perikanan. Produksi ikan yang berasal dari penangkapan di laut Situbondo pada tahun 2023 mengalami peningkatan dimana produksi 2022 sebesar 18.772,82 ton dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 18.483,37 ton. Keberhasilan ini dikarenakan semua nelayan men-taati aturan pemakaian alat tangkap serta tidak melakukan penangkapan ikan yang berlebihan sehingga ketersediaan sumberdaya ikan di laut tetap terjaga. Tingginya hasil produksi ikan tersebut dapat meningkatkan nilai pendapatan pelaku usaha perikanan dari Rp. Rp. 2.103.015.949.708 di tahun 2022 menjadi Rp. 539.033.327,50 di tahun 2023. Lebih lanjut, hal ini juga berpengaruh pada PDRB sub sektor perikanan yang di tahun 2021 dapat tumbuh sebesar 2,18% dengan capaian sebesar 438%, angka tersebut diperoleh karena hasil produksi perikanan yang stabil dan cenderung meningkat didukung dengan masyarakat situbondo yang memiliki keinginan untuk berbudidaya dengan baik sehingga menghasilkan budidaya perikanan yang banyak dan tangkapan nelayan yang tidak merusak ekosistem dilingkungan perairan situbondo terbukti dengan sering munculnya ikan besar di perairan situbondo Untuk itu, agar produksi ikan di Kabupaten Situbondo tetap terjaga, Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan pelestarian lingkungan laut dengan memberikan aturan terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta rehabilitasi ekosistem (penanaman mangrove) yang digencarkan. Hal ini juga tercakup dalam arah kebijakan 1-10 yang mengisyaratkan mengenai pelestarian keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Pelestarian lingkungan dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana pada tahun 2022 IKLH Kabupaten Situbondo sebesar 73,02 dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 75.40. Peningkatan nilai IKLH tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada komposit lahan, pada komposit kualitas air dan udara meningkat hingga melebihi target yang ditentukan.
2. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tidak terlepas dari adanya resiko bencana alam yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan tanggap darurat terhadap bencana. Dengan kondisi geografis yang berada pada daerah pesisir, Kabupaten Situbondo memiliki letak geografis yang dekat dengan laut, gunung, serta hutan. Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 sebesar 101,40% dapat menurun menjadi 94,11 % di tahun 2023. Meskipun nilainya menurun, hal ini tetap perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya BPBD karena nilai IRB pada 2 tahun terakhir ini masih cukup tinggi.

Merujuk pada arah kebijakan, representasi keberhasilan Misi 5 RPJPD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2025 dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Indeks Infrastruktur, pengembangan infrastruktur di Kabupaten Situbondo dapat dinilai dari meningkatnya Indeks Infrastruktur pada tahun 2023 sebesar 80.48, dimana pada tahun sebelumnya (2022) menunjukkan angka 69.10. Salah satu infrastruktur bernilai tambah tinggi adalah jalan dan jembatan, pada tahun 2022 prosentase jalan dan jembatan yang terbangun dan terpelihara dalam kondisi mantap adalah sebesar 69,94%. Sedangkan untuk Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 77,77% pada 2021 dan menurun menjadi 74,21 pada tahun 2022. Sebagai daerah pesisir, infrastruktur dalam sektor kelautan juga perlu diperhatikan, pada tahun 2021 masih terdapat 70% persentase angkutan laut, hal ini dikarenakan belum maksimalnya fasilitas pelabuhan yang terbangun/diperbaiki. Akan tetapi, kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal angkutan laut dapat lebih baik pada tahun 2022, yakni dengan tercapainya 100% persentase angkutan laut.
2. Infrastruktur berikutnya yang juga memiliki peranan penting dalam masyarakat yakni mengenai air dan listrik. Pemenuhan air baku di Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 menunjukkan angka 72,47% dan pada tahun ini hanya terdapat 54,65% pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik. Pembangunan pada infrastruktur air terus dilakukan pemerintah Situbondo, sehingga pada tahun 2022 pemenuhan air baku dapat meningkat menjadi 74,90%.
3. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan lahan pada suatu wilayah, adapun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 terdapat 4 unit Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Pada tahun tersebut Prosentase identifikasi Bangunan yang ber-IMB berada pada angka 11,76%. Hal ini dikarenakan terdapat satu kegiatan ubah suai bangunan gedung yang tidak dapat terlaksana mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas sedangkan kegiatan tersebut menggunakan perlakuan struktur bangunan gedung khusus yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu cukup lama.

Merujuk pada arah kebijakan, keberhasilan Misi 6 RPJPD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2025 dapat direpresentasikan dan diukur melalui indikator pembangunan sebagai berikut:

1. Persentase penegakan perda, adapun pada tahun 2021 penegakan perda di Kabupaten Situbondo terlaksana 92,5% dan pada tahun 2022 menjadi 92%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat, kepuasan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek penerima manfaat penyelenggaraan pemerintahan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah pada suatu wilayah. Pada tahun 2022, survey kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah Kabupaten Situbondo berada pada angka 82,71 dan dapat meningkat pada tahun 2023 menjadi 82.75. Hal ini mencerminkan

adanya peningkatan pada kinerja pemerintah Situbondo. Melalui survey kepuasan tersebut, Dari 9 (sembilan) unsur yang dinilai, 2 (dua) unsur dalam kategori sangat baik, 6 (enam) unsur dalam kategori kinerja baik, dan 1 (satu) unsur berkinerja kurang baik, yaitu "Sarana dan Prasarana ". Sarana Prasarana menjadi unsur kinerja pemerintah Kabupaten Situbondo yang perlu diperbaiki, sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

3. Peningkatan PAD, Kabupaten Situbondo berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebesar 10,73%. Dimana jumlah PAD pada tahun 2022 sebesar Rp. 253.323.693.161,60 sedangkan pada tahun 2023 dapat meningkat menjadi Rp.266.047.712.290,94. Upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai tersebut di atas adalah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, meningkatkan intensitas koordinasi antara petugas pendataan dengan wajib pajak untuk mengoptimalisasikan potensi Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan sinergitas dengan instansi vertifikal, instansi provinsi dan OPD pengelola retribusi daerah, pemasangan taxmonitor pada obyek pajak,dan melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada wajib pajak maupun petugas pemungut pajak dalam rangka mendukung prosentase peningkatan PAD.
4. Nilai Investasi, investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Situbondo mencapai Rp. 3.733.811.101.171 di tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 dapat meningkat hingga menjadi Rp. 3.937.136.168.410. Adapun tingginya realisasi nilai investasi pada tahun 2023 tersebut karena tingginya minat para pelaku usaha yang ada untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Situbondo. Hal ini didukung oleh kegiatan Promosi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo baik melalui media elektronik (radio) maupun melalui event Pameran di luar kota serta penerbitan peraturan untuk mempermudah investasi. Selain itu, meningkatnya iklim investasi yang ada di Kabupaten Situbondo juga ditunjang oleh adanya Program "Nyara Investasi", yaitu Nyaman Ramah Berinvestasi. Sebagai bukti nyata dalam melaksanakan Nyara Investasi, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan daerah sebagai upaya mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program nyara investasi yaitu dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Situbondo. Dimana, dengan adanya peraturan bupati tersebut, diharapkan akan semakin menarik minat para investor, baik lokal maupun asing untuk berinvestasi dan melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Situbondo. Adapun beberapa upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar nilai investasi meningkat sebagai berikut:
 - a) Pembinaan rutin terhadap pelaku usaha
 - b) Pengawasan secara berkala terhadap pelaku usaha
 - c) Promosi

- d) Pelaksanaan Inovasi Klinik Dokter OSS RBA (Klinik Datang, Operasikan, Konsultasikan, Terbitkan OSS RBA)
- e) Pelaksanaan Safari Pengurusan NIB / Nomer Induk Berusaha (SIPENI)
- 5. Reformasi Birokrasi, adapun nilai reformasi birokrasi di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan di tahun 2023. Adapun capaian pada tahun 2022 sebesar 68,83 yang kemudian meningkat menjadi 70,14 di tahun 2023.
- 6. Predikat SAKIP serta Opini BPK, penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah serta penyelenggaraan keuangan di daerah. Kabupaten Situbondo telah 5 kali berturut-turut mendapatkan predikat A dalam penilaian SAKIP. Pada tahun 2019 nilai SAKIP Kabupaten Situbondo sebesar 81,5 (A), pada tahun 2023 tetap menerima predikat A akan tetapi nilai SAKIP-nya pada angka 81,59. Sedangkan untuk penilaian laporan keuangan dari BPK tahun 2023 Pemerintah Situbondo dapat meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2.5.6.2 RPJMD Tahun 2021 – 2025

RPJMD pada periode ini ditetapkan dengan visi pembangunan sebagai berikut, “Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, Dan Berdaya”. Visi tersebut diterjemahkan kedalam empat misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman
- 2. Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan
- 3. Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing
- 4. Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh

Capaian kinerja pada perencanaan 5 tahunan (RPJMD) periode ke empat RPJPD memiliki capaian yang sangat bagus. Berdasarkan data capaian kinerja pada setiap indikator kinerja Sasaran memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 165.91%. Dengan rata-rata capaian demikian maka predikat kinerja pada RPJMD periode terakhir Kabupaten Situbondo adalah pada kategori Tinggi. Berikut merupakan rincian capaian kinerja pada RPJMD periode keempat secara lebih detail.

Tabel 2. 71 Tabel Capaian RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2025

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Realisa si Akhir Periode (2023)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	Indeks Kesalehan Sosial	0	71,89	78.38	109,03



Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Realisa si Akhir Periode (2023)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
dalam Keberagaman	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Indeks Stabilitas	0	74,92	76.65	102.31
		Indeks Resiko Bencana	128.39	125.37	94,11	133.22
	Meningkatnya Toleransi Sosial	Indeks Toleransi	0	76.40	81.28	106.39
	Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	0	75.80	78.37	103.39
Misi 2 Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan	Meningkatkan Kualitas dan Keseimbangan SDM	Indeks Pembangunan Manusia	67.38	69.11	70.65	102.23
	Meningkatnya Keseimbangan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	87.06	87.63	87.43	99.65
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.580	0.602	0.596	99.00
	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.760	0.769	0.819	106.50
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks PPP	0.346	0.371	0.722	194,09
Misi 3 Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	Persentase Kemiskinan	12.22	11.52	11.90	96.70
		Gini Rasio	0.31	0.29	0.326	189.86
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80.37	83.21	83.59	100.45
		Pertumbuhan Ekonomi	-2.33	3.79	4.90	121.29
	Meningkatnya Desa Maju	Jumlah Desa Maju	39	61	63	103.28
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.85	2.87	3.27	86.06
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	n/a	69.80	80.48	100.97
		IKLH	72.05	72.19	75.40	104.45

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2023)	Realisa si Akhir Periode (2023)	Capaian Kinerja RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi	-13.06	5.19	4.28	82.47
		Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.09	0.88	4.03	457.95
		Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3.18	6.82	5.30	77.60
		Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8.70	4.87	5.59	114.78
		Nilai Realisasi Investasi (Juta)	1,445,621	1.533.994. 34	3.937.1 36.17	256.66
Misi 4 Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh	Mewujudkan Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	68.74	70.54	70.14	99.58
	Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital	Indeks SPBE	3.48	3.50	4.17	119.14
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76.66	80.01	82.75	103.42
	Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	56.95	65.50	63.16	96.42
	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	82.39	83.80	81.59	97.36
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	100.00
		Tingkat Maturnitas SPIP	Level 3	Level 4	Level 3	75
	Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2021-2025					
Predikat Kinerja						Tinggi



Berdasarkan capaian pada masing-masing periode dalam RPJPD Kabupaten Situbondo tahun 2005-2025 sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendorong dan penghambat kinerja sasaran pokok pada setiap misi dan periodisasi RPJMD harus dijadikan dasar di dalam proses perumusan indikator dan arah kebijakan.
2. Dalam perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan harus diikuti dengan indikator yang relevan sehingga mudah dalam merepresentasikan tingkat keberhasilan pembangunan.
3. Kebijakan pengembangan sektoral Kabupaten Situbondo kedepan diarahkan pada akselerasi potensi unggulan yakni sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Informasi dan Komunikasi serta pertumbuhan investasi secara berkelanjutan.
4. Terkait pembangunan spasial di Kabupaten Situbondo kedepan agar diselaraskan dengan kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan arah pembangunan nasional dalam rangka optimalisasi kerjasama daerah (intergovernmental relationship) dan akselerasi pemerataan ekonomi.
5. Dalam Perumusan visi, misi dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045 agar mengacu pada Visi Indonesia Emas tahun 2025-2045, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan, yang bersumber dari dokumen narasi rancangan awal RPJPN 2025-2045.
6. Dalam perumusan periodisasi, sasaran dan target serta arah kebijakan harus selaras atau linear dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
7. Arah kebijakan pembangunan harus memperhatikan keselarasan dengan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Situbondo, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Nasional.
8. Dalam hal optimalisasi kinerja sektoral dan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah Kabupaten Situbondo perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan atau pemantauan kinerja khususnya yang berkaitan dengan data sektoral sebaiknya melibatkan peran serta masyarakat.
 - b. Akselerasi pembangunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, namun kesiapan infrastruktur dan user harus sama sama dalam kondisi siap.
 - c. Desain pembangunan wilayah sebaiknya juga memperhatikan faktor kebencanaan untuk meminimalisir dampak dari kejadian luar biasa dan mempercepat proses pemulihan.
 - d. Pemerataan hasil pembangunan dapat dicapai secara optimal dengan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek pembangunan.
 - e. kualitas pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan harus semakin dioptimalkan untuk meningkatkan nilai investasi.

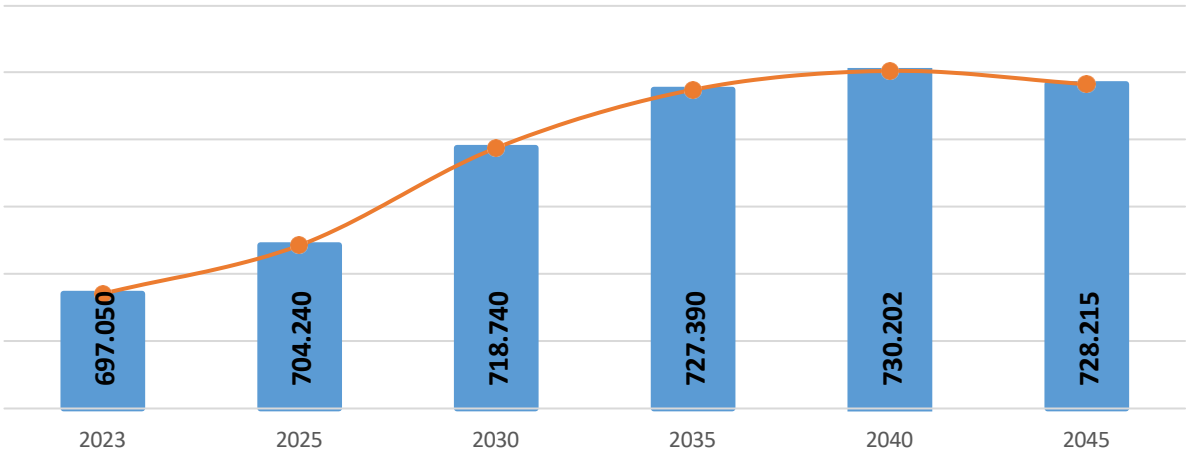
- f. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masih harus ditingkatkan, khususnya pada interkoneksi antar wilayah dan pemerataan akses pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan sosial.
- g. pengembangan kawasan perlu dilakukan dengan lebih holistik, sehingga dapat terjadi hubungan yang erat antara aktivitas di hulu dan hilir.
- h. fleksibilitas dokumen perencanaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang fleksibel sangat dibutuhkan.
- i. fokus pengembangan sektor pertanian harus mampu mengakomodir perkembangan rekayasa genetika tanaman dan kebutuhan pengolahan pasca panen.
- j. Untuk menekan tingkat pengangguran dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan tenaga kerja harus diselaraskan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Sebagai upaya untuk merumuskan Kebijakan Jangka Panjang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah, diperlukan adanya proyeksi kependudukan yang dapat memberikan gambaran kondisi demografi Kabupaten Situbondo hingga tahun 2045. Proyeksi ini akan menjadi dasar utama pengembangan Kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke Masyarakat seperti pelayanan sektor kesehatan, pendidikan dan sosial serta kebijakan kewilayahan di Kabupaten Situbondo.

Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo 2023-2045



Gambar 2. 94 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo

Tabel 2. 72 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo

Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
	2025	2030	2035	2040	2045
697.050	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024, diolah



Berdasarkan hasil analisis terhadap data proyeksi kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 mencapai 697.050 Jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 342.500 penduduk laki-laki dan 354.550 penduduk perempuan. Pada tahun-tahun berikutnya, Kabupaten Situbondo diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang relatif gradual hingga tahun 2040 dan mengalami penurunan jumlah di 5 tahun selanjutnya, hingga pada 2045 mencapai 728.215 jiwa dengan komposisi penduduk yang terdiri dari 354.771 jiwa penduduk laki-laki dan 373.444 jiwa penduduk perempuan atau dengan rasio jenis kelamin sebesar 95%, yang artinya terdapat 95 penduduk laki-laki di setiap 100 perempuan di Kabupaten Situbondo pada 2045.

Tabel 2. 73 Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Kelamin

Komponen	Baseline Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	342.500	346.070	352.760	356.180	356.607	354.771
Perempuan	354.550	358.170	365.980	371.210	373.595	373.444
Total Penduduk	697.050	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Rasio	97%	97%	96%	96%	95%	95%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024, diolah

Selain menjadi pertimbangan dalam penentuan arah pengembangan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, proyeksi demografi Kabupaten Situbondo juga dapat memberikan gambaran umum kondisi sumber daya manusia Kabupaten Situbondo di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui rasio ketergantungan penduduk yang merupakan perbandingan jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk non produktif.

Tabel 2. 74 Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kelompok Umur Produktif dan Non Produktif

Kelompok Umur	Baseline Tahun 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	134.000	135.450	138.970	141.180	133.138	126.585
15-64 Tahun	485.890	486.050	482.500	473.530	470.757	463.025
65 + Tahun	77.160	82.740	97.270	112.680	126.307	138.605
Angka Ketergantungan (%)	43,46%	44,89%	48,96%	53,61%	55,11%	57,27%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024, diolah

Apabila dicermati, hingga tahun 2045, Kabupaten Situbondo diproyeksikan akan mengalami pergeseran komposisi usia penduduk yang cukup signifikan. Pergeseran ini diindikasikan oleh penurunan komposisi penduduk usia produktif bersamaan dengan peningkatan penduduk usia non-produktif (terutama kelompok lanjut usia). Walhasil pergeseran ini berdampak pada peningkatan angka ketergantungan di Kabupaten Situbondo yang pada awalnya sebesar 43,45% di tahun 2023 menjadi 57,27% di tahun 2045. Secara lebih detail, proyeksi penduduk Kabupaten Situbondo berdasarkan kelompok usia dapat diamati pada tabel berikut:

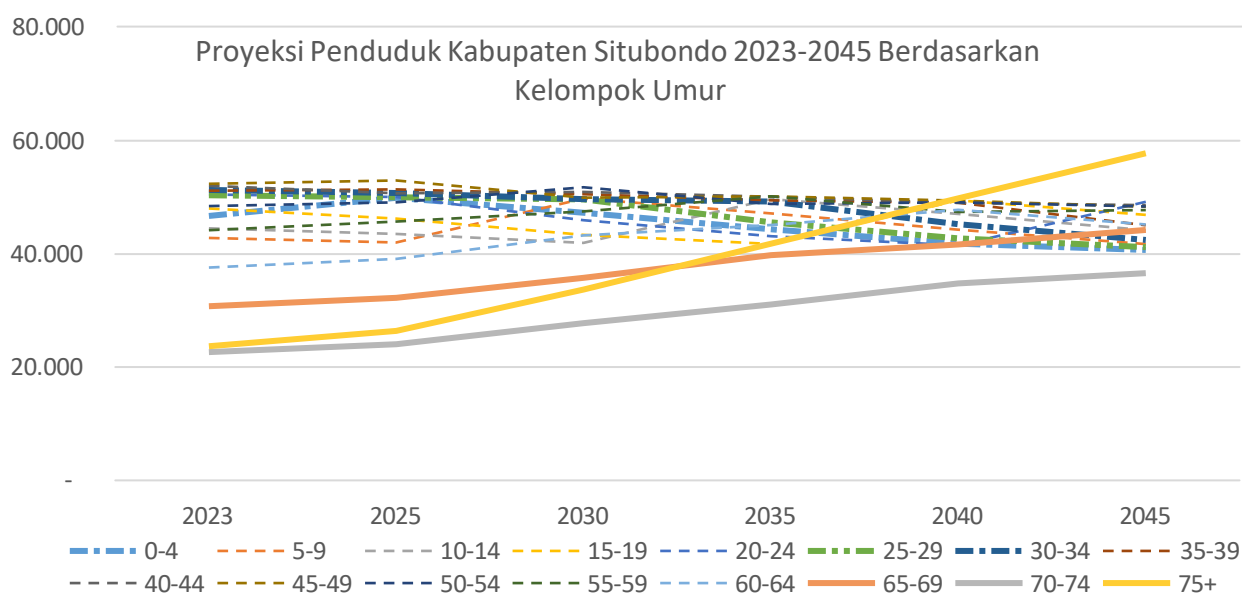


Tabel 2. 75 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Baseline	Proyeksi					% Penurunan/ Peningkatan
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
0-4	46.720	49.910	47.290	44.370	41.837	40.697	-12,89%
5-9	42.790	42.010	49.750	47.150	44.240	41.724	-2,49%
10-14	44.490	43.530	41.930	49.660	47.061	44.164	-0,73%
15-19	48.010	46.240	43.360	41.770	49.463	46.879	-2,36%
20-24	50.500	50.040	45.970	43.120	41.538	49.188	-2,60%
25-29	50.360	50.020	49.610	45.590	42.760	41.195	-18,20%
30-34	51.290	50.780	49.660	49.240	45.262	42.466	-17,20%
35-39	51.120	51.380	50.530	49.420	49.011	45.046	-11,88%
40-44	52.030	50.700	50.930	50.100	49.012	48.613	-6,57%
45-49	52.340	52.960	49.910	50.160	49.376	48.312	-7,70%
50-54	48.430	49.100	51.770	48.840	49.135	48.376	-0,11%
55-59	44.200	45.720	47.490	50.170	47.415	47.730	7,99%
60-64	37.610	39.110	43.270	45.120	47.785	45.220	20,23%
65-69	30.760	32.270	35.770	39.790	41.665	44.227	43,78%
70-74	22.680	24.070	27.770	31.100	34.817	36.600	61,38%
75+	23.720	26.400	33.730	41.790	49.825	57.778	143,58%
Total	697.050	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215	4,47%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024, diolah

Meskipun secara total Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan jumlah penduduk yang gradual sebesar 4,47%, namun apabila diamati secara lebih terperinci, terdapat beberapa kelompok usia yang justru mengalami tren penurunan pada tiap- tiap. Penurunan paling signifikan dapat diamati pada tren penduduk kelompok usia 25-29 Tahun di mana pada tahun 2045 jumlahnya diperkirakan sebesar 41.195 jiwa atau menurun sebesar -18,2% dari jumlahnya di tahun 2023 yang mencapai 50.360 jiwa. Penurunan ini juga dapat dilihat secara merata terjadi pada tren pendudukan kelompok usia muda hingga usia produktif yang terdapat pada rentang usia 30-34 tahun serta kelompok usia balita atau penduduk dengan usia 0-4 tahun.



Gambar 2. 95 Proyeksi Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024, diolah

Sebaliknya, penduduk Kabupaten Situbondo yang masuk dalam kategori masa akhir usia produktif hingga lanjut usia mengalami tren kenaikan paling signifikan dari tahun 2023 hingga 2045. Sesebagaimana yang dapat dilihat pada proyeksi pertumbuhan penduduk usia 75 tahun ke atas di Kabupaten Situbondo yang mengalami total peningkatan sebesar 143% dari sejumlah 23.720 jiwa di tahun 2023 menjadi 57.778 jiwa pada tahun 2045. Fenomena meningkatnya penduduk lanjut usia ini mengindikasikan adanya potensi *aging population* di Kabupaten Situbondo dalam 20 tahun mendatang. Sebagai bentuk respons pada kecenderungan penduduk yang didominasi oleh manusia lanjut usia (manula), penting bagi kabupaten Situbondo untuk memastikan tersedianya prasarana dan jaminan kesehatan yang memadai serta merata bagi penduduk rentan dan juga optimalnya perluasan kesempatan kerja bagi penduduk produktif sebagai tindakan preventif pada peningkatan angka ketergantungan penduduk.

Pada akhirnya, proyeksi kependudukan dalam RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045 ini akan menjadi fondasi penting dalam proses perumusan kebijakan sosial yang lebih merata dan tepat sasaran hingga 2 tahun yang akan datang.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan pelayanan dasar yang merata dan tepat sasaran, perlu dilakukan analisis pada kebutuhan dasar serta sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar tersebut dalam rentang waktu 2025-2045. Analisis tersebut diejawantahkan dalam bentuk proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2045. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar dimaksud meliputi: Kebutuhan Air, Pangan, Permukiman dan Rumah, Persampahan, Pendidikan, Kesehatan dan Listrik/ Energi.

Di bagian ini, kebutuhan dasar serta kebutuhan sarana prasarana Kabupaten Situbondo akan diproyeksikan dalam jangka 5 tahunan, tepatnya di tahun terakhir setiap tahapan. Hasil proyeksi kependudukan Kabupaten Situbondo tahun 2020-2045 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur menjadi dasar utama dalam proses proyeksi di masing-masing aspek

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Air

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Situbondo, terutama mengingat karakteristik pesisir wilayah ini. Keberadaan air bersih bukan hanya menjadi syarat utama untuk menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga menentukan kelangsungan berbagai sektor kehidupan. Di wilayah pesisir, akses terhadap air bersih menjadi lebih krusial karena dampak langsung dari aktivitas kelautan dan perikanan. Selain air bersih yang menjadi salah satu aspek krusial, air minum saat ini juga menjadi perhatian dalam ketersediaannya. Kebutuhan akan air minum masyarakat linier dengan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada peningkatan jumlah kebutuhan air minum. Oleh karena itu, dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045, aspek pelayanan air minum dan air bersih perlu diperhatikan secara serius. Pengelolaan sumber daya air, infrastruktur penyediaan air minum dan air bersih, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kualitas air harus

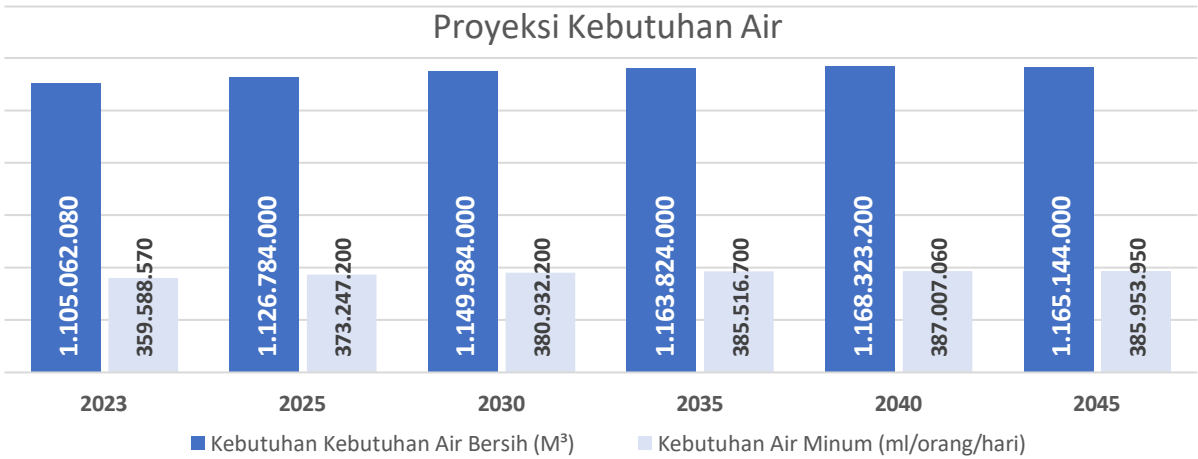
menjadi fokus. Dengan menjaga keberlanjutan pasokan air minum dan air bersih, Kabupaten Situbondo dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung sektor pertanian, dan memitigasi dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan air.

Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Uraian	Standar	Baseline	Proyeksi				
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Orang)		678.469	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Kebutuhan Kebutuhan Air Bersih (M³)	1600M³/Orang/Tahun	1.105.062.080	1.126.784.000	1.149.984.000	1.163.824.000	1.168.323.200	1.165.144.000
Kebutuhan Air Minum (ml/orang/hari)	2 ml/orang/hari	359.588.570	373.247.200	380.932.200	385.516.700	387.007.060	385.953.950

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Kebutuhan air bersih Kabupaten Situbondo diproyeksikan dengan cara mengalikan estimasi jumlah penduduk di tahun berkenaan dengan standar Kebutuhan air bersih untuk hidup layak sebesar 1.600 m3, sesuai dengan standar yang ada di dalam SNI Nomor 2003 – 1733 Tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Sedangkan kebutuhan air minum di Kabupaten Situbondo diproyeksikan dengan cara mengalikan estimasi jumlah penduduk di tahun berkenaan dengan standar kebutuhan air minum sebesar 2ml/harinya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Proyeksi tersebut menunjukkan adanya lonjakan signifikan kebutuhan air bersih dalam rentang waktu menuju tahapan terakhir RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045 yaitu periode 2040-2045. Sedangkan untuk kebutuhan air minum secara proyeksi terjadi penurunan di tahapan terakhir RPJP yakni tahun 2040-2045. Secara lebih lengkap, berikut merupakan proyeksi kebutuhan air Kabupaten Situbondo di akhir periode masing-masing tahapan RPJPD hingga tahun 2045:



Gambar 2. 96 Total Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (M³) dan Air Minum (ml/orang/hari)

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024



Kabupaten Situbondo, dengan segala kompleksitasnya, membutuhkan sistem air yang efisien untuk mengatasi tantangan seperti peningkatan permintaan air dan risiko bencana lingkungan. Akses universal terhadap air bersih dan air minum menjadi landasan, dan solusi inovatif yang harus diintegrasikan untuk memastikan distribusi air yang merata di seluruh wilayah kota. Kebutuhan akan air bersih Kabupaten Situbondo tersebut, apabila dibandingkan dengan ketersediaannya masih berstatus defisit di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis daya dukung sumber daya air Kabupaten Situbondo yang terdapat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045. Daya dukung sumberdaya air suatu wilayah merupakan parameter yang memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan maksimal wilayah menyediakan air bagi penduduk dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya. Apabila daya dukung untuk suatu wilayah telah terlampaui, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak bisa mendapatkan air dalam jumlah yang memadai sehingga terjadilah gejala krisis air atau defisit air.

Tabel 2. 77 Daya Dukung Sumber Daya Air Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3 / tahun)			DA = Total Kebutuhan Air (m3 / tahun)	Status Daya Dukung Air
		Limpasan Air (Ro)	Mata Air	SA Total (m3/ tahun)		
1	Sumbermalang	44.102.757,95	133,39	44.102.891,34	45.938.764,616	Defisit
2	Jatibanteng	38.326.760,73	170,16	38.326.930,89	37.166.812,497	Surplus
3	Banyuglugur	17.389.016,31	187,15	17.389.203,46	39.721.017,443	Defisit
4	Besuki	48.880.431,23	365,12	48.880.796,35	104.905.419,319	Defisit
5	Suboh	15.452.728,91	449,76	15.453.178,67	45.450.720,427	Defisit
6	Mlandingan	14.406.800,69	291,89	14.407.092,58	38.362.841,840	Defisit
7	Bungatan	25.547.511,57	304,06	25.547.815,63	41.864.237,808	Defisit
8	Kendit	24.331.386,90	524,12	24.331.911,02	47.123.556,099	Defisit
9	Panarukan	22.433.093,24	545,50	22.433.638,74	94.259.955,465	Defisit
10	Situbondo	23.172.645,70	143,76	23.172.789,46	78.212.291,964	Defisit
11	Mangaran	18.440.627,71	357,00	18.440.984,71	55.105.647,228	Defisit
12	Panji	13.475.856,37	535,90	13.476.392,27	107.189.915,634	Defisit
13	Kapongan	27.533.207,37	921,50	27.534.128,87	62.675.148,369	Defisit
14	Arjasa	23.130.819,01	830,20	23.131.649,21	70.530.412,226	Defisit
15	Jangkar	15.049.664,38	867,55	15.050.531,93	66.462.307,053	Defisit
16	Asembagus	12.611.384,35	824,60	12.612.208,95	79.920.446,622	Defisit
17	Banyuputih	0,00	189,87	189,87	90.172.585,390	Defisit
Kabupaten Situbondo		384.284.692,418	7.641,530	384.292.333,948	1.094.948.800,000	Defisit

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024



2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Pangan

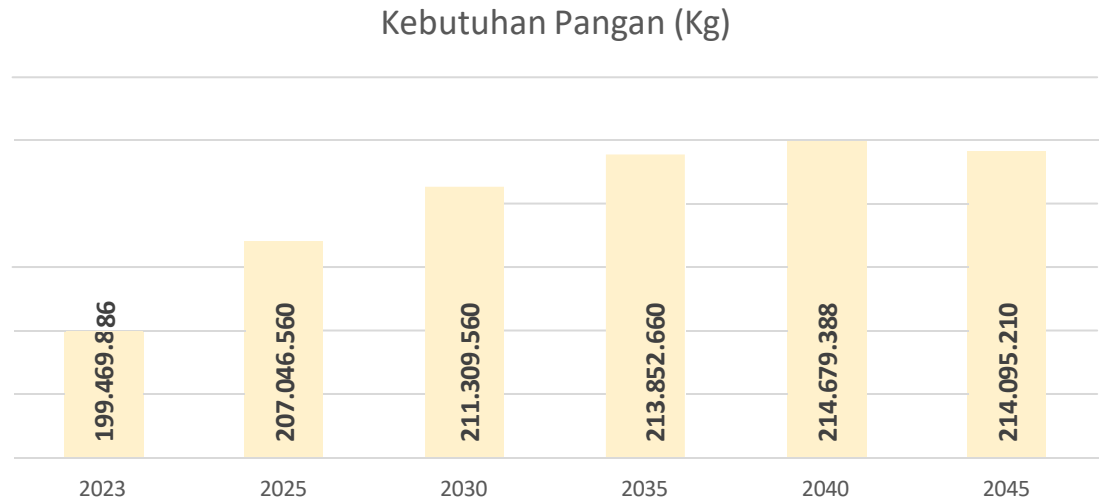
Kebutuhan akan pangan sebagai aspek paling dasar bagi masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi fokus utama dalam perencanaan pengembangan layanan dasar dalam jangka panjang tahun 2025-2045. Pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi kelangsungan hidup dan perkembangan ekonomi daerah. Dengan mengoptimalkan sektor pertanian dan ketahanan pangan, Kabupaten Situbondo dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi tingkat kelaparan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Perencanaan ini harus melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung petani lokal, dan memastikan distribusi pangan yang merata. Dengan demikian, Kabupaten Situbondo dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menjawab tantangan global terkait kebutuhan pangan.

Tabel 2. 78 Proyeksi Kebutuhan Pangan

Uraian	Standar	Baseline	Proyeksi				
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Orang)		678.469	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Kebutuhan Pangan (Kg)	294 Kg/Orang/Tahun	199.469.886	207.046.560	211.309.560	213.852.660	214.679.388	214.095.210

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Proyeksi kebutuhan pangan dalam konteks ini akan difokuskan pada kebutuhan pangan yang mencukupi kalori harian masyarakat Kabupaten Situbondo atau yang umumnya disebut Kebutuhan Fisik Minimum. Kebutuhan fisik minimum (KFM) adalah kebutuhan minimum dari seorang penduduk yang diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin, dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan (BPS,2023). Proses proyeksi dilakukan dengan melakukan perkalian antara hasil proyeksi penduduk di tahun berkenaan dengan Standar Kebutuhan Fisik Minimum yang sebesar 0,294 atau 294 Kg/Orang/Tahun sebagaimana yang terdapat dalam KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045, sehingga menghasilkan proyeksi sebagaimana berikut:



Gambar 2. 97 Total Kebutuhan Pangan

Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024



Selain memperhitungkan estimasi total kebutuhan pangan Kabupaten Situbondo hingga tahun 2045, bagian ini juga mencoba menghitung sebaran kebutuhan pangan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo. Proyeksi sebaran kebutuhan pangan berdasarkan kecamatan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan jangka panjang dalam urusan pangan dan perdagangan terutama dalam hal distribusi kebutuhan pangan yang merata di seluruh Kabupaten Situbondo hingga tahun 2045.

Selain memperkirakan kebutuhan pangan Kabupaten Situbondo hingga tahun 2045, sebagai upaya mengetahui kapasitas sumber daya alam Kabupaten Situbondo untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk tersebut, maka diperlukan perhitungan daya dukung lahan pertanian. Pada prinsipnya, Daya dukung lahan pertanian merupakan perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Untuk itu perlu diketahui berapa luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per kepala keluarga, potensi lahan yang tersedia dan penggunaannya untuk kegiatan pertanian. Perhitungan daya dukung pangan memiliki berbagai pendekatan dalam rangka mengukur kemampuan ekosistem memproduksi pangan untuk kehidupan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi nilai daya dukung. Dari Hasil perhitungan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Situbondo pada tahun 2022, pendekatan dihitung dari pendekatan odum, christeleiler, Howard dan Issar dengan membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan pangan. Indikator ketersediaan dicerminkan oleh luas lahan pertanian dan produktivitasnya. Sebagaimana produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas dalam bentuk pangan pokok khususnya beras. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{KLP}{KP} = t$$

Dimana :

t = Daya dukung lahan pertanian
 KLP = Ketersediaan Lahan Pertanian (Ha/kapita)
 KP = Kebutuhan Pangan (Kg/kapita)

Kelestarian ekosistem terantung pada ketersediaan sumberdaya yang cukup merata dan berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui dan sebagai indikatornya adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras. Dengan asumsi dari perhitungan daya dukung pertanian di atas, jika:

a. $t > 1$

Surplus, wilayah tersebut mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

b. $t < 1$

Defisit, wilayah tersebut tidak mampu melaksanakan swasembada pangan atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.

c. $t = 1$

Wilayah tersebut memiliki daya dukung lingkungan optimal. Jadi nilai 1 (satu) merupakan batas ambang daya dukung lingkungan.

Parameter yang digunakan adalah (1) luas panen; (2) jumlah penduduk; (3) kebutuhan fisik minimum (KFM); dan (4) produktivitas lahan/ ha. Kebutuhan fisik minimum yang diperlukan untuk menentukan besarnya daya dukung wilayah lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi wilayah. KFM penduduk di Kabupaten Situbondo adalah sekitar 294 kg/ kapita/ tahun.

Untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel 2. 79 Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Situbondo

Kecamatan	Ketersediaan Lahan Pertanian (Ha/kapita)	Kebutuhan Pangan (Kg/kapita)	Daya Dukung	Status
Sumbermalang	0,047	0,058	0,807	DEFISIT
Jatibanteng	0,064	0,059	1,086	SURPLUS
Banyuglugur	0,037	0,057	0,652	DEFISIT
Besuki	0,055	0,056	0,975	DEFISIT
Suboh	0,090	0,055	1,625	SURPLUS
Mlandingan	0,102	0,056	1,814	SURPLUS
Bungatan	0,028	0,057	0,494	DEFISIT
Kendit	0,062	0,056	1,099	SURPLUS
Panarukan	0,070	0,056	1,247	SURPLUS
Situbondo	0,028	0,056	0,503	DEFISIT
Mangaran	0,144	0,055	2,604	SURPLUS
Panji	0,060	0,055	1,091	SURPLUS
Kapongan	0,130	0,056	2,297	SURPLUS
Arjasa	0,072	0,056	1,283	SURPLUS
Jangkar	0,041	0,056	0,725	DEFISIT
Asembagus	0,010	0,059	0,166	DEFISIT
Banyuputih	0,062	0,057	1,075	SURPLUS
Kabupaten Situbondo	0,065	0,057	1,145	SURPLUS

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Dari hasil perhitungan tabel Daya Dukung dan daya tampung Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki skor 1,145. Angka tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh sawah dan ladang padi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Dari 17 kecamatan yang dihitung, sebanyak 10 kecamatan memiliki skor >1 dengan skor tertinggi diperoleh di Kecamatan Mangaran (2,604) dan



Kecamatan Kapongan (2,297). Sedangkan sebanyak 7 kecamatan lainnya memiliki skor <1 dengan skor terendah diperoleh di Kecamatan Asembagus (0,166). Hal Ini menunjukkan bahwa 10 dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo cukup mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri. Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Kapongan mempunyai lahan panen komoditas padi terluas dan produksi tertinggi se-kabupaten sehingga berdampak terhadap ketersediaan pangan. Kecamatan dengan daya dukung rendah mempunyai tingkat produksi rendah, sedangkan jumlah penduduknya relatif tinggi. Kondisi tersebut merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Permukiman dan Rumah

Lahan permukiman memiliki urgensi yang tidak terbantahkan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Situbondo, terutama ketika merencanakan pembangunan jangka panjang pada periode tahun 2025-2045. Sebagai wilayah yang mencakup luas 1.638,50 km² atau 163.850 hektar, lahan permukiman menjadi pondasi bagi keberlanjutan kehidupan sehari-hari penduduk. Urgensi lahan permukiman terkait dengan penyediaan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam perencanaan jangka panjang, pemerintah Kabupaten Situbondo perlu memperhatikan pengembangan lahan permukiman yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan penduduk. Dengan memastikan ketersediaan lahan permukiman yang memadai, Kabupaten Situbondo dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.

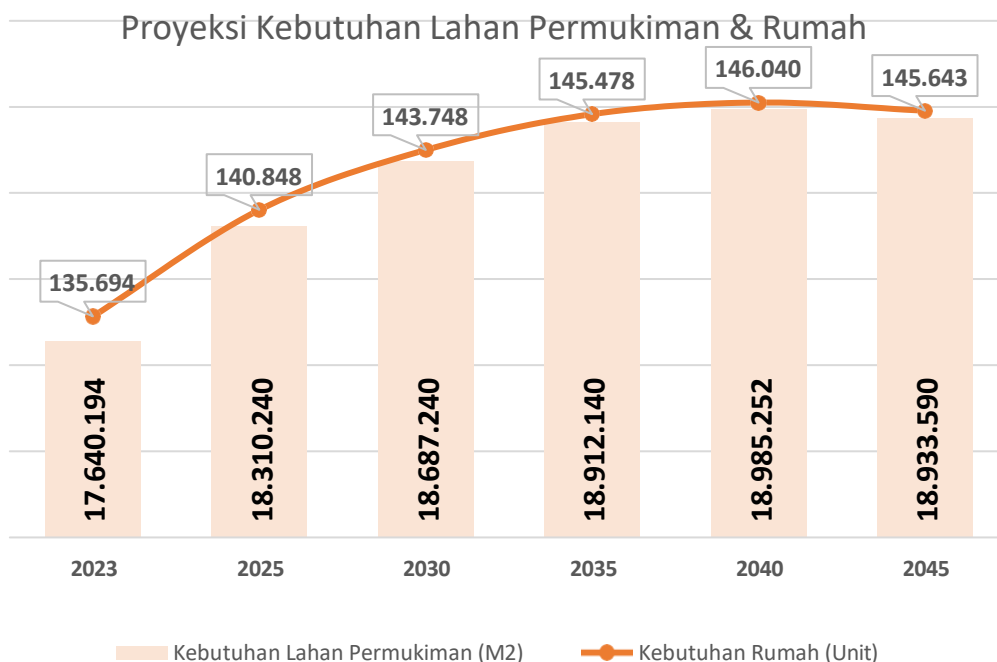
Tabel 2. 80 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman dan Rumah

Uraian	Standar	Baseline	Proyeksi				
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Orang)		678.469	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Kebutuhan Lahan Permukiman (M ²)	26 M ² /orang	17.640.194	18.310.240	18.687.240	18.912.140	18.985.252	18.933.590
Kebutuhan Rumah (Unit)	1 unit per 5 penduduk	135.694	140.848	143.748	145.478	146.040	145.643

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur & Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Kebutuhan Lahan Permukiman Kabupaten Situbondo dipoyeksikan dengan metode mengalikan jumlah penduduk pada tahun berkenaan dengan standar kebutuhan lahan permukiman perkapita yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan lingkungan perumahan yaitu sebesar 26 M²/kapita. Hasil dari proyeksi tersebut menunjukkan bahwa total kebutuhan lahan permukiman Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan, dari tahun awal RPJPD 2025-2045 (Tahun 2025) yang sebesar 18.310.240 M² kemudian meningkat secara gradual dengan lonjakan signifikan pada tahapan ketiga periode RPJPD (2035-2040) mencapai 18.985.252 M² di tahun 2040. Sedangkan di tahun 2045 mengalami penurunan kebutuhan lahan permukiman hingga mencapai 18.933.590 M².





Gambar 2. 98 Total Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman dan Rumah
Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Karena lahan permukiman merupakan kebutuhan dasar yang bersifat spasial, maka selain perlu memproyeksikan kebutuhannya secara total, juga dibutuhkan proyeksi kebutuhan rumah yang menjadi kebutuhan primer masyarakat. Proyeksi kebutuhan rumah sendiri dilakukan untuk memprediksi jumlah rumah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di masa depan. Melihat pada proyeksi di atas, maka kebutuhan akan lahan permukiman dan rumah di Kabupaten Situbondo mengalami lonjakan peningkatan yang cukup signifikan di tiga periode pertama (2025-2040) sedangkan di tahun 2045 kondisi proyeksi kebutuhan lahan permukiman dan rumah mengalami penurunan. Apabila kebutuhan rumah mengalami peningkatan dan tidak dapat segera diantisipasi pada perencanaannya maka dapat memicu berkembangnya kawasan kumuh dan permasalahan lingkungan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proyeksi dalam kebutuhan lahan permukiman dan proyeksi kebutuhan rumah untuk dapat lebih merencanakan pengembangan permukiman dan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan lahan yang ada.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan

Pengembangan sarana prasarana persampahan di Kabupaten Situbondo memiliki urgensi yang tak terbantahkan, terutama ketika melibatkan wilayah pesisir dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai daerah yang ditandai oleh karakteristik pesisir, Kabupaten Situbondo memiliki tantangan tersendiri terkait pengelolaan sampah. Urgensi ini berkaitan erat dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan pesisir, yang merupakan aspek vital dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat setempat. Pengembangan sarana prasarana persampahan melibatkan pembangunan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah plastik yang cenderung menjadi masalah di wilayah pesisir. Selain itu, keberlanjutan program pengelolaan sampah ini juga dapat

mendukung pariwisata pesisir yang menjadi salah satu sektor potensial di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, pengembangan sarana prasarana persampahan yang efisien dan terencana dengan baik akan memastikan penanganan sampah yang optimal. Maka dari itu, penting untuk memperkirakan timbulan sampah yang akan terjadi hingga tahun 2045 sebagai dasar pengembangan sarana prasarana persampahan di Kabupaten Situbondo.

Tabel 2. 81 Proyeksi Timbulan Sampah & Kebutuhan Prasarana Persampahan

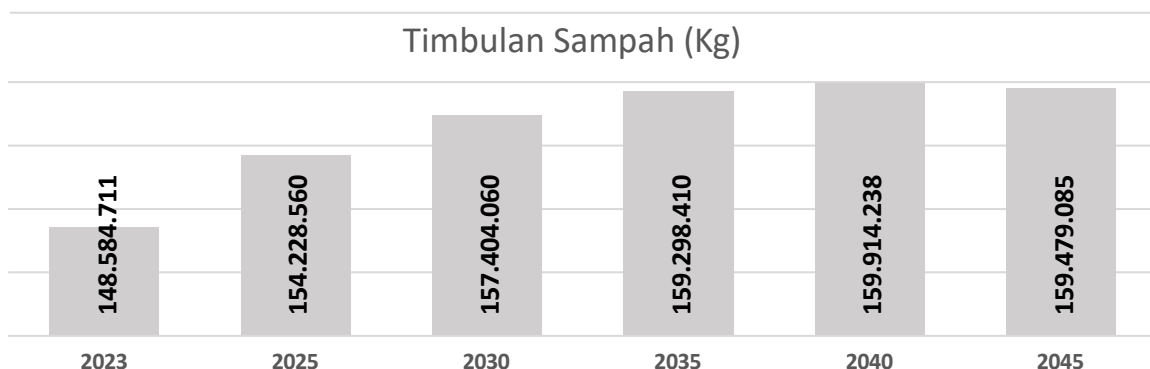
Uraian	Standar	Baseline	Proyeksi				
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Orang)		678.469	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Timbulan Sampah (Kg)	0,6 Kg/orang/hari	148.584.711	154.228.560	157.404.060	159.298.410	159.914.238	159.479.085
Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	1: 120.000	6	6	6	6	6	6

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur & Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Proyeksi timbulan sampah Kabupaten Situbondo dilakukan melalui perkalian antara proyeksi jumlah penduduk di tahun berkenaan dengan faktor estimasi timbulan sampah dengan jumlah penduduk antara 500.001-7 jiwa seperti Kabupaten Situbondo yaitu sebesar 0,6 Kg/orang/hari, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang **Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional**, serta dikalikan koefisien 365 sebagai angka yang mewakili jumlah hari dalam 1 tahun sehingga menghasilkan standar timbulan sampah tahunan sebesar 219 Kg. Hasil proyeksi timbulan sampah Kabupaten Situbondo menunjukkan peningkatan yang konsisten dari awal tahun RPJPD (2025) hingga pada tahapan terakhir periode RPJPD (2045) mencapai 159.479.085 Kg.

Selain melihat pada perkiraan timbulan sampah, proyeksi sarana prasarana persampahan yang perlu diperhatikan dengan baik adalah perkiraan kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. Melihat hal ini pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energi). Sehingga ketersediaan tempat pengelolaan sampah sesuai dengan jumlah timbulan sampah yang ada menjadi urgensi karena pengelolaan sampah dapat disebut sebagai 'pintu masuk' untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan.





Gambar 2. 99 Proyeksi Timbulan Sampah
Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Sesuai apa yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, standar kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu adalah 1:120.000 jiwa penduduk. Sehingga pada tahun awal periode RPJPD (2025) dengan proyeksi jumlah penduduk sebesar 704.240 jiwa maka dibutuhkan 6 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. Hingga akhir periode RPJPD yakni pada tahun 2045, Kabupaten Situbondo di proyeksikan tetap membutuhkan 6 buah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk pada tahun tersebut diproyeksikan sebesar 728.215 jiwa.

Dalam konteks perencanaan jangka panjang, pengembangan sarana prasarana persampahan juga dapat diintegrasikan dengan inisiatif pembangunan berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan implementasi teknologi hijau untuk mendukung upaya daur ulang dan pengurangan limbah. Dengan demikian, investasi pada pengembangan sarana prasarana persampahan bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga langkah strategis menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Maka dari itu, mengetahui estimasi sebaran timbulan sampah di masing-masing kecamatan sangat diperlukan guna menunjang pengelolaan persampahan yang optimal di setiap aspek, mengantisipasi timbulan sampah berlebih di kecamatan tertentu, maupun sebagai dasar bagi kebijakan optimalisasi 3R sebagai poros pengendalian timbulan sampah domestik sejak dari hulu yang selama ini sudah dilakukan.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga menjadi parameter dalam mengukur indeks pembangunan manusia serta menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan meningkatnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat maka pola berfikir yang konstruktif dan kreatif akan berkembang di kalangan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka diperlukan suatu fasilitas pendidikan sebagai pendukung dan sebuah wadah untuk masyarakat meningkatkan pendidikannya. Saat ini Fasilitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo dapat di sajikan pada tabel ketersediaan prasarana pendidikan di bawah ini:

Tabel 2. 82 Ketersediaan Prasarana Pendidikan

Uraian	Ketersediaan Prasarana Pendidikan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah TK (unit)	260	262	266	272	279
Jumlah Sekolah Dasar (unit)	434	403	398	398	397
Jumlah SMP (unit)	91	91	92	93	95
Jumlah SMA (unit)	17	17	17	17	17

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo & BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan wilayah. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan dan jumlah sarana pendidikan sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukannya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Berikut dibawah ini merupakan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo dalam 20 tahun kedepan:

Tabel 2. 83 Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Pendidikan Kabupaten Situbondo

Uraian	Standar (Prasarana: Jumlah Penduduk)	Baseline	Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Pendidikan				
		2023	2025	2030	2035	2045	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk		678.469	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Kebutuhan Prasarana TK	1: 1250	543	563	575	582	584	583
Kebutuhan Prasarana Sekolah Dasar	1:1600	424	440	449	455	456	455
Kebutuhan Prasarana SMP	1:4800	141	147	150	152	152	152
Kebutuhan Prasaran SMA	1:4800	141	147	150	152	152	152

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur & Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Pada proyeksi fasilitas pendidikan di atas telah menyesuaikan pada perhitungan SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Sesuai dengan standart yang ada kebutuhan prasarana pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan berbeda-beda. Misalnya saja kebutuhan prasarana TK memiliki standart 1:1.250 yakni prasarana yang ada dibanding dengan jumlah penduduk. Dengan kondisi jumlah prasarana TK di tahun 2023 sebanyak 279 dibanding dengan jumlah penduduk sebanyak 678.469. Apabila dalam 20 tahun kedepan terdapat peningkatan jumlah penduduk maka baik fasilitas pendidikan jenjang Pendidikan TK hingga SMA akan mengalami peningkatan menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila melihat dari ketersediaan prasarana pendidikan dan dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan maka terdapat gap jumlah fasilitas pendidikan yang cukup jauh dari proyeksi.



Akan tetapi perhitungan proyeksi fasilitas pendidikan ini bukan merupakan perhitungan tetap yang akan terjadi dalam 20 tahun kedepan, proyeksi ini hanyalah sebuah prediksi kebutuhan kedepannya. Adanya kemungkinan jumlah fasilitas pendidikan akan menurun karena berkurangnya penduduk dan banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan dan pendidikan di kota lain juga menjadi salah satu pertimbangan akan menurunnya fasilitas pendidikan yang ada. Oleh karena itu untuk tetap mempertahankan kualitas pendidikan di Kabupaten Situbondo, maka pemerintah Kabupaten Situbondo perlu meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam sarana prasarana maupun kualitas pendidik yang ada. Selain itu kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang mudah dan murah untuk masyarakat kurang mampu juga perlu untuk dipertimbangkan dan juga fasilitas pendidikan yang dapat mencakup seluruh masyarakat baik masyarakat yang ada di wilayah perkotaan maupun yang ada diujung wilayah Kabupaten Situbondo perlu dipermudah untuk menghasilkan pendidikan yang merata bagi masyarakat.

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya fasilitas kesehatan pada setiap wilayah maka dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Secara etimologi fasilitas kesehatan dapat diartikan sebagai sarana prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk fasilitas umum, yang merujuk pada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diperlukan dalam bidang kesehatan. Dalam fasilitas kesehatan biasanya terdapat layanan medis dasar, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan perawatan kepada pasien dengan kondisi medis yang lebih ringan.

Sama halnya dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan merupakan salah satu sarana prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan wilayah. Selain itu fasilitas kesehatan merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintahan untuk masyarakatnya dan menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat. Sehingga fasilitas kesehatan memiliki standartnya pada masing-masing jenis fasilitas kesehatan. Adapun dibawah jumlah ketersediaan prasarana kesehatan dan proyeksi kebutuhan prasarana fasilitas kesehatan 20 tahun kedepan di Kabupaten Situbondo:

Tabel 2. 84 Ketersediaan Prasarana Kesehatan Kabupaten Situbondo

Uraian	Ketersediaan Prasarana Kesehatan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu	925	925	939	941	947
Jumlah Klinik/ Balai Pengobatan Warga	17	14	13	16	18
Jumlah Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	2	2
Jumlah Puskesmas	20	20	20	20	20
Jumlah Rumah Sakit	6	6	6	8	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2024

Melihat ketersediaan prasarana kesehatan di atas apabila dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan maka dalam beberapa kategori prasarana kesehatan telah melebihi hasil proyeksi untuk



ketersediaannya. Misalnya saja posyandu di tahun 2023 tercatat pada tahun tersebut ketersediaannya sebesar 947 unit, sedangkan dalam proyeksinya hingga tahun 2045 hanya membutuhkan sebesar 583 unit posyandu. Hal ini juga berlaku pada kategori prasarana kesehatan lainnya. Untuk melihat rincian proyeksi kebutuhan minimum prasarana kesehatan 20 tahun mendatang di Kabupaten Situbondo berikut di bawah ini:

Tabel 2. 85 Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Kesehatan Kabupaten Situbondo

Uraian	Standar (Prasarana: Jumlah Penduduk)	Baseline	Proyeksi Kebutuhan Minimum Prasarana Kesehatan				
		2023	2025	2030	2035	2045	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk		678.469	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Kebutuhan Posyandu	1: 1250	543	563	575	582	584	583
Kebutuhan Balai Pengobatan Warga	1: 2500	271	282	287	291	292	291
Kebutuhan BKIA/ Klinik Bersalin	1: 30.000	23	23	24	24	24	24
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	1: 30.000	23	23	24	24	24	24
Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan	1: 120.000	6	6	6	6	6	6
Tempat Praktek Dokter	1:5000	136	141	144	145	146	146
Apotik/ Rumah Obat	1: 30.000	23	23	24	24	24	24
Rumah Sakit	1:4800	3	3	3	3	3	3

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur & Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dalam 20 tahun mendatang memiliki standart yang harus diperhatikan sebelum melakukan proyeksi kebutuhan. Standart kebutuhan fasilitas kesehatan telah diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Apabila melihat dari hasil proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan di atas maka terdapat kenaikan jumlah parasarana mengikuti proyeksi jumlah penduduk. Selain proyeksi kebutuhan fasilitas dalam 20 tahun mendatang kualitas fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Misalnya saja kebutuhan akan digitalisasi untuk pendaftaran maupun mengecek jadwal dokter yang ada. Hal ini juga untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Kebutuhan prasarana kesehatan kedepannya juga membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas dan kuantitas sesuai standar. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu untuk melihat dan memperhitungkan kembali akan kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.6.2.7 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Listrik

Pengembangan infrastruktur listrik merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, proyeksi kebutuhan fasilitas listrik menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa ketersediaan energi listrik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan menggunakan metode yang akurat dan data yang terpercaya, proyeksi ini bertujuan untuk memprediksi kebutuhan energi listrik di masa depan,



sehingga dapat dilakukan perencanaan yang efektif untuk mengembangkan infrastruktur listrik yang memadai. Berikut di bawah ini merupakan proyeksi kebutuhan fasilitas Listrik dalam 20 tahun mendatang.

Tabel 2. 86 Proyeksi Kebutuhan Minimum Fasilitas Listrik Kabupaten Situbondo

Uraian	Standar (VA)	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2045	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk		678.469	704.240	718.740	727.390	730.202	728.215
Kebutuhan Rumah (Unit)		135.694	140.848	143.748	145.478	146.040	145.643
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (VA)	2.250	305.311.050	316.908.000	323.433.000	327.325.500	328.590.900	327.696.750
Kebutuhan Listrik Sarana Lingkungan (VA)	900	122.124.420	126.763.200	129.373.200	130.930.200	131.436.360	131.078.700
TOTAL		427.435.470	443.671.200	452.806.200	458.255.700	460.027.260	458.775.450

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur & Bappeda Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas listrik dalam 20 tahun mendatang memiliki standart yang harus diperhatikan sebelum melakukan proyeksi kebutuhan. Standart kebutuhan fasilitas listrik telah diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Apabila melihat dari hasil proyeksi kebutuhan listrik rumah tangga di atas maka terdapat kenaikan yang beriringan dengan kebutuhan rumah. Selain itu kebutuhan listrik sarana lingkungan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga total kebutuha listrik rumah tangga dan sarana lingkungan di akhir periode 2045 mencapai 458.775.450 VA. Dengan meningkatnya kebutuhan an listrik, Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan dapat melakukan persiapan pemenuhan kebutuhan tersebut untuk masa mendatang.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional

Dalam rangka menentukan keselarasan dan integrasi pembangunan antar wilayah, pemerintah pusat telah menyusun arahan pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan Nasional memiliki fokus yang luas, dimana arahan yang diberikan masih secara makro menurut wilayah pulau maupun provinsi. Dalam konteks ini berkenaan dengan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Situbondo, maka kebijakan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah tema dan arah pembangunan untuk wilayah Pulau Jawa.

Tema pembangunan untuk wilayah pulau jawa adalah “Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan” dengan target pembangunan pulau jawa mampu memberikan kontribusi pembangunan sebesar 54,5% terhadap PDB Nasional dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6-5,9% pada periode pertama RPJPD yaitu 2025-2029.



Transformasi Wilayah Jawa

"Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan"



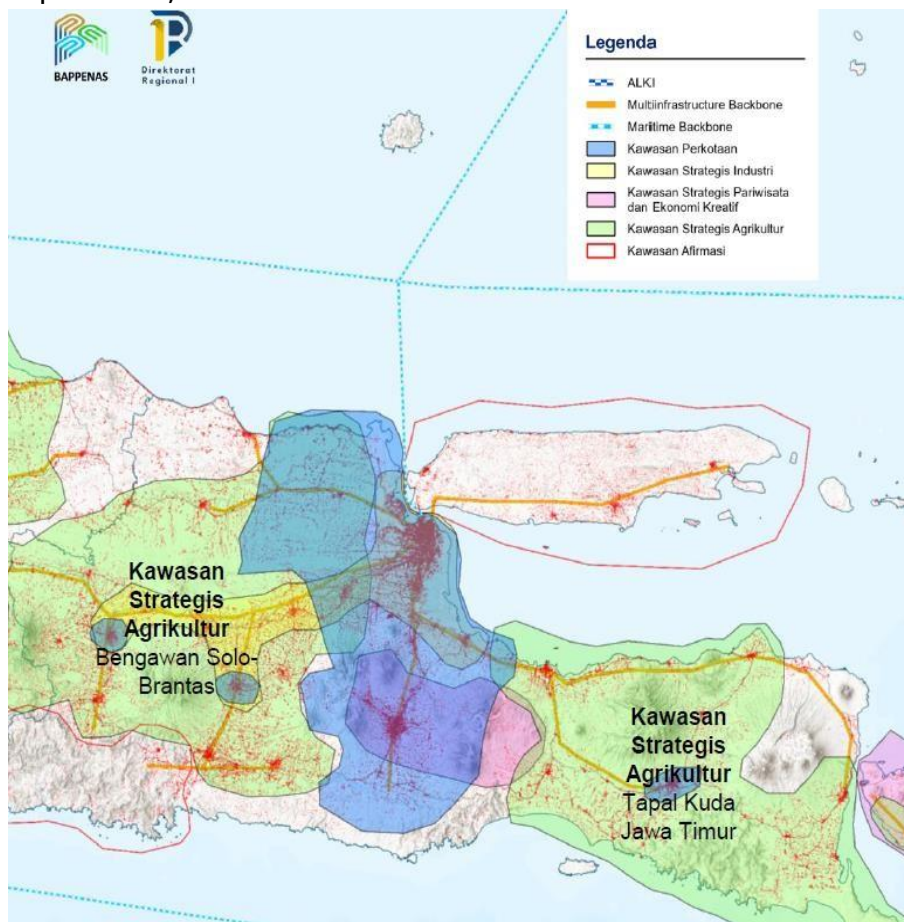
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa



Gambar 2. 100 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa

Sumber: RPJPN 2025-2045

Implementasi arah kebijakan pembangunan tersebut diterjemahkan pada masing-masing kawasan strategis pembangunan nasional di Jawa timur meliputi, Kawasan Strategis Perkotaan Metropolitan Surabaya, kawasan megapolitan Surabaya-Malang, Kawasan Perkotaan Madiun, Kawasan Perkotaan Kediri, Kawasan Perkotaan Jember, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Malang-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Strategis Agrikultur Bengawan Solo-Brantas, Kawasan Strategis Agrikultur Tapal Kuda, dan Kawasan Afirmasi Madura.



Gambar 2. 101 Peta Kawasan Agrikultur

Sumber: RPJPN 2025-2045



Berdasarkan pada pembagian kawasan strategis tersebut, Kabupaten Situbondo masuk pada Kawasan Strategis Agrikultur Tapal Kuda. Pada kawasan strategis tersebut, telah diidentifikasi beberapa faktor sangat penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan (*Game Changer*) serta dirumuskan program pembangunan yang harus diperhatikan dalam 20 tahun kedepan. *Game Changer* dan program pembangunan tersebut terbagi dalam masing-masing transformasi sebagai berikut:

Tabel 2. 87 Transformasi dan *Game Changer* dalam Arah Pembangunan Kawasan Agrikultur Tapal Kuda

Transformasi (1)	UTSP/ <i>Game Changer</i> (2)	Program Pembangunan (3)
Sosial	Pengembangan perguruan tinggi riset dan vokasi yang mendukung di bidang pertanian dan agroindustri	Penguatan perguruan tinggi riset dan vokasi bidang pertanian dan agroindustri
Ekonomi	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	Penguatan Integrasi Konektivitas dengan Intra dan Antarkawasan Pertumbuhan Ekonomi
	Pembentukan BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah	Pembentukan BUMD
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan, khususnya komoditas tebu dan tembakau	Penyediaan bibit dan varietas unggul
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Reformasi perencanaan dan fiskal perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif reformasi APBN serta transforasi kelembagaan perencanaan dan fiskal	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
	Reformasi subsidi terutama pupuk tepat sasaran	Pengendalian Nilai Tukar
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	1. Penerapan ekonomi sirkular dari sumber domestik secara partisipatif 2. Optimalisasi penanganan sampah domestik
	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu <i>FEW Nexus (Food, Energy, Water)</i>	1. Kemandirian Pangan 2. Pemenuhan Akses Air Minum Aman

Dalam rangka memberikan arahan yang lebih detail dalam penyelenggaraan pembangunan kedepan, pemerintah pusat juga telah memberikan rincian arah kebijakan yang lebih detail untuk masing-masing wilayah pembangunan. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang ditujukan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, khsuusnya yang berkenaan dengan Kabupaten Situbondo untuk 20 tahun kedepan.



Tabel 2. 88 Arah kebijakan pembangunan dalam RPJPN yang berkenaan dengan Kabupaten Situbondo

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur terutama pada Kepulauan Madura melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar.
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
	Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan.
	Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi.
	Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal.
	Pendekatan layanan kesehatan lansia.
	Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi.
	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi serta sarana prasarana penanganan limbah medis.
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial
	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja,



Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim
	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat – setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas
	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
	Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih.
	Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan.
	Pengembangan perikanan yang berkelanjutan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi <i>blue energy</i> pada perairan-perairan tersebut.
	Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work
	Memperkuat keterampilan digital untuk penguasaan seluruh keahlian
	Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban



Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	farming, penggunaan <i>Internet of Things</i> (IoT), pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) dan transportasi hijau, penerapan <i>smart city</i> dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan <i>creative financing</i> .
	Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (<i>electric vehicles</i>) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.
	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok.
	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis.
	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan, serta adopsi teknologi dan inovasi.
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Fasilitasi akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan startegis lainnya, khususnya untuk pekerja.
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
	Peningkatan Produktivitas BUMD.
	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
Transformasi Tata Kelola	Penguatan integrasi partai politik
	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.



Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Transformasi sistem penuntutan menuju <i>single prosecution system</i> dan transformasi lembaga Kejaksaan sebagai <i>advocaat generaal</i>.
	Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik social
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
	Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa.
	Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas.
	Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Wilayah Jawa.
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan
	resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.



Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa.
	Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan.
	Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
	Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa.
	Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif.
	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi.
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan.
	Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Gerbangkertosusila dari banjir 100 tahunan.
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa.
	Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa.
	Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni.
	Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai.
	Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan. Penerapan kebijakan <i>Zero Delta Q</i> .



Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
	Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan.
	Penerapan <i>Flood Forecasting Early Warning System</i> (FFEWS) berbasis teknologi digital.
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
Implementasi Transformasi	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa.
	Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
	Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.
	Percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan <i>access to market</i> dan <i>access to information</i> pada kawasan-kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Madura dan Pacitan-Trenggalek-Blitar.
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang)
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .



Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
	Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sumber: RPJPN 2025-2045

2.7.2 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur

Selaras dengan arahan pembangunan kewilayahan pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Timur yang menetapkan arah kebijakan “Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, maka provinsi Jawa timur telah menetapkan 5 prioritas pembangunan sebagai berikut:

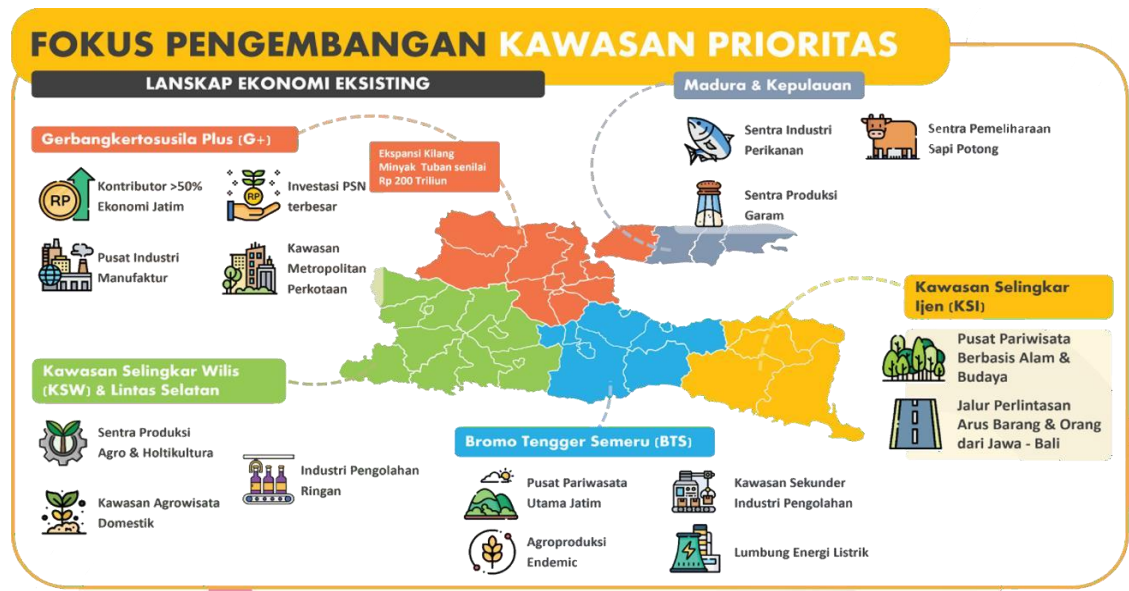
- A. Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.
 - 1. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
 - 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja
 - 3. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal
 - 4. Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian Selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar

- B. Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
 - 1. Pengembangan Kawasan-Kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical Megapolitan Surabaya-Malang
 - 2. Pengembangan beberapa Kawasan strategis industri kawasan strategis industri Madiun – Surabaya – Gresik – Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, material/metalurgi, kapal, agroindustri, industry dan pengolahan perikanan);



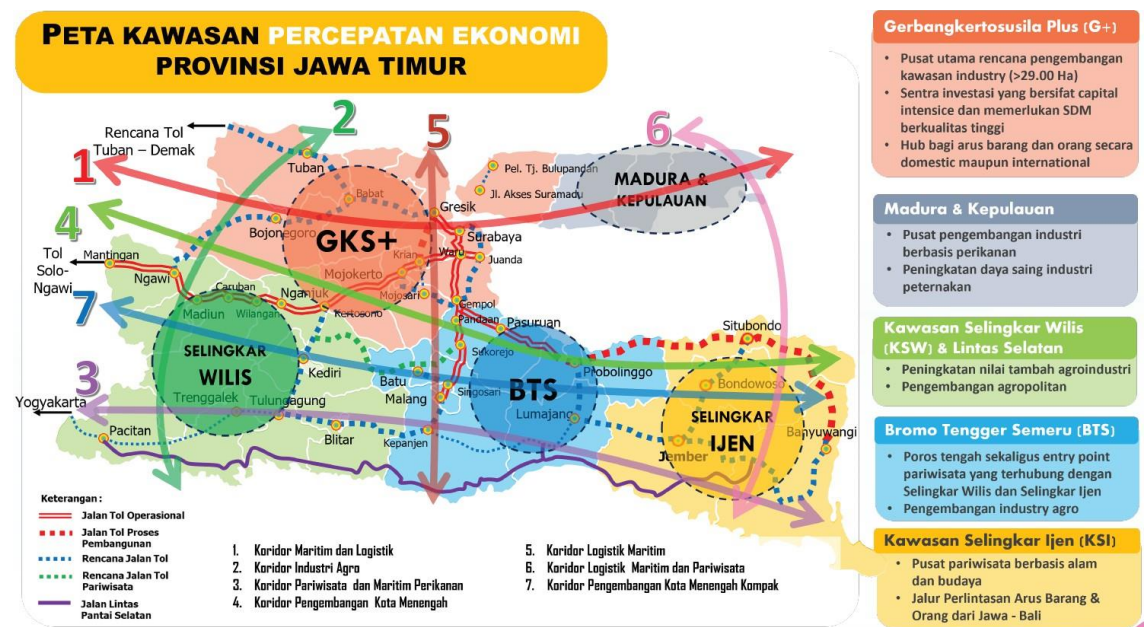
3. Percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan access to information pada Kawasan afirmasi antara lain Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar;
 4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Surabaya dan kota Malang yang andal dan modern
- C. Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.
1. Pengembangan industri hijau di Metropolitan Surabaya.
 2. Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Tapal Kuda.
 3. Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
 4. Perlindungan pesisir Gerbangkertosusila dari banjir kala ulang 100 tahun.
 5. Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien;
- D. Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastrukture backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
1. Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.
 2. Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah;
 3. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (global city) pada megapolitan Surabaya-Malang, dan pusat-pusat aglomerasi yaitu Madiun, Kediri, dan Jember
 4. Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pelabuhan bertaraf global
 5. Optimalisasi dan pengembangan bandara Juanda
 6. Pengembangan kereta cepat (Jakarta – Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta – Bandung
 7. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana dasar
- E. Kelima, penuntasan RDTR Kabupaten/Kota perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan startegis.

Dalam rangka menentukan fokus pembangunan pada masing-masing wilayah, Provinsi Jawa timur telah membagi wilayahnya menjadi 5 wilayah yang menjadi kawasan prioritas. Kawasan prioritas yang dimaksud adalah Gerbangkertosusila Plus (G+), kawasan selingkar wilis, Bromo tengger smeru (BTS), Kawasan Selingkar ijen, dan Kawasan Madura Kepulauan.



Gambar 2. 102 Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas
Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Masing-masing prioritas pembangunan pada setiap wilayah tersebut didasarkan atas potensi yang dimiliki. Dari 5 kawasan tersebut, Kabupaten Situbondo masuk dalam cluster Kawasan Selingkar ijen. Mengacu pada kondisi existing sebagaimana telah diidentifikasi oleh Provinsi Jawa Timur, pada kawasan tersebut telah menjadi pusat pariwisata berbasis alam dan budaya serta Pembangunan jalur perlintasan arus barang dan orang dari jawa-bali. Mengacu pada kondisi eksisting dan awah kebijakan nasional untuk Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Timur, maka dalam rentang waktu 20 tahun kedepan ditetapkan beberapa kebijakan percepatan pembangunan ekonomi pada masing-masing wilayah sebagai berikut:



Gambar 2. 103 Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045



Percepatan pembangunan ekonomi untuk Kawasan Selingkar ijen yang masuk dalam Kabupaten Situbondo dilakukan melalui 2 koridor pembangunan yaitu koridor pengembangan kota menengah, dan koridor logistik maritim dan pariwisata. Dari koridor tersebut, juga didukung dengan pembangunan jalan tol. Adapun fokus pembangunan Kawasan Selingkar ijen antara lain peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan.

2.7.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Situbondo berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Situbondo diarahkan sebagai kawasan pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta berbasis mitigasi bencana. Adapun kebijakan kewilayahan Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

- 8 Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari. Adapun pengembangan sistem pusat pelayanan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi;

Tabel 2. 89 penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Kegiatan	Lokasi
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Situbondo
Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp),	1. Kecamatan Besuki 2. Kecamatan Asembagus.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Kecamatan Banyuglugur, 2. Kecamatan Suboh, 3. Kecamatan Mlandingan, 4. Kecamatan Bungatan, 5. Kecamatan Jatibanteng, 6. Kecamatan Sumbermalang, 7. Kecamatan Kendit, 8. Kecamatan Panarukan, 9. Kecamatan Mangaran, 10.Kecamatan Panji, 11.Kecamatan Arjasa, 12.Kecamatan Kapongan, 13.Kecamatan Jangkar, 14.Kecamatan Banyuputih.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Desa Kayumas dan Jatisari di Kecamatan Arjasa; 2. Desa Patemon di Kecamatan Jatibanteng; 3. Desa Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran; 4. Desa Gelung di Kecamatan Panarukan; 5. Desa Kumbangsari di Kecamatan Jangkar;



Pusat Kegiatan	Lokasi
	6. Desa Curahcoto di Kecamatan Kapongan; 7. Desa Battal di Kecamatan Panji; 8. Desa Dawuan di Kecamatan Suboh; 9. Desa Kalirejo di Kecamatan Sumbermalang; 10. Desa Kedung Lo di Kecamatan Asembagus; 11. Desa Lubawang di Kecamatan Banyuglugur; 12. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan; 13. Desa Kukusan di Kecamatan Kendit; 14. Desa Alas Banyur di Kecamatan Mlandingan; 15. Desa Blimbing di Kecamatan Besuki.

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Situbondo

2. Penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif sebagaimana berikut:
 - a. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan Sistem Jaringan Transportasi darat, laut dan udara. Sistem Jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, terminal dan jaringan kereta api. Sedangkan system jaringan laut diarahkan pada peningkatan dan pengembangan peranan dan fungsi pelabuhan umum, pelabuhan khusus serta pelabuhan perikanan. Disamping itu jaringan transportasi udara diarahkan pada Pengembangan Bandara Khusus Militer dan Lapangan Udara TNI AD Melik di Kecamatan Banyuputih.
 - b. Mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti telepon rumah tangga, telepon umum, Janngan telepon seluler yang menghubungkan seluruh wilayah. pengembangan sistem jaringan prasarana telematika meliputi perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat berupa tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama-sama.
 - c. Mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir.
3. Pengendalian fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya. kawasan lindung meliputi Kawasan berikut

Tabel 2. 90 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Situbondo

Pusat Kegiatan	Lokasi
kawasan hutan lindung	1. Kecamatan Sumbermalang; 2. Kecamatan Asembagus; dan 3. Kecamatan Arjasa.



Pusat Kegiatan	Lokasi
kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Sumbermalang; 2. Kecamatan Asembagus; 3. Kecamatan Arjasa; 4. Kecamatan Mlandingan; dan 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampeyan.
Kawasan perlindungan setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan sempadan pantai meliputi Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Mlandingan, Kendit, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Banyuputih 2. Kawasan sempadan sungai meliputi Sungai Selowongo, Sungai Sletreng, Sungai Klatakan, Sungai Lobawang, Sungai Deluwang, Sungai Klatakan (Kendit), Sungai Sampean, Sungai Merakan, Sungai Penjalinan, Sungai Kresek, Sungai Curah Ugang, Sungai Majid, Sungai Simacan, Sungai Patemon, Sungai Bayeman, Sungai Banyuputih, Sungai Bangeran, Sungai Kalorkoran/Sekarputih, Sungai Klenang, Sungai Sbr. Bendo Hulu, Sungai Sbr. Bendo Total, Sungai Batuputih, Sungai Mangga jajar, Sungai Deluwang Kecil, Sungai Pategalan, Sungai Duren, Sungai Bales, Sungai Pakel dan Sungai Gilindung 3. kawasan sekitar mata air meliputi Kecamatan Jatibanteng 11 (sebelas) titik, Kecamatan Banyuglugur 5 (lima) titik, Kecamatan Suboh 5 (lima) titik, Kecamatan Mlandingan 5 (lima) titik, Kecamatan Bungatan 2 (dua) titik:, Kecamatan Kendit 8 (delapan) titik, Kecamatan Arjasa 8 (delapan) titik, Kecamatan Jangkar 4 (empat) titik, Kecamatan Asembagus 9 (tiga) titik, Kecamatan Sumbermalang 13 (tiga belas) titik 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang meliputi area memanjang atau jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanami, 5. Kawasan sempadan jalan kereta api meliputi kawasan sepanjang jalan kereta api, dengan sempadan minimal 23 (dua puluh tiga) meter.
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Nasional Baluran di Kecamatan Banyuputih 2. Kawasan cagar budaya Kecamatan Besuki dan Kecamatan Panarukan 3. Kawasan cagar alam Sungai Kolbu di Kabupaten Situbondo. 4. Kawasan suaka margasatwa dataran tinggi Hyang di Kecamatan Sumbermalan 5. kawasan pantai berhutan bakau berada di sepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Kapongan, Mangaran, Arjasa, Jangkar dan Asembagus

Pusat Kegiatan	Lokasi
kawasan rawan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Besuki, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Jatibanteng, Mladingan dan Jangkar. 2. Kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Jatibanteng, Sumbermalang dan Bungatan, Kendit. 3. Kawasan rawan angin ribut meliputi Kecamatan Jatibanteng dan Sumbermalang 4. Kawasan rawan rob air meliputi seluruh kawasan pesisir di wilayah Kabupaten. 5. Kawasan rawan gempa meliputi Kecamatan Panarukan dan Banyuputih.
Kawasan lindung geologi	kawasan cekungan air tanah yang tergabung dalam CAT Bondowoso – Situbondo dan kawasan rawan gempa.
Kawasan lindung lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan plasma nutfah Kawasan perlindungan dan pengungsian satwa berada di wilayah Taman Nasional Baluran 2. kawasan pantai berhutan bakau yang dilindungi yaitu pantai sepanjang Kecamatan Banyuputih

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Situbondo

4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian prodktif sesuai daya dukung lingkungan. Adapun pengembangan Kawasan produktif sebagai berikut:

Tabel 2. 91 Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Situbondo

Pusat Kegiatan	Lokasi
kawasan peruntukan hutan	Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Mladingan, Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Banyuglugur
kawasan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. wilayah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang 2. kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan meliputi Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang 3. skala prioritas daerah sentra tanaman pangan padi meliputi Kecamatan Kapongan, Panarnkan, Panji, dan Arjasa 4. rencana pengembangan tanaman pangan padi gogo meliputi Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Bungatan dan Mladingan. 5. rencana pengembangan tanaman pangan palawija, berupa jagung berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mladingan, Bungatan, Kendit, Panarnkan, Situbondo, Panji,



Pusat Kegiatan	Lokasi
	<p>Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Mangaran, Banyuputih, dan Sumbermalang.</p> <p>6. rencana pengembangan kedele berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Suboh, Mlandingan, Besuki, Situbondo, Panarukan, Panji, Kendit, Kapongan dan Banyuputih.</p> <p>7. rencana pengembangan tanaman ubi kayu berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Jatibanteng, Arjasa, Sumbermalang, Situbondo, Banyuglugur, Kendit, Jangkar dan Kapongan.</p> <p>8. rencana pengembangan tanaman pangan palawija lainnya, seperti kacang tanah berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Jangkar, Arjasa, Kapongan dan Panji.</p>
Kawasan perikanan	<p>1. budidaya air tawar terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>2. budidaya air payau terdapat di Kecamatan Besuki, Mlandingan, Kendit, Suboh, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Banyuputih budidaya air laut yang terdapat di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan, Mlandingan, Suboh, Besuki, dan Banyuglugur.</p> <p>3. kawasan peruntukan perikanan tangkap yang berada di Pondok Mimbo Kabupaten Situbondo.</p>
Kawasan perkebunan	<p>1. komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih</p> <p>2. komoditi kapas berada di Kecamatan Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih</p> <p>3. Komoditi jambu mente berada di Kecamatan Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;</p> <p>4. komoditi tembakau berada di Kecamatan Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih;</p> <p>5. komoditi tanaman jarak tersebar di berbagai wilayah kabupaten meliputi Kecamatan Banyuputih, Arjasa, Kapongan, Panji dan Panarukan, yang memiliki tanah-tanah marjinal/kritis dengan pengelolaan diarahkan pada kawasan industri.</p>
Kawasan pertambangan	<p>1. kawasan pertambangan energi panas bumi di wilayah Gunung Argopuro dan Belawan – Ijen.</p> <p>2. kawasan pertambangan mineral logam di Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Jangkar.</p>

Pusat Kegiatan	Lokasi
	<p>3. Kawasan pertambangan bukan logam berada di Kecamatan Kendit, Bungatan, Asembagus, Situbondo, Arjasa dan Sumbermalang.</p> <p>4. Kawasan pertambangan batuan berada di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Situbondo.</p>
Kawasan industri	<p>1. Pengembangan kawasan industri yang sudah ada sebagaimana meliputi pengembangan 4 (empat) Pabrik Gula (PG) yang sudah ada, berupa PG. Olean di Kecamatan Situbondo, PG. Asembagus di Kecamatan Situbondo, PG. Asembagus di Kecamatan Asembagus, PG. Wringinanom di Kecamatan Panarukan dan PG. Panji di Kecamatan Panji.</p> <p>2. Pengembangan kawasan industri baru meliputi kawasan industri di Kecamatan Kapongan, Panji, Arjasa, Mangaran, Asembagus, Jangkar, Besuki dan Banyuglugur.</p>
Kawasan pariwisata	Pengembangan wisata bahari meliputi zona pengembangan wisata bahari berada di sepanjang pantai utara meliputi Pelabuhan Besuki (di Kecamatan Besuki) – Pantai Pasir Putih (Kec. Bungatan) – Pantai Gelung (Kec. Panarukan)- Pelabuhan Kalbut (Kecamatan kalbut) – Pantai Bama (Taman Nasional Baluran).
Kawasan permukiman	<p>1. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan tinggi meliputi Kecamatan Besuki, Situbondo, Panji, Kapongan, dan Banyuputih, dengan mengembangkan daerah permukiman</p> <p>2. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan sedang meliputi Kecamatan Jatibanteng, Suboh, Panarukan, Mangaran, Asembagus, agar dipertahankan</p> <p>3. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah meliputi Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Mandingan, Bungatan, Kendit, Arjasa, Jangkar</p> <p>4. Kawasan permukiman perkotaan yang berada di semua ibukota kecamatan terutama pada lingkup wilayah kecamatan dan daerah-daerah pengembangan industri meliputi area sekitar PLTU Paiton, Oil Refinary, dan eksplorasi laut</p>
kawasan peruntukan lainnya	Pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya meliputi kawasan sektor informal, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan.

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Situbondo

5. Peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis. Beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, kawasan strategis teknologi tinggi dan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup.

RPJPD

2025 - 2045

KABUPATEN SITUBONDO



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perencanaan Pembangunan Daerah menjadi kunci utama dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Akan tetapi, perencanaan Pembangunan Daerah tidak jauh dari permasalahan yang ada sehingga menghambat proses perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif. Untuk mengatasi permasalahan Pembangunan daerah yang ada, maka dibutuhkan pengidentifikasian permasalahan Pembangunan daerah, khususnya permasalahan Pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan pembahasan bersama antara Tim Penyusun dan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Situbondo.

Permasalahan Pembangunan Daerah diidentifikasi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dari berbagai urusan yang diampu oleh Kabupaten Situbondo. Selain itu juga identifikasi permasalahan ini juga dilakukan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari pertimbangan berbagai aspek seperti aspek geografi, demografi, kesenjangan Masyarakat, pelayanan umum dan juga daya saing daerah. Hasil dari identifikasi permasalahan daerah ini akan dikerucutkan menjadi isu strategis daerah.

Tabel 3. 1 Permasalahan Pembangunan Daerah di Kabupaten Situbondo

Permasalahan Pembangunan Daerah	
1. Pungli dan tindak kriminal	19. Ketercukupan Infrastruktur perdagangan
2. Kemiskinan	20. Ketersediaan bahan pangan penting
3. Daya Saing SDM	21. Ketersediaan Pupuk
4. Daya Saing UMKM	22. Ketersediaan dan pemanfaatan data
5. Daya saing usaha	23. Kondusifitas iklim usaha
6. Daya saing usaha EKRAF	24. Konflik pemanfaatan lahan
7. Degradasi lingkungan	25. Literasi Masyarakat
8. Pembangunan Karakter	26. Pemanfaatan IPTEK
9. Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	27. Pembangunan Pemuda
10. Efisiensi waktu tempuh	28. Pergeseran Demografi
11. <i>Fixed Mindset</i>	29. Stabilitas politik
12. Keamanan sistem informasi	30. Stabilitas Wilayah
13. Keberdayaan Desa	31. Urbanisasi
14. Kemandirian fiskal daerah	32. Pertumbuhan ekonomi
15. Kepercayaan Publik Terhadap Instansi Pemerintah	33. Pemerataan ekonomi
16. Kesehatan Ibu dan Bayi	34. <i>Urban Sprawl</i>
17. Kesenjangan Gender	35. Perkembangan/ Eksistensi Budaya Lokal
18. Ketangguhan Bencana	

Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)



Pada tabel di atas telah diidentifikasi permasalahan Pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo. Terdapat 35 permasalahan yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai urusannya. Permasalahan Pembangunan yang ada kemudian dikelompokkan menjadi isu strategis yang nantinya dapat menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk membuat perencanaan dengan tetap berpedoman pada isu-isu yang ada di daerah. Berikut di bawah ini merupakan penjelasan pada masing-masing permasalahan di atas:

1. Pungli dan Tindak Kriminal

Permasalahan pungli dan tindak kriminal yang terjadi di Situbondo bukan merupakan suatu kejahatan yang terlihat secara riil, akan tetapi praktik-praktik pungli pada beberapa sektor menyebabkan kerugian petani maupun nelayan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada hasil panen ataupun tangkapannya. Hasil panen/tangkapan yang dijual murah kepada tengkulak tanpa kesempatan untuk menjual hasil panennya secara mandiri yang membawa kerugian pada petani/nelayan.

2. Kemiskinan

Melihat angka garis kemiskinan Kabupaten Situbondo pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, namun belum terlalu signifikan dapat mengidentifikasi bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan setiap tahunnya dan selalu linier dengan tingkat inflasi. Permasalahan terkait kemiskinan akan selalu ada hingga 20 tahun mendatang, apabila pemerintah tidak mengambil tindakan tegas maupun kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam menaikkan taraf hidupnya.

3. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kebutuhan SDM selalu linier dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan zaman yang melesat maka kebutuhan SDM akan semakin meningkat dengan kriteria tertentu. Selain itu, jumlah penduduk dan jumlah lowongan pekerjaan yang tidak seimbang membuat persaingan dalam daerah maupun luar daerah semakin tinggi di kalangan anak muda saat ini.

4. Daya Saing UMKM

UMKM menjadi salah satu sektor yang diusung dapat meningkatkan lapangan kerja serta dapat mengakomodir pencari kerja untuk dapat memiliki usahanya sendiri saat ini juga ikut serta kedalam persaingan antar UMKM dengan produk yang sama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan UMKM maka dibutuhkan inovasi dan daya saing yang baik

5. Daya saing usaha

Saat ini Kabupaten Situbondo merupakan jalan utama yang akan dilalui untuk menuju ke Banyuwangi ataupun Bali, hal ini memberikan bantuan untuk masyarakat yang memiliki usaha sekitar jalan Provinsi. Akan tetapi apabila pembangunan Tol akan diteruskan hingga Banyuwangi maka usaha masyarakat akan berdampak, selain itu Koperasi saat ini juga telah sedikit peminat di kalangan anak muda, permasalahan lain pada daya saing usaha juga terlihat di sektor peternakan dan pertanian yang mana hasil usahanya tersebut tidak bisa dinikmati secara maksimal dengan harga yang sesuai pasar karena adanya pembagian keuntungan.

6. Daya saing usaha EKRAF

Berkembangnya sektor perdagangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjual dagangannya, akan tetapi banyaknya persaingan yang ada membuat semakin tinggi daya saing pada usaha ekonomi kreatif. Sedangkan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat terbatas dan apabila

dibandingkan dengan daerah lain inovasi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Situbondo masih belum maksimal.

7. Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan merupakan suatu perkumpulan permasalahan lingkungan yang dapat disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim maupun perubahan struktur lingkungan.

8. Pembangunan Karakter

Pergeseran karakter yang ada pada anak-anak saat ini menjadikan suatu masalah tersendiri pada orang tua maupun dalam lingkup sosial masyarakat, karakter dan mental yang lemah pada anak-anak membuat kebutuhan tentang pembangunan karakter bangsa perlu ditingkatkan untuk menunjang SDM Indonesia emas pada masa mendatang.

9. Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang ada masih dirasa menjadi sebuah masalah karena tidak efisiennya pembagian wewenang antar OPD maupun antar Pemerintah Daerah dan Pusat.

10. Efisiensi waktu tempuh

Permasalahan terkait efisiensi waktu tempuh yang ada di Kabupaten Situbondo berkesinambungan dengan transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat serta pelabuhan ataupun fasilitas transportasi umum yang belum dapat dimaksimalkan dengan baik.

11. *Fixed Mindset*

Fixed mindset merupakan salah satu permasalahan terkait pola pikir manusia/masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa takdir dan kehidupan tetap tanpa dapat diubah. Apabila disejajarkan dengan permasalahan yang muncul di Kabupaten Situbondo maka dapat menyangkut terkait pola pikir masyarakat yang tetap ingin menerima bantuan dari pemerintah, pelaku usaha yang tidak melaporkan perkembangan usahanya sehingga pemerintah daerah tidak dapat mentoring dengan tepat, masyarakat yang tidak mengembangkan potensinya serta pendidikan yang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat.

12. Keamanan sistem informasi

Penggunaan teknologi saat ini menuntut tingginya keamanan sistem informasi yang digunakan oleh masyarakat, banyaknya kebocoran data hingga cyber memberikan ketidak nyamanan dan kekhawatiran pada masyarakat yang saat ini informasi datanya termuat online.

13. Keberdayaan Desa

Desa yang ada di Kabupaten Situbondo belum dapat mengoptimalkan kemampuan, kapasitas dan potensi yang ada pada desa tersebut. Sehingga dalam menuju desa mandiri perlu perubahan dan komitmen yang tinggi.

14. Kemandirian fiskal daerah

Saat ini, Kabupaten Situbondo masih bergantung pada support anggaran dana bagi hasil dari pusat. Sehingga perlunya memunculkan potensi-potensi yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan PAD.

15. Kepercayaan Publik Terhadap Instansi Pemerintah

Adanya perubahan kebijakan yang dinamis memberikan efek negatif pada sinergitas hulu ke hilir dalam pencegahan konflik internal pemerintah. Belum maksimalnya pemerintah dalam mengatasi permasalahan PPKS dari luar daerah yang masuk ke dalam Situbondo memberikan ekspektasi masyarakat menurun kepada pemerintah.

16. Kesehatan Ibu dan Bayi

Pemunurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi belum progresif dan masih tergolong tinggi, minimnya pengetahuan orang tua dalam proses kehamilan, kelahiran dan perawatan bayi juga menjadi permasalahan saat ini. Selain itu pemenuhan gizi pada ibu hamil dan bayi juga masih belum optimal dikarenakan rendahnya ekonomi masyarakat dan inkonsistensi fasilitas kesehatan dalam pemeriksaan kehamilan karena tingginya angka urbanisasi.

17. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender di Kabupaten Situbondo adalah berkaitan dengan berkaitan dengan permasalahan masih minimnya rasio tenaga kerja wanita dalam pekerjaan sektor formal. Selain itu terkait dengan pendidikan dan keikutsertaan perempuan pembangunan masih termasuk rendah. Hal tersebut dikarenakan permasalahan budaya masyarakat serta jumlah pernikahan usia anak yang masih termasuk tinggi.

18. Ketangguhan Bencana

Risiko bencana di Kabupaten Situbondo masing-masing mengalami kecenderungan peningkatan dimana risiko tertinggi adalah pada banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dalam upaya pencegahan dan penurunan risiko bencana diperlukannya upaya dalam jangka panjang maupun jangka pendek dalam meminimalisir terjadinya bencana seperti pembangunan waduk yang terintegrasi dengan aliran sungai dan irigasi.

19. Ketercukupan Infrastruktur perdagangan

Sebagai upaya peningkatan kualitas perdagangan di Kabupaten Situbondo, pemenuhan kebutuhan infrastruktur perdagangan masih belum optimal khususnya terkait dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pasar dan peningkatan infrastruktur penunjang akses pada sentra usaha terhadap pusat pemasaran produk.

20. Ketersediaan bahan pangan penting

Sektor ekonomi utama di Kabupaten Situbondo adalah pertanian dan perikanan saat ini yang mengalami penurunan memberikan dampak terhadap ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Situbondo. Dalam jangka panjang ketahanan pangan menjadi perhatian besar sehingga peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan menjadi hal utama dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo.

21. Ketersediaan Pupuk

Ketidakstabilan ketersediaan dan harga pupuk di Kabupaten Situbondo berpengaruh terhadap produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan pupuk dan semakin meningkatnya harga pupuk adalah persoalan utama saat ini pada petani sehingga diperlukannya alternatif pengembangan produksi pupuk secara mandiri di Kabupaten Situbondo dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

22. Ketersediaan dan pemanfaatan data

Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Situbondo berpengaruh terhadap belum optimalnya integrasi data antar unit pemerintahan serta belum optimalnya kualitas pelayanan di Kabupaten Situbondo.

23. Kondusifitas iklim usaha

Iklim usaha di Kabupaten Situbondo belum optimal dikarenakan pada segi akses permodalan yang masih kurang serta belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata sebagai motor penggerak peningkatan iklim usaha.

24. Konflik pemanfaatan lahan
Konflik pemanfaatan lahan di Kabupaten Situbondo lebih bersifat pada tanah yang belum memiliki sertifikat yang jelas sehingga berpengaruh terhadap terjadinya konflik pemanfaatan lahan antar petani.
25. Literasi Masyarakat
Akses literasi masyarakat di Kabupaten Situbondo sudah termasuk baik. Akan tetapi masih perlunya peningkatan akses literasi khususnya akses literasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat
26. Pemanfaatan IPTEK
Pemanfaatan IPTEK di Kabupaten Situbondo yang termasuk kurang adalah berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang masih rendah pada sektor ekonomi khususnya pada pertanian dan perikanan. Selain itu, pada UMKM dalam produksi dan pemasaran masih kurang dalam penggunaan teknologi tepat guna.
27. Pembangunan Pemuda
Pembangunan kepemudaan yang masih belum optimal adalah berkaitan dengan belum optimalnya ruang bagi pemuda dalam pengembangan bakat maupun keahlian khususnya pada daerah-daerah pedesaan.
28. Pergeseran Demografi
Pergeseran demografi menjadi peluang sekaligus ancaman di Kabupaten Situbondo. Pada 2 periode dalam RPJPD ini jumlah penduduk produktif memiliki jumlah lebih banyak sehingga bila menjadi sebuah peluang kedepannya jika pengelolaan potensi pemuda, keterampilan dan peningkatan peluang kerja dapat dikelola dengan baik. Serta akan menjadi ancaman karena jika pengelolaan potensi pemuda kurang baik akan menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka serta peningkatan angka kemiskinan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
29. Stabilitas politik
Stabilitas politik menjadi sebuah tantangan di Kabupaten Situbondo dalam keberlanjutan atau keselarasan pembangunan khususnya pada setiap periode 5 tahunan. Selain itu, stabilitas politik menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo seperti penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dan dukungan publik dalam pembangunan.
30. Stabilitas Wilayah
Kondusifitas di Kabupaten Situbondo termasuk sudah baik, tetapi dalam jangka panjang tetap menjadi tantangan bagi daerah dalam peningkatan pembangunan. Tantang kedepan yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan keamanan daerah dalam meningkatkan rasa aman masyarakat serta meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Situbondo.
31. Urbanisasi
Minimnya peluang kerja dan fasilitas pendidikan yang berkualitas mendorong semakin meningkatnya urbanisasi masyarakat ke luar daerah.
32. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo saat ini masih termasuk belum stabil. Hal tersebut dikarenakan sektor utama di kabupaten Situbondo adalah pertanian dan perikanan terkena dampak akibat kondisi iklim ekstrim yang terjadi sehingga berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan perikanan yang menurun drastis. Selain itu, nilai tambah pertanian dan perikanan yang masih kurang tidak dapat memberikan dukungan signifikan terhadap penurunan produksi pertanian dan perikanan.

33. Pemerataan ekonomi

Pemerataan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama pada wilayah selatan dimana adanya kesenjangan ekonomi pada wilayah situbondo utara dengan selatan. Peningkatan integrasi pertanian dan nilai tambah pertanian sebagai sektor utama di wilayah selatan menjadi peran penting dalam peningkatan pemerataan ekonomi di wilayah selatan.

34. *Urban Sprawl*

Pada wilayah perkotaan di Kabupaten Situbondo, *urban sprawl* berkaitan dengan tidak terstrukturanya perkembangan pemukiman yang menimbulkan permasalahan kurangnya wilayah serapan air, drainase dan sanitasi yang tidak menjangkau daerah pemukiman, dan timbulkan kawasan pemukiman kumuh. Sedangkan kalau di wilayah pedesaan lebih bersifat peningkatan pemukiman pada lahan produktif.

35. Perkembangan/ Eksistensi Budaya Lokal

Modernisasi saat ini menjadi tantangan besar terkait dengan kelestarian budaya lokal. Hal tersebut dikarenakan semakin menurunnya generasi penerus yang menjadi pelaku budaya semakin berkurang serta antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan acara-acara budaya yang telah bergeser menjadi lebih menyukai acara-acara modern akulturasi budaya luar.

Adanya perencanaan ini juga membuat Pemerintah Daerah tidak gegabah dalam melakukan Pembangunan di daerah. Perencanaan juga dapat menjadi solusi apabila proses penyusunan dapat mempergunakan perencanaan partisipatif dan adaptif salah satunya adalah dengan mendapatkan hasil survey dari Masyarakat. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan banyak unsur sebagai input, unsur-unsur tersebut dapat berasal dari aspirasi Masyarakat, lingkungan, data, pemetaan masalah secara akurat dan juga dukungan teknologi. Hasilnya merupakan perencanaan yang harus menjadi produk kebijakan yang dapat diterima seluruh Masyarakat sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan dari pemerintah.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau prioritas dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan isu strategis Kabupaten Situbondo.

3.2.1 Isu Global

Isu global merupakan suatu yang memang ada, yang terjadi sebagai akibat perkembangan kehidupan manusia, bangsa maupun negara. Isu global berdasarkan yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2025-2045 meliputi:

a. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Berdasarkan proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Selain itu, kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi dikawasan Asia

dan Afrika, serta terjadi Urbanisasi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota, serta peningkatan pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global akibat eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas serta memunculkan kekuatan baru. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang memicu ketidakpastian geoekonomi global.

c. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi dan berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi sehingga perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.

d. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

e. Konstelasi Perdagangan Global

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan Intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Kerja sama kawasan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

f. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi, serta perkembangan inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan.

g. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% terhadap populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari yang sebelumnya didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India.

h. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam/SDA (energi, air, dan pangan) ditingkat global diproyeksikan meningkat, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah di masa mendatang.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global (tiga krisis global-The Triple Planetary Crisis) diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari, berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu melakukan perubahan secara signifikan, beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor dan penerapan ekonomi sirkular. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

j. Pemanfaatan Luar Angkasa

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2 Isu Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, antara lain :

a. Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat.

Kondisi produktivitas yang rendah dibandingkan negara-negara yang menuju negara maju lainnya di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

b. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN).

Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

- c. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah.

Beberapa faktor penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan antara lain adalah karena terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Selain itu, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian, serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum.

- d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata.

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.

- e. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut.

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.

- f. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi.

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

- g. Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas.

Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

- h. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara

menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Di samping itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.

- i. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas.

Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

- j. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal.

Ketertinggalan produktivitas terjadi pada tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

- k. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif karena proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.

- l. Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan

- m. Demokratisasi Belum Optimal

Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

- n. Ketimpangan Antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi.

Secara umum dikarenakan masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah- wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

3.2.3 Isu Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Berikut adalah identifikasi isu strategis di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu pembangunan di Tahun 2025-2045 :

- a. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal, Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.

- b. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

- c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi serta daya saing pendidikan dan pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

- e. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan linkage dan logistik (supply-value chain) dan hub pangan (food hub). Ke depan diperlukan upgrading PIA Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub dengan didukung oleh pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulan susut dan sisa Pangan/Food Loss and Waste (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW. Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan/ agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur. Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing mendunia bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi.

Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau Business As Usual (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- g. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik juga menjadi sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial. Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan pelembagaan dan pembudayaan nilai – nilai pancasila.

3.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan. Dalam Upaya mewujudkan pembangunan daerah yang merata maka diperlukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan satu dengan yang lain. Perumusan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tentunya tidak dapat lepas dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apabila dokumen KLHS RPJPD telah terintegrasi ke dalam dokumen RPJPD maka dokumen RPJPD telah memenuhi 2 prinsip dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 5 yakni dokumen rencana pembangunan daerah tersebut telah dirumuskan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan memiliki tujuan yang tertuang pada Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimaksud untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial Masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat empat pilar yang didalamnya tertuang tujuan pembangunan berkelanjutan yakni pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum dan tata Kelola dan pilar lingkungan.

Pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Situbondo telah dilakukan telaah dan evaluasi atas capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan pemetaan hasil evaluasi KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo.

Tabel 3. 2 Telaah Evaluasi KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo

Permasalahan/ Isu	Sumber	Urusan/ Bidang	Isu PB
Pengurangan risiko (mitigasi) bencana daerah belum optimal	TPB – SOSIAL	Bencana	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
Tingkat risiko bencana masih tinggi (diatas target yang mencapai 118,6)	TPB – SOSIAL	Bencana	
Dampak ekonomi akibat terjadinya bencana meningkat	TPB – SOSIAL	Bencana	
Tingkat risiko bencana masih tinggi (diatas target yang mencapai 118,6)	TPB – LINGKUNGAN	Bencana	
Dampak ekonomi akibat terjadinya bencana meningkat	TPB – LINGKUNGAN	Bencana	
Terdapat 1 kecamatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengaturan pencegahan perlindungan bencana dengan status Rendah dan Sangat Rendah yang luas, yaitu Kecamatan Besuki	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Bencana	
Risiko bencana di Kabupaten Situbondo meningkat, dimana ancaman Banjir, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki kelas risiko yang Tinggi	Risiko Bencana Alam	Bencana	
Terjadinya Banjir Bandang siklus 6 Tahunan di Kabupaten Situbondo	Hasil FKP 1	Bencana	



Permasalahan/ Isu	Sumber	Urusan/ Bidang	Isu PB
Adanya bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya sebagai salah satu akibat dari perubahan iklim	Bencana Hidrometrologi (Provinsi)	Bencana	
Rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Bencana Hidrometrologi (Provinsi)	Bencana	
Tingkat kesejahteraan hidup masyarakat masih belum optimal	TPB – EKONOMI	Ekonomi	Pemerataan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih rendah	TPB – EKONOMI	Ekonomi	
Persebaran kantor bank dan ATM di Kabupaten Situbondo belum merata	TPB – EKONOMI	Ekonomi	
Ketersediaan dermaga penyeberangan masih terbatas	TPB – EKONOMI	Ekonomi	
Akses pinjaman atau kredit bagi industri kecil masih rendah	TPB – EKONOMI	Ekonomi	
Kontribusi penerimaan pajak yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian masih rendah	TPB – EKONOMI	Ekonomi	
Keikutsertaan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah	TPB – SOSIAL	Tenaga Kerja	
Tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output mengalami penurunan	TPB – EKONOMI	Tenaga Kerja	
Ketersediaan lapangan kerja informal sektor non-pertanian masih stagnan	TPB – EKONOMI	Tenaga Kerja	
Masyarakat yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam/minggu) meningkat	TPB – EKONOMI	Tenaga Kerja	
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) menurun	TPB – EKONOMI	Tenaga Kerja	
Keikutsertaan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah	TPB – EKONOMI	Tenaga Kerja	
Kepesertaan Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan belum merata	TPB – SOSIAL	Kesehatan	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata	TPB – SOSIAL	Kesehatan	
Mutu Layanan di Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Hasil FKP 1	Kesehatan	
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun meningkat	TPB – SOSIAL	Kesehatan	
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Hasil FKP 1	Kesehatan	
Peningkatan kejadian malaria	TPB – SOSIAL	Kesehatan	
Persentase merokok pada penduduk usia 18 tahun kebawah masih tinggi	TPB – SOSIAL	Kesehatan	
Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun keatas meningkat	TPB – SOSIAL	Kesehatan	

Permasalahan/ Isu	Sumber	Urusan/ Bidang	Isu PB
Masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengkonsumsi alkohol	TPB – SOSIAL	Kesehatan	
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri meningkat	TPB – SOSIAL	Kesehatan	
Partisipasi masyarakat untuk sekolah pada jenjang pendidikan SD/ MI/ sederajat belum maksimal	TPB – SOSIAL	Pendidikan	
Ketersediaan sekolah SMP/ MTs dengan akreditasi minimal B masih belum merata	TPB – SOSIAL	Pendidikan	
Partisipasi sekolah pada tingkat SD/ MI belum optimal	TPB – SOSIAL	Pendidikan	
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas masih rendah (berada dibawah 7 tahun)	TPB – SOSIAL	Pendidikan	
Kemampuan membaca dan menulis pada penduduk usia 15 tahun keatas belum merata	TPB – SOSIAL	Pendidikan	
Masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer baik, dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi	Realisasi Anggaran	Keuangan	Kemandirian Fiskal dan Efektivitas Alokasi Belanja Daerah
Dukungan anggaran dalam pencapaian indikator TPB di Kabupaten Situbondo masih rendah	Keuangan TPB	Keuangan	
Kondisi musim yang tidak normal dan potensi terjadinya Kekeringan Meteorologis di Kabupaten Situbondo	Tingkat Kerentanan/ Kapasitas Perubahan Iklim	Lingkungan (Iklim)	Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
Percepatan pengaruh perubahan iklim akibat padatnya aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya	Pemanasan Global (Provinsi)	Lingkungan (Iklim)	
Adanya faktor perubahan iklim yang terjadi secara alamiah	Pemanasan Global (Provinsi)	Lingkungan (Iklim)	
Perlunya menciptakan adaptasi dampak perubahan iklim dengan menciptakan sistem pembangunan yang berdaya tahan (reliance) terhadap guncangan variabilitas iklim saat ini (anomali iklim) danantisipasi dampak di masa depan	Pemanasan Global (Provinsi)	Lingkungan (Iklim)	
Perlunya mempertimbangkan resiko perubahan iklim pada setiap arah kebijakan pembangunan yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)	Pemanasan Global (Provinsi)	Lingkungan (Iklim)	
Adanya perubahan iklim memberikan dampak yang lebih besar pada masyarakat miskin	Pemanasan Global (Provinsi)	Lingkungan (Iklim)	
Perlunya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang paling mendasar dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas dan tata kelola pemerintahan yang baik	Pemanasan Global (Provinsi)	Lingkungan (Iklim)	
Belum tersedianya Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Kehati)	Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
Terdapat 11 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya memiliki dukungan ekosistem terhadap perikehidupan dan keanekaragaman hayati dengan status Rendah dan Sangat Rendah, yaitu :	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Lingkungan (Kehati)	



Permasalahan/ Isu	Sumber	Urusan/ Bidang	Isu PB
Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Jangkar, Jatibanteng, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo, dan Suboh			
Terdapat 1 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya memiliki daya tarik wisata dengan fitur lansekap, keunikan alam atau nilai tertentu yang telah disediakan oleh ekosistem dengan status Rendah dan Sangat Rendah, yaitu Kecamatan Besuki	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Lingkungan (Kehati)	
Masih kurangnya penanganan sampah di kawasan perkotaan	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Persampahan)	Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan
Pengolahan sampah di Kabupaten Situbondo masih belum optimal	Dampak Risiko Lingkungan Hidup	Lingkungan (Persampahan)	
Masih banyak terdapat sampah di laut/ pantai	Hasil FKP 1	Lingkungan (Persampahan)	
Terdapat 4 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya memiliki kemampuan dan kesesuaian lahan dalam memberikan dukungan kehidupan secara sosial, ekonomi, maupun budaya (tempat tinggal) dengan status Rendah dan Sangat Rendah, yaitu Kecamatan Banyuputih, Kendit, Mlandingan, dan Sumbermalang	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Lingkungan (Lahan)	Penyediaan Pangan Berkelanjutan, Pengendalian Alih Fungsi dan Kerusakan Lahan/ Kawasan Pantai
Kualitas tutupan lahan di Kabupaten Situbondo semakin menurun yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan	Dampak Risiko Lingkungan Hidup	Lingkungan (Lahan)	
Proporsi tutupan hutan mengalami penurunan	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Hutan)	
Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, permukiman dan pusat perkantoran	Perubahan Tata Guna Lahan (Provinsi)	Lingkungan (Lahan)	
Perlu dilakukan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (<i>enviromental carrying capacity</i>)	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (Provinsi)	Lingkungan (Lainnya)	
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) meningkat	TPB – SOSIAL	Pangan	
Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diukur berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih kurang beragam dan seimbang	TPB – SOSIAL	Pangan	
Terdapat wilayah yang memiliki nilai daya dukung lahan pertanian dengan status defisit (tidak mampu melaksanakan swasembada pangan), yaitu Kec. Sumbermalang, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Situbondo, Jangkar, dan Asembagus	Daya Dukung dan Daya Tampung	Lingkungan (Pangan)	
Terdapat 4 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya memiliki status ketersediaan pangan (kemampuan wilayah untuk menyiapkan pangan) Rendah dan Sangat Rendah, yaitu : Kecamatan Besuki, Kendit, Mlandingan, dan Sumbermalang	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Lingkungan (Pangan)	

Permasalahan/ Isu	Sumber	Urusan/ Bidang	Isu PB
Adanya ancaman krisis pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur	Perubahan Tata Guna Lahan (Provinsi)	Pangan	
Kurangnya sarana dan prasarana wilayah pendukung pengembangan sistem agrobisnis	Perubahan Tata Guna Lahan (Provinsi)	Pangan	
Terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar pantai (Kerusakan Hutan Bakau)	Hasil FKP 1	Lingkungan (Hutan)	
Masih terdapat lahan kritis didalam hutan produksi dan diluar kawasan hutan yang cukup luas	Dampak Risiko Lingkungan Hidup	Lingkungan (Lahan)	
Ketersediaan pupuk anorganik dan kecenderungan pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan serta masih rendahnya pemakaian pupuk organik	Pencemaran Tanah Air dan Udara (Provinsi)	Lingkungan (Lahan)	
Terjadinya Kerusakan Hutan di Wilayah Hilir yang menyebabkan material banyak yang masuk ke laut sehingga berpotensi merusak biota laut	Hasil FKP 1	Lingkungan (Hutan)	
Masih perlunya optimalisasi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	TPB – HUKUM & TK	Pemerintahan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
Penggunaan E-procurement pada belanja pengadaan belum maksimal	TPB – HUKUM & TK	Pemerintahan	
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kab. Situbondo belum maksimal	TPB – HUKUM & TK	Pemerintahan	
Pencatatan kelahiran pada anak dengan usia dibawah 5 tahun belum merata	TPB – HUKUM & TK	Pemerintahan	
Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih rendah	TPB – HUKUM & TK	Pemerintahan	
Tingkat kebebasan masyarakat dalam berkumpul, berpendapat, berkeyakinan, dan tidak diskriminasi masih perlu ditingkatkan	TPB – EKONOMI	Kesbang	
Masih kurangnya kebijakan yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	TPB – SOSIAL	Perempuan & Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kejadian kekerasan terhadap anak perempuan masih cukup banyak	TPB – SOSIAL	Perempuan & Anak	
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin usia 25 hingga 49 tahun masih rendah (dibawah usia 21 tahun)	TPB – SOSIAL	Perempuan & Anak	
Tingkat kelahiran pada penduduk perempuan usia 15 hingga 19 tahun masih tinggi	TPB – SOSIAL	Perempuan & Anak	
Belum tersedianya insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Air)	
Belum tersedianya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Air)	
Status daya dukung sumber daya air di Kabupaten Situbondo mengalami Defisit	Daya Dukung dan Daya Tampung	Lingkungan (Air)	
Terdapat 1 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya memiliki status	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Lingkungan (Air)	

Permasalahan/ Isu	Sumber	Urusan/ Bidang	Isu PB
penyedia Air Rendah dan Sangat Rendah, yaitu Kecamatan Besuki			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Air, serta Pemenuhan Layanan Sanitasi Layak
Penurunan debit air sumber PDAM pada musim kemarau	Hasil FKP 1	Lingkungan (Air)	
Penanggulangan krisis Air	Hasil FKP 1	Lingkungan (Air)	
Akses terhadap layanan sumber air minum layak belum merata	TPB – SOSIAL	Perkim	
Akses layanan terhadap air minum layak belum merata	TPB – LINGKUNGAN	Perkim	
Akses layanan terhadap air minum aman dan berkelanjutan belum merata	TPB – LINGKUNGAN	Perkim	
Akses terhadap layanan sanitasi layak belum merata	TPB – LINGKUNGAN	Perkim	
Akses terhadap layanan sanitasi layak belum merata	TPB – SOSIAL	Perkim	
Masih banyak perilaku masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Hasil FKP 1	Kesehatan	
Belum tersedia Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Hasil FKP 1	Perkim	
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku mengalami penurunan	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Pencemaran)	
Belum adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Pencemaran)	
Terdapat 1 kecamatan yang memiliki kemampuan ekosistem untuk membersihkan pencemaran yang masuk ke dalam ekosistem perairan dengan status Rendah dan Sangat Rendah yang luas, yaitu Kecamatan Situbondo	Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem	Lingkungan (Pencemaran)	
Terjadinya penurunan kualitas air, dimana berdasarkan hasil uji terdapat 4 sungai memiliki mutu air dengan status cemar ringan, yaitu : Sungai Rajegwesi, Sungai Bayeman, Sungai Curah Tatal, dan Dam Sluice	Dampak Risiko Lingkungan Hidup	Lingkungan (Pencemaran)	
Pengelolaan limbah B3 belum dilaksanakan dengan optimal	TPB – LINGKUNGAN	Lingkungan (Pencemaran)	
Tingkat kemiskinan masih tinggi (masih berada diatas target nasional yang mencapai 8%)	TPB – SOSIAL	Sosial	Penanggulangan Kemiskinan dan Inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas
Akses penerangan listrik pada rumah tangga miskin dan rentan masih belum merata	TPB – SOSIAL	Sosial	
Pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas belum maksimal	TPB – SOSIAL	Sosial	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi	TPB – EKONOMI	Sosial	

Sumber: KLHS RPJPD

Pada hasil evaluasi tersebut menetapkan 12 isu pembangunan berkelanjutan melalui perumusan yang didasarkan pada hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Situbondo, analisis kondisi umum daerah (Muatan KLHS dan Keuangan Daerah), masukan peserta saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik/Uji Publik, serta mempertimbangkan isu strategis Provinsi Jawa Timur berdasarkan 3 isu utama KLHS RPJPN. Hasil evaluasi tersebut kemudian dilaksanakan penajaman kembali sehingga menjadi isu Pembangunan Berkelanjutan/ Isu Pendek KLHS RPJPD di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
3. Pemerataan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
6. Penyediaan Pangan Berkelanjutan, Pengendalian Alih Fungsi dan Kerusakan Lahan/ Kawasan Pantai
7. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Air, serta Pemenuhan Layanan Sanitasi Layak

3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Situbondo

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/Masyarakat) di masa depan. Pada dasarnya identifikasi terkait isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Dengan adanya isu strategis maka Lembaga khususnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat akan dapat mengelompokkan dan melaksanakan proses perencanaan strategis untuk kebutuhan masa depan. Oleh karena itu isu strategis masih dinilai sangat penting untuk kebutuhan pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis sendiri selalu beranjak dari isu-isu yang dimulai atau ada dalam Masyarakat, pengambilan keputusan politis tidak bisa serta merta tanpa landasan pengambilan keputusan.

Thomas E. Ambler (2008) menjelaskan bahwa isu strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam Upaya mencapai tujuan bisnis sebuah Perusahaan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa tujuan suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan memerlukan aspek-aspek penting yang dirasa membutuhkan perhatian untuk menunjang keberhasilan tujuan dari organisasi. Keberhasilan tujuan organisasi selalu membutuhkan perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan memberikan isu-isu yang sudah berhasil terbingkai kepada pengambil keputusan yang nantinya pengambil keputusan akan mengidentifikasi isu yang ada kemudian akan diolah menjadi kerangka keputusan yang di dalamnya terdapat rincian beberapa keputusan serta rencana aksi.

Adanya disposisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, membuat pemerintah daerah membutuhkan rangkaian pemetaan isu strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berisikan tentang visi misi dan juga arah Pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Untuk itu kesepakatan dan juga komitmen Pembangunan dibutuhkan di dalamnya, dengan mengusung terkait isu strategis yang ada di daerah tersebut. Perencanaan Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan pada sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu berbagai

alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik digunakan untuk mencapai tujuan di masa depan. Pemilihan alternatif yang paling baik diharapkan mampu mencapai suatu tujuan yang berguna bagi kualitas Pembangunan kedepannya.

Sebelum memasuki perencanaan strategis Kabupaten Situbondo telah berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai dasar dalam membuat perencanaan strategis. Penyajian dalam isu strategis ini telah disusun sesuai dengan isu global, nasional dan regional yang nantinya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun isu-isu strategis yang sudah berhasil diidentifikasi di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia di kabupaten Situbondo masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota Lainnya di Provinsi Jawa Timur. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mencerminkan kondisi sumber daya manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia, dimana pada Kabupaten Situbondo nilai IPM masih dibawah Provinsi Jawa Timur. Daya saing sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah berkenaan dengan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dampak dari kurangnya daya saing dapat menjadi domino permasalahan di kemudian hari, seperti halnya potensi peningkatan pengangguran karena keterbatasan kemampuan untuk mengakses pekerjaan yang layak.

2. Daya Saing Usaha

Daya saing usaha sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan usaha masyarakat, fenomena pelaku usaha khususnya pada sektor UMKM yang tidak mampu bertahan menunjukkan gejala daya saing usaha yang lemah. Daya saing usaha sendiri dapat dilihat dari kemampuan UMKM dalam merespon kompetitor usaha baik di dalam wilayah (Kabupaten Situbondo) maupun di luar wilayah. Baik dalam bentuk ekspor produk maupun menarik konsumen kedalam wilayah kabupaten Situbondo. Jika keberlanjutan usaha dapat dijaga dengan baik, maka lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar, selain itu dengan daya saing yang baik akan semakin merangsang pertumbuhan sektor-sektor lain yang dapat menunjang keberlanjutan para pelaku usaha di Kabupaten Situbondo.

3. Daya Saing Usaha EKRAF

Dalam beberapa tahun terakhir usaha EKRAF atau biasa disebut Ekonomi Kreatif merupakan usaha yang cukup diminati oleh Masyarakat. Ekonomi kreatif sendiri merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Usaha Ekonomi Kreatif sendiri cukup bermacam-macam seperti arsitektur Pembangunan, desain interior, desain produk, film, animasi video, fotografi, musik, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, fesyen, maupun kuliner. Majunya teknologi saat ini juga mampu mendukung usaha EKRAF dalam negeri untuk dapat bersaing kedalam kancah internasional. Namun demikian, kondisi tersebut akan menjadi boomerang atau menjadi tantangan yang sangat berat jika para pelaku EKRAF tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

4. Kerusakan lingkungan

Degradasi lingkungan atau yang dapat kita kenal sebagai kerusakan lingkungan merupakan suatu permasalahan karena penipisan sumber daya seperti udara, air dan tanah. Kerusakan ekosistem, habitat dan kepunahan kehidupan di alam serta tingginya polusi udara juga merupakan salah satu akibat dari adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di Situbondo dipicu oleh berbagai hal diantaranya adalah timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan berbagai pencemaran baik berbentuk cair maupun padat lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak bertanggung jawab serta mindset untuk hidup sehat yang masih belum membumi juga menjadi salah satu pemicu utama kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang akan terjadi terus menerus dapat menyebabkan bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Apabila kerusakan lingkungan tidak segera diatasi untuk kemudian hari maka persentase kerusakan lingkungan akan semakin meningkat.

5. Pendidikan Karakter

Fenomena munculnya berbagai tindakan kriminalitas dan penyimpangan sosial di masyarakat khususnya yang melibatkan anak dibawah umur baik sebagai korban maupun pelaku menunjukkan adanya pengikisan moral dan mental di masyarakat. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai permasalahan dikemudian hari seperti bergesernya norma-norma sosial yang telah ada dan digantikan dengan norma baru atau budaya baru yang dapat membawa dampak negatif di masyarakat. Merujuk pada kondisi tersebut, maka penting kiranya untuk mengangkat isu berkenaan dengan pendidikan karakter sebagai salah satu isu strategis jangka panjang di Kabupaten Situbondo, mengingat dalam pembangunan karakter tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat atau instan dan menuntut keterlibatan cukup banyak pihak.

6. Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan

Kewenangan pembangunan yang cukup banyak beserta keterbatasan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan kewenangan tersebut menuntut tingkat efisiensi penyelenggaraan pemerintah untuk terus ditingkatkan. Efisiensi dapat diwujudkan melalui penyesuaian struktur organisasi sebagaimana tujuan atau fokus pembangunan kedepan serta penggantian beberapa peran manusia yang dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga waktu dan biaya tata kelola pemerintahan dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengorbankan esensi pembangunan.

7. Efisiensi waktu tempuh

Majunya perkembangan teknologi saat ini membuat pola pikir Masyarakat ikut berubah, seiring meningkatnya kemampuan ekonomi dan literasi masyarakat. Dalam aktivitas sosial ekonominya, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan biaya, namun juga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin efisiennya waktu tempuh maka dapat mempermudah proses distribusi barang dan jasa antar daerah yang nantinya dapat berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal akses antar daerah, terdapat peluang baru dalam hal efisiensi waktu tempuh yaitu dengan proses dibangunnya jalan tol trans jawa. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan juga ancaman jika tidak ditindaklanjuti dengan baik.

8. Keamanan sistem informasi

Berkembangnya teknologi informasi dalam berbagai sektor menyebabkan peningkatan pada jumlah aplikasi maupun media layanan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut semakin meningkatkan potensi ancaman yang dapat merugikan masyarakat baik sebagai pengguna jasa maupun sebagai penyedia jasa yang memanfaatkan platform digital. Munculnya berbagai fenomena seperti kebocoran data serta penipuan dengan memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat menunjukkan masih rendahnya kemandirian sistem informasi dan literasi digital masyarakat. Jika keamanan sistem informasi berkenaan dengan perlindungan data sensitif masyarakat tidak dapat diberikan dengan baik, maka kedepannya dapat berdampak kepada turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya berkenaan dengan keamanan data.

9. Keberdayaan Desa

Pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang dapat diselenggarakan secara merata hingga level desa. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan pembangunan di desa. Namun demikian, jika dilihat dari segi status pembangunan desa di Kabupaten Situbondo, masih belum semua desa masuk dalam kategori desa mandiri. Dari segi empiris juga dapat dilihat bahwa ketergantungan pembangunan desa pada pemerintah dengan level diatasnya masih cukup tinggi. Upaya pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat desa masih belum dapat berjalan optimal baik dalam proses tatakelola pemerintahan desa maupun optimalisasi lembaga atau badan usaha milik desa.

10. Kemandirian fiskal daerah

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai proses pembangunan tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Apabila kemandirian fiskal daerah semakin tinggi maka dapat dikategorikan bahwa pendapatan daerah juga semakin tinggi dan dapat dinilai kegiatan perekonomian Masyarakat juga berjalan dengan baik. Hingga saat ini, kondisi kemandirian fiskal daerah Kabupaten Situbondo masih relatif rendah dan masih perlu untuk terus diupayakan mengingat potensi yang ada masih cukup besar.

11. Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Kepercayaan publik pada pemerintah sangat penting untuk dijaga, kepercayaan publik yang rendah dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa kebijakan pemerintah dinilai masih belum mampu mengakomodir kebutuhan Masyarakat. Kondisi tersebut dapat dipicu oleh kualitas kebijakan yang kurang tepat sasaran, maupun proses pelayanan yang dinilai terlalu berbelit-belit.

12. Ketangguhan Bencana

Ketangguhan bencana merupakan kondisi dimana masyarakat telah memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana. Bencana yang dimaksud dalam hal ini dapat diartikan secara lebih luas bukan hanya bencana alam saja yang berupa banjir, tanah longsor, ataupun bencana gunung meletus. Kekeringan maupun kelangkaan pangan adalah salah satu bencana yang juga perlu untuk

diantisipasi. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan secara jangka panjang mengingat Kabupaten Situbondo memiliki berbagai macam potensi bencana.

13. Ketersediaan dan pemanfaatan data

Penyediaan data yang komprehensif sesuai dengan arah pembangunan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mendukung proses akselerasi pembangunan khususnya dalam mendukung terciptanya inovasi-inovasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat atau swasta. Namun demikian, ketersediaan dan pemanfaatan data hingga saat masih dirasa belum cukup komprehensif jika dilihat dari kelengkapan data sektoral baik dari segi keragaman data maupun kedalaman data dan interoperabilitas data pemerintah.

14. Konflik Pemanfaatan Lahan

Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah 1.638,50km dengan perbandingan jumlah penduduk sebesar 678.469 jiwa di tahun 2023. Dengan luas wilayah demikian, potensi konflik pemanfaatan lahan masih cukup tinggi khususnya pada lahan dengan status yang belum bersertifikat dan lahan produktif. Konflik tersebut dipicu oleh beberapa hal, selain karena keterbatasan lahan, faktor ekonomi dan faktor kepentingan lainnya menjadi salah satu penyebab paling tinggi. Potensi konflik pemanfaatan lahan dapat menghambat proses pembangunan, baik dari segi pengembangan infrastruktur maupun dari segi kondusifitas iklim investasi.

15. Pergeseran Demografi

Pergeseran demografi dapat diartikan sebagai perubahan dalam komposisi usia dan kelompok populasi pada Masyarakat. Pergeseran demografi dapat terjadi karena berbagai hal contohnya seperti pada pandemic Covid-19 dan juga adanya urbanisasi. Terbatasnya lapangan pekerjaan pada suatu daerah juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu pergeseran struktur demografi melalui proses urbanisasi yang membuat masyarakat berpindah domisili atau wilayah. Berdasarkan pada hasil evaluasi dan FGD, Kabupaten Situbondo hingga beberapa tahun kedepan masih sangat berpotensi memiliki tingkat urbanisasi cukup tinggi baik dari desa ke kota dalam Kabupaten Situbondo maupun Keluar Kabupaten Situbondo. Selain itu, masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi lebih memiliki kecenderungan untuk membangun karir di luar Kabupaten Situbondo yang dikarenakan minimnya alternatif lapangan pekerjaan yang tersedia.

16. Pemerataan ekonomi

Pemerataan ekonomi merupakan suatu konsep yang mencakup Upaya untuk menciptakan distribusi yang lebih merata dari sumber daya ekonomi, kesempatan dan kekayaan di antara individu dan kelompok dalam Masyarakat. Pemerataan ekonomi sendiri bertujuan untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang ada. Jika merujuk pada tingkat ketimpangan antar kelas pendapatan, maka ketimpangan di kabupaten Situbondo masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Namun jika dilihat dari tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita, Kabupaten Situbondo masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya,

isu berkenaan dengan pemerataan ekonomi masih perlu untuk diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang daerah.

17. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan aspek yang memiliki multiplier effect yang sangat luas. Kemiskinan di Kabupaten Situbondo menjadi sebab dan akibat munculnya fenomena sosial seperti halnya peningkatan kerawanan konflik yang dengan bentuk sengketa, dan lambatnya proses pembangunan karena keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengakses kualitas pendidikan dan kesehatan yang layak.

18. Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Situbondo memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan lahan yang luas pengembangan pertanian masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Potensi besar sektor pertanian ini berada di tengah-tengah ironi karena menghadapi krisis talenta pertanian. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena berkurangnya talenta muda di bidang ini akan membahayakan ketersediaan tenaga kerja dan berkurangnya inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan untuk mempertahankan produksi dan ketahanan pangan jangka panjang. Selain itu, tantangan iklim dan cuaca, seperti gelombang panas El Nino yang melanda Indonesia saat ini dan kenaikan suhu yang tidak biasa, seringkali menyebabkan hasil panen sulit untuk diperkirakan. Gangguan rantai pasokan juga dapat menyebabkan harga komoditas anjlok sehingga petani sulit mencapai titik impas. Belum lagi menyusutnya lahan pertanian karena perubahan tata guna lahan dan peran maladaptif tengkulak yang telah mengurangi kepercayaan terhadap pasar pertanian.

Meskipun terbilang banyak pelaku usaha di bidang peternakan di Kabupaten Situbondo, nyatanya sebagian besar pelaku usaha tersebut adalah peternak tradisional dengan jumlah kepemilikan hewan ternak yang masih sangat sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan hasil peternakan yang didapatkan tidak optimal. Cara perawatan yang digunakan masih tradisional sehingga pertumbuhan cenderung lambat. Keuntungan yang dihasilkan juga tidak maksimal. Disamping itu, Pakan menjadi kebutuhan utama yang sering mengalami masalah. Hingga saat ini sebagian besar peternak masih bergantung pada pakan hijauan yang semusim dan pemanfaatan limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Dalam hal inilah diperlukan banyak Sumber Data Manusia yang menguasai nutrisi dan teknologi pakan ternak agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk pengganti atau tambahan pakan yang bergizi bagi ternak, sehingga ternak dapat tumbuh dengan sehat dan sesuai keinginan.

Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai.

Isu Strategis Nasional, Provinsi, KLHS dan Isu Strategi RPJPD Kabupaten Situbondo merupakan isu yang saling berkaitan sehingga perencanaan dari Nasional, Provinsi dan daerah merupakan perencanaan yang berkesinambungan serta memperhatikan aspek lingkungan melalui penyelarasan Isu KLHS. Berikut merupakan Lineraritas Isu Nasional, Provinsi dan KLHS terhadap Isu Strategi RPJPD Kabupaten Situbondo.

Tabel 3. 3 Lineraritas Isu Global, Nasional, Provinsi dan KLHS terhadap Isu Strategis RPJPD Kabupaten Situbondo

Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu KLHS	Isu Strategis
Perkembangan Demografi Global	Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Daya Saing Sumber Daya Manusia
				Pendidikan Karakter
	Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat	Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	Penyediaan Pangan Berkelanjutan	Daya Saing Usaha
				Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan
	Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah
	Demokratisasi Belum Optimal			
Perkembangan Teknologi	Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN).			Keamanan sistem informasi
				Ketersediaan dan pemanfaatan data
	Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar		



Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu KLHS	Isu Strategis
Peningkatan Urbanisasi Dunia	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata			Daya Saing Usaha EKRAF
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut			
	Ketimpangan Antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi.		Penanggulangan Kemiskinan dan Inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas	Kemiskinan
				Pergeseran Demografi
Konstelasi Perdagangan Global	Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah			
	Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi.			
Tata Kelola Keuangan Global				Kemandirian fiskal daerah
Pertumbuhan Kelas Menengah	Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas	Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan	Pemerataan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Pemerataan ekonomi
				Efisiensi waktu tempuh
				Keberdayaan Desa
Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam				
Perubahan Iklim	Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Air, serta Pemenuhan Layanan Sanitasi Layak	Kerusakan lingkungan
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Pengendalian Alih Fungsi dan Kerusakan Lahan/ Kawasan Pantai	Konflik Pemanfaatan Lahan
			Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Ketangguhan Bencana
Pemanfaatan Luar Angkasa				



RPJPD

2025 - 2045

KABUPATEN SITUBONDO



BAB 4

VISI DAN MISI DAERAH

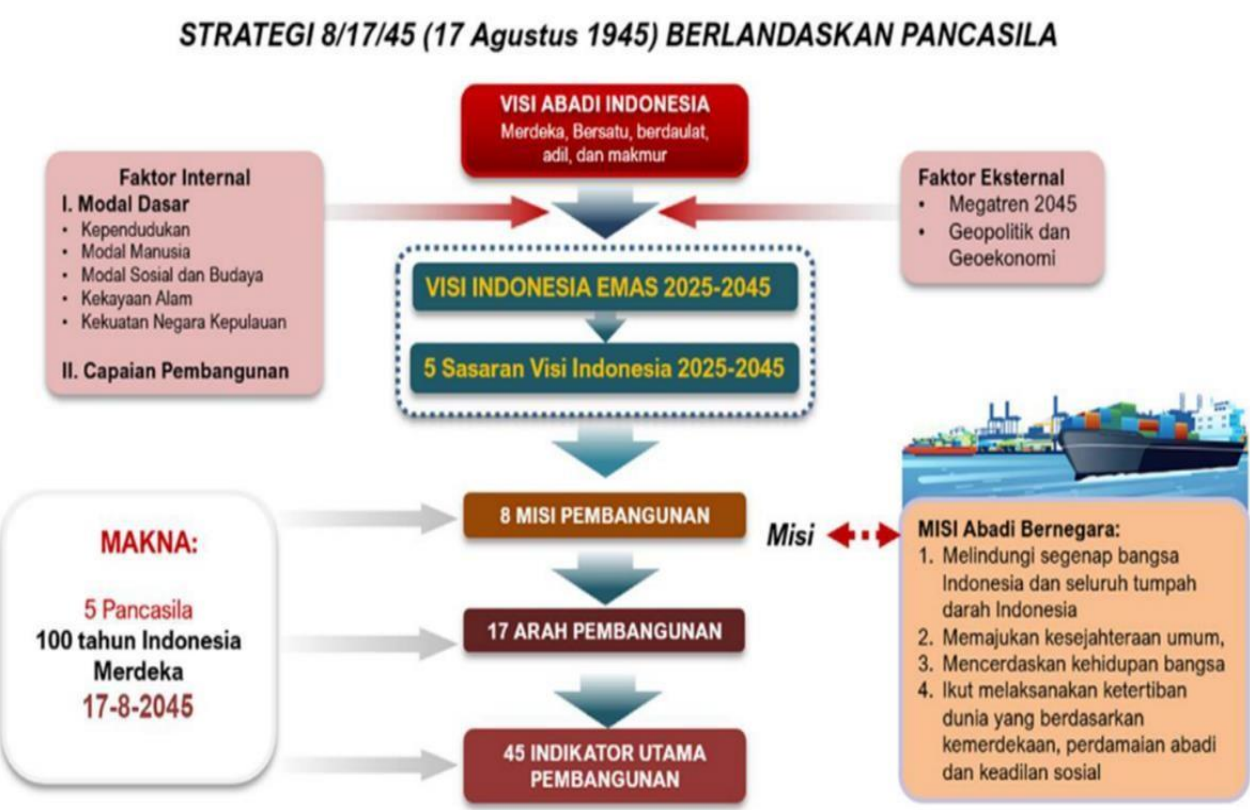
BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH

9.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

9.1.1 Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan dalam 8 (delapan) misi (agenda) Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8 misi (agenda) Pembangunan nasional, 17 arah (tujuan) Pembangunan nasional, dan 45 indikator utama Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan negara kesatuan republic Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.



Gambar 4. 1 Kerangka Pikir RPJPN 2025 – 2045
Sumber: RPJPN 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan



Gambar 4. 2. Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

1. Kekuatan geopolitik: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif, serta menjalin hubungan kerja sama dengan negaranegara lain di kawasan dan dunia internasional.
2. Kekuatan militer: Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneisa dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis, dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar.
3. Kekuatan geoekonomi: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional, yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara negara lain di kawasan dan dunia internasional.
4. Kekuatan peradaban maritim: Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, yang meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan dan dunia internasional.

Berdaulat

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

1. Ketahanan: Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.
2. Kesatuan: Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.
3. Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain, karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.
4. Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

Maju

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

1. Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
2. Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau.

- Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.
3. Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.
 4. Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.
 5. Adil: Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



Gambar 4. 3. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
Sumber: RPJPN 2025-2045



Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

1. **Sasaran pertama**, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
2. **Sasaran kedua**, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. **Sasaran ketiga**, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
4. **Sasaran keempat**, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. **Sasaran kelima**, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, menuju *net zero emission* pada tahun 2060.



Gambar 4. 4. 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan
Sumber: RPJPN 2025-2045

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045 diperlukan sinkronasi dan penyelarasan antara perencanaan Pembangunan nasional dan perencanaan Pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan Pembangunan jangka Panjang menjadi kunci bagi sinergi Pembangunan antara pusat dan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlunya disusun suatu mekanisme dalam rangka penyelarasan RPJP Daerah tahun 2025-2045 terhadap RPJP nasional tahun 2025-2045.

1. Misi 1 Transformasi Sosial

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.

2. Misi 2 Transformasi Ekonomi

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Misi 3 Transformasi Tatakelola

Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.

4. Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.

5. Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan



karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.

6. Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualiti dan Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

9.1.2 Telaah Visi Dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Telaah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota/Kabupaten merupakan tindak lanjut terhadap keterkaitan perencanaan Pemerintah provinsi terhadap perencanaan daerah Kabupaten/Kota dimana Kabupaten Situbondo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan dan memperhitungkan perencanaan yang tersusun dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan diantaranya keduanya dapat diharapkan dapat menciptakan linieritas dalam pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun visi jangka panjang Provinsi Jawa Timur dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

JAWA TIMUR BERAHLAK, MAJU, MENDUNIA DAN BERKELANJUTAN

Sebagai Upaya mencapai cita-cita jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2025-2045 sehingga visi RPJPD Provinsi Jawa Timur diturunkan kedalam 8 (delapan) Misi sebagai upaya memastikan bahwa setiap tahapan tujuan jangka Panjang akan dapat tercapai dengan baik, berikut merupakan gambaran 8 (delapan) misi Pembangunan jangka Panjang Provinsi Jawa Timur:

- 1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkelanjutan**, Misi ini meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan perlindungan sosial dalam mewujudkan masyarakat

Jawa Timur yang maju, sehat, unggul, dan inovatif. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan literasi ilmu pengetahuan, peningkatan kesehatan, dan pengendalian penduduk. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial dicapai melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga.

- 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan,** Misi ini meliputi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui akselerasi industri pengolahan dan perdagangan, optimalisasi pertanian (dalam arti luas) melalui pengembangan agrominapolitan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan UKM, Koperasi dan BUMDesa, implementasi ekonomi biru dan ekonomi hijau, penerapan ekonomi syariah dan ekonomi kreatif yang didukung transformasi digital dan infrastruktur/konektivitas pendukung ekonomi.
- 3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif,** Misi ini meliputi Tata kelola pemerintahan yang bersih dan peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini dicapai dengan membangun sistem pemerintahan yang handal (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), kebijakan pengawasan internal dan eksternal yang efektif dengan Produk Hukum yang berkualitas dan berintegritas serta kapasitas aparatur daerah (ASN) yang gesit (*Agile*), inovatif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas.
- 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Jawa Timur yang aman, nyaman, tertib, tentram, demokratis, dan ekonomi yang stabil. Keamanan daerah tangguh dilakukan melalui optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantribumlinmas), demokrasi substansial melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan, dan Pendidikan politik untuk menjamin hak-hak politik dan demokrasi masyarakat. Stabilitas keamanan dan demokrasi yang kondusif merupakan modal dalam memperkuat stabilitas ekonomi makro. Penguatan stabilitas ekonomi makro melalui penguatan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- 5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,** Ketahanan sosial budaya dan ekologi diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan sosial budaya untuk tahan menghadapi segala tantangan. Aspek penting dalam penguatan ketahanan sosial adalah penguatan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pijakan spiritual yang kokoh dan teruji, penguatan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan pembangunan karakter melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga. Pemantapan ketahanan ekologi diwujudkan melalui pengembangan wilayah berbasis tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, perlindungan lingkungan hidup,

ketahanan energi, air dan pangan, serta ketangguhan penanggulangan bencana dan perubahan iklim.



- 6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan,** Misi ini difokuskan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, utamanya antara Wilayah Utara – Selatan, Madura Kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar wilayah, dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Pemerataan pembangunan antar wilayah dilaksanakan untuk memperkuat akses pasar regional dan global serta mengurangi biaya logistik. Pembangunan wilayah yang mendukung pemerataan pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
- 7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan,** Misi ini difokuskan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan tangguh bencana, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sarana transportasi, sumber daya air, energi dan pendukung pengembangan sektor riil, pertanian serta kelautan.
- 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan,** Misi ini untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Jawa Timur melalui Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *Creative Finance*.

9.1.3 Visi Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

Harapan pembangunan Kabupaten Situbondo dalam 20 tahun kedepan dituangkan dalam Visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan jangka panjang dirumuskan dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan pada periode sebelumnya untuk melihat kondisi masa lampau dan kondisi saat ini, serta mempertimbangkan unsur kemungkinan yang akan terjadi pada 20 tahun kedepan yang diperoleh melalui telaah-telaah pada dokumen maupun publikasi hasil penelitian yang tentunya sedikit banyak akan memiliki pengaruh pada pembangunan di kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 20 tahun kedepan.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka dengan kondisi saat ini yang dirasa masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Situbondo untuk ikut andil dalam pembangunan regional secara khusus di Provinsi Jawa Timur dan pada pembangunan Nasional secara umumnya, maka dirumuskan Visi pembangunan sebagai berikut:

“Situbondo Berakhlak, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”

Visi tersebut memuat beberapa makna dimana terdapat 4 pokok visi meliputi “ Berakhlak”, “Sejahtera”, “Maju”, dan “Berkelanjutan”. Pokok Visi tersebut memuat makna bahwa seluruh pembangunan harus dilandaskan pada akhlak, baik pada proses pembangunan maupun dampak dari suatu pembangunan. Tujuan utama pembangunan harus dilandaskan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo, hal tersebut dicapai dengan memajukan berbagai aspek baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi.



Gambar 4. 5 Visi Kabupaten Situbondo
Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

Namun demikian upaya tersebut harus tetap memperhatikan unsur keberlanjutan pada setiap aspek tersebut, sehingga daya saing wilayah akan terbentuk dan menjadi amplifier atau pelipat ganda atas manfaat pembangunan kepada masyarakat di Kabupaten Situbondo. Makna tersirat dari visi tersebut adalah pembangunan yang ada di Kabupaten Situbondo harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di pusat pertumbuhan ekonomi maupun di daerah terdepan Kabupaten Situbondo yang berbatasan langsung dengan daerah lain.

Tabel 4. 1 Linieritas Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Situbondo

No	Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi 2025-2045	Visi RPJPD Kab. Situbondo 2025-2045
1	2	3	4
	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan	Situbondo Berakhlak, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan

Sumber: RPJPN, RPJPD Provinsi dan Data diolah



Perumusan Visi Pembangunan daerah tentunya tidak dapat terpisah dari kerangka pembangunan Nasional dan Regional, oleh karenanya, visi yang dirumuskan telah dilakukan penyelarasan terhadap Visi pembangunan pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Upaya penyelarasan dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyelarasan dimana terdapat muatan wajib yang harus diakomodi dalam RPJPD Kabupaten Situbondo. Secara nomenklatur atau redaksional visi di Kabupaten Situbondo telah memasukkan unsur wajib yaitu “Maju” dan “Berkelanjutan”. Dimana pada perumusan awal visi dipilih redaksional “Lestari” dan setelah dilakukan penyelarasan diubah menjadi berkelanjutan. Namun demikian, muatan substansi yang dimaksudkan adalah sama, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan atas penyesuaian dokumen RPJPD.



Gambar 4. 6 Visi, Sasaran dan Indikator Visi Kabupaten Situbondo

Sumber: Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

Muatan penyelarasan yang kedua adalah dengan menyelaraskan sasaran visi RPJPN yang berjumlah 5 sasaran visi kedalam RPJPD Kabupaten Situbondo. Proses penyelarasan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil sasaran visi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. PDRB Perkapita meningkat

Sasaran visi yang pertama adalah PDRB Perkapitan Meningkat, Sasaran visi ini ditetapkan mengingat PDRB Perkapita merupakan cerminan dari rata-rata pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB Perkapita menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat secara umum dalam menjalankan roda perekonomian. Namun demikian jika melihat kondisi saat ini, PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.



2. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan dibawah Jawa Timur

Sasaran visi yang kedua adalah dari perspektif tingkat kemiskinan dan ketimpangan, sasaran ini dipilih karena pendapatan perkapita tidak cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat hanya dari sisi gambaran ekonomi secara makro, namun harus dikonfirmasi dengan kondisi lain yang dapat menunjukkan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi tersebut, ditunjukkan dengan kemampuan ekonomi masyarakat pada kondisi yang sesungguhnya. Oleh karena hal tersebut, sasaran visi yang kedua adalah ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, namun demikian parameter keberhasilan yang diinginkan setidaknya adalah tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten Situbondo Lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dimana tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebagai gambaran rata-rata tingkat regional.

Pada sasaran visi yang kedua tidak hanya merujuk pada kondisi kemiskinan daerah, namun juga merujuk pada Kondisi ketimpangan, dimana ketimpangan dapat dilihat dari perspektif antar kelas pendapatan serta antar wilayah. Ketimpangan yang dimaksud disini adalah ketimpangan antar kelas pendapatan yang dilihat dari nilai indeks Gini Kabupaten Situbondo. Tingkat ketimpangan masih tetap menjadi fokus untuk pembangunan kedepan meskipun kondisi saat ini telah berada di bawah provinsi jawa timur karena jika disandingkan dengan kondisi lainnya seperti tingkat kemiskinan dan PDRB Perkapita, tingkat ketimpangan sangat berpotensi akan meningkat dikarenakan kawasan-kawasan potensial masih belum sepenuhnya terbangun, dan arus urbanisasi pada saat ini masih rendah.

3. Daya saing daerah meningkat

Pada sasaran visi selanjutnya, diharapkan Kabupaten Situbondo memiliki daya saing yang lebih baik, khususnya jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Daya saing yang dimaksud setidaknya dapat dilihat dari kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat serta pada sektor-sektor ekonomi produktif. Dengan demikian, dapat tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dan membuat Kabupaten Situbondo dapat lebih dipertimbangkan oleh daerah sekitar, baik dari sektor publik maupun pada sektor swasta yang ingin mengembangkan usahanya.

4. IPM Berada diatas Rata-rata Jawa timur

Sasaran visi selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia, indeks tersebut dipilih dalam sebagai alternatif tolok ukur kesejahteraan masyarakat yang mempertimbangkan 3 aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM melihat konsep kesejahteraan dengan memperhatikan faktor barier atau halangan yang mungkin dapat menghambat masyarakat berkembang secara mandiri. Dengan demikian jika faktor penghalang dapat diminimalisir, masyarakat dapat memiliki daya saing yang lebih baik. Jika nilai IPM dibandingkan antar wilayah dalam satu regional, maka dapat diketahui daya saing masyarakat Kabupaten Situbondo terhadap masyarakat di Kabupaten atau kota lainnya, khususnya pada daerah yang berbatasan secara langsung dengan batas wilayah Kabupaten Situbondo.

5. Terjaganya kualitas ekologi daerah

Sasaran visi selanjutnya adalah terjaganya kualitas ekologi daerah yang ditunjukkan dengan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta

Nilai Indeks Risiko Bencana yang semakin rendah. Dengan demikian, pembangunan yang ada di kabupaten situbondo dapat berlangsung dengan berkesinambungan.

Lima sasaran visi sebagaimana diuraikan sebelumnya telah disinkronkan dengan sasaran visi pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur yang memuat lima sasaran visi meliputi:

1. Sasaran visi RPJPN :
 - a. Pendapatan perkapita setara negara maju
 - b. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
 - c. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
 - d. Daya saing sumber daya manusia meningkat
 - e. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*
2. Sasaran visi RPJPD Provinsi Jawa Timur :
 - a. Peningkatan Pendapatan per Kapita
 - b. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
 - c. Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional
 - d. Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat
 - e. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Dilihat dari substansi yang dimuat dalam sasaran visi RPJPN dapat diketahui gambaran sinkronisasi antar dokumen dimana pada sasaran visi pertama memiliki substansi yang sama yaitu berkenaan dengan pendapatan perkapita, pada sasaran visi yang kedua sama memiliki substansi berkenaan dengan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, pada sasaran visi ketiga memiliki substansi berkenaan dengan kepemimpinan dan pengaruh terhadap daerah sekitar, hanya saja konteks wilayah pengaruhnya diturunkan menjadi level regional. Pada sasaran visi keempat sama memiliki substansi daya saing sumber daya manusia, dan pada sasaran visi terakhir sama sama memiliki substansi yang berkenaan dengan keberlanjutan secara lebih spesifik berkaitan dengan lingkungan. Berikut merupakan matriks penyelarasan sasaran visi pembangunan Kabupaten Situbondo dengan Nasional dan provinsi Jawa Timur.

Tabel 4. 2 Penyelarasan Sasaran Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,25-78,35	396,86-475,84	PDRB Perkapita Meningkat	PDRB Perkapita (Rp Juta)	7,02	100
		Kontribusi PDB maritim (%)	8,1	15		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	71,63	649,53				
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	29,99-30,14	36,27-36,88				
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	9,40 – 8,90	3,05 – 2,25	Tingkat kemiskinan dan ketimpangan dibawah Jawa Timur	Tingkat Kemiskinan (%)	10,8	0,82
		Rasio gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,290 – 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,381 – 0,386	0,319 – 0,370		Gini Rasio	0,31	0,25
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		Kontribusi PDRB Wilayah Selatan dan Kepulauan Jawa Timur (%)	14,19	12,36				
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 BESAR	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di kancah nasional	Indeks Daya Saing Daerah	3,78 (2023)	4,00	Daya saing Daerah Meningkat	ICOR	4,83	4,4
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,61	0,72	IPM Berada diatas Rata-rata Jawa timur	IPM	71	80,09
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	81,32	Terjaganya kualitas ekologi daerah	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	0,15	0,5
										Indeks Risiko Bencana	91,32	64,39

Sumber : RPJPN, RPJPD Provinsi dan Data diolah



10.1 Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi pembangunan jangka panjang merupakan jabaran atas visi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena hal tersebut dalam rangka perumusan misi pembangunan, tidak dapat terlepas dari point-point penting yang termuat dalam sasaran visi pembangunan. Berdasarkan pada sasaran visi yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan 8 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi sosial berkeadilan
2. Mewujudkan Transformasi ekonomi inklusif
3. Mewujudkan Transformasi layanan publik berdampak
4. Mewujudkan birokrasi yang tangguh dan adaptif
5. Memantapkan Stabilitas wilayah dan ketertiban umum
6. Mewujudkan Pemerataan infrastruktur dan sarpras berkualitas
7. Memantapkan Ketahanan nilai budaya dan karakter daerah
8. Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi

Berikut merupakan urian secara lebih detail tentang delapan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045:

1. Mewujudkan Transformasi sosial berkeadilan

Pembangunan kedepan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan asas keadilan yang menitikberatkan pada akses dan kualitas pelayanan, sehingga seluruh lapisan masyarakat mampu untuk mengakses layanan tersebut.

2. Mewujudkan Transformasi ekonomi inklusif

Pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada sektor unggulan daerah, dan digerakkan oleh sumberdaya terampil daerah. Pembangunan ekonomi mampu didukung oleh infrastruktur penunjang perekonomian yang mumpuni dan mampu mempermudah akselerasi pertumbuhan pelaku usaha baik yang memiliki skala usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Dengan demikian, maka manfaat atas pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

3. Mewujudkan Transformasi layanan publik berdampak.

Pelayanan publik yang mampu memberikan layanan yang bermakna, relevan, dan efektif kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang berdampak didukung oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, dan pengukuran kinerja. Pengambilan keputusan yang efisien memerlukan analisis data yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan kinerja sektor publik.

4. Mewujudkan birokrasi yang tangguh dan adaptif

Birokrasi yang mampu menunjang tatakelola pemerintahan dengan efisien, serta memiliki ketahanan yang baik, baik dari segi kemandirian fiskal maupun kecepatan dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Responsivitas adaptasi ditunjang dengan kematangan dalam penguasaan teknologi informasi yang ditunjukkan dengan dominasi atau pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Memantapkan Stabilitas wilayah dan ketertiban umum

Stabilitas wilayah yang dapat terjaga dari baik dari potensi bencana alam maupun dari konflik atau gejolak sosial. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya kemandirian, ketertiban serta toleransi masyarakat. Selain itu, kualitas manajemen bencana pemerintah serta kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap kebencanaan juga semakin meningkat, sehingga seluruh potensi bencana dapat diminimalisir baik dari segi kejadian maupun kerugian yang ditimbulkan.

6. Mewujudkan Pemerataan infrastruktur dan sarpras berkualitas

Infrastruktur yang mampu memberikan nilai tambah pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Nilai tambah yang dimaksud diantaranya adalah efisiensi waktu, dan keamanan dan keberlanjutannya. Keberlanjutan yang dimaksud adalah dari segi ketersediaan atau keberlangsungan infrastruktur itu sendiri, serta dampak dari pembangunannya yang masih ramah lingkungan. Infrastruktur juga dapat memperkecil ketimpangan antar wilayah. Dengan demikian diharapkan berbagai sektor berkembang dengan lebih cepat.

7. Memantapkan Ketahanan nilai budaya dan karakter daerah

Pembangunan kebudayaan dengan menempatkan budaya selain sebagai nilai sosial masyarakat juga sebagai suatu hal yang memiliki nilai tambah dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Hal tersebut tercermin dari lestariannya sejarah dan kearifan lokal, nilai luhur kebudayaan lokal, kesenian tradisi masyarakat serta cagar budaya di Kabupaten Situbondo. Penguatan aspek budaya juga melibatkan pembangunan karakter masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, agama, maupun norma sosial lainnya. Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kemajuan pembangunan di Kabupaten Situbondo

8. Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi

Keseimbangan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan dengan praktik yang ramah lingkungan namun dapat memberikan dampak yang baik secara luas pada masyarakat. Lingkungan hidup khususnya dari segi ekologi yang dapat tetap terjaga dan mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat baik yang menetap di Kabupaten Situbondo maupun pendatang.

Seperti halnya pada proses perumusan visi yang harus memperhatikan visi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi, pada perumusan misi pembangunan juga harus mengakomodir substansi pada setiap misi pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa proses penyelarasan dilakukan dengan memastikan substansi dapat diakomodir, maka dalam hal ini secara kuantitas atau jumlah misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Situbondo dapat dikatakan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah misi pembangunan pada RPJPN. Namun demikian substansi yang dimaksud dalam 8 misi pembangunan yang dibagi kedalam 3 agenda (Transformasi Indonesia, Landasan Transformasi, dan kerangka Implementasi) dapat diakomodir kedalam 4 misi pembangunan di Kabupaten Situbondo.

Tabel 4. 3 Penyalarsan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Situbondo

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kabupaten 2025-2045
	Kelompok Agenda/ Misi	Agenda/ Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi sosial berkeadilan
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi ekonomi inklusif
3		Transformasi tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Mewujudkan Transformasi layanan publik berdampak Mewujudkan birokrasi yang tangguh dan adaptif
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Memantapkan Ketahanan nilai budaya dan karakter daerah
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan Stabilitas wilayah dan ketertiban umum
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Mewujudkan Pemerataan infrastruktur dan sarpras berkualitas
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi

Sumber : RPJPN, RPJPD Provinsi dan Data diolah



Dilihat dari substansi 8 misi pembangunan nasional dapat ditarik kesimpulan bahwa 2 misi pembangunan pada agenda landasan transformasi adalah misi dalam rangka menjaga stabilitas wilayah, sehingga dalam konteks misi pembangunan di kabupaten Situbondo sudah diakomodir dalam misi lima dan tujuh yaitu "Memantapkan Stabilitas wilayah dan ketertiban umum" dan "Memantapkan Ketahanan nilai budaya dan karakter daerah". Sedangkan pada kerangka implementasi terdapat 3 misi pembangunan namun dapat diakomodir dalam 2 misi pembangunan di Kabupaten Situbondo yaitu berkenaan dengan pemantapan pembangunan dan pemerataan pembangunan baik dari segi ekonomi dan infrastruktur yang dimuat dalam misi RPJPN "Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan", dan misi "Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan", kedua misi tersebut telah diakomodir dalam misi 6 RPJPD Kabupaten Situbondo yaitu "Mewujudkan Pemerataan infrastruktur dan sarpras berkualitas" serta substansi kedua adalah berkenaan dengan kesinambungan pembangunan yang dalam RPJPD Kabupaten Situbondo Diakomodir dalam misi 8 yaitu "Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi".

RPJPD

2025 - 2045

KABUPATEN SITUBONDO



BAB 5

**ARAH KEBIJAKAN DAN
SASARAN POKOK**

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Situbondo dibagi kedalam 4 periode pembangunan yang yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. Arah kebijakan pada setiap periode tersebut berbeda-beda. Arah kebijakan secara makro pada setiap periode adalah sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045
Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

Arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam arah kebijakan yang lebih mikro pada setiap Misi RPJPD Kabupaten Situbondo. Berikut merupakan arah kebijakan setiap periode perencanaan pada 8 misi RPJPD:

1. Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial Berkeadilan

a. 2025-2029 : Pemenuhan pelayanan dasar

Pembangunan pada periode pertama RPJPD khususnya pada misi 1 diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan akses terhadap sanitasi layak sangat diprioritaskan pada periode pertama mengingat masih belum semua masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta sistem pengelolaannya menjadi penting untuk dituntaskan pada periode pertama karena menjadi prasyarat dalam percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Khusus pada pelayanan kesehatan, pada periode ini selain diupayakan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat juga diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat.

b. 2030-2034 : Akselerasi kesejahteraan sosial

Pada periode kedua, transformasi sosial diarahkan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kondisi ini, diasumsikan bahwa seluruh masyarakat telah mampu mengakses pelayanan dasar yang esensial sebagaimana yang difokuskan pada periode pertama. Namun demikian, pada periode ini masih dilaksanakan upaya-upaya dalam pemenuhan pelayanan dasar meskipun memiliki porsi yang lebih kecil. Upaya percepatan dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing SDM serta upaya preventif terhadap risiko yang mampu berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat seperti mempercepat proses pengendalian penyakit menular dan meningkatkan edukasi masyarakat dalam kesehatan sebagai upaya untuk menanggulangi peningkatan kejadian penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup masyarakat.



c. 2035-2039 : Penguatan kesejahteraan masyarakat

Periode ketiga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui penguatan infrastruktur penunjang kebutuhan dasar masyarakat. Penguatan kesejahteraan dilaksanakan dengan memperkuat pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta pemenuhan infrastruktur sosial di masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud ditujukan pada kelompok rentan, sedangkan pada pemenuhan infrastruktur sosial diarahkan untuk dapat menjadi infrastruktur yang ramah lansia.

d. 2040-2045 : Meningkatkan kesetaraan sosial

Transformasi sosial pada periode keempat RPJPD diarahkan untuk peningkatan kesetaraan sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesetaraan dilaksanakan dengan mengurangi disparitas atau ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan lainnya. Seluruh pelayanan publik, khususnya pada pelayanan dasar dapat diberikan dengan tidak membedakan latar belakang masyarakat, baik dari jenis kelamin, suku, maupun usia masyarakat sehingga pembangunan sosial dapat terwujud dengan inklusif.

2. Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif

Dalam Mewujudkan Misi “Transformasi Ekonomi Inklusif” dalam Pembangunan jangka Panjang di Kabupaten Situbondo, maka adapun upaya yang perlu dilakukan terbagi dalam 4 periode arah kebijakan pembangunan. Adapun arah kebijakan pada misi 2 antara lain:

a. 2025-2029 : Pembangunan Sumber Daya Sektor-sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial Penunjang Produktivitas dan Nilai Tambah Produksi.

Pada arah kebijakan periode pertama ini difokuskan terhadap pembangunan sumber daya seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaku industri, UMKM maupun pada sumber daya manusia pada sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, pembangunan sumber daya juga difokuskan terhadap penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana produksi dan pengolahan. Penyediaan infrastruktur penunjang distribusi dan konektivitas antar kawasan ekonomi juga menjadi fokus pembangunan ekonomi dalam periode ini. Dalam menunjang pada segi kapasitas usaha, pada periode ini juga pembangunan iklim investasi juga menjadi fokus pembangunan di arah kebijakan.

b. 2030-2034 : Pengembangan Sistem Konektivitas antar Kawasan Ekonomi dalam Rangka Hilirisasi Industri Berbasis Agropolitan dan Pariwisata.

Pada arah kebijakan periode kedua ini adalah melakukan akselerasi ekonomi setelah sumber daya pada sektor ekonomi telah dibangun pada periode pertama. Adapun Pengembangan Sistem Konektivitas antar Kawasan Ekonomi dalam Rangka Hilirisasi Industri Berbasis Agropolitan dan Pariwisata di Kabupaten Situbondo adalah melalui pengintegrasian antar kawasan ekonomi sehingga adanya konektivitas antara produk mentah seperti hasil pertanian dan perikanan dengan industri pengolahan serta dengan jaringan perdagangan. Selain itu, Kabupaten Situbondo mempunyai potensi pariwisata yang besar maka pengembangan pariwisata didorong juga bersama dengan industri pariwisata yang ada seperti produk ekonomi kreatif dan hasil produk UMKM maupun industri di Kabupaten Situbondo.

c. 2035-2039 : Peningkatan Daya Saing Produk Berorientasi Eksport

Pada arah kebijakan ini, peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk guna peningkatan eksport daerah baik skala regional, nasional dan internasional. Selain peningkatan kualitas produk dan pemasaran, juga difokuskan dalam pengembangan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna dalam produksi pada sektor-sektor ekonomi sehingga memberikan penguatan dalam daya saing produk. Peningkatan nilai investasi juga menjadi fokus pembangunan pada arah kebijakan ini dikarenakan dengan adanya investasi dapat memberikan peningkatan kapasitas usaha daerah dalam melakukan pengembangan produk maupun perluasan jaringan pemasaran.

d. 2040-2045 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo yang Berkualitas dan Berkelanjutan

yaitu peningkatan wilayah wilayah pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Situbondo melalui pengembangan daya saing BUMDES maupun pengembangan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berdampak

a. 2025-2029 : Efisiensi Pengambilan Kebijakan untuk penguatan Transformasi Tata Kelola berorientasi layanan publik Berdampak

Pelayanan publik yang berdampak adalah upaya pemerintah atau lembaga lainnya untuk memberikan layanan yang bermakna, relevan, dan efektif kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang berdampak didukung oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, dan pengukuran kinerja. Pengambilan keputusan yang efisien memerlukan analisis data yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan kinerja sektor publik. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi dan solusi yang tepat. Pengambilan keputusan yang baik harus melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih akurat. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan penting untuk membangun kepercayaan serta dapat menghindari bias dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.

b. 2030-2034 : Implementasi tata Kelola pemerintahan berbasis

***collaborative digital government* melalui Penguatan digitalisasi**

Implementasi *collaborative digital government* melibatkan serangkaian langkah strategis dan praktis untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu langkah strategi adalah menentukan visi dan strategi yang jelas untuk *collaborative digital government*. Visi ini harus mencakup tujuan-tujuan jangka panjang dan prinsip-prinsip yang akan membimbing implementasi selanjutnya. Membangun kerja sama antarlembaga pemerintah untuk memastikan koordinasi yang baik dalam pengembangan dan implementasi inisiatif digital.

c. 2035-2039 : Penguatan *collaborative digital government* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif

Penguatan pemerintahan digital kolaboratif melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan partisipasi publik, efisiensi administrasi, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Membangun infrastruktur TIK yang kuat dan andal menjadi langkah awal. Memanfaatkan analitik data untuk memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah.

d. 2040-2045 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan adaptif berorientasi layanan publik Berdampak

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif melibatkan berbagai langkah dan strategi untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, merespons perubahan lingkungan dengan cepat, dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan partisipasi publik. Ini termasuk implementasi sistem *e-government*, pembangunan platform kolaborasi, dan penyediaan layanan publik secara digital. Menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan, baik itu perubahan politik, ekonomi, sosial, atau teknologi. Pemerintah harus dapat beradaptasi dengan cepat dan mengubah strategi serta kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

4. Misi 4: Mewujudkan Birokrasi yang Tangguh dan adaptif

a. 2025-2029 : Meningkatkan Kemandirian fiskal daerah

Arah kebijakan pada periode pertama RPJPD diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal daerah dilaksanakan dengan intensifikasi penerimaan asli daerah baik dari pajak dan retribusi daerah.

b. 2030-2034 : Optimalisasi belanja pemerintah

Pada periode kedua diarahkan untuk mengoptimalkan belanja pemerintah daerah. Optimalisasi dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah serta mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan inovatif lainnya seperti KPBU dan *Blended finance*.

c. 2035-2039 : Tatakelola pemerintahan berbasis *collaborative digital government*

Pada periode ketiga RPJPD, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang tangguh diarahkan untuk meningkatkan kolaborasi layanan pemerintah berbasis digital. Pada periode ini lebih difokuskan untuk meningkatkan literasi digital baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat secara umum. Selain itu, pemenuhan infrastruktur penunjang dapat dipenuhi baik yang berbentuk perangkat keras, maupun perangkat lunak. Hal tersebut dimaksudkan supaya seluruh pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dapat tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

d. 2040-2045 : Penguatan partisipasi masyarakat

Pada periode keempat RPJPD, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya yang melibatkan teknologi informasi. Partisipasi yang dimaksud adalah dalam keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital. Dengan demikian, pelayanan berbasis digital serta otomatisasi layanan yang memanfaatkan AI maupun IoT dapat berjalan optimal.

5. Misi 5: Memantapkan Stabilitas Wilayah dan Ketertiban Umum

Dalam Mewujudkan Misi Stabilitas wilayah dan ketertiban umum pada Pembangunan jangka Panjang di Kabupaten Situbondo, maka adapun upaya yang perlu dilakukan terbagi dalam 4 periode arah kebijakan pembangunan. Adapun arah kebijakan pada misi 5 antara lain:

a. 2025-2029 : Pembangunan Kelembagaan dan Jaringan Sosial dalam Menunjang Keamanan dan Ketertiban Daerah

Dalam hal ini difokuskan terhadap pembangunan kelembagaan pada organisasi masyarakat maupun partai politik dalam membangun ketentraman dan ketertiban daerah serta peningkatan solidaritas dan toleransi pada seluruh elemen masyarakat. Selain itu, pada arah kebijakan periode ini juga di fokuskan terhadap pembangunan jaringan sosial dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebencanaan alam maupun sosial.

b. 2030-2034 : Pengembangan Mitigasi Kebencanaan Alam dan Sosial Daerah

Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, serta membangun kerukunan dan ketertiban masyarakat berlandaskan nilai sosial dan budaya masyarakat.

c. 2035-2039 : Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Daerah dalam Mendukung Daya Saing Daerah

Penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban yang difokuskan terhadap titik tertentu masih terdapat kejadian konflik sosial maupun bencana alam. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah pada periode ini diharapkan mampu untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.

d. 2040-2045 : Penguatan Modal Sosial Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan dan Stabilitas Daerah

Melalui ketercapaian mitigasi bencana pada masyarakat yang sudah berjalan dengan baik serta dengan adanya solidaritas dan toleransi masyarakat berlandaskan nilai lokal masyarakat dapat memberikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan stabilitas daerah.

6. Misi 6: Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana berkualitas

a. 2025-2029 : Akselerasi penyediaan infrastruktur yang merata

Akselerasi dalam penyediaan infrastruktur yang merata memiliki peran penting, terutama dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan

Ekonomi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang dan jasa, memungkinkan lebih banyak sektor ekonomi untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan infrastruktur, akselerasi penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas dapat membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

b. 2030-2034 : Pemerataan kualitas infrastruktur di wilayah Situbondo

Infrastruktur yang berkualitas rendah atau tidak merata dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga Pemerataan kualitas infrastruktur memastikan bahwa semua wilayah memiliki akses yang sama ke layanan dan fasilitas penting seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan energi. Infrastruktur yang merata dan berkualitas menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memberikan akses yang lebih baik, maka peluang ekonomi dan pemerataan infrastruktur membantu memperkuat daya saing wilayah yang sebelumnya terpinggirkan akan memungkinkan partisipasi lebih luas dalam aktivitas ekonomi.

c. 2035-2039 : Pemantapan Infrastruktur berkelanjutan sebagai penunjang pertumbuhan daerah penyangga

Infrastruktur yang berkelanjutan di daerah penyangga memungkinkan distribusi pertumbuhan ekonomi dari pusat ke wilayah-wilayah sekitarnya. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memperkuat ekonomi lokal dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan tidak hanya memfasilitasi transportasi barang dan orang, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Dengan infrastruktur yang memadai, daerah penyangga dapat menarik lebih banyak investasi swasta, mempercepat pertumbuhan sektor industri dan jasa, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal.

d. 2040-2045 : Mengembangkan titik tumbuh baru melalui Optimalisasi infrastruktur penunjang daerah penyangga

Dengan mengoptimalkan infrastruktur penunjang di daerah penyangga, daerah dapat menciptakan titik-titik tumbuh baru di luar pusat kota. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan dan menciptakan diversifikasi ekonomi yang penting untuk ketahanan ekonomi jangka panjang. Optimalisasi infrastruktur di daerah penyangga mendorong pengembangan wilayah yang lebih merata. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi dapat menjadi lebih terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi dan pasar regional, memungkinkan pengembangan potensi ekonomi lokal.

7. Misi 7: Memantapkan Ketahanan Nilai Budaya Dan Karakter Daerah

Dalam Mewujudkan Misi “Ketahanan Nilai Budaya Dan Karakter Daerah” dalam Pembangunan jangka Panjang di Kabupaten Situbondo, maka adapun upaya yang perlu dilakukan terbagi dalam 4 periode arah kebijakan pembangunan. Adapun arah kebijakan pada misi 7 antara lain:

a. 2025-2029 : Pembangunan Literasi Budaya dan Penguatan Nilai Lokal Masyarakat

yaitu melalui pelestarian sejarah dan kearifan lokal, nilai luhur kebudayaan lokal, kesenian tradisi masyarakat serta cagar budaya di Kabupaten Situbondo. Selain itu, pada arah kebijakan periode pertama ini juga difokuskan terhadap pembangunan sarana prasana penunjang dalam rangka pengelolaan kebudayaan dan nilai lokal masyarakat sehingga pelestarian dan pemanfaatan budaya dapat secara baik berkembang di masyarakat. Pembangunan literasi budaya ini juga melalui pembangunan sumber daya manusia pada pelaku budaya, pengelola cagar budaya serta pembangunan pendidikan kebudayaan bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda.

b. 2030-2034 : Pengembangan Kebudayaan Sebagai Modal Sosial dalam Penguatan Karakteristik Daerah dan Nilai Ekonomis

Pengembangan Kebudayaan Sebagai Modal Sosial dalam Penguatan Karakteristik Daerah dan Nilai Ekonomis yaitu dengan semakin meningkatkan pembangunan kebudayaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai nilai lebih bagi masyarakat Kabupaten Situbondo dalam penguatan nilai solidaritas dan kerukunan masyarakat, sebagai *city branding* Kabupaten Situbondo, serta digunakan sebagai modal atraksi dalam pengembangan pariwisata maupun pengembangan nilai jual produk unggulan daerah.

c. 2035-2039 : Peningkatan Pemanfaatan Kebudayaan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah

Peningkatan Pemanfaatan Kebudayaan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah yaitu melalui peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan kebudayaan lokal Kabupaten Situbondo dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat Kabupaten Situbondo dalam pengenalan nilai sosial dan kebudayaan masyarakat Situbondo. Selain itu juga sekaligus sebagai nilai lebih dalam pemasaran produk unggulan Kabupaten Situbondo pada lingkup skala regional, nasional maupun internasional.

d. 2040-2045 : Meningkatkan pembangunan budaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan budaya

Upaya pembangunan budaya dengan melihat budaya selain sebagai nilai sosial masyarakat juga memiliki nilai tambah dalam pemanfaatan kebudayaan Kabupaten Situbondo yang beragam. Dengan demikian, kebudayaan di Kabupaten Situbondo dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kemajuan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

8. Misi 8: Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi

a. 2025-2029 : Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Pengendalian Pencemaran

Kelestarian dan ketahanan ekologi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Ekosistem yang sehat memberikan berbagai layanan yang penting, seperti penyediaan air bersih, udara bersih, penyerapan karbon, dan kontrol banjir. Melalui pengendalian pencemaran, dapat memastikan bahwa layanan-layanan ini tetap tersedia dalam jangka panjang.

b. 2030-2034 : Penguatan regulasi dan partisipasi dalam Pelestarian Lingkungan

Penguatan regulasi dan partisipasi dalam pelestarian lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan. Regulasi lingkungan yang kuat membantu melindungi sumber daya alam yang terbatas, sehingga dapat mengendalikan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan yang dapat mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan lingkungan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pembentukan masa depan lingkungan.

c. 2035-2039 : Pemanfaatan Kelestarian dan ketahanan ekologi dalam persaingan global

Kelestarian dan ketahanan ekologi menjamin pasokan jangka panjang dari sumber daya alam, termasuk air bersih, tanah subur, dan bahan baku lainnya. Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi fluktuasi pasar global dan perubahan lingkungan. Fokus pada kelestarian mendorong inovasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dapat meningkatkan daya saing di pasar global serta mengurangi risiko jangka panjang terkait dengan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakstabilan pasokan sumber daya.

d. 2040-2045 : Optimalisasi Kelestarian dan ketahanan ekologi dalam Pembangunan

Menerapkan prinsip kelestarian dan ketahanan ekologi membantu mempertahankan keseimbangan pembangunan. Mengoptimalkan kelestarian dan ketahanan ekologi membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Selain itu Kelestarian ekologi dapat memberikan peluang ekonomi baru, seperti pariwisata ekologi, pertanian organik, atau pengembangan energi terbarukan. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Table 5.1: Arah Kebijakan Makro pada Masing-Masing Periode RPJPD

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Situbondo Berakhlak, Sejahtera, maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi sosial berkeadilan	Pemenuhan pelayanan dasar	Akselerasi kesejahteraan sosial	Penguatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kesetaraan sosial
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif	Pembangunan Sumber Daya Sektor-sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial Penunjang Produktivitas dan Nilai Tambah Produksi	Pengembangan Sistem Konektivitas antar Kawasan Ekonomi dalam Rangka Hilirisasi Industri Berbasis Agropolitan dan Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Produk Berorientasi Eksport	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berdampak	Efisiensi Pengambilan Kebijakan untuk penguatan Transformasi Tata Kelola berorientasi layanan publik Berdampak	Implementasi tata Kelola pemerintahan berbasis <i>collaborative digital government</i> melalui Penguatan digitalisasi	Penguatan <i>collaborative digital government</i> untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan adaptif berorientasi layanan publik Berdampak
	Mewujudkan Birokrasi yang Tangguh dan adaptif	Meningkatkan Kemandirian fiskal daerah	Optimalisasi belanja pemerintah	Tatakelola pemerintahan berbasis <i>collaborative digital government</i>	Penguatan partisipasi masyarakat
	Memantapkan Stabilitas Wilayah dan Ketertiban Umum	Pembangunan Kelembagaan dan Jaringan Sosial dalam Menunjang Keamanan dan Ketertiban Daerah	Pengembangan Mitigasi Kebencanaan Alam dan Sosial Daerah	Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Daerah Dalam Mendukung Daya Saing Daerah	Penguatan Modal Sosial Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan dan Stabilitas Daerah
	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana berkualitas	Akselerasi penyediaan infrastruktur yang merata	Pemerataan kualitas infrastruktur di wilayah situbondo	Pemantapan Infrastruktur berkelanjutan sebagai penunjang pertumbuhan daerah penyangga	Mengembangkan titik tumbuh baru melalui Optimalisasi infrastruktur penunjang daerah penyangga
	Memantapkan Ketahanan Nilai Budaya dan Karakter daerah	Pembangunan Literasi Budaya dan Penguatan Nilai Lokal Masyarakat	Pengembangan Kebudayaan Sebagai Modal Sosial dalam Penguatan Karakteristik Daerah dan Nilai Ekonomis	Peningkatan Pemanfaatan Kebudayaan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan pembangunan budaya melalui pengelolaan dan pemafaatan budaya
	Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Pengendalian Pencemaran	Penguatan regulasi dan partisipasi dalam Pelestarian Lingkungan	Pemanfaatan Kelestarian dan ketahanan ekologi dalam persaingan global	Optimalisasi Kelestarian dan ketahanan ekologi dalam Pembangunan

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)



Selain kebijakan secara makro tersebut, pada RPJPD Kabupaten Situbondo juga telah dirumuskan rincian kebijakan yang lebih mikro untuk mempermudah proses harmonisasi dengan dokumen perencanaan pada level dibawahnya dalam hal ini adalah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap periodesasinya. Arah kebijakan secara lebih terprtinci menurut periode dan misi pembangunan RPJPD yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 : Alternatif Arah Kebijakan Mikro menurut Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Situbondo

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
MISI 1 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL BERKEADILAN	1	Perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar
	2	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau
	3	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan
	4	Resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan anak (termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang)
	5	peningkatan kualitas dan kuantitas peran dan fungsi kelembagaan yang menangani perlindungan perempuan dan anak
	6	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial
	7	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif
	8	Pemerataan kuantitas dan kualitas pada satuan pendidikan
	9	Pendekatan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dari bayi sampai dengan lansia
	10	Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkesinambungan
	11	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan <i>universal coverage</i>
	12	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	13	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
	14	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
	15	Peningkatan mutu layanan yang terstandarisasi terakreditasi dan berkesinambungan
	16	Pemerataan kebutuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
	17	Percepatan penurunan stunting dan pencegahan stunting
	18	Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular
	19	Peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan



Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	20	Peningkatan ketahanan tanggap darurat kesehatan
	21	Pemerataan serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana
	22	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik dan mahasiswa, khususnya bagi masyarakat Situbondo berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	23	Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang berkualitas dan berkeadilan
	24	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
	25	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
	26	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
	27	Fasilitasi peningkatan akses Pendidikan menengah dan tinggi
	28	Menerapkan program Perlindungan sosial dan jaminan sosial seperti bantuan pangan, dan program bantuan lainnya kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan
	29	Memberikan edukasi, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan pilar Kesejahteraan Sosial agar berdaya dan mandiri
	30	Membentuk mekanisme pengawasan dan pelaporan yang memungkinkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk melaporkan pelanggaran hak dan diskriminasi
	31	Melakukan kegiatan pasar murah untuk pangan bergizi supaya dapat terjangkau oleh semua elemen Masyarakat
	32	Penganekaragaman konsumsi pangan atau diversifikasi pangan
	33	Memberikan edukasi mengenai PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) dan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) pada masyarakat
	34	Pemutakhiran dan pendataan masyarakat miskin melalui mekanisme berjenjang dan musyawarah dari desa
	35	Penguatan budaya Baca dan literasi melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
	36	Pemetaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan akreditasi perpustakaan
	37	Penguatan Kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	38	Peningkatan keamanan dan kemudah akses arsip melalui digitalisasi kearsipan pada semua Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta Lembaga Lainnya
	39	penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta jaminan sosial komprehensif
	40	penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam penataan persebaran dan penggerakan mobilitas penduduk
	41	penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam pembangunan keluarga
	42	penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dalam penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan
	43	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk
	44	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
	45	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
MISI 2 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI INKLUSIF	1	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan, serta adopsi teknologi dan inovasi
	2	Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian
	3	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku
	4	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
	5	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)
	6	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	7	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
	8	Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan dan pertanian (penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi, serta penguatan kolaborasinya dengan pasar, bank, dan asuransi)
	9	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
	10	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak
	11	Penguatan infrastruktur penunjang produktivitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan
	12	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan
	13	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
	14	Peningkatan produktivitas BUMD
	15	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan perkotaan (<i>urban tourism</i>) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Situbondo.
	16	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
	17	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
	18	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
	19	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan / <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)
	20	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> . Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya. Penyediaan akses telekomunikasi dan digital. Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri
	21	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	22	Hilirisasi produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
	23	Melakukan pemberdayaan masyarakat yang kurang sejahtera melalui pembinaan wirausaha secara berkelanjutan
	24	Meningkatkan pembinaan terhadap IKM, UMKM dan Usaha Kreatif di Kabupaten Situbondo, termasuk memfasilitasi adanya kerja sama dengan pihak luar
	25	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
	26	Mendorong peningkatan investasi dan adanya investasi oleh pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah
	27	Fasilitasi pelaku usaha lokal dalam pengembangan usaha dan pemenuhan legalitas formal usaha
	28	Mendorong keikutsertaan pekerja ke dalam program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
	29	Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan perusahaan/ pelaku usaha, dan dunia pendidikan sebagai fasilitasi penempatan tenaga kerja lokal
	30	Pelaksanaan pelatihan vokasi dan transisi <i>school to work</i>
	31	Mendorong percepatan penurunan angka pengangguran terbuka melalui fasilitasi pengiriman transmigran yang produktif
	32	Mendorong para petani lokal untuk mengembangkan tanaman pangan organik sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi
	33	Pemerintah menyediakan berbagai alternatif untuk kebutuhan pangan Masyarakat dapat tercukupi, melalui peningkatan produktivitas pangan dan menjamin ketersediaan pangan
	34	Optimalisasi capaian Desa Mandiri
	35	Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
MISI 3 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK BERDAMPAK	1	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
	2	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat
	3	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran



Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	4	Transformasi sistem penuntutan menuju <i>single prosecution system</i> dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai <i>advocaat generaal</i>
	5	Memberikan edukasi mengenai pentingnya kebebasan berpendapat dalam lingkup publik
	6	Melakukan komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan untuk menampung pendapat/aspirasi Masyarakat
	7	Memberikan akses atau transparansi informasi publik kepada seluruh kalangan Masyarakat
	8	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
	9	mendekatkan pelayanan adminduk ke tingkat desa
	10	Optimalisasi inovasi pelayanan adminduk
	11	Memaksimalkan kepemilikan dokumen adminduk
	12	Perluasan kerjasama pemanfaatan data adminduk
MISI 4 : MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG TANGGUH DAN ADAPTIF	1	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)
	2	Pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU
	3	Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan
	4	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
	5	Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
	6	Fasilitasi akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis
	7	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
	8	Meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)
	9	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	10	Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi
	11	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
	12	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	13	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok
	14	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Situbondo, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Situbondo yang profesional dan bebas korupsi
	15	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	16	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	17	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Daerah
MISI 5 : MEMANTAPKAN STABILITAS WILAYAH DAN KETERTIBAN UMUM	1	Penguatan ketangguhan area pesisir terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob, abrasi dan banjir.
	2	Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir
	3	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim
	4	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
	5	Peningkatan penegakan perda yang mendukung pada pengawasan, pengendalian, keamanan dan ketertiban
	6	Penguatan optimalisasi terkait strukturisasi kelembagaan keamanan dan ketertiban
	7	peningkatan upaya pengendalian dan ketertiban masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan terpadu
	8	peningkatan kapasitas kompetensi dan kebutuhan SDM dalam upaya perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat
	9	peningkatan sarana dan prasarana pendukung penegakan ketertiban dan keamanan
	10	pemetaan mitigasi ketertiban dan keamanan
	11	Pembinaan dan penguatan partai politik
	12	Penguatan edukasi dan partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu
	13	Menjaga kondusivitas keamanan daerah
	14	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
		literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
	15	Pembangunan dan penguatan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Pencegahan Bencana, khususnya pada wilayah rawan bencana
	16	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana dan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana
	17	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA BERKUALITAS	1	Pengembangan kawasan strategis pertanian yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian
	2	Pengembangan sentra produksi pangan kolektif antarwilayah berbasis teknologi ramah lingkungan
	3	Pengembangan perikanan yang berkelanjutan baik tangkap maupun budidaya
	4	Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri
	5	Pengembangan interkoneksi terhadap kawasan perkotaan untuk meningkatkan akses pasar dan informasi
	6	Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah
	7	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
	8	Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (<i>electric vehicles</i>)
	9	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
	10	Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/ pengumpan/ lokal
	11	Menjaga keandalan infrastruktur penunjang ekonomi khususnya pada sektor strategis
	12	Penyediaan infratsruktur inklusif (Ramah anak dan Lansia)
	13	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat
	14	Menjaga daerah sumber mata air bersih dan resapan air sebagai Upaya untuk menjaga sumber air minum yang berkelanjutan.
	15	Menambah pasokan air baku
	16	Perluasan jaringan sumber daya air
	17	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	18	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik)
MISI 7 : MEMANTAPKAN KETAHANAN NILAI BUDAYA DAN KARAKTER DAERAH	1	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial
	2	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
	3	Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, kesenian dan tradisi masyarakat
	4	Pelestarian Sejarah dan kearifan Lokal, nilai budaya, kesenian dan tradisi masyarakat Situbondo
	5	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
	6	Penelusuran dan pelestarian naskah kuno
	7	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	8	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria
	9	Penguatan nilai-nilai positif budaya lokal dalam menjaga pola konsumsi masyarakat
	10	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
	11	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
MISI 8 : MEWUJUDKAN KELESTARIAN DAN KETAHANAN EKOLOGI	1	Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan
	2	Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan
	3	Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut
	4	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
	5	Penerapan kebijakan <i>Zero Delta Q</i>
	6	Penguatan kerja sama antar daerah sekitar dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem
	7	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan
	8	Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui regulasi dan insentif yang efektif

Misi	Alternatif Arah Kebijakan	
	9	Pengendalian alih fungsi lahan dan mempertahankan/meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	10	Meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk mengelola daerah sekitar Sungai dari segala macam pencemaran (khususnya: sampah dan kotoran manusia/hewan)
	11	Penguatan kolaborasi lintas stakeholder dalam mengelola Daerah aliran sungai
	12	penguatan Pengawasan atau kontrol terhadap perusahaan industri dalam menangani pengelolaan limbah B3
	13	Penguatan literasi berkenaan dengan limbah B3 dan persampahan bagi masyarakat (melakukan pengelolaan dan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah)
	14	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir yang berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
	15	Pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok pembangunan merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai melalui implementasi misi pembangunan yang dioperasionalkan melalui arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap periodenya. Perumusan sasaran pokok didasarkan pada misi pembangunan jangka panjang, sehingga linieritasnya disusun berdasarkan misi pembangunan bukan pada arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut merupakan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Situbondo yang disajikan berdasarkan misi pembangunan jangka panjang daerah:

MISI 1: Mewujudkan Transformasi sosial berkeadilan

1. Meningkatnya Daya Saing SDM

Dalam menghadapi tren globalisasi dan kemajuan teknologi, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi krusial. Penyempurnaan sistem pendidikan yang mengintegrasikan keterampilan digital dan pemikiran kritis akan mempersiapkan individu untuk bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan akan mendorong inovasi dan penciptaan nilai tambah, sehingga daya saing SDM di Kabupaten Situbondo semakin meningkat dan dapat memperlebar peluang atas peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Terjaminnya Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi penting untuk memastikan inklusi dan keadilan sosial. Pengembangan sistem kesehatan dan pendidikan yang universal dan berkualitas akan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyediaan kesempatan kerja yang layak, serta sistem jaminan sosial yang efektif, akan mengurangi ketimpangan dan memperkuat jaring pengaman sosial.



3. Keterserapan Tenaga Kerja Lokal Meningkatkan
 Dalam mengantisipasi perubahan struktur ekonomi global, ketersediaan tenaga kerja lokal harus ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembukaan lapangan kerja baru dengan dukungan investasi yang strategis, serta sinergi antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri, akan memperkuat ekosistem kerja. UMKM dan sektor informal harus mendapat dukungan kebijakan untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal.



Gambar 5. 2 Cascading Sasaran Pokok Misi 1

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

MISI 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif

1. Daya Saing Ekonomi Meningkat
 Meningkatkan daya saing ekonomi memerlukan transformasi struktural yang mendukung efisiensi dan inovasi. Kebijakan perdagangan yang progresif dan stabilisasi makroekonomi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur dan penguatan lembaga keuangan juga akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Desa
 Keberdayaan ekonomi desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan industri berbasis lokal yang mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia. Peningkatan akses terhadap teknologi dan modal, serta pembangunan keterampilan wirausaha, akan meningkatkan produktivitas dan inovasi di pedesaan. Ini relevan dengan tren global yang mengarah pada ekonomi desentralisasi dan berkelanjutan.
3. Meningkatnya Kemudahan Berusaha
 Kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam ekonomi global yang berorientasi pada efisiensi dan inovasi. Reformasi regulasi dan birokrasi yang memangkas red tape akan mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Infrastruktur digital yang solid mendukung transformasi ini, memungkinkan pengusaha untuk bersaing di pasar global.





Gambar 5. 3 Cascading Sasaran Pokok Misi 2

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

MISI 3: Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berdampak

1. Layanan Publik Prima dan Inklusif

Peningkatan layanan publik yang prima dan inklusif harus menyertakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi dan aksesibilitas. Layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua segmen masyarakat, termasuk kelompok rentan, akan mendorong partisipasi sosial yang lebih luas dan memperkuat demokrasi.

2. Digitalisasi Tata Kelola Menuju Pelayanan Publik Efisien

Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan langkah vital menuju pelayanan publik yang efisien. Digitalisasi mencakup penggunaan big data untuk perencanaan dan kebijakan yang lebih tepat, serta otomatisasi yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan layanan. Digitalisasi diharapkan menjadi tulang punggung pelayanan publik yang responsif di Kabupaten Situbondo.



Gambar 5. 4 Cascading Sasaran Pokok Misi 3

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

MISI 4: Mewujudkan Birokrasi yang Tangguh dan adaptif

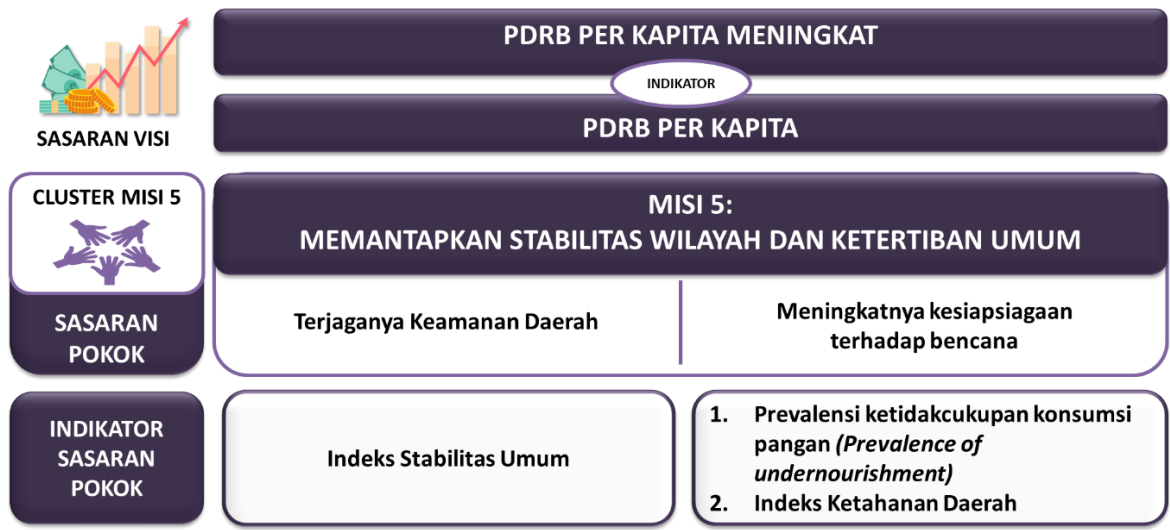
- 1. Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Tangkas
Reformasi birokrasi yang memprioritaskan efektivitas dan responsivitas menghasilkan pemerintahan yang lebih tangkas. Penyesuaian struktur organisasi menjadi lebih efisien dan pengembangan SDM aparatur sipil negara untuk menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan inovatif, sejalan dengan perubahan zaman dan aspirasi atau harapan layanan berkualitas dari masyarakat.
- 2. Kemandirian Fiskal Daerah Dapat Dicapai
Dalam 20 tahun kedepan diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat meningkat. Kemandirian fiskal daerah penting untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan. Diversifikasi pendapatan dan pengelolaan keuangan yang efisien akan memperkuat otonomi daerah dan memungkinkan penerapan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.



Gambar 5. 5 Cascading Sasaran Pokok Misi 4
Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

MISI 5: Memantapkan Stabilitas Wilayah dan Ketertiban Umum

- 1. Terjaganya Keamanan Daerah
Keamanan daerah yang terjaga adalah fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Perkembangan trend global yang penuh ketidakpastian, penguatan sistem keamanan dan kapasitas penegak hukum menjadi esensial. Peningkatan kerjasama antar masyarakat, kelompok, di tingkat daerah, regional maupun nasional dalam penanganan ancaman juga akan meningkatkan stabilitas dan keamanan. Sehingga potensi atas perkembangan tindak pelanggaran dan kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dapat ditekan atau dihindari.
- 2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana yang semakin tidak pasti memberikan tuntutan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kesiapan tersebut termasuk investasi dalam infrastruktur yang resilien, pengembangan sistem peringatan dini, dan pendidikan masyarakat tentang respon bencana yang efektif. Sehingga diharapkan dalam 20 tahun kedepan, ketahanan terhadap bencana daerah dapat meningkat.



Gambar 5. 6 Cascading Sasaran Pokok Misi 5
 Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

MISI 6: Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana berkualitas

1. Tersedianya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
 Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pemerataan infrastruktur mencakup pembangunan jaringan transportasi yang terintegrasi, pasokan energi yang berkelanjutan, dan konektivitas digital. Infrastruktur yang terjamin keandalannya dapat meningkatkan akselerasi pembangunan khususnya dalam hal ekonomi, sosial dan inovasi masyarakat.
2. Infrastruktur Dapat Berkontribusi pada Pembangunan Wilayah
 Infrastruktur yang dibangun dapat menjadi penunjang pembangunan wilayah. Pengembangan infrastruktur yang dapat menjadi katalis bagi aktivitas ekonomi lokal dan dapat memberikan dukungan pada perkembangan inovasi dan kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan pola pertumbuhan yang merata dan inklusif.

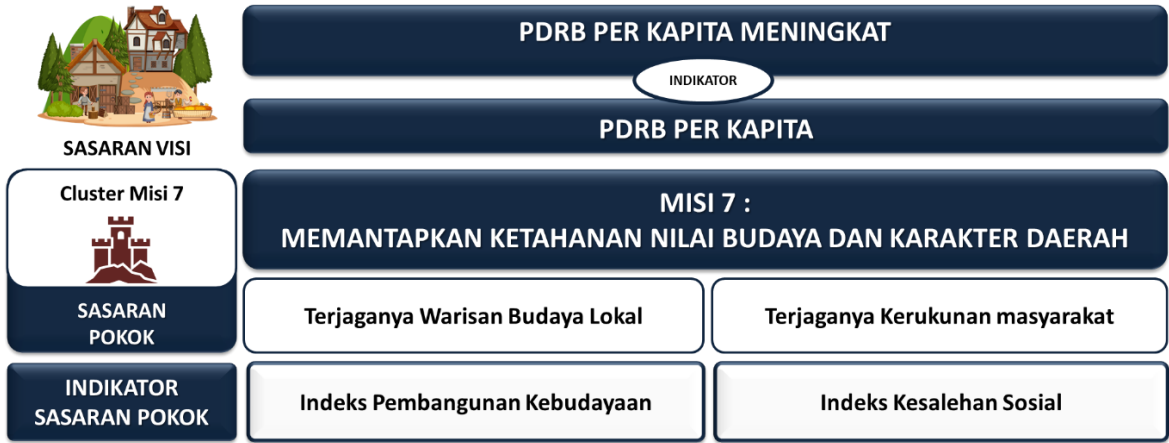


Gambar 5. 7 Cascading Sasaran Pokok Misi 6
 Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)



MISI 7: Memantapkan Ketahanan Nilai Budaya dan Karakter daerah

- 1. Terjaganya Warisan Budaya Lokal
Warisan budaya lokal di Kabupaten Situbondo dapat terjaga dan dimanfaatkan secara optimal, baik melalui upaya dari perspektif ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola-pola pelestarian setidaknya telah dilakukan dengan mengintegrasikan budaya dalam pendidikan dan pariwisata, serta melindungi hak kekayaan intelektual budaya.
- 2. Terjaganya Kerukunan Masyarakat
Kerukunan masyarakat merupakan aset penting untuk proses pembangunan kedepan, khususnya untuk daerah dengan karakteristik multikultural. Edukasi yang mempromosikan toleransi dan kebijakan yang menjamin kesetaraan akan menciptakan masyarakat yang harmonis.



Gambar 5. 8 Cascading Sasaran Pokok Misi 7
Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

MISI 8: Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi

- 1. Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Meningkatkan
Lingkungan hidup yang berkualitas adalah prasyarat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya menuju pembangunan berkelanjutan telah dilakukan, kebijakan lingkungan yang ketat dan praktek ekonomi hijau telah mampu memberikan dukungan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
- 2. Terjaganya Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati adalah komponen kunci dari keseimbangan ekologis. Upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan telah dilakukan dengan optimal sehingga kelestarian keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang dapat dijaga.



Gambar 5. 7 Cascading Sasaran Pokok Misi 6
Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Hasil FGD, Data Diolah)

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	2045
1	Mewujudkan Transformasi sosial berkeadilan	Meningkatnya Daya Saing SDM	Pendidikan Berkualitas yang merata	Rata-rata Lama Sekolah	7,39	10,56
				Harapan Lama Sekolah	13,23	14,03
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	6,38	7,71
			Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,6	79,8
				Prevalensi Stunting	14,8	4,17
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	90	21
		Terjaminnya Kesejahteraan Masyarakat	Perlindungan Sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	10,8	0,82
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,381	0,18
		Keterserapan tenaga kerja lokal meningkat	Peningkatan Kualitas Iptek dan Inovasi	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,87	1,84
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,1	79,99
				Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	23,76	90,34

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	2045
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif	Daya Saing ekonomi meningkat	Produktivitas Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,19	6,74
			Penerapan Ekonomi Hijau			
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	21,49	23,59
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,7	1,95
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	22,51	16,92
				Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	11.580	15.360
		Transformasi Digital				
		Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Desa	Integrasi Ekonomi domestik dan Global	Persentase Desa mandiri (%)	46,97	100
		Meningkatnya Kemudahan Berusaha	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi	Realisasi Investasi (Miliar)	4.300,12	10.983,78
ICOR	4,83			4,4		
3	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berdampak	Layanan publik prima dan inklusif	Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,91	84,51
		Digitalisasi tata kelola menuju pelayanan publik efisien		Indeks SPBE	4,64	5



No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	2045
4	Mewujudkan Birokrasi yang Tangguh dan adaptif	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan tangkas	Hukum Berkeadilan, ketahanan berdaya gentar, kawasan keamanan nasional	Indeks Reformasi Birokrasi	71,45	84,55
		Kemandirian fiskal daerah dapat dicapai		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Sedang	Tinggi
5	Memantapkan Stabilitas Wilayah dan Ketertiban Umum	Terjaganya keamanan daerah	Resilensi terhadap perubahan iklim	Indeks Stabilitas Umum	77,39	84,79
		Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana	Berketahanan Energi, air dan Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of undernourishment</i>)	12	0,8
				Indeks Ketahanan Daerah	0,75	0,9
6	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur dan sarpras berkualitas	Tersedianya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mewujudkan Sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Indeks Infrastruktur	72,84	83,78
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	52	100
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	-	83
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	-	87
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	-	100
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	-	100



No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	2045
		Infrastruktur dapat berkontribusi pada pembangunan wilayah	Mewujudkan pembangunan kewilayahan berkeadilan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	85,03	90
7	Memantapkan Ketahanan Nilai Budaya dan Karakter daerah	Terjaganya Warisan Budaya Lokal	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,6	70,49
		Terjaganya Kerukunan masyarakat	Keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan masyarakat inklusif	Indeks Kesalehan Sosial	80	90
8	Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi	Kualitas lingkungan hidup masyarakat meningkat	Lingkungan Hidup berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	77,52	79,11
		Terjaganya Keaneka-ragaman hayati	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Luas lahan kritis (Ha)	10.273,58	10.204,54

Sumber : Bappeda Kabupaten Situbondo (Data dan Hasil FGD, Diolah)

RPJPD

2025 - 2045

KABUPATEN SITUBONDO



BAB 6

PENUTUP

BAB 6 PENUTUP

6.1 Pedoman Transisi

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Situbondo, fungsi RPJPD adalah sebagai pedoman sekaligus rambu-rambu yang menentukan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan RPJMD disetiap tahapan pembangunan jangka menengah (lima tahunan). Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti penyusunan RPJPD Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Sebagaimana mandat dalam rangka melakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan di Indonesia maka perlu adanya proses sinkronisasi periode perencanaan pada RPJMD dan RTRW daerah.
2. Sebagaimana fungsi Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah yang digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan dalam 20 tahun kedepan, maka perlu kiranya dilakukan penjabaran arah pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah.
3. RPJPD dijadikan acuan dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan atau *platform* politik calon kepala daerah.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Situbondo 20 tahun kedepan. Untuk menjamin adanya konsistensi pembangunan dalam 20 tahun kedepan, maka perlu dilakukan upaya untuk menjamin konsistensi perencanaan pada perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pendanaan;
2. Akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan pencapaian sasaran prioritas nasional;
3. Kerangka pengendalian melalui manajemen risiko, sistem insentif;
4. Mekanisme perubahan;
5. Komunikasi publik;
6. Mekanisme pembiayaan pembangunan daerah;
7. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
8. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Blended Finance*.

6.3 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga

pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana berikut.



Gambar 6. 1: Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045

Pengendalian RPJP Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya ruang lingkup pengendalian pembangunan Kabupaten Situbondo terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pengendalian perencanaan
Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup:
 - a. Penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah (rencana strategis);
 - b. Kesiapan desain prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan penetapan ukuran keberhasilan;
 - c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

- Sedangkan pengendalian jangka pendek mencakup:
- a. Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek Perangkat Daerah;
 - b. Kesiapan desain prioritas pembangunan daerah termasuk penetapan ukuran keberhasilan;
 - c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

- a. Pemantauan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- c. Evaluasi pencapaian sasaran pembangunan daerah; dan
- d. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

BUPATI SITUBONDO

ttd.

KARNA SUSWANDI